# PERATURAN DAERAH
# RPJMD

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

## KOTA TANJUNGBALAI
## TAHUN 2025-2029

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**
**Jln. Jenderal Sudirman Km. 5,5**
**Tanjungbalai - 21311**

# PERATURAN DAERAH
# RENCANA PEMBANGUNAN
# JANGKA MENENGAH DAERAH
# (RPJMD)

# KOTA TANJUNGBALAI
# TAHUN 2025-2029

SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 1 TAHUN 2025

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas ilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

dan

WALI KOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dearah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 2005-2025 selama 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah,
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
22. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dan membiayai penyeleggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Wali Kota serta target pembangunan nasional.
23. Permasalahan pembangunan Daerah adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kodisi rill saat perencanaan dibuat.
24. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.

25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
28. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
29. Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
30. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
31. Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
33. Program pembangunan daerah adalah program program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
34. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivits pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output)* dalam rangka mencapai hasil (*outcome)* suatu program.
35. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.
36. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapain kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
37. Keluaran (output) adalah Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
38. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
39. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* beberapa program.

40. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
41. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
42. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
43. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutantelah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
44. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Wali Kota dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

## BAB II
## RUANG LINGKUP RPJMD
## TAHUN 2025-2029
### Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
   a. visi dan misi Wali Kota terpilih; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
TAHUN 2025-2029
Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Pengendalian dan evalusi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI
## KETENTUAN PERALIHAN
### Pasal 7

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun awal di bawah kepemimpinan Wali Kota terpilih hasil pemilihan umum Wali Kota pada periode berikutnya.
(2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada ayat 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam masa kepemimpinan Wali Kota terpilih.
(3) Mengingat masa jabatan Wali Kota adalah 2025-2030, maka sisa waktu periode RPJMD masih dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan tahunan selama masa transisi, selama sebelum adanya revisi atau penyesuaian dengan kebijakan yang baru dari Pemerintah.
(4) Selanjutnya RKPD masa transisi menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas RPJMD periode berikutnya dan RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk Menyusun APBD pada masa transisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

NURMALINI MARPAUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,
PROVINSI SUMATERA UTARA (1-54/2025)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKO TANJUNGBALAI,

HERMAN GULTOM, SH.
Penata Tk. I/III-d
NIP. 19810630 2000604 1 003

# KATA PENGANTAR_____

Puji serta syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Dokumen Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sistematika Dokumen Peraturan Daerah RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, terdiri atas: BAB I Pendahuluan; BAB II Gambaran Umum Daerah; Gambaran Umum Keuangan Daerah; BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan BAB V Penutup. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi Perencanaan Pembangunan di Kota Tanjungbalai untuk lima tahun ke depan.

Tanjungbalai,  Agustus 2025

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**MAHYARUDDIN SALIM B.**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**
**DAFTAR ISI** ..... i
**BAB I**
**PENDAHULUAN** ..... I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan ..... I-1
1.2. Landasan Hukum ..... I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ..... I-7
1.3.1. RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045 ..... I-9
1.3.2. RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033 ..... I-9
1.3.3. RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... I-10
1.3.4. RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ..... I-10
1.3.5. RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai ..... I-11
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-13
1.4.1. Maksud ..... I-13
1.4.2. Tujuan ..... I-13
1.5. Sistematika Penulisan ..... I-14
**BAB II**
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** ..... II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-43
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah ..... II-74
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ..... II-89
2.1.5. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah ..... II-94

2.1.6. Kerjasama Daerah ..... II-172
2.1.7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal ..... II-174
2.2. Gambaran Keuangan Daerah ..... II-179
2.2.1. Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024 ..... II-180
2.2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD ..... II-181
2.2.3. Kebijakan Anggaran APBD Tahun 2020-2024 ..... II-203
2.2.4. Proyeksi Keuangan Kota Tanjungbalai ..... II-205
2.3. Permasalahan Daerah ..... II-209
2.3.1. Permasalahan Pembangunan ..... II-210
2.4. Isu Strategis Daerah ..... II-240
2.4.1. Isu Global ..... II-240
2.4.2. Isu Nasional ..... II-245
2.4.3. Isu Provinsi Sumatera Utara ..... II-249
2.4.4. Isu Strategis Kota Tanjungbalai ..... II-252

**BAB III**
**VISI, MISI DAN PRGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** ..... III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran ..... III-2
3.1.1. Visi Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ..... III-2
3.1.2. Misi Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ..... III-8
3.1.3. Tujuan Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ..... III-13
3.1.4. Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ..... III-19
3.2. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... III-30
3.2.1. Strategi Pembangunan ..... III-31
3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai ..... III-32
3.2.3. Strategi dan Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Tanjungbalai ..... III-42
3.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kota Tanjungbalai ..... III-52
3.2.5. Program Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai ..... III-54

3.2.6. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kota Tanjungbalai ..... III-69

3.2.7. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Sasaran Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ..... III-72

**BAB IV**

**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH** ..... IV-1

4.1. Program Perangkat Daerah ..... IV-1

4.1.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ..... IV-2

4.1.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... IV-10

4.1.3. Urusan Pilihan ..... IV-27

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..... IV-33

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ..... IV-34

4.1.6. Unsur Kewilayahan ..... IV-39

4.1.7. Unsur Pemerintahan Umum ..... IV-41

4.2. Indikator Kinerja Utama ..... IV-61

4.3. Indikator Kinerja Daerah ..... IV-65

**BAB V**

**PENUTUP** ..... V-1

# DAFTAR TABEL

**BAB II**

Tabel 2.1. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-4

Tabel 2.2. Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-7

Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tanjungbalai, 2023 ..... II-8

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan Kota Tanjungbalai, 2016 dan 2022 ..... II-10

Tabel 2.5. Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai ..... II-25

Tabel 2.6. Kejadian Bencana di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-27

Tabel 2.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-34

Tabel 2.8. Indeks Risiko Bencana Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-36

Tabel 2.9. Indeks Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-38

Tabel 2.10. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2020-2024 ..... II-40

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2020-2024 ..... II-40

Tabel 2.12. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-42

Tabel 2.13. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai 2026-2030 ..... II-42

Tabel 2.14. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Milyar Rupiah) ..... II-44

Tabel 2.15. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Juta Rupiah) ..... II-45

Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (Persen), 2020-2024 ..... II-48

Tabel 2.17. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjunbalai, 2020-2024 ..... II-50

Tabel 2.18. PDRB ADHB Per Kapita Kota Tanjungbalai (Juta Rupiah), 2020-2024 ..... II-51

Tabel 2.19. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-54

Tabel 2.20. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-60
Tabel 2.21. Usia Harapan Hidup di Perkotaan, 2024 ..... II-63
Tabel 2.22. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tanjungbalai, 2023 ..... II-66
Tabel 2.23. Persentase RT menurut Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki atau Diterima, 2023-2024 ..... II-67
Tabel 2.24. Kasus Kriminal di Kota Tanjungbalai, 2022-2024 ..... II-68
Tabel 2.25. Indeks Perlindungan Anak, 2022 ..... II-70
Tabel 2.26. Indeks Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.27. PDRB, Peranan dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, 2020-2024 ..... II-77
Tabel 2.28. PDRB, Peranan dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Minum, 2020-2024 ..... II-78
Tabel 2.29. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.30. Penduduk 15 Tahun ke Atas Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.31. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-82
Tabel 2.32. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-82
Tabel 2.33. PDRB, Peranan dan Pertumbuhan PMTB Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.34. Perkembangan Ekspor Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.35. Rasio Pajak terhadap PDRB, 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.36. Nilai Reformasi Hukum Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-89
Tabel 2.37. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-90
Tabel 2.38. Indeks SPBE di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-90
Tabel 2.39. Capaian Aksi HAM Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-92

Tabel 2.40. Indeks Daya Saing Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-93
Tabel 2.41. Tingkat Melek Huruf 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2021-2024 ..... II-94
Tabel 2.42. Perkembangan APK Kota Tanjungbalai (%), 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.43. Perkembangan APM Kota Tanjungbalai (%), 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.44. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Yang di Tamatkan, 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.45. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pendidikan, 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.46. Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-102
Tabel 2.47. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2.48. Banyaknya Fasilitasi Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2.49. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-104
Tabel 2.50. Banyaknya Tenaga Dokter Menurut Kecamatan Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-104
Tabel 2.51. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kesehatan, 2020-2024 ..... II-105
Tabel 2.52. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan, 2021-2024 ..... II-107
Tabel 2.53. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.54. Banyaknya Pelanggan, Daya Tersambung, KWH Terjual dan Nilai Listrik yang Disalurkan Menurut Jenis Pemakai, 2024 ..... II-110
Tabel 2.55. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.56. Banyaknya Pelanggan Air Minum yang Disalurkan dan Nilai Air Minum Menurut Jenis Pemakai di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-111
Tabel 2.57. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak, 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.58. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, 2021-2024 ..... II-112
Tabel 2.59. Penyelesaian Perkara di Kota Tanjungbalai, 2022-2024 ..... II-114

Tabel 2.60. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2020-2024 ..... II-114

Tabel 2.61. Sarana/Prasarana Keamanan, Ketertiban Umum dan Tanggap Bencana Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-117

Tabel 2.62. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungbalai, 2023-2024 ..... II-118

Tabel 2.63. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Sosial, 2020-2024 ..... II-119

Tabel 2.64. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Tenaga Kerja, 2020-2024 ..... II-121

Tabel 2.65. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat, 2020-2024 ..... II-122

Tabel 2.66. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pangan, 2020-2024 ..... II-124

Tabel 2.67. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Lingkungan Hidup, 2020-2024 ..... II-125

Tabel 2.68. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020-2024 ..... II-129

Tabel 2.69. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020-2024 ..... II-130

Tabel 2.70. Prasarana dan Sarana Perhubungan Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-132

Tabel 2.71. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perhubungan, 2020-2024 ..... II-132

Tabel 2.72. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Persandian, 2020-2024 ..... II-134

Tabel 2.73. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Koperasi dan UKM, 2020-2024 ..... II-135

Tabel 2.74. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Penanaman Modal, 2020-2024 ..... II-136

Tabel 2.75. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga, 2020-2024 ..... II-137

Tabel 2.76. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Statistik, 2020-2024 ..... II-138

Tabel 2.77. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Komunikasi dan Informatika, 2020-2024 ..... II-138

Tabel 2.78. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kebudayaan, 2020-2024 ..... II-139

Tabel 2.79. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perpustakaan, 2020-2024 ..... II-140

Tabel 2.80. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kearsipan, 2020-2024 ..... II-141
Tabel 2.81. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perikanan, 2020-2024 ..... II-142
Tabel 2.82. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pariwisata, 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2.83. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pertanian, 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2.84. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perdagangan, 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2.85. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perindustrian, 2020-2024 ..... II-145
Tabel 2.86. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perencanaan, 2020-2024 ..... II-145
Tabel 2.87. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Keuangan, 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2.88. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kepegawaian, 2020-2024 ..... II-147
Tabel 2.89. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pengawasan, 2020-2024 ..... II-147
Tabel 2.90. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja ..... II-149
Tabel 2.91. Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-172
Tabel 2.92. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dalam RPJMD yang Mendukung Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kota Tanjungbalai ..... II-174
Tabel 2.93. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) ..... II-182
Tabel 2.94. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) ..... II-189
Tabel 2.95. Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) ..... II-192
Tabel 2.96. Neraca Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 ..... II-196
Tabel 2.97. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Neraca Daerah Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-199
Tabel 2.98. Analisa Proporsi Belanja Pegawai Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) ..... II-203
Tabel 2.99. Analisa Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) ..... II-204
Tabel 2.100. Asumsi Pertumbuhan dan Tingkat Inflasi Tahun 2026-2030 ..... II-205
Tabel 2.101. Proyeksi Pendapatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2026-2030 ..... II-206
Tabel 2.102. Proyeksi Belanja APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2026-2030 ..... II-207

Tabel 2.103. Proyeksi Pembiayaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2026-2030 ..... II-208

Tabel 2.104. Isu Strategis Kota Tanjungbalai..... II-283

**BAB III**

Tabel 3.1. Keterkaitan Visi dan Kata Kunci RPJMD Tanjungbalai dengan RPJPD Tanjungbalai dan RPJMD Sumatera Utara serta RPJMN Indonesia..... III-4

Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai..... III-5

Tabel 3.3. Penyelerasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara..... III-7

Tabel 3.4. Keterkaitan Misi RPJMD Tanjungbalai dengan RPJPD Tanjungbalai, RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia..... III-11

Tabel 3.5. Keterkaitan Tujuan RPJMD Tanjungbalai dengan RPJPD Tanjungbalai, RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia..... III-17

Tabel 3.6. Keterkaitan Sasaran RPJMD Tanjungbalai dengan RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia..... III-24

Tabel 3.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029..... III-26

Tabel 3.8. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029..... III-33

Tabel 3.9. Pentahapan Pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai ..... III-41

Tabel 3.10. Strategi dan Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai ..... III-43

Tabel 3.11. Program Prioritas RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ..... III-55

Tabel 3.12. Tahapan Pelaksanaan Program Prioritas Kota Tanjungbalai..... III-64

Tabel 3.13. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kota Tanjungbalai ..... III-69

Tabel 3.14. Program Pembangunan Daerah Kota Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ..... III-73

**BAB IV**

Tabel 4.1. Dukungan Program Hasil Terbaik Cepat Kota Tanjungbalai terhadap PHTC Sumatera Utara..... IV-43

Tabel 4.2. Dukungan Program Prioritas Kota Tanjungbalai terhadap Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara .....IV-44

Tabel 4.3. Penyelarasan Indikator Emas (IE) RPJMN dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 .....IV-47

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029 .....IV-62

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029 .....IV-66

Tabel 4.6. Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Kota Tanjung Balai 2025-2029 .....IV-102

**BAB V**

Tabel 5.1. Proses Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kota Tanjungbalai.....V-5

**LAMPIRAN**

Tabel 1. Dukungan Kota Tanjungbalai Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 .....L-1

Tabel 2. Dukungan Kota Tanjungbalai Terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.....L-22

# DAFTAR GAMBAR

**BAB I**

Gambar 1.1. Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Tanjungbalai 2025-2029 ..... I-3

Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ..... I-4

Gambar 1.3. RPJMD Dalam Rangka Perencanaan Jangja Panjang, Menengah dan Tahunan ..... I-8

Gambar 1.4. Keterkaitan Antar Dokumen Perncanaan ..... I-12

**BAB II**

Gambar 2.1. Luas Kota Tanjungbalai Berdasarkan Kecamatan (Ha) ..... II-1

Gambar 2.2. Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai ..... II-2

Gambar 2.3. Peta Wilayah Kota Tanjungbalai Berdasarkan Geologi ..... II-6

Gambar 2.4. Persentase Luas Pengguna Lahan Eksisting Tahun 2016 dan 2022 (Ha) ..... II-11

Gambar 2.5. Peta Wisata Kota Tanjungbalai ..... II-18

Gambar 2.6. Peta Wilayah Kota Tanjungbalai Berdasarkan Rawan Banjir ..... II-30

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-39

Gambar 2.8. Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-41

Gambar 2.9. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010, 2020-2024 ..... II-47

Gambar 2.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai 2020-2024 ..... II-52

Gambar 2.11. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-53

Gambar 2.12. Gini Ratio Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 ..... II-55

Gambar 2.13. Gini Ratio Kota Tanjungbalai, Provinsi dan Nasional, 2024 ..... II-56

Gambar 2.14. Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, SUMUT dan Nasional, 2020-2024 ..... II-56

Gambar 2.15. IPM Kabupaten/Kota, 2024 ..... II-57

Gambar 2.16. Tingkat Pengangguran di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-58
Gambar 2.17. Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, 2025 ..... II-59
Gambar 2.18. Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun (ribu rupiah), 2020-2024 ..... II-61
Gambar 2.19. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-62
Gambar 2.20. Pravelensi Stunting Kota Tanjungbalai, 2021-2023 ..... II-63
Gambar 2.21. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-64
Gambar 2.22. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-65
Gambar 2.23. Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, 2020-2024 ..... II-67
Gambar 2.24. Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-72
Gambar 2.25. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-73
Gambar 2.26. Indeks Ketimpangan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-73
Gambar 2.27. Angka Ketergantungan Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-76
Gambar 2.28. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-79
Gambar 2.29. Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2021-2024 ..... II-80
Gambar 2.30. Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan, 2020-2024 ..... II-84
Gambar 2.31. Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasioanal, 2020-2024 ..... II-88
Gambar 2.32. Penegakan Perda di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-91
Gambar 2.33. Banyaknya Sekolah Negeri dan Swasta, 2024 ..... II-97
Gambar 2.34. Angka Kematian Bayi dan Balita Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-101
Gambar 2.35. Angka Kematian Balita Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-101
Gambar 2.36. Angka Kematian Ibu Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-102
Gambar 2.37. Rumah Layak Huni Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-113
Gambar 2.38. Perbandingan Anggaran Keuangan Daerah Kota Tanjungbalai, Tahun 2020-2024 ..... II-181

Gambar 2.39. Proporsi Anggaran Komponen Pendapatan APBD Kota Tanjungbalai, Tahun 2020-2024 ..... II-184

Gambar 2.40. Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Tanjungbalai, Tahun 2020-2024 ..... II-186

Gambar 2.41. Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-188

Gambar 2.42. Proporsi Realisasi Belanja Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 ..... II-191

Gambar 2.43. Ringkasan Permasalahan Aspek Geografis dan Demografis Kota Tanjungbalai ..... II-213

Gambar 2.44. Ringkasan Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Tanjungbalai ..... II-223

Gambar 2.45. Ringkasan Permasalahan Aspek Daya Saing Ekonomi Kota Tanjungbalai ..... II-227

Gambar 2.46. Ringkasan Permasalahan Aspek Daya Saing SDM Kota Tanjungbalai ..... II-231

Gambar 2.47. Ringkasan Permasalahan Aspek Daya Saing Infrastruktur Kota Tanjungbalai ..... II-233

Gambar 2.48. Ringkasan Permasalahan Aspek Daya Saing Iklim Kota Tanjungbalai ..... II-235

Gambar 2.49. Ringkasan Permasalahan Aspek Pelayanan Umum Kota Tanjungbalai ..... II-238

Gambar 2.50. Ringkasan Isu Global ..... II-241

Gambar 2.51. Ringkasan Isu Strategis Kota Tanjungbalai ..... II-252

**BAB III**

Gambar 3.1. Rencana Pelabuhan Perikanan ..... III-54

**BAB V**

Gambar 5.1. Kerangka Pengendalian RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029 ..... V-4

# BAB I

## PENDAHULUAN

## PERATURAN DAERAH
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
## (RPJMD)

## KOTA TANJUNGBALAI
## TAHUN 2025-2029

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penyusunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Dengan terpilihnya Wali Kota Tanjungbalai dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai masa bakti periode 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses strategis yang dirancang untuk menentukan kebijakan masa depan melalui serangkaian pilihan rasional. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna optimalisasi pemanfaatan dan alokasi sumber daya dalam jangka waktu tertentu di wilayah tersebut. Keberhasilan dan kualitas pembangunan daerah akan tercermin dari hasil yang dicapai. Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029 ini juga mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pembangunan daerah adalah suatu proses terstruktur dan terencana yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, dengan tujuan meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, menciptakan peluang kerja dan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan mandat kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rangka menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Secara substansial, perencanaan pembangunan daerah harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menetapkan RPJPD Kota Tanjungbalai 2025-2045 di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan visi daerah, yaitu: Tanjungbalai Masyhur 2045: Kota Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan yang didalamnya memuat indikator dan target capaian kinerja. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039) dan Tahap IV (2040-2045).

Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ini merupakan periode lima tahun pertama dalam RPJPD Kota Tanjungbalai 2025-2045. Mengacu pada tahapan transformasi RPJPN, periode ini merupakan momentum **penguatan pondasi transformasi**. Di sisi lain fase ini juga bisa dilihat sebagai proses **persiapan** sebelum pelaksanaan transformasi. Dalam tahapan ini harus dipastikan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melakukan transformasi berkesinambungan telah dilaksanakan. Semua kebutuhan dasar, sarana prasarana fundamental, internalisasi rencana pembangunan dan penyiapan ekosistem pendukung harus telah diselesaikan. Sehingga Kota Tanjungbalai dapat melakukan proses transformasi yang menyeluruh, efektif, efisien dan tepat sasaran. Selain itu, rancangan ini memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 serta

masukan dari pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat. Dinamika geostrategis dan analisis tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 juga menjadi pertimbangan penting.

Gambar 1.1 Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Tanjungbalai 2025-2045

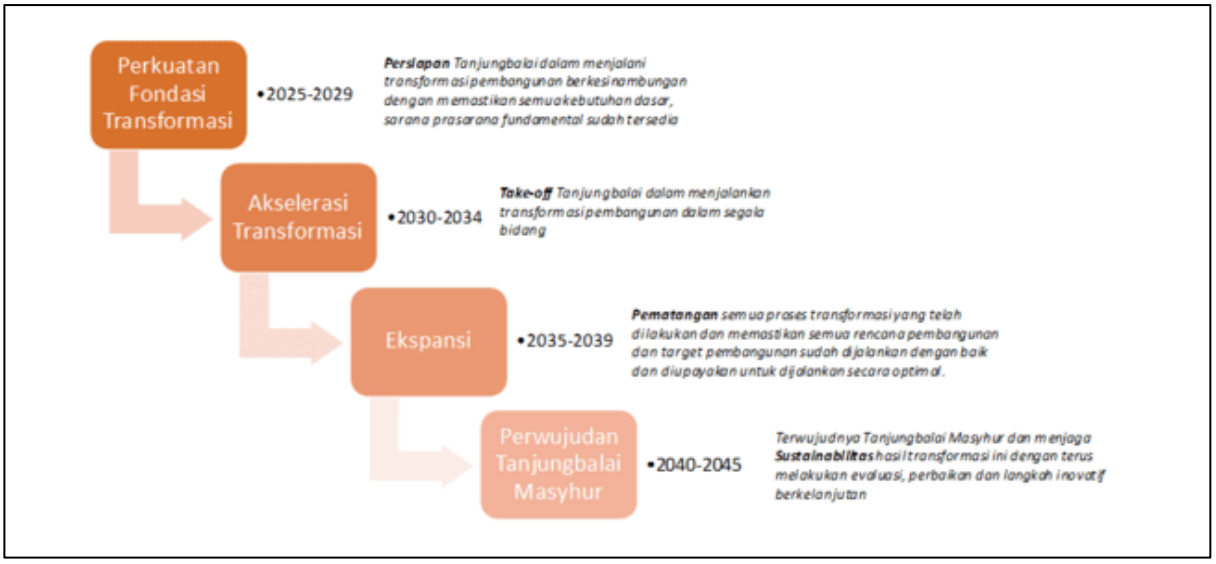


Sumber: RPJPD Kota Tanjungbalai 2025-2045

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJMD

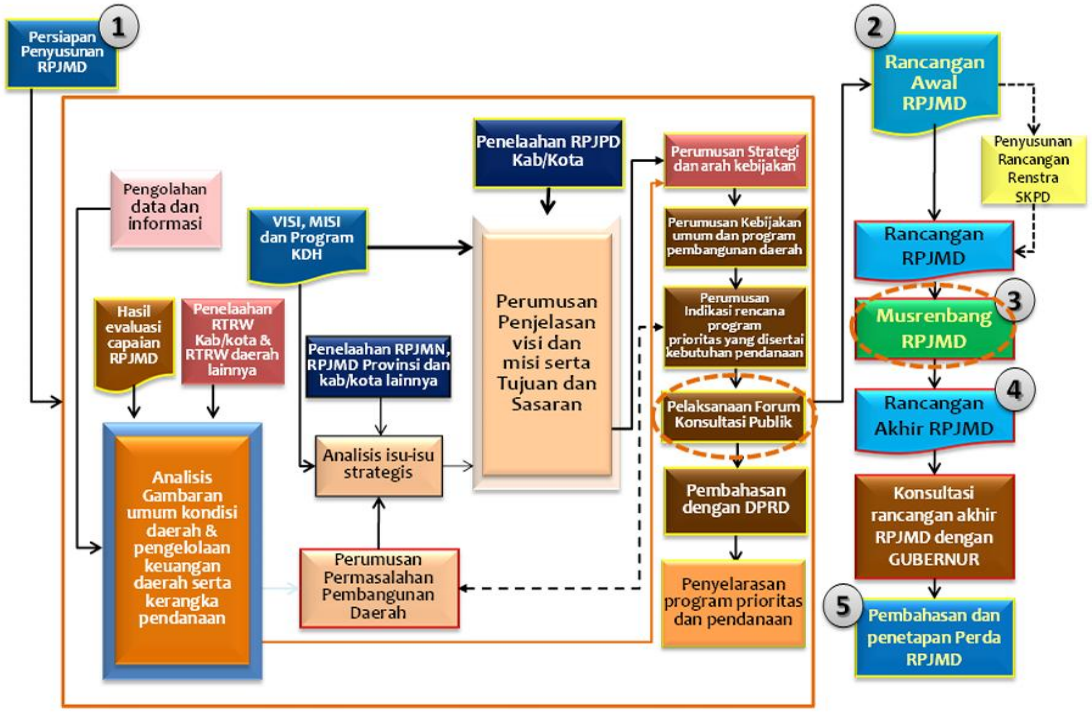


Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dan signifikan, yang memberikan landasan hukum dan panduan teknis bagi proses perencanaan ini. Berikut adalah identifikasi dasar hukum yang menjadi acuan, diurutkan dari level tertinggi dan tahun penyusunan terdahulu ke yang lebih muda:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam

Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;

22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Derah Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033.
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2025-2045.

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045, RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 disamping harus menelaah RPJMD daerah lain (daerah tetangga). RPJMD disusun harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan pada diagram alur berikut ini:

Gambar 1.3 RPJMD Dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan

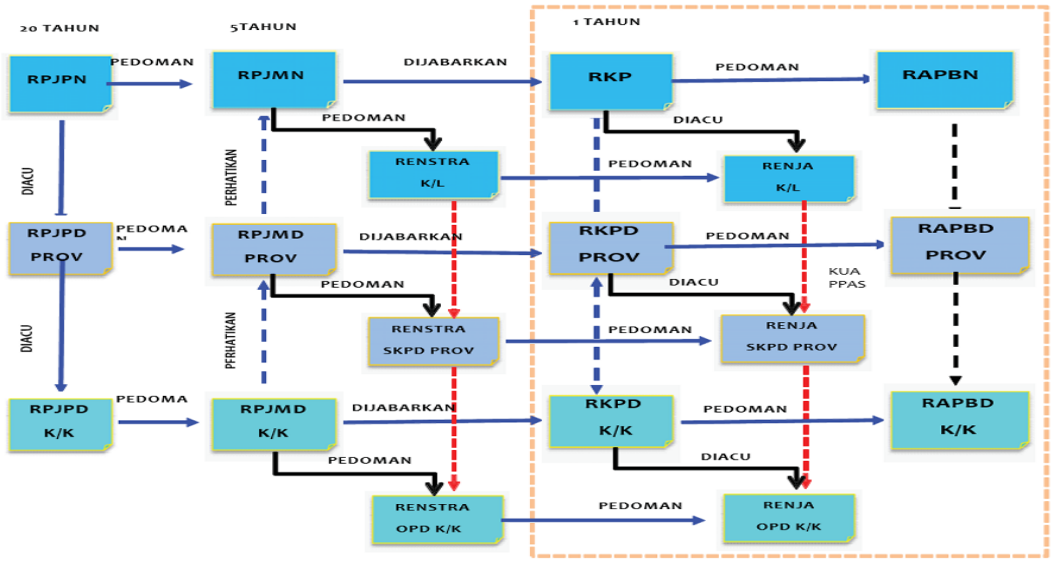


Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045 yang merupakan dokumen yang menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang akan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen ini memberikan kerangka strategis yang mencakup tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. RPJMD sebagai rencana pembangunan jangka menengah merupakan turunan dari RPJPD, sehingga harus selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang yang telah ditetapkan. dan memperhatikan keselarasannya dengan RPJMN serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kota Tanjungbalai dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yakni dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah. Penjabaran keterkaitan antar dokumen rencana lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

### 1.3.1 RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai periode 2025-2029 dan tetap mempedomani tahapan pertama pelaksanaan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045 yang menekankan pada **penguatan pondasi transformasi**, sebagai proses **persiapan** sebelum pelaksanaan transformasi. Memperkokoh fondasi transformasi pembangunan yang berkesinambungan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur dan sarana prasana penunjang dan regulasi pendukung.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

### 1.3.2 RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

Selain itu, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) juga memiliki keterkaitan yang signifikan dengan RPJMD. RTRW adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di Kota Tanjungbalai, mencakup aspek tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Dalam penyusunan RPJMD, pemanfaatan ruang harus direncanakan dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam RTRW untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sinergi antara RPJMD dan RTRW memastikan bahwa pembangunan fisik dan infrastruktur yang diusulkan dalam RPJMD dapat diimplementasikan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.

### 1.3.3 RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Dokumen lain yang berhubungan dengan RPJMD adalah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN merupakan dokumen yang menyusun strategi dan program pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kota Tanjungbalai harus selaras dengan RPJMN untuk memastikan bahwa program-program daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini penting agar terdapat kesinambungan antara pembangunan di tingkat nasional dan daerah, sehingga dapat tercipta sinergi yang optimal dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### 1.3.4 RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 menyatakan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi perangkat daerah mengacu pada visi dan misi kota.

### 1.3.5 RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Tanjungbalai, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

Gambar 1.4 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

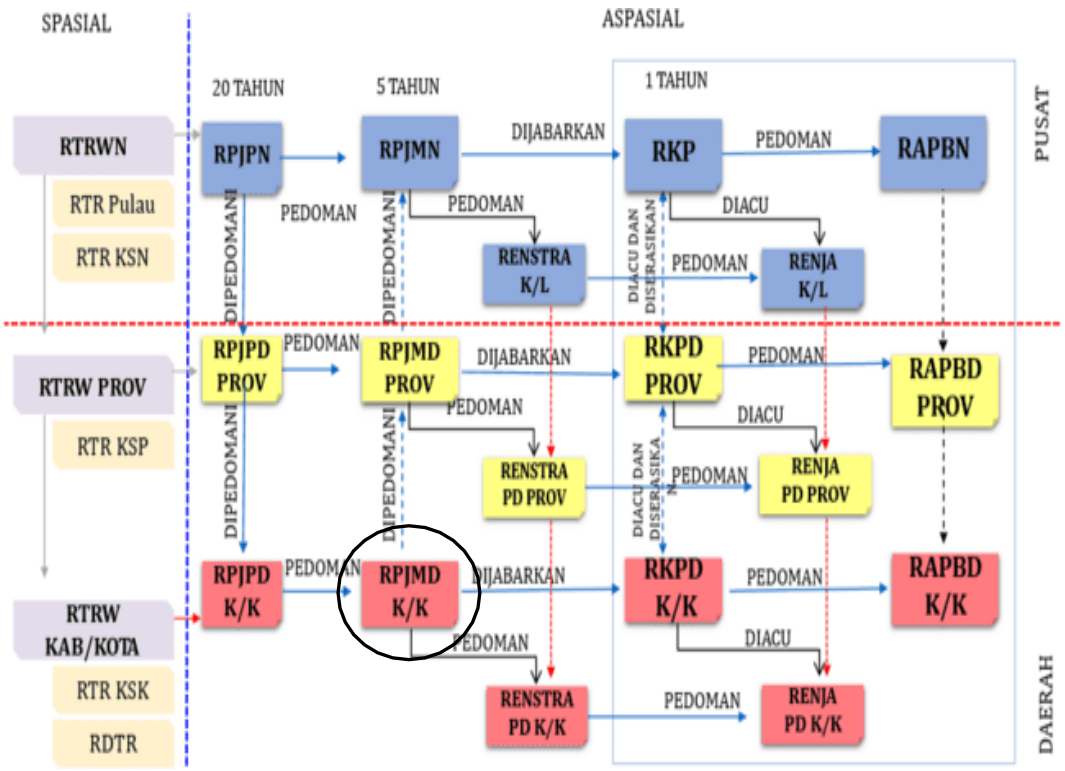


Sumber: Kemendagri, 2024

Hubungan antar dokumen-dokumen ini menciptakan sebuah kerangka kerja yang integratif dan komprehensif untuk perencanaan pembangunan di Kota Tanjungbalai. Dengan memastikan bahwa RPJMD 2025-2029 selaras dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN, perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan jangka menengah, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan visi jangka panjang dan strategi nasional, menciptakan harmoni dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai tingkatan.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan informasi tentang analisis yang komprehensif mengenai rencana pembangunan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan daerah.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan, isu strategis daerah dan prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan;

b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;

c. Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;

d. Merumuskan alternatif strategi dan arah kebijakan lima tahun kedepan yang dapat digunakan untuk mencapai kerangka tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kota Tanjungbalai.

e. Menetapkan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan beserta indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029;

f. Menetapkan kinerja pembangunan daerah dengan merumuskan Indikator kinerja Daerah sebagai alat ukur keberhasilan pemerintah daerah periode 2025-2029.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penyusunan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Realisasi APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024

2.2.2 Neraca Keuangan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024

2.2.3 Proyeksi Keuangan Kota Tanjungbalai Tahun 2026-2030

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.2 Isu Strategis Daerah

**BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasararan

3.1.1 Visi Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

3.1.2 Misi Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

3.1.3 Tujuan Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

3.1.4 Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi Pembangunan

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai

3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Tanjungbalai

3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

4.1.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.3 Urusan Pilihan

4.1.4 Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.5 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.6 Unsur Kewilayahan

4.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

4.2 Indikator Kinerja Utama

4.3 Indikator Kinerja Daerah

**BAB V PENUTUP**

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

**PERATURAN DAERAH**
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**
**(RPJMD)**

**KOTA TANJUNGBALAI**
**TAHUN 2025-2029**

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

**1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah Kota Tanjungbalai sebesar 6.007,21 Ha atau 60,0721 $km^2$ dan menjadi wilayah terkecil di Sumatera Utara selain Kota Sibolga dan Kota Tebing Tinggi. Wilayah admisnistrasi Kota Tanjungbalai terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Kecamatan Datuk Bandar menjadi wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 2.223,10 Ha atau sekitar 37 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai, sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi wilayah terkecil dengan luas 78,33 ha atau hanya sekitar 1 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai.

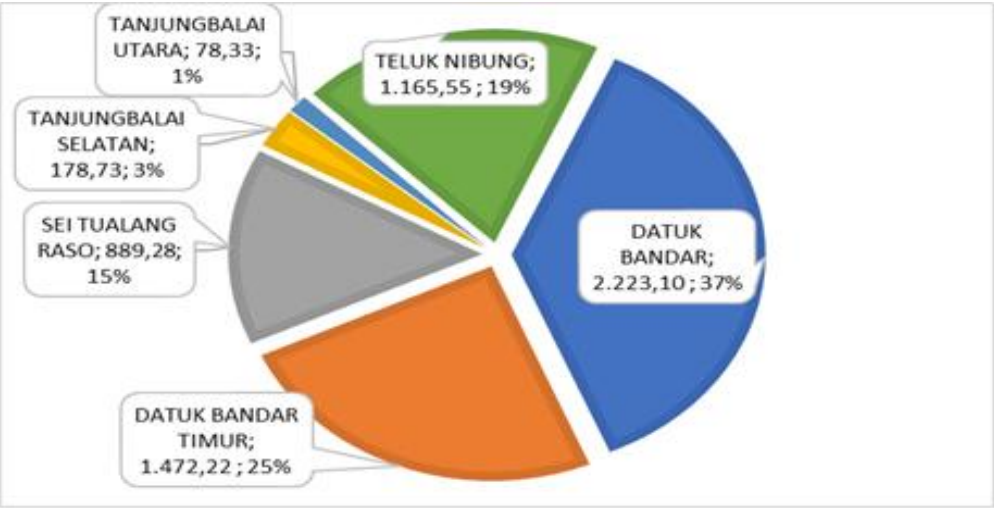


**Gambar 2.1**
**Luas Kota Tanjungbalai Berdasarkan Kecamatan (Ha)**
*Sumber. Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024*

Secara administratif, semua bagian wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan. Batas wilayah Kota Tanjungbalai secara rinci adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan
Sebelah selatan : Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Sebelah barat : Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Sebelah timur : Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

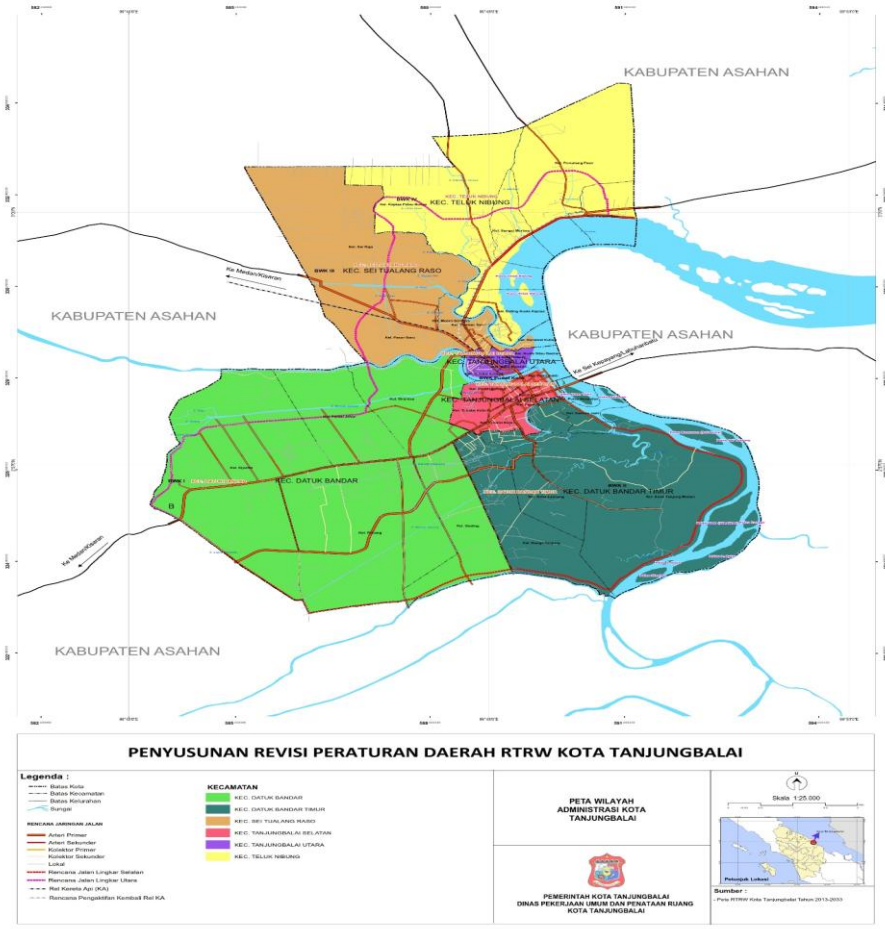


**Gambar 2.2**

**Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai**

*Sumber: Revisi RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033*

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tanjung Balai merupakan tempat pertemuan bagi dua sungai besar yang bermuara ke Selat Malaka, yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan. Lokasi pertemuan kedua sungai ini berada di timur laut Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai memiliki sebuah pelabuhan bernama Pelabuhan Teluk Nibung. Lokasinya berada di Kecamatan Teluk Nibung. Pelabuhan Teluk Nibung merupakan pelabuhan tertua kedua di provinsi Sumatera Utara sesudah Pelabuhan Belawan. Keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda sebagai pelabuhan internasional yang memiliki kegiatan ekspor-impor yang cukup ramai dikunjungi karena berdekatan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain itu, Kota Tanjung Balai juga memiliki jembatan terpanjang di provinsi

Sumatera Utara sepanjang ±600 m yang menghubungkan Kota Tanjung Balai dengan desa Sei Kepayang Kiri, Sei Kepayang Tengah, dan Sei Kepayang Kanan kabupaten Asahan.

a. Posisi Astronomis

Letak astronomis Kota Tanjungbalai terletak di antara 2°58'15"-3°'01"32 Lintang Utara dan antara 99°48'00" – 99°50' 16"99° Bujur Timur. Kota Tanjungbalai berada di wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Utara tepatnya berada di tepi Sungai Asahan yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera Utara. Kota Tanjungbalai berada sekitar 184 km dari Medan sebagai ibukota Sumatera Utara. Meskipun relatif tidak terlalu dekat dengan ibukota provinsi, Kota Tanjungbalai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur perdagangan internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa yang relatif ramai di pesisir Timur Pulau Sumatera.

b. Posisi Geostrategis

Berdasarkan posisi geografis, Kota Tanjungbalai berada di kawasan pantai timur Pulau Sumatera serta merupakan wilayah bagian hilir dari Sungai Asahan serta dikelilingi oleh Kabupaten Asahan. Kota Tanjungbalai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur perdagangan internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa yang relatif ramai di pesisir Timur Pulau Sumatera.

## 3. Topografi

a. Ketinggian Lahan

Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada 0-3 m dari atas permukaan laut atau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis tanah alluvial, latosol, dan pasir. Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah tertinggi dengan tinggi wilayah sekitar 3 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah terendah dengan tinggi wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut.

Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan tingkat kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air, sehingga

tidak jarang wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-rawa.

**Tabel 2.1**
**Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)**
**Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2024**

| No | Kecamatan | Tinggi (m) |
|---|---|---|
| 1 | Datuk Bandar | 3 |
| 2 | Datuk Bandar Timur | 2 |
| 3 | Tanjungbalai Selatan | 2 |
| 4 | Tanjungbalai Utara | 2 |
| 5 | Sei Tualang Raso | 1,5 |
| 6 | Teluk Nibung | 1 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024*

b. Kemiringan Lahan

Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada 0-3 m dari atas permukaan laut atau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis tanah alluvial, latosol, dan pasir. Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah tertinggi dengan tinggi wilayah sekitar 3 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah terendah dengan tinggi wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut.

Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan tingkat kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air, sehingga tidak jarang wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-rawa.

Data kemiringan ini dapat diturunkan menjadi beberapa data yang bekaitan dengan bentuk bentang alam dan kemiringannya, antara lain; data morfologi dan kemiringan lereng. Ditinjau dari kondisinya, Kota Tanjungbalai memiliki kemiringan lahan 0-3 % dan kondisi morfologi yang relatif datar.

**4. Geologi**

a. Struktur dan Karakteristik

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, jenis batuan yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai dapat digolongkan terhadap beberapa bagian, antara lain : Jenis batuan yang terdapat di Kota Tanjungbalai, meliputi :

alluvium (alluvium muda dan alluvium tua). Jenis ini tersebar hampir diseluruh wilayah Kota Tanjungbalai, antara lain:

1. Alluvium Muda
   - Sebagian wilayah Kecamatan Sei Tualang Raso (Kelurahan : Pasar Baru dan Sungai Raja).
   - Kecamatan Teluk Nibung
   - Kecamatan Tanjungbalai Utara
   - Kecamatan Tanjungbalai Selatan
   - Kecamatan Datuk Bandar
   - Kecamatan Datuk Bandar Timur
2. Aluvium Tua terdiri atas : krikil, pasir, dan lempung. Penyebaran jenis batuan ini, antara lain : Kecamatan Datuk Bandar (Kelurahan Sijambi).
3. Aneka Terobosan, jenis ini menyebar disebagian Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Sei Tualang Raso.

b. Potensi

Potensi sumber daya alam bila ditinjau dari sisi geologi adalah Galian golongan C berupa pasir yang tersebar di sepanjang Sungai Silau dan sebagian Sungai Asahan.

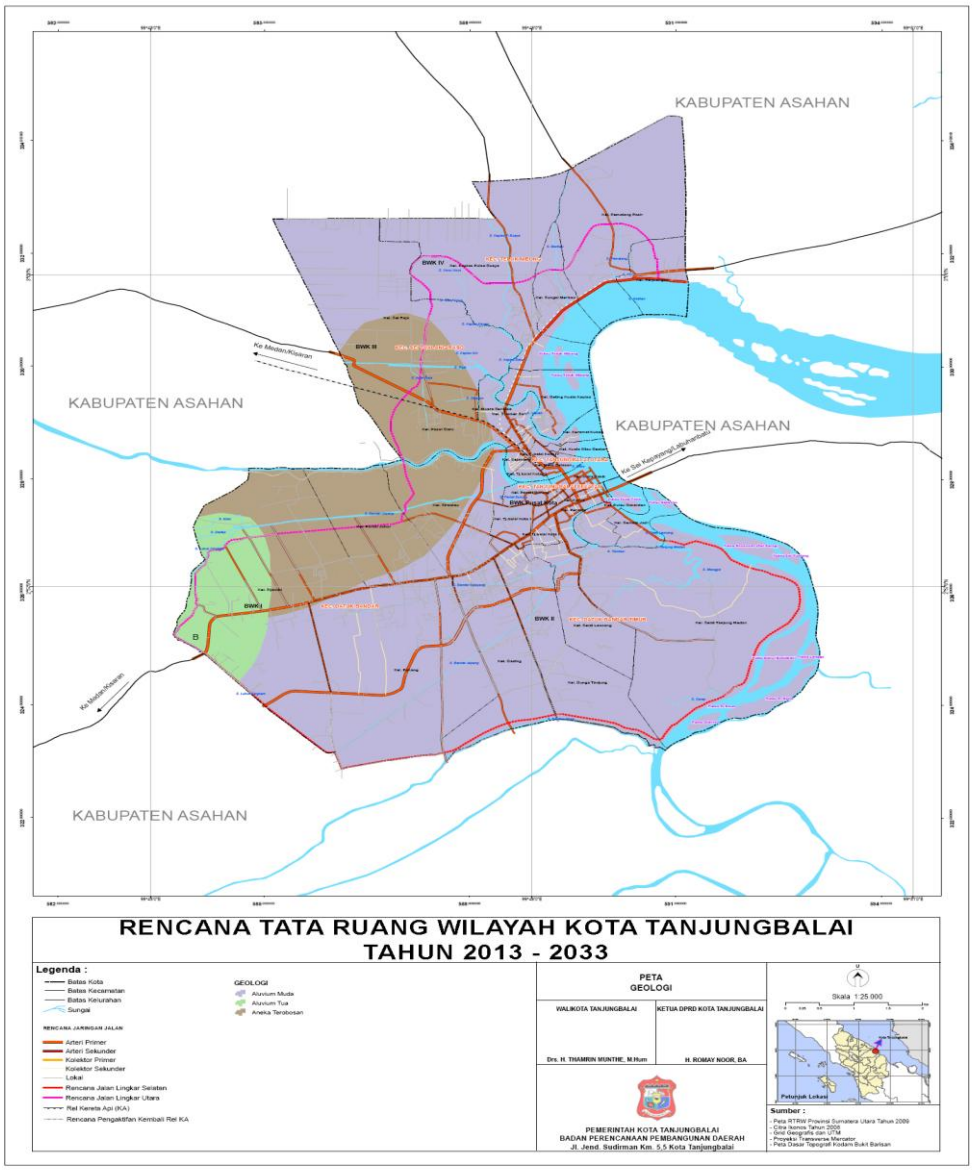


**Gambar 2.3**
**Peta Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Geologi**
*Sumber: Revisi RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033*

## 5. Hidrologi

a. Sungai

Selain Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, Kota Tanjungbalai juga dialiri beberapa sungai kecil. Sungai-sungai kecil tersebut diantaranya adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias, dan Sungai Raja yang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Kondisi air sungai saat ini telah mengalami pencemaran. Hal tersebut disebabkan oleh limbah perkotaan dan pembuangan sampah ke sungai. Penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh pencucian pasir-pasir maupun akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir bebas ke badan-badan air. Diketahui bahwa jika vegetasi tidak ada, maka air hujan langsung jadi *overland flow* dan biasanya membawa material-material yang dapat mengurangi kualitas air sungai.

**Tabel 2.2**
**Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai, 2024**

| Nama Sungai | Panjang (Km) | Lebar (m) |
|---|---|---|
| **Sungai Bandar Jaksa** | 8,20 | 10,00 |
| **Sungai Bandar Jepang** | 5,10 | 6,1 s/d 5,6 |
| **Sungai Bandar Sipoyong** | 6,00 | 6,00 |
| **Sungai Kanal Sultan** | 4,00 | 10,15 |
| **Sungai Giam I** | 6,50 | 6,00 |
| **Sungai Aek Noto** | 1,75 | 20,00 |
| **Sungai Parit Kangkung** | 1,50 | 20,00 |
| **Sungai Sei Giam II** | 2,35 | 6,00 |
| **Sungai Pantai Burung** | 4,25 | 25,00 |
| **Sungai Kapias** | 4,20 | 35,00 |
| **Sungai Tanjung Medan** | 6,00 | 30,00 |
| **Sungai Sarap** | 2,10 | 25,00 |
| **Sungai Daun Besar** | 1,50 | 25,00 |
| **Sungai Merbau** | 4,50 | 25,00 |
| **Sungai Rintis** | 2,00 | 25,00 |
| **Sungai Mata Halasan** | 1,20 | 3,00 |
| **Sungai Silau** | 7,00 | 125,00 |
| **Sungai Asahan** | 7,50 | 700,00 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024*

## 6. Klimatologi

a. Suhu dan Kelembaban

Suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 25 $^{o}$C. Kota Tanjungbalai beriklim tropis serta mengalami musim hujan dan musim kemarau, relatif sama dengan wilayah lainnya yang berada di Sumatera Utara. Iklim Kota Tanjungbalai diklasifikasikan sebagai Af (iklim hutan hujan tropis) berdasarkan sistem *Koppen-Geiger* dengan kelembaban suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 27,9$^{0}$-32 C$^{0}$ dan memiliki Presipitasi rata-rata 18,63 mm dengan kelembaban udara rata-rata 77%-98%. Lokasi yang berada dekat dengan laut membuat Kota Tanjungbalai tergolong daerah yang panas. Selama Tahun 2019 tercatat bahwa temperatur Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Suhu maksimum mencapai 37$^{0}$C yang terjadi pada bulan Juni, sedangkan suhu minimum.

b. Curah hujan

Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Kondisi alam atau topografi Kota Tanjungbalai pada umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-3 meter diatas permukaan laut. Sehingga Kota Tanjungbalai mempunyai iklim seperti daerah lain di kawasan pantai timur Pulau Sumatera yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada tahun 2019 terdapat 130 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 1.627 mm$^{3}$.

Curah hujan terbesar terjadi pada bulan September yaitu 462,5 mm$^{3}$ dengan jumlah hari hujan sebanyak 17 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 41,5 mm$^{3}$ dengan jumlah hari hujan sebanyak 8 hari.

**Tabel 2.3**
**Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tanjungbalai, 2023**

| Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan (hari) |
|---|---|---|
| Januari | 146 | 11 |
| Februari | 41,5 | 8 |
| Maret | 91,0 | 10 |

| Bulan | Curah Hujan | Hari Hujan |
|---|---|---|
| | (mm) | (hari) |
| April | 114,5 | 9 |
| M e i | 82,0 | 9 |
| J u n i | 71,0 | 7 |
| J u l i | 48,0 | 8 |
| Agustus | 195,5 | 11 |
| September | 462,5 | 17 |
| Oktober | 231,0 | 17 |
| November | 291,5 | 19 |
| Desember | 151,5 | 17 |
| | **1.926,0** | **143** |

*Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025*

**7. Penggunaan lahan**

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung dengan menggunakan konsep perhitungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No, 17 Tahun 2009, Kota Tanjungbalai mempunyai status daya dukung lahan yang defisit terhadap penduduk yang tinggal di Kota Tanjungbalai. Artinya, kebutuhan akan lahan lebih besar dari ketersediaan lahan. Penurunan daya dukung lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus meningkat, luas lahan yang semakin berkurang, persentase jumlah petani dan luas lahan yang diperlukan untuk hidup layak, dan jenis komoditas yang ada di wilayah setempat.

Perkembangan penduduk yang didorong dengan adanya kemajuan perekonomian masyarakat serta diiringi kemajuan akan teknologi maupun informasi tentunya akan berdampak pada skala global maupun lokal yang mendorong terjadinya perubahan pemilihan lokasi permukiman dan kegiatan, dengan adanya perkembangan kegiatan dan fungsi suatu lokasi dan wilayah pada akhirnya akan merubah pemanfaatan ruang.

Perubahan pemanfaatan ruang permukiman untuk kebutuhan rumah, bangunan perdagangan dan jasa, dan perlengkapan permukiman lainnya terjadi sejalan dengan penyebaran penduduk dari kondisi yang ada sehingga pemanfaatan ruang permukiman akan semakin ekspansif dari lokasi yang sudah ada.

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti: industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada. Kegiatan pemanfaatan ruang terkonsentrasi dan berkembang namun tidak meluas tersebar. Pemanfaatan ruang yang paling terlihat nyata adalah pemanfaatan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, baik yang berada pada wilayah daratan, pesisir dan kepulauan.

Dalam distribusi ruang, wilayah yang pada saat ini masih memiliki kawasan hutan yang juga berfungsi untuk perlindungan daerah bawahannya ataupun fungsi ekologis lainnya, perlu menyiapkan pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka perolehan PAD, Konflik kepentingan dalam kondisi keterbatasan lahan budidaya perlu diatasi melalui kesepakatan yang mengikat dalam pelestarian kawasan hutan yang berfungsi lindung, Untuk itu, salah satu dasar pengendalian adalah menyesuaikan pengembangan kegiatan pada lahan dengan kemampuan yang memadai.

Berdasarkan hasil analisa digitasi secara makro dengan menggunakan interpretasi peta citra satelit. Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 di dominasi olah perkebunan dimana luasnya diperkirakan mencapai 3,299 Ha, sementara untuk kegiatan permukiman di tahun 2022 perkiraan mencapai 1,117 Ha. Bila dilihat dari tabel di bawah dapat disimpulkan terdapat perubahan fungsi lahan dari tahun 2016 hingga 2022, adapun fungsi lahan yang paling meningkat yaitu meningkatnya kawasan permukiman, hal tersebut dapat diperkirakan akibat adanya peningkatan distribusi penduduk yang mengarahkan kepada pemanfaatan lahan untuk permukiman. Untuk lebih jelasnya terkait penggunaan lahan di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**
**Penggunaan Lahan di Kota Tanjungbalai, 2016-2022**

| PENGGUNAAN LAHAN | 2016 | 2022 |
|---|---|---|
| **Industri** | 37,76 | 53,09 |
| **Lahan Kosong** | 142,06 | 160,74 |
| **Perkebunan** | 3.171,11 | 3.299,00 |
| **Pertanian** | 939,87 | 356,26 |
| **Perdagangan dan jasa** | 291,04 | 227,48 |
| **Permukiman** | 615,02 | 1,117,58 |

| PENGGUNAAN LAHAN | 2016 | 2022 |
|---|---|---|
| **Rawa/Semak Belukar** | 136,63 | 60,22 |
| **RTH/TPU** | 15,50 | 14,23 |
| **Sungai** | 599,93 | 508,98 |
| **SPU** | 65,75 | 217,12 |
| **Jumlah** | **6.014,69** | **6.014,69** |

*Sumber: Revisi RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033*

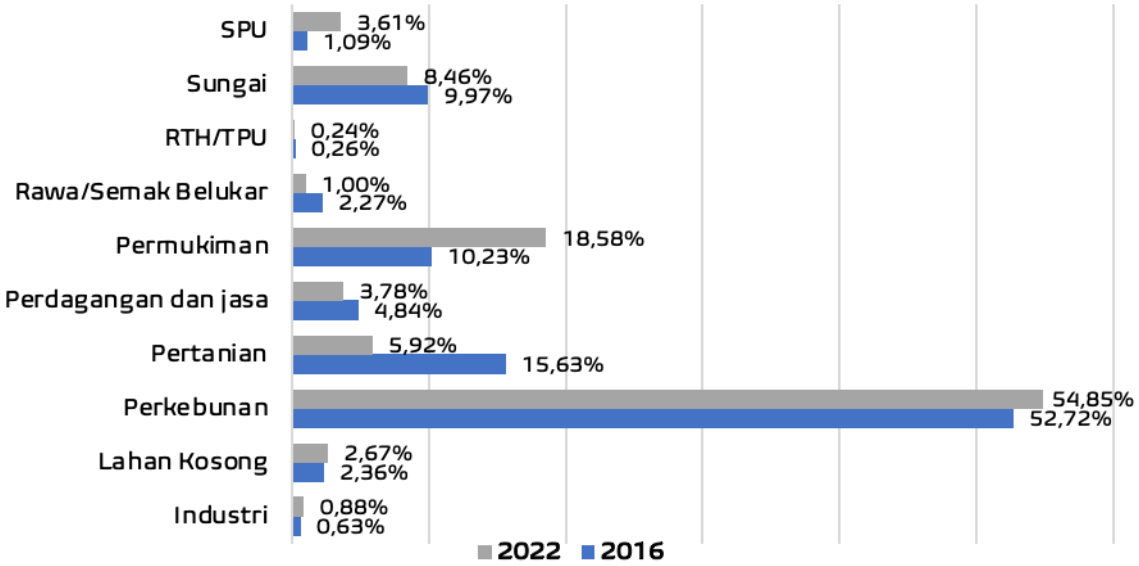


**Gambar 2.4**
**Persentase Luas Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2016 dan 2022 (Ha)**

Berdasarkan gambar di atas dapat kita ketahui bahwa alih fungsi pertanian dari tahun 2016 ke tahun 2022 mencapai 62 persen. Ini berarti bahwa konversi lahan pertanian yang terjadi di Kota Tanjungbalai apabila tidak dilakukan upaya pengendalian, akan mengurangi kapasitas dalam memproduksi pangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan pencegahan alih fungsi lahan pertanian antara lain:

a. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengatur penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan membagi habis wilayah administratif menurut fungsi (peruntukan) kawasan, termasuk di dalamnya kawasan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dengan ketentuan pengaturan tertentu

b. Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1989 juncto Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1996 juncto Keputusan Presiden nomor 98 tahun 1998 tentang Kawasan Industri, melarang perubahan penggunaan lahan pertanian subur untuk pembangunan Kawasan Industri.

**8. Keanekaragaman Hayati**

Kota Tanjungbalai memiliki keanekaragaman hayati dengan kekayaan flora dan fauna yang unik, termasuk beberapa spesies endemik. Kota ini merupakan habitat berbagai jenis tumbuhan, termasuk flora lokal dan khas ekosistem sungai pesisir dan rawa yang merupakan bagian integral dari ekosistem lahan basah dan estuari, seperti kelapa (Cocos nucifera), nipah (Nypa fruticans), nibung (Oncosperma tigillarium), birah (Ziziphus mauritiana), berombang (Sonneratia caseolaris), ara (Ficus racemosa), putat (Barringtonia racemosa), rukam (Flacourtia rukam), bajaronggi (Premna serratifolia), daun sikontut-kontut (Paederia foetida), sibuas-buas (Premna cordifolia L.), temu pauh (urcuma mangga), serta ulam raja (Cosmos caudatus) yang banyak ditemukan di permukiman dan tepian sungai.

Kota ini juga menjadi habitat bagi satwa lokal seperti buaya muara (Crocodylus porosus), yang juga dikenal sebagai buaya bekatak. Satwa ini merupakan predator di Sungai Asahan, dengan makanan utama berupa ikan, meskipun juga dapat memangsa reptil dan mamalia lain. Satwa lainnya adalah monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), yang sering ditemukan di hutan-hutan sekunder dan tepian sungai di Kota Tanjungbalai. Di ekosistem perairan Kota Tanjungbalai juga terdapat berbagai jenis organisme akuatik. Di antaranya udang galah (Macrobrachium rosenbergii) dan kepah lumpur (Polymesoda erosa) yang merupakan organisme bentos di Sungai Asahan. Adapun organisme nekton yang banyak ditemukan antara lain ikan sindarsat (Leptobarbus hoeveni), ikan balido (Cyclocheilichthys apogon), ikan paitan/wader (Rasbora argyrotaenia), ikan putak (Notopterus notopterus), dan ikan kedukang/duri (Hexanematichthys sagor). Selain itu, terdapat 12 kelas plankton di perairan Sungai Asahan, Kota Tanjungbalai, yang terdiri dari 5 kelas fitoplankton dan 7 kelas zooplankton. Kelas fitoplankton tersebut meliputi Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Conjugatophyceae, Coscinodiscophyceae, dan Cyanophyceae. Sedangkan kelas zooplankton tersebut antara lain Branchiopoda, Cladocera, Clitellata, Copepoda, Crustacea, Filosia, Gastropoda, Lobosea, Monogonta, Oligotrichea, Tubulinea dan Turbellaria. Satwa darat khas lainnya adalah kepiting kelapa (Birgus latro),

yang merupakan artropoda darat terbesar di dunia. Spesies ini dikenal karena kemampuannya memecahkan buah kelapa dengan capit kuatnya untuk mengonsumsi isinya. Di antara vegetasi seperti tanaman nipah, hidup pula serangga dan organisme kecil lainnya, seperti kumbang nipah, yang umumnya merujuk pada kumbang badak (Oryctes rhinoceros). Kumbang ini dikenal sebagai hama utama tanaman kelapa dan berpotensi menyerang nipah. Dalam siklus hidupnya, kumbang ini mengalami fase larva (ulat) sebelum menjadi pupa dan imago (dewasa). Dalam bentuk pupa, kumbang ini dikenal sebagai ulat nipah. Selain itu, terdapat juga cacing nipah (Polychaeta sp.) yang hidup di jaringan lunak atau lumpur di sekitar akar nipah. Meskipun memiliki kekayaan hayati yang beragam, Kota Tanjungbalai tidak memiliki kawasan konservasi maupun cagar alam untuk melindungi flora dan fauna spesifik tersebut. Namun demikian, keanekaragaman hayati di wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam pengembangan ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan pemanfaatan tanaman lokal sebagai sumber obat-obatan dan pangan alternatif, yang jika dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

#### 2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik fisik, sosial ekonomi dan sumberdaya alam yang beragam mengakibatkan potensi wilayah yang berbeda. Pembangunan suatu wilayah tidak dilakukan secara sembarangan tetapi harus memperhatikan karakteristik dan potensi utama suatu wilayah. Berikut ini merupakan rencana pola ruang pengembangan kawasan Kota Tanjungbalai:

**1. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya**

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya yaitu tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi yang telah mempunyai umur lebih dari 50 tahun dan perlu untuk dilestarikan. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya di Kota Tanjungbalai, meliputi :

a. Kawasan perdagangan yang berada di Kelurahan Karya, Kelurahan Perwira, Kelurahan Pantai Burung dan Kelurahan Indra Sakti,
b. Kawasan bangunan tua berupa bangunan yang berusia lebih dari 50 (limapuluh) tahun di Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan,

c. Kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara,

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai arahan terhadap rencana kawasan cagar budaya melalui :

a. Mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya,
b. Merevitalisasi kawasan cagar budaya,

**2. Pengembangan Kawasan Perumahan**

Kawasan peruntukan perumahan dikembangkan dengan tujuan untuk pemerataan distribusi kependudukan di wilayah Kota Tanjungbalai yang dilakukan teritegrasi dengan rencana sistem jaringan transportasi sebagai penopang pergerakan penduduk, Kawasan peruntukan perumahan seluas kurang lebih 1,562,3 Ha terdiri dari :

**A. Kawasan Permukiman Kepadatan Tinggi (>150 bangunan/ha)**

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pada pinsipnya kawasan perumahan padat di Kota Tanjungbalai, terdapat hampir disetiap titik-titik permukiman yang tersebar di :

a. Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan (Pusat Pelayanan Kota),
b. Kecamatan Teluk Nibung (SPPK 4),
c. Kecamatan Sei Tualang Raso (SPPK 3),
d. Kecamatan Datuk Bandar Timur (SPPK 2),
e. Sampai dengan tahun 2033 perkembangan permukiman kepadatan tinggi tidak diarahkan lagi selain di wilayah tersebut, Kawasan permukiman kepadatan tinggi direncanakan seluas kurang lebih 91 ha dikembangkan ke arah vertikal pada wilayah pusat pelayanan kota di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

**B. Kawasan Permukiman Kepadatan Sedang (51-150 bangunan/ha)**

Kawasan permukiman kepadatan sedang di Kota Tanjungbalai direncanakan seluas kurang lebih 163 (seratus enampuluh tiga) hektar di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung.

## C. Kawasan Permukiman Kepadatan Rendah (0-50 bangunan/ha)

Kawasan perumahan kepadatan tinggi merupakan perumahan kebanyakan yang terdapat di wilayah perkotaan yang relatif kecil atau masih bersifat kedaerahan seperti Kota Tanjungbalai, sehingga alokasinya merupakan alokasi perumahan terbesar. Perumahan kepadatan rendah di Kota Tanjungbalai direncanakan seluas kurang lebih 1,309 yang terletak di Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Sungai Merbau Kecamatan Teluk Nibung, Kelurahan Sei Raja, Muara Sentosa, Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Kelurahan Sirantau, Sigading, Sijambi, Pantai Johor, Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Pulau Simardan, Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi, Pasar Baru Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Perwira, Tanjungbalai Kota I, Tanjungbalai Kota II Kecataman Tanjungbalai Selatan.

Pengembangan perumahan di Kota Tanjungbalai juga diklasifikasikan atas 3 (tiga) tipe kavling atau persil bangunan. Klasifikasi luas kavling tersebut ditentukan berdasarkan kondisi luas kavling bangunan saat ini, Adapun klasifikasi luas kavling perumahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kavling besar dengan luas kavling 600 $m^2$,
- Kavling sedang dengan luas kavling 250 $m^2$,
- Kavling kecil dangan luas kavling 150 $m^2$,

Perbandingan yang dipakai dalam membagi jumlah unit rumah yang akan dikembangkan tersebut berpedoman pada standar Perumnas (Perumahan Nasional) yaitu 1 : 3 : 6 atau tipe besar : sedang : kecil.

Selain jenis permukiman diatas, jenis pemukiman yang diatur di Kota Tanjungbalai adalah kawasan perumahan rusunawa pada wilayah SPPK 3 (Kecamatan Sei Tualang Raso) dan Kawasan Perumahan Nelayan yang diarahkan pada wilayah SPPK 4 (Kecamatan Teluk Nibung). Pengertian perumahan rusunawa disini adalah perumahan yang dibangun dengan ketentuan-ketentuan atau persyaratan teknis bangunan/konstruksi tahan gempa, sehingga perumahan yang dibangun tahan terhadap bencana seperti banjir dan gempa bumi. Pembangunan perumahan nelayan ini selain harus memenuhi persyaratan teknis juga jumlah rumahnya dibatasi dan penduduk yang tinggal di kawasan itu, memang penduduk yang benar-benar mata pencahariannya sebagai nelayan.

### 3. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa dengan luas 160 Ha dikembangkan untuk mengarahkan perkembangan sektor industri dan jasa dan menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang tertib dan teratur. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa meliputi :

a. Kawasan pasar tradisional seluas kurang lebih 3,5 Ha dikembangkan di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, dan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso.
b. Kawasan pusat perbelanjaan seluas kurang lebih 5 Ha dikembangkan di Kelurahan Mata Halasan, Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara.
c. Kawasan toko modern seluas kurang lebih 3 Ha dikembangkan di Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Karya dan Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

### 4. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Berdasarkan kondisi eksistingnya, kawasan peruntukan perkantoran di Kota Tanjungbalai tersebar dibeberapa kawasan, antara lain SPPK 1 dan Pusat Pelayanan Kota. Kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan untuk mengoptimalkan kegiatan perkantoran yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan hunian. Kawasan peruntukan perkantoran dengan luas 69 Ha terdiri dari :

Kawasan perkantoran pemerintahan meliputi kawasan perkantoran pemerintahan di sepanjang Jl, Jend, Sudirman dan sekitarnya pada wilayah SPPK 1 di Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, dan Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar.

Kawasan perkantoran swasta berada di Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara. Rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan dan swasta meliputi:

a. Kawasan perkantoran pemerintahan di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar.
b. Kawasan perkantoran swasta di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kelurahan Sei Raja kecamatan Sei Tualang Raso.

**5. Pengembangan Kawasan Industri**

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kota Tanjungbalai pada prinsipnya saat ini sudah berkembang di hampir diseluruh sub pusat pelayanan kota, antara lain: industri besar/sedang tersebar di SPPK 1 (Kelurahan Pahang, Sirantau dan Pantai Johor), SPPK 3 (Kelurahan Keramat Kubah dan Sumber Sari) dan SPPK 4 (Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kapias Pulau Buaya, Sei Merbau dan Pematang Pasir). Kawasan peruntukan industri dikembangkan untuk mendukung sektor industri dan membatasi dampak negatif industri terhdap kawasan sekitarnya. Sampai dengan tahun 2033 rencana pengembangan kawasan peruntukan industri seluas ± 348 ha yang di arahkan pada:

a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro; dan Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro di Kota Tanjungbalai seluas kurang lebih 6,15 hektar terdapat di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Teluk Nibung;
b. Kawasan peruntukan industri menengah;
c. Kawasan peruntukan industri menengah bidang pengolahan hasil perikanan dan perkebunan di Kota Tanjungbalai seluas kurang lebih 342,08 hektar terdapat di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso; dan Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Pematang Pasir, dan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

**6. Pengembangan Kawasan Pariwisata**

Pengembangan kawasan ini diarahkan dengan potensi wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam dengan lahan seluas ± 157 meliputi kawasan pariwisata alam di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung.

Kawasan tepi sungai selalu menjadi tempat yang menarik untuk permukiman. Gejala tersebut terjadi karena beberapa alasan diantaranya adalah bahwa kawasan tepi sungai merupakan dataran subur yang dapat memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudahan transportasi air, kebutuhan atas air (minum, mandi dan cuci) dan salah satu pintu gerbang perdagangan dari tempat yang terpisah oleh badan air. Melihat kenyataan tersebut, upaya penataan dan perbaikan kawasan tepi sungai merupakan hal yang tidak berlebihan, bahkan sudah selayaknya

dilakukan. Penataan yang baik akan menjadikan suatu kawasan yang berpotensi sebagai suatu destinasi wisata. Dilihat dari permasalahan yang ada, penataan kawasan tepi sungai menjadi salah satu model alternatif penanganan Kota Tanjungbalai mengatasi permasalahan banjir dan kumuh perkotaan. Kota Tanjungbalai telah mencoba menata kawasan tepi air Waterfront Kota Tanjungbalai tepatnya berada di pinggir Sei Asahan di jalan Asahan Kota Tanjungbalai. Kawasan ini berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena merupakan kawasan kota lama. Pada kawasan ini terdapat potensi-potensi wisata cagar buda seperti Bangunan Balai Ujung Tanjung, Pasar Tradisional, Restaurant, Hotel dan bekas lahan Istana Kesultanan yang akan dibangun kembali Replika Istana Sultan. Juga terdapat Jembatan Tabayang yang menjadi jembatan terpanjang di Provinsi Sumatera Utara.

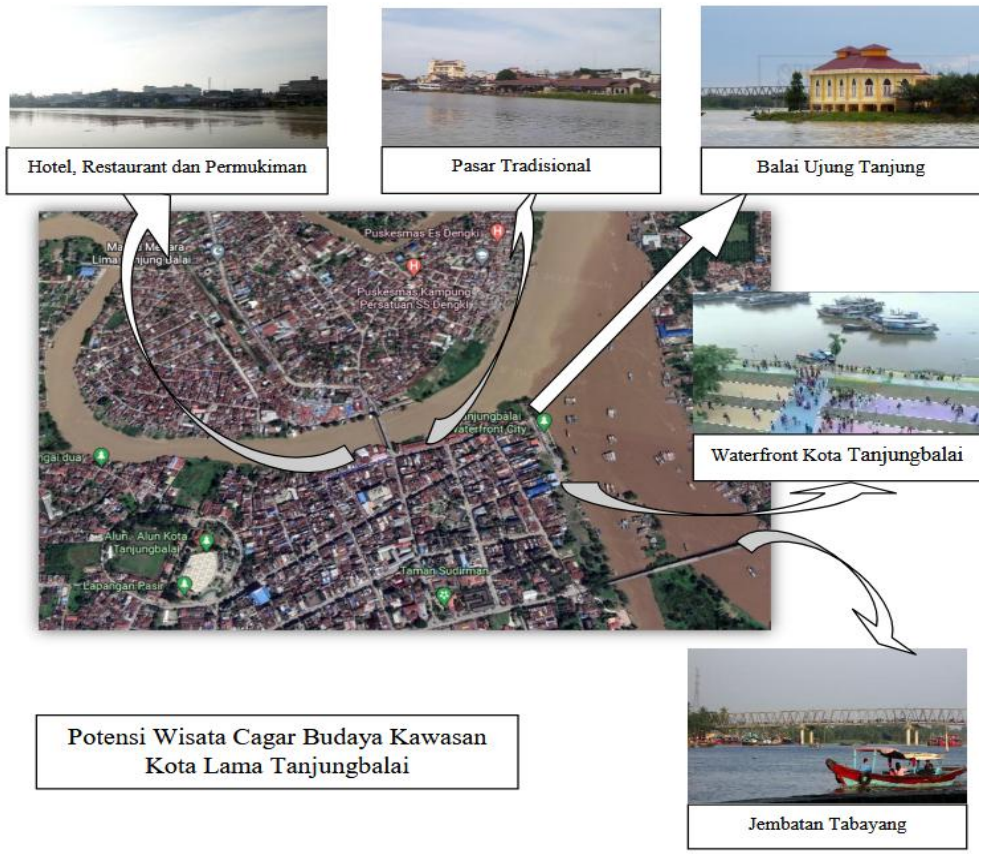


**Gambar 2.5**
**Potensi Wisata Kota Tanjungbalai**

Selain Kawasan Waterfront, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Utara telah menata kawasan permukiman kumuh di pinggir Sungai Silau yang berada

di Kelurahan Sirantau. Kawasan ini ditata dengan membuat pedestrian pejalan kaki di sepanjang Sungai Silau. Selain untuk tujuan wisata, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjadi benteng masuknya air ke kawasan permukiman dan perkotaan Kota Tanjungbalai. Kondisi muka air sungai yang tinggi akibat sedimentasi menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan permukiman dan perkotaan.

**Aksesibilitas Pendukung Pariwisata**

Akses menuju pulau-pulau kecil DAS Asahan adalah melalui badan sungai dengan sarana perahu. Saat ini belum ada angkutan air yang melayani transportasi umum ke pulau-pulau tersebut, hanya para nelayan dan pengambil hasil bumi (seperti Nira dan Sagu) yang berkegiatan di pulau-pulau tersebut dengan menggunakan perahu bermotor milik nelayan.

Untuk pengembangan pulau-pulau tersebut salah satu prasarana dasar yang harus tersedia adalah transportasi air sebagai aksesibilitas ke/dari pulau-pulau tersebut. Pada RTRK Tanjungbalai terdapat pengembangan Kawasan Water Front di Kecamatan Datuk Bandar Timur. Kawasan Water Front sebagai suatu kawasan yang berhadapan langsung dengan Sungai Asahan dan menonjolkan kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan Sungai Asahan maupun kegiatan transisi antara kegiatan perkotaan dan badan sungai, dapat dimanfaatkan sebagai vocal point aksesibilitas ke/dari pulau-pulau tersebut. Untuk itu pembangunan dermaga di Kawasan Water Front untuk transportasi air lokal, khususnya untuk penunjang kegiatan pariwisata merupakan prasyarat
pertama yang harus dipenuhi.

**Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata**

Untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan pemenuhan kebutuhan wisatawan selama berwisata, suatu objek daerah tujuan wisata seharusnya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung (seperti: restoran, kafe, parkir, dan lain-lain) agar wisatawan dapat menambah waktu tinggalnya lebih lama.

Hampir semua objek daerah tujuan wisata di Kota Tanjungbalai belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang wisata ini, kalaupun ada kondisinya sudah tidak terawat lagi. Untuk itu pembangunan fasilitas wisata di tiap-tiap objek daerah tujuan wisata harus menjadi prioritas pengembangan pariwisata.

## 7. Pengembangan Perikanan

Di Kota Tanjungbalai lokasi pendaratan hasil perikanan tangkap tersebar di 3 Kecamatan yaitu kecamatan Teluk Nibung, kecamatan Tanjungbalai Utara, kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan jumlah nelayan sebesar 7.703 jiwa. Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar ± 12.030 ton. Jenis ikan yang ditangkap merupakan produk perikanan komoditas ekspor seperti pari, senangin, kembung, tongkol, kakap, kerapu, bawal, udang, kepiting, cumi-cumi, mayong.

Sebagai proses produksi yang komersial, pemasaran hasil perikanan merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan di sektor perikanan karena sistem pemasaran mampu menciptakan nilai tambah melalui guna tempat, guna bentuk dan guna waktu. Para nelayan di Kota Tanjungbalai mendaratkan ikan hasil tangkapannya di tangkahan pribadi. Produksi perikanan tangkap sebagian kecil di olah dengan teknologi yang sederhana menjadi terasi, ikan asin, dan ikan rebus sebagian lagi didistribusikan dalam bentuk segar ke pasar lokal maupun ke luar daerah. Permasalahannya adalah kualitas ikan yang cepat sekali menurun sebelum sampai ke tangan konsumen dikarenakan penanganan yang seadanya maupun lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Hal ini menjadi peluang investasi usaha di bidang pengolahan hasil perikanan, agar dapat mendirikan pabrik pengolahan ikan sehingga memberikan nilai tambah pada produk perikanan. Untuk memperkuat upaya hilirisasi perikanan di Kota Tanjungbalai, maka pemerintah Kota Tanjungbalai akan membuat strategi dan inisiatif melibatkan semua pelaku sektor industri perikanan termasuk lembaga riset, pembiayaan dan investor. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hilirisasi perikanan di Kota Tanjungbalai:

a. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur: Membangun dan meningkatkan fasilitas pengolahan hasil laut, seperti pabrik pengolahan ikan, gudang berpendingin, dan fasilitas pengepakan.
b. Pengembangan Teknologi Pengolahan: Mengadopsi teknologi modern dalam pengolahan hasil laut, seperti pengeringan, pengasapan, pembekuan, dan pengalengan termasuk meningkatkan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk olahan baru yang bernilai tinggi.

c. Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan kepada nelayan dan pekerja industri pengolahan tentang teknik-teknik pengolahan dan manajemen bisnis serta Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kualitas dan standar keamanan pangan.
d. Kemitraan dan Kerjasama: Membentuk kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mendorong investasi dari sektor swasta dalam pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran.
e. Diversifikasi Produk: Mengembangkan berbagai produk olahan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional, seperti nugget ikan, sosis ikan, dan produk makanan laut siap saji.

**8. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau**

Ruang terbuka non hijau dikembangkan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan ruang terbuka sebagai wadah aktivitas sosial dan budaya politik dengan lahan seluas kurang lebih 7,25 ha meliputi:

a. Kawasan pelataran parkir pada bangunan pemerintahan, perdagangan dan jasa maupun fasilitas umum lainnya seluas ± 1,39 ha di Kelurahan Sijambi Kecamatan Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara;
b. Lapangan upacara seluas ± 2 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
c. Lapangan olahraga/stadion, lapangan bermain dan rekreasi ± 3,86 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; dan
d. Pembatas/median jalan serta koridor antar bangunan seluas ± 0,7 ha di Kelurahan Sijambi (Jalan Kartini dan Jalan Stadion Baru) Kecamatan Datuk Bandar.

**9. Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana**

Ruang evakuasi bencana merupakan upaya untuk menyediakan ruang evakuasi darurat bagi warga kota sebagai tempat berlindung dan tempat penyaluran bantuan sosial. Adapun di dalam Kota Tanjungbalai diarahkan ruang evakuasi bencana sebagai berikut :

1. Lapangan sultan abdul jalil rahmadsyah di kelurahan pantai burung kecamatan tanjungbalai selatan;

2. Fasilitas olahraga (gedung serba guna) kelurahan sijambi kecamatan datuk bandar; dan
3. Fasilitas olahraga (lapangan bola kaki) kelurahan pematang pasir kecamatan Teluk Nibung.

**10. Pengembangan Kawasan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian. Kawasan peruntukkan lahan pertanian di Kota Tanjungbalai seluas ± 1,591 ha yang diarahkan dengan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sampai dengan tahun 2033 pengembangan arahan Kawasan peruntukan pertanian dikembangkan meliputi:

a. Kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan kurang lebih 359 hektar meliputi kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor dan Sirantau dengan luas kurang lebih 361 (tiga ratus enam puluh satu) hektar ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
b. Kawasan hortikultura dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa dan palawija di Kelurahan Pahang, Gading Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Simula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pasar Baru, Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir, Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

**11. Pengembangan Iklim Investasi**

Kota Tanjungbalai berada pada lokasi yang sangat strategis yaitu merupakan lintasan jalur lalu lintas Internasional Selat Malaka yang padat dan berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia) lokasi yang strategis ini memungkinkan Kota Tanjungbalai untuk mengoptimalkan perannya dalam sistem ekonomi lokal, regional, nasional maupun internasional di masa yang akan datang. Adapun rencana investasi Kota Tanjungbalai pada saat ini, berdasarkan data informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai yaitu :

a. Pengembangan Pelabuhan
b. Pengembangan Kawasan Industri
c. Penambahan sumber daya energi listrik terbarukan
d. Peningkatan kapasitas pengolahan Air Bersih

e. Pengembangan destinasi wisata (Waterfront City dan Wisata Pulau) serata Perhotelan.
f. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

Adapun arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal:

a. Penyelenggaraan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
b. Melakukan harmonisasi dan simplikasi prosedur serta penyederhanaan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal mencakup penyelenggaraan sistem Online Single Submission (OSS) seperti dikemukakan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan kemudian diatur lebih rinci pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
c. Mengarahkan lembaga penanaman modal di pusat dan daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving).

**12. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat).

Adapun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu:

a. Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKM di Kota Tanjungbalai, memverifikasi keabsahan data UMKM, selanjutnya menetapkan UMKM yang potensial untuk dikembangkan seperti penawaran kerja sama dengan usaha besar.
b. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di Kota Tanjungbalai, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi dan manajemen.

c. Memfasilitasi pihak UMKM dalam hal pengenalan dan pemasaran produk mereka, seperti mengikutsertakan dalam berbagai bazar, pameran promosi, pameran perdagangan, temu usaha, terutama yang berhubungan dengan penanam modal atau investor potensial.
d. Memanfaatkan CSR perusahaan – perusahaan yang berada di Kota Tanjungbalai agar lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM terutama yang bergerak di sektor–sektor yang prioritas.

#### 2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kota Tanjungbalai dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana yang berpotensi terjadi. Area Kota Tanjungbalai yang relatif beradadi dataran rendah dengan kemiringan wilayah hanya sekitar 0-3 meter di atas permukaan laut, membuat Kota Tanjungbalai cenderung rawan terhadap genangan-genangan air, baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air sungai.

Bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau proses yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu, baik proses alam itu sendiri maupun oleh manusia. Jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di Kota Tanjungbalai hanya kerawanan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh hujan maupun pengaruh pasang surut air sungai.

**A. Rawan Genangan**

Potensi rawan genangan di Kota Tanjungbalai diakibatkan oleh rendahnya ketinggian permukaan Kota Tanjungbalai terhadap permukaan air, sehingga bila terjadi pasang maka air yang terdapat di daratan Tanjungbalai tidak mampu turun menuju sungai. Sebaliknya air pasang naik kedaratan melalui sistem drainase perkotaan sehingga terjadilah genangan.

Adapun daerah-daerah yang menjadi rawan genangan tersebut umumnya di sekitar aliran sungai yaitu di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Gading (Kecamatan Datuk Bandar), Kelurahan Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi dan Kelurahan Pulau Simardan (Kecamatan Datuk Bandar Timur).

**B. Rawan Banjir**

Potensi rawan banjir di Kota Tanjungbalai pernah terjadi yang diakibatkan oleh bencana alam jebolnya tembok (benteng jalan) sepanjang aliran Sungai Silau, hal ini diakibatkan oleh tingginya debit air sungai yang mempengaruhi secara langsung terhadap ketahanan benteng itu sendiri. Daerah yang berpotensi rawan banjir secara umumnya Kota Tanjungbalai mempunyai potensi tetapi yang telah mengalami potensi rawan banjir ini pada daerah-daerah seperti Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pantai Johor, Kelurahan Gading, Kelurahan Pahang dan Kelurahan Sirantau.

Wilayah rawan bencana alam di Kota Tanjungbalai merupakan wilayah banjir yang terjadi di sekitar daerah aliran Sungai Silau dan Sungai Asahan. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan rawan banjir/genangan berada disebagian wilayah Kecamatan Datuk Bandar di Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Pantai Johor dan Kecamatan Datuk Bandar Timur di Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Bunga Tanjung, Kawasan rawan banjir tersebut dilakukan suatu rencana arahan ruang sebagai antisipasi penanggulangan melalui:

a. Normalisasi dan pengerukan Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Bandar Jepang dan Sungai Bandar Sipoyong;
b. Melaksanakan penanaman di daerah sempada sungai Asahan dan Sungai Silau;
c. Membangun benteng alam sebagai penyangga.

**Tabel 2.5**
**Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai**

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Datuk Bandar | Pahang | Banjir Kiriman, Banjir Rob |
| | | Gading | Banjir Kiriman, Banjir Rob |
| | | Sijambi | Banjir Kiriman, Banjir Rob |
| | | Pantai Johor | Banjir Kiriman, Banjir Rob |
| | | Sirantau | Banjir Kiriman, Banjir Rob |
| | | | |
| 2 | Datuk Bandar Timur | Bunga Tanjung | Banjir Kiriman, Banjir Rob |
| | | Selat Lancang | Banjir Kiriman, Banjir Rob |
| | | Selat Tanjung Medan | Banjir Kiriman, Banjir Rob |
| | | Pulau Simardan | Banjir Rob |

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | | Semula Jadi | Banjir Rob |
| | | | |
| 3 | Tanjungbalai Utara | TB Kota III | Banjir Rob |
| | | TB Kota IV | Banjir Rob |
| | | Kuala Silo Bestari | Banjir Rob |
| | | Matahalasan | Banjir Rob |
| | | | |
| 4 | Sei Tualang Raso | Sumber Sari | Banjir Rob |
| | | Pasar Baru | Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng |
| | | Muara Sentosa | Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng |
| | | Keramat Kubah | Banjir Rob |
| | | | |
| 5 | Teluk Nibung | Pematang Pasir | Banjir Rob |
| | | Beting Kuala Kapias | Banjir Rob |
| | | Kapias Pulau Buaya | Banjir Rob |
| | | Sei Merbau | Banjir Rob |
| | | Perjuangan | Banjir Rob |
| | | | |
| 6 | Tanjungbalai Selatan | Pantai Burung | Banjir Rob |
| | | Indra Sakti | Banjir Rob |

*Sumber: BPBD Kota Tanjungbalai, 2025*

Kejadian bencana lain yang terjadi di Kota Tanjungbalai selain banjir adalah bencana kebakaran. Kota Tanjungbalai memiliki luas wilayah hanya sebesar 6,052 Ha atau 60,52 $km^2$ dengan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan kepadatan penduduk tinggi terutama wilayah Kecamatan Tanjung Balai Utara dan Kecamatan Teluk Nibung sehingga memperbesar resiko kebakaran terjadi. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan kejadian bencana di Kota Tanjungbalai.

**Tabel 2.6**
**Kejadian Bencana di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| TAHUN | BENCANA | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 2020 | Kebakaran | Kelurahan Sei Merbau,<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota IV,<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota III,<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota II,<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota I,<br>Kelurahan Kuala Silau Bestari,<br>Kelurahan Perwira,<br>Kelurahan Karya,<br>Kelurahan Indra Sakti,<br>Kelurahan Pantai Burung,<br>Kelurahan Beting Kuala Kapias,<br>Kelurahan Pematang Pasir,<br>Kelurahan Pantai johor,<br>Kelurahan Matahalasan,<br>Kelurahan Muara Sentosa,<br>Kelurahan Pulau Simardan,<br>Kelurahan Keramat Kubah,<br>Kelurahan Perjuangan,<br>Kelurahan Selat Lancang | **36 kasus** |
| 2021 | Kebakaran | Kelurahan Perjuangan,<br>Kelurahan Semula Jadi,<br>Kelurahan Sijambi,<br>Kelurahan Perwira,<br>Kelurahan Pantai Burung,<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota III | **8 kasus** |
| 2022 | Kebakaran | Kelurahan Gading<br>Kelurahan Bunga Tanjung<br>Kelurahan Kapias Pulau Buaya<br>Kelurahan Karya<br>Kelurahan Pahang<br>Kelurahan Pantai Burung<br>Kelurahan Pantai Johor<br>Kelurahan Pasar Baru<br>Kelurahan Perwira<br>Kelurahan Sejahtera | **23 Kasus** |

| TAHUN | BENCANA | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | | Kelurahan Sijambi<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota I<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota IV<br>Kabupaten Asahan | |
| 2023 | Kebakaran | Kelurahan Beting Kuala Kapias<br>Kelurahan Gading<br>Kelurahan Indra Sakti<br>Kelurahan Kapias Pulau Buaya<br>Kelurahan Kuala Silo Bestari<br>Kelurahan Pematang Pasir<br>Kelurahan Perjuangan<br>Kelurahan Perwira<br>Kelurahan Sei Merbau<br>Kelurahan Sei Raja<br>Kelurahan Selat Tanjung Medan<br>Kelurahan Semula Jadi<br>Kelurahan Sijambi<br>Kelurahan Sirantau<br>Kelurahan Sumber Sari<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota I<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota II<br>Kabupaten Asahan | **35 Kasus** |
| | Banjir | Kelurahan Sijambi, Gading, Pahang, Pantai Johor, Sirantau, Bunga Tanjung, Selat Tanjung Medan, Selat Lancang | |
| 2024 | Kebakaran | Kelurahan Sirantau<br>Kelurahan Beting Kuala Kapias<br>Kelurahan Bunga Tanjung<br>Kelurahan Gading<br>Kelurahan Indra Sakti<br>Kelurahan Kapias Pulau Buaya<br>Kelurahan Karya<br>Kelurahan Keramat Kubah<br>Kelurahan Pahang<br>Kelurahan Pantai Burung<br>Kelurahan Pantai Johor<br>Kelurahan Pasar Baru<br>Kelurahan Perjuangan | **50 Kasus** |

| TAHUN | BENCANA | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | | Kelurahan Selat Lancang<br>Kelurahan Selat Tanjung Medan<br>Kelurahan Semula Jadi<br>Kelurahan Sijambi<br>Kelurahan Sirantau<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota I<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota II<br>Kabupaten Asahan | |
| | Banjir | Kelurahan Sijambi, Gading, Pahang, Pantai Johor, Sirantau, Bunga Tanjung, Selat Tanjung Medan, Selat Lancang | |

*Sumber: Satpol PP Kota Tanjungbalai, 2025*

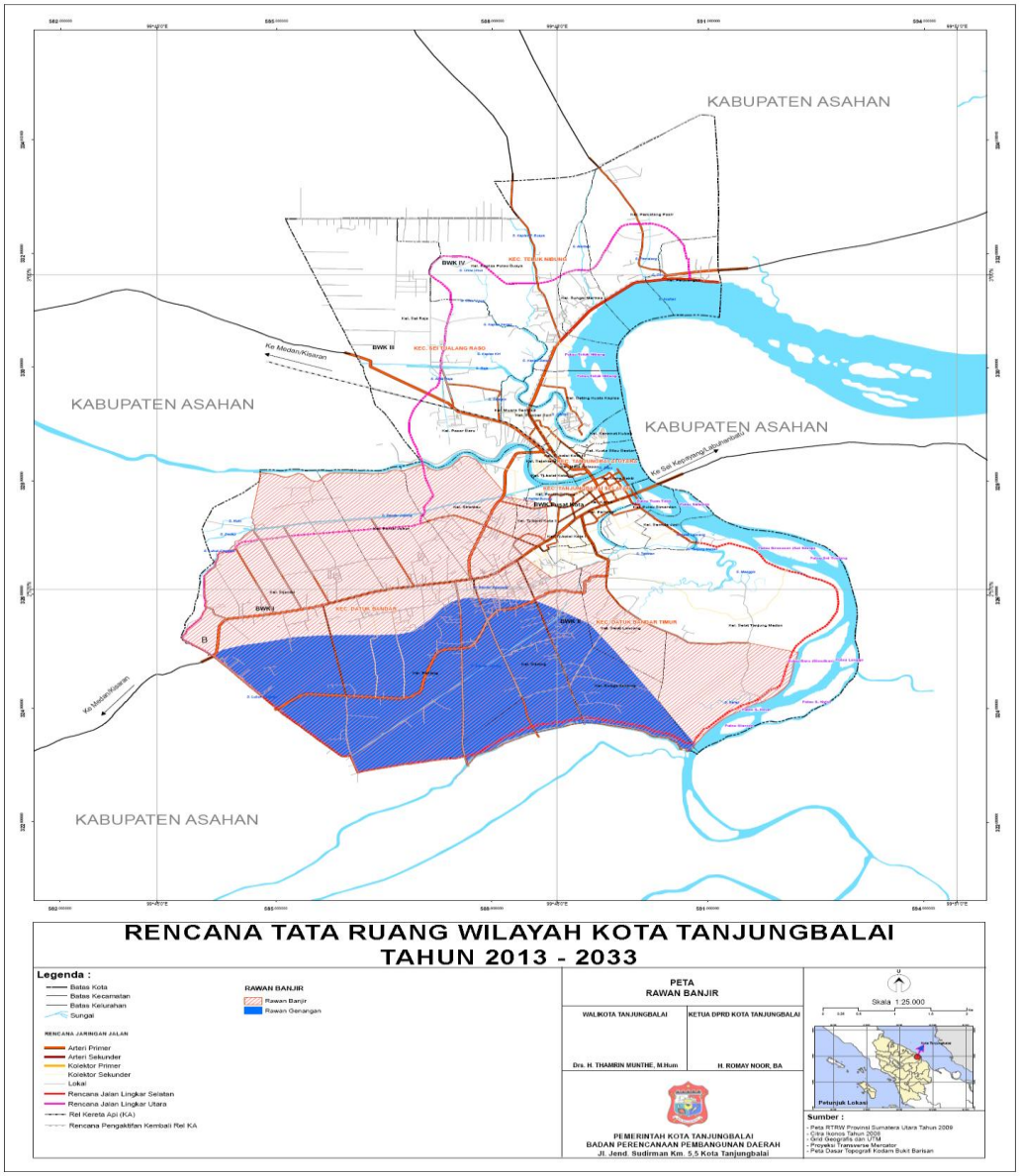


**Gambar 2.6**

**Peta Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Rawan Banjir**

*Sumber: Revisi RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033*

### 2.1.1.3 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Kebencanaan dan Perubahan Iklim

Analisis daya dukung dan daya tampung untuk aspek air, udara, pangan, serat, sumberdaya genetik, kebencanaan, dan perubahan iklim di Kota Tanjungbalai, dalam kaitannya dengan RPJPD Kota Tanjungbalai 2025-2045, adalah sebagai berikut:

1. **Air**: Kota Tanjungbalai mengalami defisit daya dukung penyediaan air bersih yang signifikan. Dengan populasi 175.223 jiwa dan konsumsi rata-rata 1.600 $m^3$ per orang per tahun, kebutuhan air mencapai sekitar 790.684.800 $m^3$ per tahun, sementara ketersediaan hanya sekitar 23.542.293 $m^3$ per tahun, menyebabkan defisit mencapai 767.142.507 $m^3$ per tahun.
2. **Udara**: DDDTLH yang dominan untuk pemeliharaan kualitas udara di Kota Tanjungbalai berada pada kondisi tinggi dengan luas 3.009,07 Ha atau sekitar 50,1% dari total area.
3. **Pangan**: Terdapat defisit yang signifikan dalam penyediaan beras. Konsumsi beras penduduk Tanjungbalai sebesar 19.099,3 ton per tahun, sedangkan ketersediaan hanya 8.304 ton per tahun, sehingga terdapat defisit sebesar 10.795,3 ton per tahun.
4. **Serat**: Jasa ekosistem penyediaan serat di dominasi oleh kondisi tinggi, dengan luas area 3.722,75 Ha atau 62% dari total area. Daya dukung dan daya tampung yang tinggi untuk penyediaan serat dominan berada di Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur.
5. **Sumberdaya Genetik**: Kondisi jasa ekosistem penyediaan sumberdaya genetik didominasi oleh kondisi rendah dan sangat rendah dengan luas 4.246,09 Ha atau 70,7% dari total area, tersebar tidak merata di Kota Tanjungbalai.
6. **Kebencanaan**: Mayoritas wilayah Kota Tanjungbalai memiliki DDDTLH yang rendah dan sangat rendah untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dengan total luas 5.044,32 Ha atau 84% dari total area. Hal ini memerlukan upaya tambahan dari BPBD Kota Tanjungbalai untuk mencapai target kebencanaan pada tahun 2030.
7. **Perubahan Iklim**: Dampak perubahan iklim yang dirasakan di Kota Tanjungbalai termasuk peningkatan permukaan air laut yang memasuki kawasan pemukiman dan pusat kota, serta perubahan pola curah hujan dan kelembaban udara.

Dalam menyusun kebijakan untuk masa depan Kota Tanjungbalai, berikut beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan, mengacu pada tantangan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Tanjungbalai 2025-2045:

1. **Manajemen Sumber Daya Air**:
    - Meningkatkan kapasitas infrastruktur penampungan dan distribusi air, termasuk pembangunan waduk atau peningkatan kemampuan penampungan air hujan.
    - Mengimplementasikan program penghematan air dan kampanye penggunaan air secara efisien.
    - Mengembangkan teknologi penyaringan dan daur ulang air untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air yang terbatas.
2. **Peningkatan Kualitas Udara**:
    - Mengembangkan dan menerapkan peraturan yang ketat terhadap emisi polutan dari industri dan kendaraan.
    - Memperluas ruang terbuka hijau sebagai 'paru-paru' kota untuk meningkatkan kualitas udara.
    - Mendorong penggunaan energi bersih dan teknologi rendah karbon untuk mengurangi pencemaran udara.
3. **Ketahanan Pangan**:
    - Mengembangkan sektor pertanian urban untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
    - Mendukung diversifikasi pangan.
    - Meningkatkan kapasitas dan efisiensi rantai pasokan pangan untuk menurunkan kerugian pascapanen.
4. **Pengelolaan Sumberdaya Genetik**:
    - Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati.
    - Mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang genetika untuk melestarikan dan mengoptimalkan sumberdaya genetik.
5. **Pengurangan Resiko Bencana**:
    - Memperkuat infrastruktur kota untuk menjadi lebih tahan terhadap bencana alam.
    - Meningkatkan sistem peringatan dini dan mempersiapkan komunitas untuk menghadapi bencana.
    - Merancang dan menerapkan pembangunan kawasan perkotaan yang mempertimbangkan risiko bencana alam.

6. **Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**:
    - Mengadopsi strategi pembangunan rendah karbon dan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan kota.
    - Meningkatkan inisiatif seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi.
    - Melakukan pendidikan dan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
7. **Integrasi Pembangunan Berkelanjutan**:
    - Menyusun rencana tindakan lokal untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.
    - Memastikan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan berkala untuk memantau kemajuan dan membuat penyesuaian kebijakan.
8. **Inisiatif Ekonomi Berkelanjutan**:
    - Mengembangkan industri yang berkelanjutan dan memberikan peluang pekerjaan yang ramah lingkungan.
    - Mendorong investasi dan inovasi dalam ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi.
9. **Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan**:
    - Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
    - Menggalakkan program kewirausahaan sosial yang mempromosikan solusi berkelanjutan untuk masalah lokal.

Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Selain itu, diperlukan sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal untuk pembangunan berkelanjutan Kota Tanjungbalai.

### 2.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tanjungbalai adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam wilayah Kota Tanjungbalai pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dalam konteks global, IKLH berperan penting dalam memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya untuk memantau kualitas air dan mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan berdasarkan indikator Indeks Kualitas Air (IKA).

Perhitungan IKLH berdasarkan pemantauan kualitas lingkungan termasuk kualitas air dan udara ambien dan penghitungan tutupan lahan yang berkesinambungan memberikan dasar bagi kerja sama internasional dalam mengatasi isu-isu lingkungan global dan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kesehatan lingkungan dan keadilan sosial. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tanjungbalai tahun 2024 adalah nilai indeks 63,80 melampaui target nilai indeks 62,79. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut termasuk kategori sedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

**Tabel 2.7**
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2024**

| Variabel | IKU | IKA | IKTL | IKLH |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Indeks | 55,71 | 90,98 | 27,40 | 63,80 |
| Target | 54,01 | 87,74 | 31,74 | 62,79 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2025*

Walaupun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu indeks 62,79 tetapi masih di bawah capaian nasional (indeks 73,07) dan capaian Provinsi Sumatera Utara (indeks 69). Salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut yang masih di bawah target yang ditentukan yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan nilai indeks 27,40 dibawah target nilai indeks 31,74. IKL Kota Tanjungbalai tahun 2024 berada pada peringkat 419 dari 514

Kabupaten/Kota secara nasional dan pada peringkat 26 dari 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Nilai IKL Kota Tanjungbalai pada indeks 27,40 menunjukkan bahwa tutupan vegetasi Kota Tanjungbalai masih relatif rendah, hal tersebut berhubungan dengan RTH publik sebesar 20% masih jauh dari kondisi ideal sebagaimana ditetapkan, terutama pada area berfungsi lindung. Rendahnya tutupan vegetasi Kota Tanjungbalai juga disebabkan oleh masih rendahnya pengawasan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menerapkan ketentuan penggunaan 10 persen luas sebagai RTH pada lahan-lahan privat. Perubahan tutupan vegetasi yang relatif tinggi akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan non tutupan vegetasi di Kota Tanjungbalai juga besar pengaruhnya terhadap rendahnya niali IKL Kota tanjungbalai Tahun 2024. Sementara komponen lainnya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 yaitu indeks 55,71 telah melampaui target indeks 54.01. IKA Kota Tanjungbalai berada pada peringkat 121 dari 514 Kabupaten/Kota secara nasional dan pada peringkat 14 dari 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

Nilai IKA Kota Tanjungbalai pada indeks 55,71 yang menandakan adanya ruang signifikan untuk peningkatan dalam pengelolaan kualitas air. Nilai ini mengimplikasikan bahwa masalah seperti pencemaran air oleh limbah domestic, industri, dan pertanian masih menjadi tantangan utama. Kebijakan yang ditujukan untuk perlindungan sumber air, peningkatan system pengolahan limbah, dan edukasi masyarakat mengenai praktik pembuangan limbah yang bertanggung jawab, menjadi penting untuk diintensifkan. Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 yaitu indeks 90,98 telah melampau target indeks 87,74. IKU Kota Tanjungbalai berada pada peringkat 264 dari 514 Kabupaten/Kota secara nasional dan pada peringkat 25 dari 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

Nilai IKU Kota Tanjungbalai pada indeks 90,98 menggambarkan kualitas udara yang relatif sangat baik. Nilai ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian polusi udara dan implementasi standar emisi telah cukup efektif. Namun, tetap penting untuk mempertahankan dan meningkatkan strategi pengelolaan kualitas udara, terutama di wilayah dengan risiko polusi tinggi. Secara keseluruhan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang berada pada peringkat 354 dari 514 Kabupaten/Kota. IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2024 masih di bawah berada

pada peringkat 26 dari 33 Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara memerlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif untuk dapat meningkatkan nilai komposit dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut dan aspek-aspek lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian lebih. Integrasi kebijakan lingkungan yang menyeluruh, yang mencakup udara, air, dan tanah serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, menjadi kunci untuk meningkatkan nilai IKLH ini.

#### 2.1.1.5 Indeks Resiko Bencana

Dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan, analisis Indeks Risiko Bencana (IRB) menjadi komponen penting dalam dokumen RPJPD Kota Tanjungbalai 2025-2045. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat risiko yang dihadapi oleh Kota Tanjungbalai terhadap berbagai jenis bencana, serta kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapinya. Dengan memahami IRB, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

**Tabel 2.8**
**Indeks Risiko Bencana Kota Tanjungbalai 2024**

| No | Jenis Bencana | Skor | Kelas Resiko |
|---|---|---|---|
| **1** | Banjir | 29,24 | Tinggi |
| **2** | Tanah Longsor | 9,75 | Sedang |
| **3** | Kekeringan | 10,12 | Sedang |
| **4** | Cuaca Ekstrim | 11,83 | Tinggi |
| **5** | Gempa Bumi | 9,40 | Sedang |
| **TOTAL** | **107,26** | **Sedang** | |

Sumber: Buku IRBI 2025

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024, Kota Tanjungbalai memiliki tingkat risiko sedang dengan total skor 107,26, yang mencakup berbagai jenis bencana seperti banjir (29,24 risiko tinggi), tanah longsor (9,75, risiko sedang), kekeringan (10,12, risiko sedang), cuaca ekstrem (11,83, risiko

tinggi), dan gempa bumi (9,40, risiko sedang). Analisis ini menunjukkan bahwa Kota Tanjungbalai harus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, pengembangan sistem peringatan dini, serta perlindungan lingkungan untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang. Perlu peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana. Pendidikan dan pelatihan tentang langkah-langkah kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas, agar masyarakat dapat merespons dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat. Program-program seperti latihan evakuasi, pendidikan tentang bencana di sekolah-sekolah, dan kampanye informasi publik dapat meningkatkan ketahanan komunitas.

Kota Tanjungbalai, yang berada di dataran rendah dengan kemiringan wilayah hanya sekitar 0-3 meter di atas permukaan laut, cenderung rawan terhadap genangan air. Genangan ini dapat disebabkan oleh air hujan atau pasang surut air sungai, khususnya di sekitar daerah aliran Sungai Silau dan Sungai Asahan. Wilayah yang paling rawan bencana, khususnya banjir, berada di beberapa bagian wilayah Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, meliputi Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Pantai Johor, Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, dan Kelurahan Bunga Tanjung.

#### 2.1.1.6 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tanjungbalai adalah alat evaluasi yang mengukur tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan. Berdasarkan data Indeks  sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek ketahanan pangan - ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat Tanjungbalai.

Ketahanan Pangan Nasional tahun 2024, IKP memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ketahanan pangan di Kota Tanjungbalai, termasuk produksi lokal, distribusi pangan, akses ekonomi, serta kualitas dan keamanan pangan yang tersedia bagi masyarakat. Indeks ini sangat penting dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi, mengurangi kerawanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan IKP, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih

dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan merancang program-program yang efektif untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa mendatang.

**Tabel 2.9**
**Indeks Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai 2020-2024**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Indeks Ketahanan Pangan** | 53,21 | 54,30 | 53,20 | 70,83 | 74,59 |

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2023, Kota Tanjungbalai menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang cukup baik dengan skor 70,83, meningkat menjadi 74,59 pada tahun 2024. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun akses ekonomi terhadap pangan cukup baik, perhatian lebih harus diberikan pada aspek pemanfaatan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mengonsumsi pangan yang bergizi dan aman. Hal ini penting untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih holistik dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

### 2.1.1.7 Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, pengintegrasian penduduk menjadi suatu hal yang teramat penting mengingat penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek pembangunan, namun juga sebagai subyek pembangunan. Ketika peran sebagai "subyek" pembangunan maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya Konsep *people centered development* merupakan konsep yang mewadahi prinsip pembangunan yang berwawasan kependudukan yang meliputi beberapa komponen yakni: pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; penataan persebaran dan mobilitas penduduk; pembangunan keluarga sejahtera serta manajemen database & informasi kependudukan. Untuk itu sasaran serta program prioritas pembangunan jangka menengah ke

depan untuk urusan pengendalian penduduk harus mengacu pada prinsip dan konsep tersebut.

Kondisi penduduk Kota Tanjungbalai mengalami berbagai dinamika yang relatif menantang untuk diatasi. Sebelum berpisah dari Kabupaten Asahan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1956, dengan luas hanya 199 ha Tanjungbalai pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan kepadatan sekitar 3.090 jiwa/km2. Pada tahun 2024, Kota Tanjungbalai dihuni oleh beragam suku diantaranya; Suku Batak (Simalungun, Toba, Mandailing, Pakpak, dan Karo), Jawa, Melayu, Minang, Aceh, dan suku lainnya. Berdasarkan dari sisi agama yang dianut, sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai beragama Islam dengan jumlah 88 persen dari seluruh populasi.

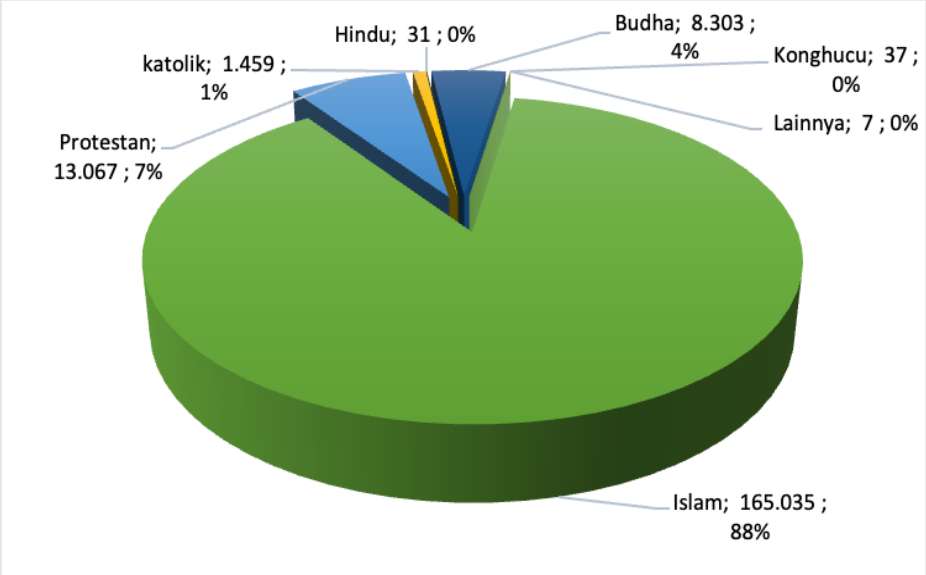


**Gambar 2.7**
**Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Tanjungbalai, 2024**
*Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025*

Jumlah penduduk laki-laki di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2020 sebesar 89.208 jiwa atau sebesar 50,68 persen dari penduduk Kota Tanjungbalai, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 87.797 jiwa atau sebesar 49,60 persen dari penduduk Kota Tanjungbalai. Selama lima tahun rasio jenis kelamin mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2024, rasio jenis kelamin sebesar 102,42, artinya bahwa dari 100 penduduk perempuan di Kota Tanjungbalai terdapat 102 hingga 103 penduduk laki-laki.

**Tabel 2.10**
**Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2020-2024**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Laki-laki** | 89.208 | 90.004 | 91.099 | 92.715 | 93.932 |
| **Perempuan** | 87.797 | 87.636 | 88.649 | 90.455 | 91.715 |
| **Rasio Jenis Kelamin** | 101,60 | 102,70 | 102,76 | 102,50 | 102,42 |

*Sumber: BPS Provsu, 2025*

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Tanjungbalai maka diketahui bahwa Kecamatan Datuk Bandar merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak yaitu pada Tahun 2024 mencapai 45.017 jiwa, disusul oleh Kecamatan Teluk Nibung dengan jumlah penduduk sebanyak 43.634 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara sebesar 16.313 jiwa. Untuk melihat persebaran penduduk pada setiap kecamatan, maka diketahui bahwa Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan wilayah dengan penduduk terpadat sebanyak 19.654,22 jiwa per kilometer. Tingkat kepadatan pada Kota Tanjungbalai memang tidak merata, dibuktikan dengan kepadatan Kecamatan Datuk Bandar hanya mencapai 2.026,88 jiwa per kilometer. Kepadatan yang tidak merata ini dapat menimbulkan permasalahan kependudukan seperti: penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, keamanan dan kesempatan kerja.

**Tabel 2.11**
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2020-2024**

| Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kepadatan 2024 (jiwa/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datuk Bandar** | 41.544 | 42.212 | 41.727 | 44.121 | 45.017 | 2.026,88 |
| **Datuk Bandar Timur** | 30.492 | 30.741 | 31.369 | 31.631 | 32.024 | 2.174,07 |
| **Tanjungbalai Selatan** | 19.277 | 19.213 | 19.362 | 19.320 | 19.337 | 10.924,86 |
| **Tanjungbalai Utara** | 16.173 | 16.141 | 16.305 | 16.277 | 16.313 | 19.654,22 |
| **Sei Tualang Raso** | 27.283 | 27.665 | 28.393 | 28.796 | 29.322 | 3.180,26 |
| **Teluk Nibung** | 41.258 | 41.668 | 42.592 | 43.025 | 43.634 | 3.858,00 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2021-2025*

Dominasi usia penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelas usia, jika piramida penduduk tebal di bawah berarti lebih banyak penduduk usia muda, namun jika tebal diatas maka lebih banyak penduduk usia tua. Berdasarkan tabel diketahui bahwa penduduk Kota Tanjungbalai didominasi oleh penduduk usia muda. Sampai dengan periode 2024 diketahui penduduk usia 5-9 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak dibanding usia penduduk Kota Tanjungbalai lainnya yang mencapai 18,056 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.088 jiwa dan perempuan sebanyak 8.968 jiwa, Hal tersebut menjelaskan bahwa saat ini Kota Tanjungbalai sedang dapat menikmati bonus demografi jika disertai dengan angka pengangguran yang rendah, Pada grafik juga terlihat bahwa jumlah penduduk usia 70–75 sangat kecil menunjukkan bahwa angka harapan hidup pada Kota Tanjungbalai masih relatif rendah.

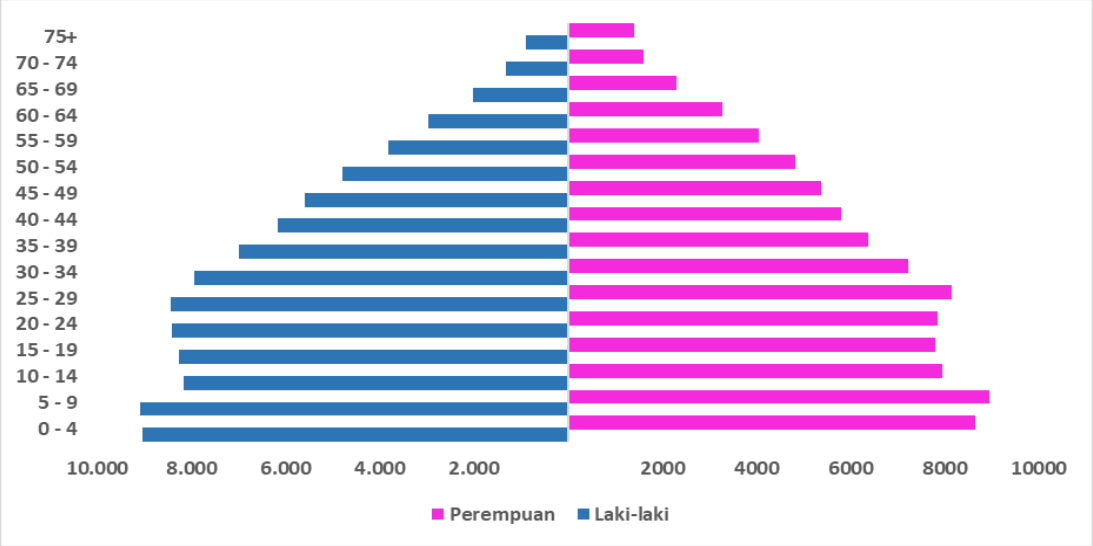


**Gambar 2.8**
**Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2024**
*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

Penduduk sebagai modal utama pembangunan Kota Tanjungbalai selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Tanjungbalai sebanyak 168,052 jiwa meningkat menjadi 178,387 jiwa pada Tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 6,14 persen, Pertambahan penduduk otomatis menambah kepadatan penduduk Kota Tanjungbalai, pada Tahun 2016 kepadatan penduduk sebesar 2,777 jiwa per km meningkat menjadi 2,948 jiwa per km.

**Tabel 2.12**
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| Tahun | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|---|
| **2020** | 176.027 | 1,27 | 1632,45 |
| **2021** | 177.640 | 1,22 | 1647,41 |
| **2022** | 179.748 | 1,20 | 2992,31 |
| **2023** | 183.170 | 1,41 | 3.049,17 |
| **2024** | 185.647 | 1,39 | 3.090,41 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

**Proyeksi Penduduk**

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai pada tahun 2026 diperkirakan akan mencapai 191.976 jiwa. Proyeksi ini menunjukkan kenaikan yang konsisten seiring dengan perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, pada tahun 2030, diperkirakan akan terjadi lonjakan menjadi 199.300 jiwa, yang menandakan pertumbuhan penduduk sekitar 5.9% dari tahun 2026.

**Tabel 2.13**
**Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai 2026-2030**

| No. | Wilayah | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datuk Bandar | 46.580 | 47.252 | 47.929 | 48.601 | 49.270 |
| 2 | Datuk Bandar Timur | 32.714 | 33.020 | 33.321 | 33.616 | 33.900 |
| 3 | Tanjung Balai Selatan | 19.372 | 19.396 | 19.415 | 19.428 | 19.431 |
| 4 | Tanjung Balai Utara | 16.382 | 16.419 | 16.452 | 16.479 | 16.499 |
| 5 | Sei Tualang Raso | 30.239 | 30.636 | 31.033 | 31.427 | 31.817 |
| 6 | Teluk Nibung | 44.664 | 45.094 | 45.523 | 45.945 | 46.354 |
| | Tanjung Balai | **191.976** | **193.843** | **195.700** | **197.524** | **199.300** |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025 (diolah)*

Trend pertumbuhan ini menegaskan kebutuhan untuk memahami dinamika demografis dalam kerangka waktu yang panjang. Pentingnya proyeksi ini terletak pada kemampuan pemerintah dan pemangku kebijakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memprediksi jumlah penduduk dan kebutuhan sarana

serta prasarana yang sesuai, pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk akan diimbangi dengan peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Pendekatan proaktif ini juga mendukung upaya dalam memitigasi potensi masalah seperti kepadatan penduduk, pengangguran, dan tekanan pada sumber daya alam. Dengan demikian, proyeksi penduduk menjadi komponen kritikal dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tanjungbalai dan memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi yang akan datang.

Namun, peningkatan ini juga memberikan indikasi akan kebutuhan untuk perencanaan yang matang dalam aspek-aspek infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan publik lainnya. Peningkatan populasi yang signifikan ini akan menuntut peningkatan kapasitas layanan publik dan infrastruktur, serta penanganan masalah lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat dari tekanan demografis.
Kebijakan dan strategi pembangunan yang proaktif diperlukan untuk mengelola pertumbuhan ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi penduduk Kota Tanjungbalai. Ini termasuk peningkatan investasi dalam pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan pengembangan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial; dan (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio penduduk miskin, Kinerja indikator-indikator tersebut mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

**1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi; (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per kapita penduduk dan (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi.

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit), Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

**Tabel 2.14**
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2020—2024 (Miliar Rupiah)**

| LAPANGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan** | 1.467,57 | 1.488,62 | 1.561,92 | 1.634,94 | 1.673,21 |
| **B. Pertambangan & Penggalian** | 166,87 | 172,79 | 182,50 | 192,09 | 200,17 |
| **C. Industri Pengolahan** | 1.798,54 | 2.000,08 | 2.145,83 | 2.263,76 | 2.560,33 |
| **D. Pengadaan Listrik dan Gas** | 62,31 | 67,29 | 73,12 | 74,44 | 77,19 |
| **E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang** | 15,06 | 15,10 | 15,39 | 16,04 | 17,17 |
| **F. Konstruksi** | 1.428,58 | 1.491,62 | 1.608,38 | 1.712,51 | 1.877,18 |
| **G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda** | 2.071,00 | 2.185,01 | 2.519,70 | 2.700,38 | 2.985,87 |

| LAPANGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| **H. Transportasi & Pergudangan** | 522,06 | 536,40 | 602,28 | 685,36 | 749,04 |
| **I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | 192,65 | 194,79 | 210,6, | 231,27 | 251,98 |
| **J. Informasi dan Komunikasi** | 80,14 | 87,93 | 94,54 | 100,85 | 109,99 |
| **K. Jasa Keuangan & Asuransi** | 154,71 | 164,46 | 181,58 | 195,82 | 203,65 |
| **L. Real Estate** | 295,36 | 305,03 | 321,04 | 336,61 | 360,8 |
| **M.N. Jasa Perusahaan** | 27,20 | 20,91 | 31,16 | 34,17 | 36,14 |
| **O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial** | 579,72 | 578,67 | 573,59 | 648,84 | 695,76 |
| **P. Jasa Pendidikan** | 129,91 | 134,30 | 142,68 | 152,66 | 164,08 |
| **Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial** | 77,19 | 78,54 | 83,84 | 91,28 | 101,81 |
| **R.S.T.U. Jasa Lainnya** | 102,67 | 104,19 | 115,99 | 129,49 | 143,36 |
| **Total** | **9.180,54** | **9.632,70** | **10.466,70** | **11.209,49** | **12.207,74** |

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, dan bertujuan untuk melihat sebaran struktur perekonomian, Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa lapangan usaha pembentuk PDRB terbesar di Kota Tanjungbalai adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda sebesar Rp, 1,58 triliun kemudian disusul oleh Industri Pengolahan sebesar Rp, 1,36 triliun.

**Tabel 2.15**
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Miliar Rupiah)**

| LAPANGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan** | 946,42 | 948,74 | 968,26 | 996,31 | 996,2 |
| **B. Pertambangan & Penggalian** | 123,97 | 126,23 | 129,28 | 133,65 | 137,67 |

| LAPANGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| **C. Industri Pengolahan** | 1.120,94 | 1.172,75 | 1.205,78 | 1.260,24 | 1.365,35 |
| **D. Pengadaan Listrik dan Gas** | 40,25 | 43,13 | 45,92 | 46,42 | 48,84 |
| **E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang** | 10,44 | 10,34 | 10,46 | 10,77 | 11,19 |
| **F. Konstruksi** | 839,51 | 851,46 | 868,87 | 907,46 | 958,41 |
| **G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda** | 1.275,23 | 1.323,48 | 1.426,72 | 1.500,72 | 1.588,42 |
| **H. Transportasi & Pergudangan** | 352,51 | 355,24 | 379,15 | 401,34 | 421,99 |
| **I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | 139,98 | 141,16 | 149,4 | 161,36 | 169,6 |
| **J. Informasi dan Komunikasi** | 71,24 | 76,33 | 80,29 | 84,65 | 88,78 |
| **K. Jasa Keuangan & Asuransi** | 102,78 | 105,41 | 109,37 | 115 | 117,05 |
| **L. Real Estate** | 188,51 | 189,71 | 195,44 | 202,54 | 208,85 |
| **M.N. Jasa Perusahaan** | 18,18 | 18,34 | 19,66 | 20,6 | 21,27 |
| **O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial** | 333,22 | 332,78 | 326,79 | 359,14 | 370,43 |
| **P. Jasa Pendidikan** | 94,71 | 97,49 | 103,19 | 109,42 | 113,28 |
| **Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial** | 44,83 | 45,1 | 47,42 | 48,83 | 51,94 |
| **R.S.T.U. Jasa Lainnya** | 60,48 | 61,12 | 65,04 | 70,3 | 75,08 |
| **Total** | **5.763,21** | **5.898,81** | **6.131,04** | **6.428,77** | **6.744,35** |

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sama halnya seperti PDRB atas dasar harga berlaku maka lapangan usaha pembentuk PDRB terbesar di Kota Tanjungbalai adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda sebesar Rp.1,58 triliun kemudian disusul oleh Industri Pengolahan sebesar Rp, 1,36 triliun.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian

dalam selang waktu tertentu, Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja dan kesehatan ekonomi suatu daerah. Di Kota Tanjungbalai, analisis pertumbuhan ekonomi selama periode 2019-2023 memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, kondisi global, dan perubahan lokal. Grafik berikut ini menyajikan data pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, yang mencerminkan upaya pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 serta pencapaian dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Analisis ini penting untuk memahami konteks ekonomi Tanjungbalai dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.

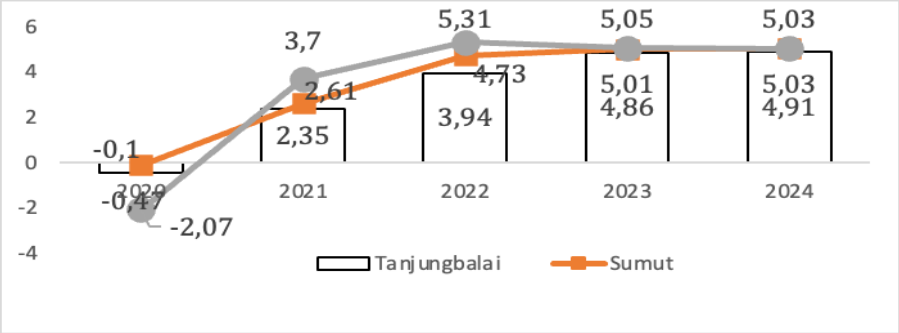


**Gambar 2.9**
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010, 2020-2024**
*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu mengalami pertumbuhan yang melambat pada tahun 2020 dan akselerasi pada tahun 2021 2022, 2023 dan 2024. Sepanjang tahun 2021 sampai 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai selalu berada di bawah pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan percepatan pemulihan ekonomi di Tanjungbalai dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,86 persen dan 4,91 persen. Meskipun pertumbuhan ini sedikit di bawah tingkat provinsi dan nasional, pencapaian ini

menandakan stabilitas dalam pemulihan ekonomi dan keberlanjutan kebijakan yang mendukung pertumbuhan. Fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan UMKM menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, upaya diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tren Sumatera Utara dan Nasional menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dan tingkat nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi Tanjungbalai mencapai 2,35 persen, meskipun masih di bawah tingkat provinsi (2,61 persen) dan nasional (3,69 persen). Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sebesar 4,91 persen masih di bawah provinsi dan nasional dengan masing-masing capaian sebesar 5,03 persen. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perbedaan ini, termasuk:

a. Dinamika Ekonomi Lokal: Kota Tanjungbalai mungkin lebih terpengaruh oleh dinamika ekonomi lokal dan kegiatan ekonomi yang spesifik, yang tidak sepenuhnya selaras dengan tren provinsi atau nasional.
b. Sektor Unggulan: Perbedaan sektor unggulan dan struktur ekonomi di Tanjungbalai dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan.
c. Kebijakan Daerah: Kebijakan dan inisiatif pemerintah kota yang berbeda dari kebijakan provinsi atau nasional dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.16**
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2020– 2024**

| LAPANGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan** | -0,76 | 0,24 | 2,06 | 2,90 | -0,01 |
| **B. Pertambangan & Penggalian** | -1,08 | 1,82 | 2,42 | 3,38 | 3,01 |
| **C. Industri Pengolahan** | 1,89 | 4,62 | 2,82 | 4,52 | 8,34 |
| **D. Pengadaan Listrik dan Gas** | 3,38 | 7,15 | 6,47 | 1,1 | 5,21 |
| **E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang** | 1 | -0,99 | 1,12 | 3,03 | 3,86 |
| **F. Konstruksi** | -4,63 | 1,42 | 2,05 | 4,44 | 5,61 |

| LAPANGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| **G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda** | -0,18 | 3,78 | 7,80 | 5,19 | 5,84 |
| **H. Transportasi & Pergudangan** | -0,5 | 0,78 | 6,73 | 5,85 | 5,15 |
| **I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | -0,53 | 0,84 | 5,84 | 8,01 | 5,1 |
| **J. Informasi dan Komunikasi** | 6,17 | 7,15 | 5,18 | 5,43 | 4,88 |
| **K. Jasa Keuangan & Asuransi** | 0,84 | 2,56 | 3,75 | 5,15 | 1,78 |
| **L. Real Estate** | 0,57 | 0,64 | 3,02 | 3,64 | 3,11 |
| **M.N. Jasa Perusahaan** | -1,71 | 0,85 | 7,21 | 4,77 | 3,27 |
| **O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial** | -0,32 | -0,13 | -1,8 | 9,9 | 3,14 |
| **P. Jasa Pendidikan** | 1,52 | 2,94 | 5,85 | 6,03 | 3,53 |
| **Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial** | -1,46 | 0,61 | 5,14 | 2,97 | 6,37 |
| **R.S.T.U, Jasa Lainnya** | -1,17 | 1,06 | 6,42 | 8,08 | 6,81 |
| **Total** | **-0,47** | **2,35** | **3,94** | **4,86** | **4,91** |

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Perekonomian Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 mengalami akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tanjungbalai tahun 2023 mencapai 4,86 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 3,94 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,19 persen, Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 4,52 persen, Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 4,44 persen dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2.90 persen serta lapangan usaha lainnya.

Strategi kebijakan kedepan dalam menanggapi tren pertumbuhan ekonomi ini, strategi kebijakan yang dapat diadopsi meliputi:

a. Penguatan Sektor Strategis: Fokus pada penguatan sektor-sektor strategis di Tanjungbalai, termasuk perikanan, pariwisata, dan perdagangan.
b. Diversifikasi Ekonomi: Diversifikasi kegiatan ekonomi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi di sektor tertentu.
c. Investasi Infrastruktur: Meningkatkan investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas.

d. Kapasitas *Resiliensi*: Membangun kapasitas resiliensi ekonomi lokal untuk menghadapi guncangan ekonomi global atau nasional.

Struktur ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2024 sebagian besar dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, dan disusul oleh lapangan usaha kontruksi, Sementara peranan lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, lapangan usaha jasa perusahaan serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB merupakan konstribusi terkecil, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.17**
**Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| LAPANGAN USAHA | DISTRIBUSI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| **A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan** | 16,08 | 15,45 | 14,92 | 14,67 | **13,71** |
| **B. Pertambangan & Penggalian** | 1,82 | 1,79 | 1,74 | 1,71 | **1,64** |
| **C. Industri Pengolahan** | 19,59 | 20,76 | 20,5 | 20,2 | **20,97** |
| **D. Pengadaan Listrik dan Gas** | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 0,66 | **0,63** |
| **E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang** | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | **0,14** |
| **F. Konstruksi** | 15,56 | 15,48 | 15,37 | 15,28 | **15,38** |
| **G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda** | 22,56 | 22,68 | 24,07 | 24,09 | **24,46** |
| **H. Transportasi & Pergudangan** | 5,69 | 5,57 | 5,75 | 6,11 | **6,14** |
| **I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | 2,1 | 2,02 | 2,01 | 2,06 | **2,06** |
| **J. Informasi dan Komunikasi** | 0,87 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | **0,9** |
| **K. Jasa Keuangan & Asuransi** | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | **1,67** |
| **L. Real Estate** | 3,22 | 3,17 | 3,07 | 3 | **2,96** |
| **M.N. Jasa Perusahaan** | 0,3 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | **0,3** |
| **O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial** | 6,31 | 6,01 | 5,48 | 5,79 | **5,7** |
| **P. Jasa Pendidikan** | 1,42 | 1,39 | 1,36 | 1,36 | **1,34** |
| **Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial** | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | **0,83** |

| LAPANGAN USAHA | DISTRIBUSI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| **R.S.T.U. Jasa Lainnya** | 1,12 | 1,08 | 1,11 | 1,16 | **1,17** |
| **Total** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

**4. PDRB Per kapita**

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi, PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, PDRB per kapita Kota Tanjungbalai mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Perkembangan PDRB per kapita tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.18**
**PDRB ADHB Per Kapita Kota Tanjungbalai (Juta Rupiah), 2020-2024**

| No | Deskripisi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk (jiwa) | 176.027 | 177.640 | 179.748 | 183.170 | 185.647 |
| 2 | PDRB ADHB (juta rupiah) | 9.180.540 | 9.632.700 | 10.466.700 | 11.209.490 | 12.207.740 |
| **3** | **PDRB Per Kapita (juta rupiah)** | 52,15 | 54,23 | 58,23 | 61,2 | 65,76 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai juga meningkat dari 176.027 jiwa pada tahun 2020 menjadi 185.647 jiwa pada tahun 2024. Dengan peningkatan jumlah penduduk ini, PDRB per kapita ADHB meningkat dari Rp 52,15 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 65,76 juta pada tahun 2024, Peningkatan PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai tidak hanya sekedar ekspansi ekonomi tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mengelola pertumbuhan ekonomi

sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita meskipun jumlah penduduk terus bertambah.

**5. Tingkat Kemiskinan**

Grafik berikut menggambarkan tren jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini memberikan wawasan mengenai efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Dengan melihat perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun, kita dapat memahami dinamika kemiskinan di Kota Tanjungbalai dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan keberlanjutan penurunan angka kemiskinan di masa depan.

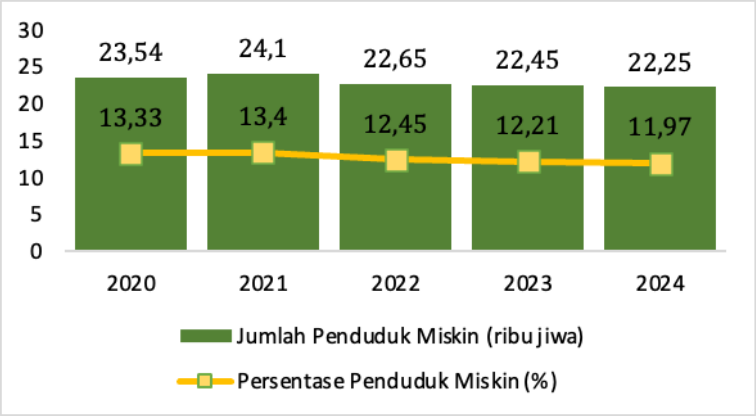


**Gambar 2.10**
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2020-2024**
*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23.540 orang dengan persentase 13,33 persen. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 24.100 orang dengan persentase 13,40 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 22.650 orang dengan persentase 12,45%, dan tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 22.250 orang dan persentase menjadi 11,97 persen. Penurunan yang konsisten ini menunjukkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan

yang diterapkan oleh pemerintah Kota Tanjungbalai, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, upaya untuk mengurangi kemiskinan harus terus dilanjutkan dengan fokus pada keberlanjutan program-program yang ada serta pengembangan inisiatif baru yang lebih inklusif dan tepat sasaran untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat lebih mendalam pada angka kemiskinan juga terlihat bahwa seiring pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga berefek positif pada pengurangan angka kemiskinan. Terlepas dari indikasi positif dari dampak ekonomi ini, di sisi lain hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengurangan angka kemiskinan terjadi karena perubahan kue ekonomi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa dibutuhkannya metode penanganan kemiskinan yang bersifat lebih "*out of the box*" dalam artian melalui cara-cara yang lebih spesifik dan inovatif.

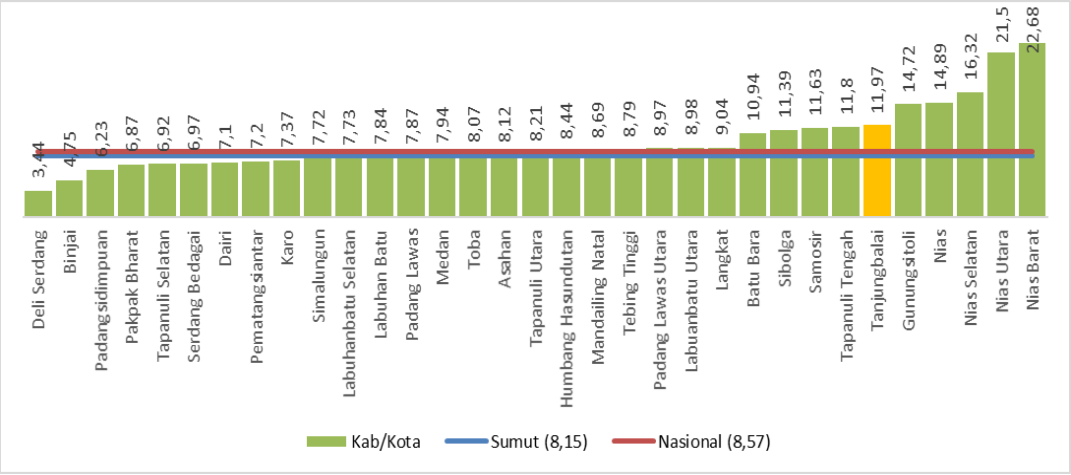


**Gambar 2.11**
**Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2024**
*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025*

Posisi tingkat kemiskinan Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Prov. Sumatera Utara maka Kota Tanjungbalai menempati posisi keenam tertinggi. Diketahui bahwa Deli Serdang merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,44 persen, sedangkan Nias Barat dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 22,68 persen.

**6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Menurut BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan,

Indikator lainnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

**Tabel 2.19**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 1,69 | 1,72 | 1,81 | 1,34 | 1,6 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,25 | 0,33 |
| Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | 444.125 | 482.602 | 515.456 | 554.065 | 592.573 |

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Tabel di atas menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mencapai 1,69 turun menjadi 1,60 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan atau menunjukkan ekonomi penduduk miskin semakin jauh dari terpuruk. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan selama lima tahun yang mengalami fluktuasi, diketahui bahwa P2 Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 sebesar 0,25 meningkat menjadi 0,33 pada tahun 2024.

**7. Gini Rasio**

Gini rasio adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, Besar gini rasio dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 1, Jika gini rasio sama dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna (dengan kata lain tidak terjadi

ketimpangan distribusi pendapatan), Jika gini rasio sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan tidak merata secara sempurna, Untuk lebih jelasnya, standar penilaian gini rasio dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria (*Heri Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995*) sebagai berikut:

- GR < 0,4 : ketimpangan rendah
- 0,4 < GR < 0,5 : ketimpangan sedang
- GR > 0,5 : ketimpangan tinggi

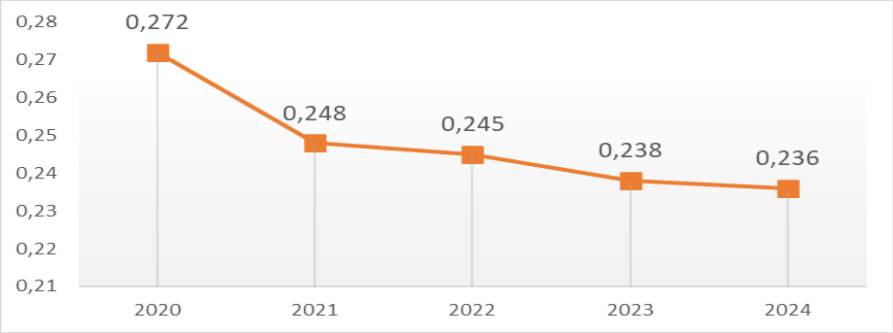


**Gambar 2.12**
**Gini Ratio Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025*

Indeks Gini membantu menilai kesenjangan sosial dan ekonomi, serta efektivitas kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya. Dengan memahami indeks ini, pemerintah dapat merancang kebijakan untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mencapai pembangunan yang lebih inklusif. Indeks Gini memberikan pandangan penting untuk mengarahkan upaya menuju keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bila dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kota Tanjungbalai cukup merata yang ditunjukkan oleh nilai koefisien gini (gini ratio) Kota Tanjungbalai dari tahun 2020—2024 berada dibawah 0,4, artinya tingkat ketimpangan rendah yang ditunjukkan pada grafik berikut.

Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meskipun masih terdapat variasi yang menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat.

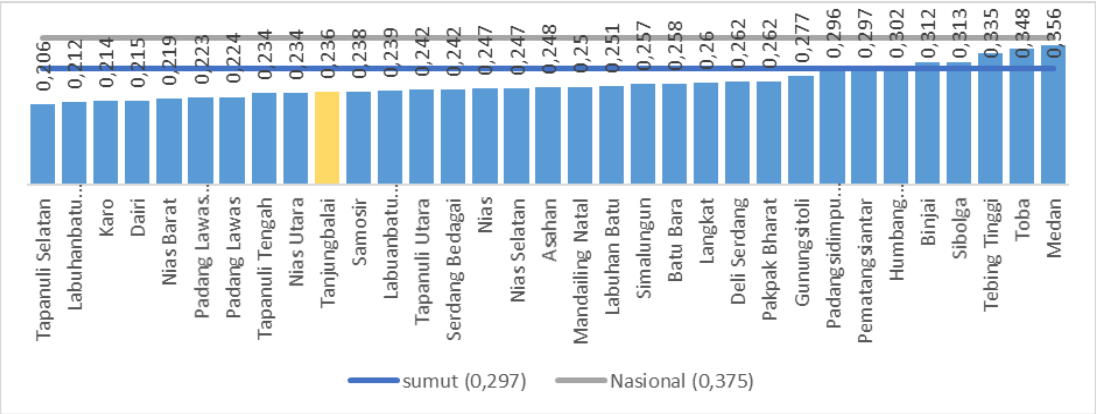


**Gambar 2.13**
**Gini Ratio Kota Tanjungbalai, Provinsi dan Nasional, 2024**
*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025*

Posisi gini rasio Kota Tanjungbalai tidak terlalu tinggi bila dibandingkan kabupaten/kota lain. Posisi ketimpangan tertinggi adalah Kota Medan sebesar 0,356 dan terendah Kabupaten Tapanuli Selatant sebesar 0,206, sedangkan Kota Tanjungbalai berada pada posisi kesepuluh terendah sebesar 0,236. Posisi gini rasio Kota Tanjungbalai juga masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

**8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM juga merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan dan Standar hidup layak,

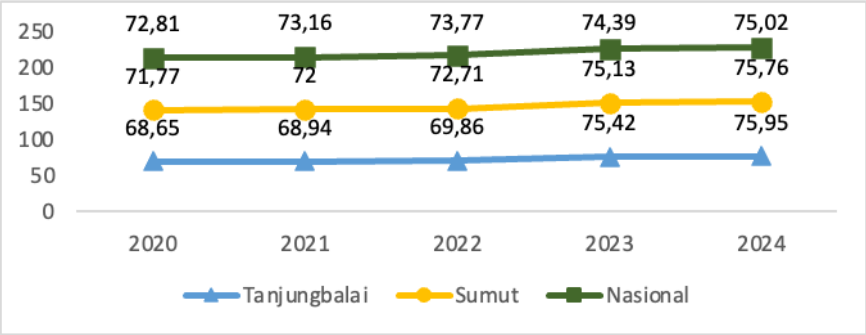


**Gambar 2.14**
**Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, Sumut dan Nasional, 2020-2024**
*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025*

IPM Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mencapai 68,65 meningkat menjadi 75,95 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut sudah cukup baik karena angka IPM Kota Tanjungbalai sudah berada di atas rata-rata angka provinsi dan nasional. Pada tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai angka 71,77 bahkan nasional mencapai 72,81 berada di atas capaian Kota Tanjungbalai, tetapi pada Tahun 2024 Kota Tanjungbalai dapat mengejar capaian indikator ini karena capaian Sumut sebesar 75,76 dan nasional sebesar 75,02. Hal tersebut mengindikasi bahwa capaian pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai sudah membaik.

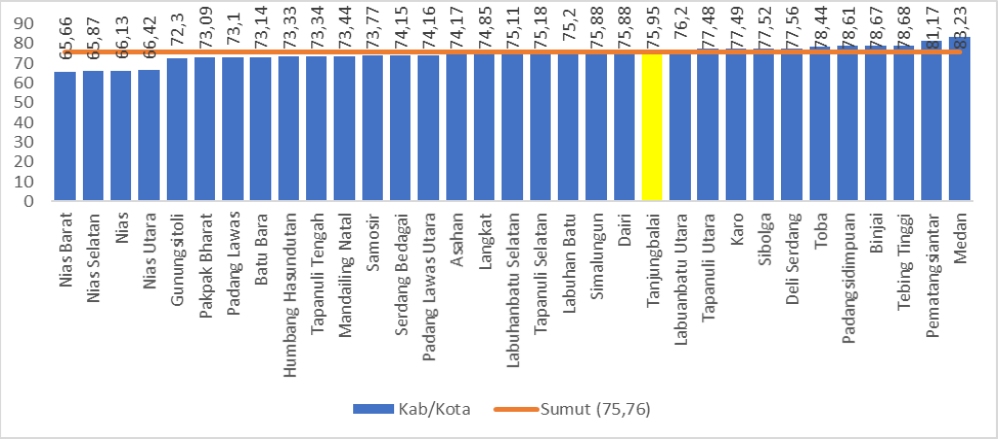


**Gambar 2.15**
**IPM Kabupaten/Kota, 2024**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025*

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa posisi relatif IPM Kota Tanjungbalai berada pada peringkat keduabelas tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tanjung Balai pada tahun 2024 telah mencapai 75,95 dengan status "tinggi". Pada tingkat Kabupaten/Kota, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Medan dengan IPM sebesar 83,23 dan termasuk kategori IPM 'Sangat Tinggi', Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nias Barat yaitu sebesar 65,66. Pengukuran IPM di Indonesia mengacu pada tiga dimensi yang diperkenalkan UNDP, yang terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

**9. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Indikator utama makro ekonomi lain yang perlu diperhatikan untuk melihat kinerja ekonomi Kota Tanjungbalai adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT mengukur persentase tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan namun belum menemukan pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan rendahnya pertumbuhan ekonomi, kesulitan penciptaan lapangan kerja, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan tingkat pengangguran yang rendah menandakan pertumbuhan ekonomi yang positif dan kesehatan pasar tenaga kerja. Analisis TPT membantu pemerintah dan pengambil keputusan ekonomi merancang kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

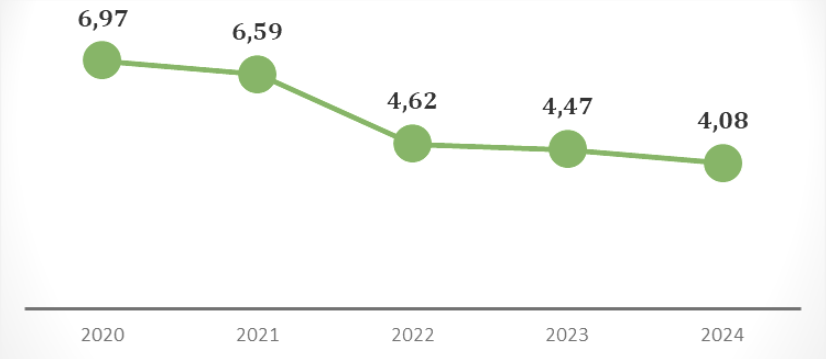


**Gambar 2.16**
**Tingkat Pengangguran di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**
*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Grafik menunjukkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020 hingga 2024. Terdapat penurunan TPT dari tahun 2020 dengan angka 6,97 persen menurun signifikan pada tahun 2022 dengan angka 4,62 persen dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 4.08 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja dan keberhasilan program pengurangan pengangguran.

Penurunan TPT pada tahun 2024 menjadi 4,08 persen menandakan keberhasilan kebijakan dan inisiasi program yang diambil untuk memperbaiki pasar tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ini bisa mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan efektivitas program intervensi pasar

tenaga kerja, seperti pelatihan kejuruan, subsidi upah, atau insentif bagi perusahaan untuk perekrutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Pemulihan Ekonomi: Pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang memulihkan sektor-sektor ekonomi penting dan penciptaan lapangan kerja.
- Program Pemerintah: Implementasi dari berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran.
- Fleksibilitas Pasar Kerja: Peningkatan fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja lebih efisien. Strategi kebijakan kedepan:
- Fokus pada Pendidikan dan Pelatihan: Melanjutkan dan memperkuat program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
- Dukungan Terhadap Industri Penggerak: Memberikan dukungan khusus pada industri yang menjadi penggerak utama perekonomian untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
- Peningkatan Investasi: Mengundang investasi dalam bidang yang memiliki potensi tinggi untuk pertumbuhan lapangan kerja seperti teknologi, energi terbarukan, dan sektor jasa.
- Reformasi Regulasi: Melakukan reformasi regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki iklim bisnis.
- Program Insentif: Menyediakan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan angkatan kerja baru, termasuk insentif fiskal atau non-fiskal.

Dari perspektif lain, pengurangan tingkat pengangguran menjadi indikator positif terhadap dinamika ekonomi lokal dan efektivitas kebijakan pemerintah kota dalam menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasional. Fenomena ini mungkin juga diakibatkan oleh pertumbuhan sektor ekonomi tertentu yang memicu penyerapan tenaga kerja, diversifikasi ekonomi, serta investasi yang masuk ke kota Tanjungbalai.

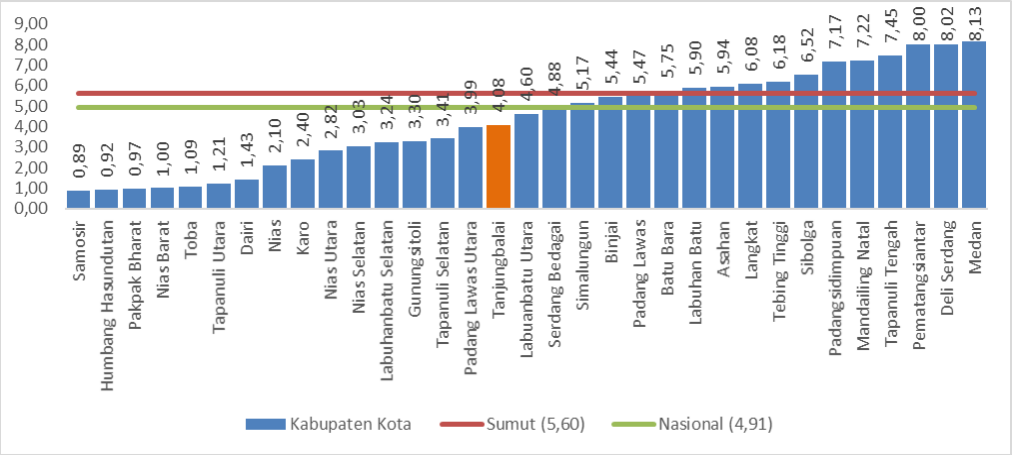


**Gambar 2.17**
**Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, 2025**
*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tanjungbalai relatif tidak tinggi karena berada pada posisi keenambelas terendah dan berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

**Tabel 2.20**
**Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungbalai, 2024**

| No | Lapangan Pekerjaan Utama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Pertanian & perikanan | **16.613** |
| 2. | Industri, pengadaan listrik, air, pengelolaan sampah dan konstruksi | **12.222** |
| 3. | Perdagangan, transportasi, penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi dan Jasa-jasa | **60.646** |
| **Jumlah** | | **89.481** |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Lapangan pekerjaan yang memadai dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan lapangan kerja juga merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Dilihat berdasarkan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai bekerja di sektor jasa yakni sebanyak 60.646 orang atau sebesar

67,78 persen disusul sektor pertanian dan perikanan sebesar 16.613 orang atau sebesar 18,57 persen, dan yang terendah adalah sektor industri, pengadaan listrik, air, pengelolaan sampah dan konstruksi sebanyak 12.222 orang atau 13,66 persen. Kelangkaan lapangan pekerjaan dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara kemampuan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penduduk usia kerja yang semakin bertambah. Membuka lapangan pekerjaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan

**10. Pengeluaran per Kapita**

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

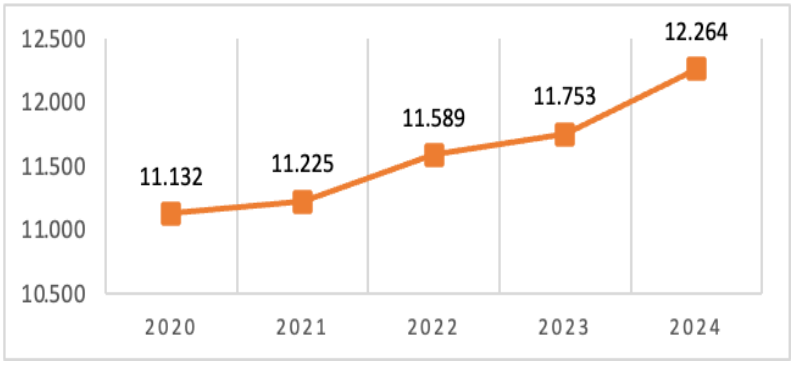


**Gambar 2.18**
**Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun (ribu rupiah), 2020-2024**

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk Kota Tanjung Balai telah mencapai Rp 11.132.000 per tahun, meningkat menjadi Rp.12.264.000 pertahun pada tahun 2024. Kemampuan daya beli masyarakat Kota Tanjung Balai selama periode 2021-2024 terus meningkat meskipun tidak signifikan, dengan rata rata pertumbuhan sekitar 2,46 persen per tahun

### 2.1.2.2 Fokus Kesehatan untuk Semua

Fokus kesehatan untuk semua mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan penyakit, peningkatan layanan kesehatan primer, hingga penguatan sistem kesehatan nasional, dengan tujuan mencapai Indonesia sehat dan sejahtera. Selain itu, juga menjelaskan kondidi Kesehatan seluruh penduduk pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

**1. Umur Harapan Hidup**

Umur Harapan Hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup.

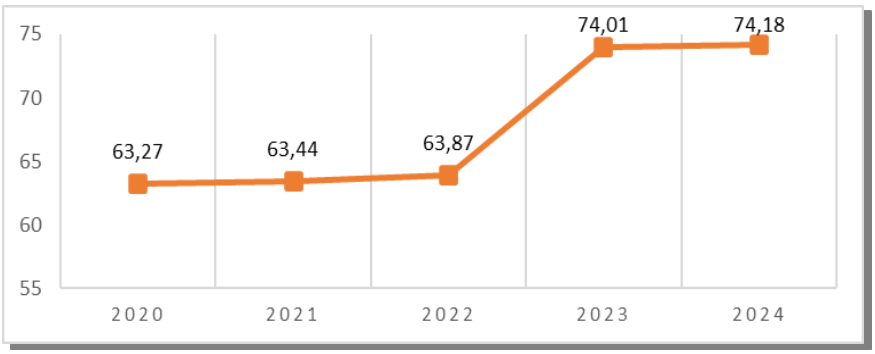


**Gambar 2.19**
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Pada gambar terlihat bahwa UHH Kota Tanjungbalai periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Peningkatan UHH Kota Tanjung Balai pada tahun 2024 meningkat 0,17 poin yaitu mencapai 74,18 tahun, artinya setiap bayi di Kota Tanjung Balai yang dilahirkan pada tahun 2024, diperkirakan hidup sampai usia 74,18 tahun. Selama tahun 2020-2024, umur harapan hidup saat lahir di Kota Tanjung Balai tumbuh rata-rata 0,37 persen per tahun.

Usia Harapan Hidup (UHH) di perkotaan, merupakan rata-rata harapan hidup penduduk di kota-kota. Berikut tabel yang menunjukkan capaian Angka Harapan Hidup di perkotaan di Provinsi Sumatera utara.

**Tabel 2.21**
**Usia Harapan Hidup di Perkotaan, 2024**

| No | Usia Harapan Hidup | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Sibolga | 74,19 |
| 2 | Tanjungbalai | 74,18 |
| 3 | Pematang Siantar | 75,03 |
| 4 | Tebing Tinggi | 74,29 |
| 5 | Medan | 75,09 |
| 6 | Binjai | 74,45 |
| 7 | Padangsidempuan | 73,73 |
| 8 | Gunungsitoli | 74,23 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Capaian usia harapan hidup pada masing-masing kota tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Medan merupakan kota yang memiliki UHH tertinggi sekitar 75,09 tahun, sedangkan UHH terendah adalah Kota Padangsidempuan dengan capaian sebesar 73,73 tahun. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**2. Pravalensi Stunting**

Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara.

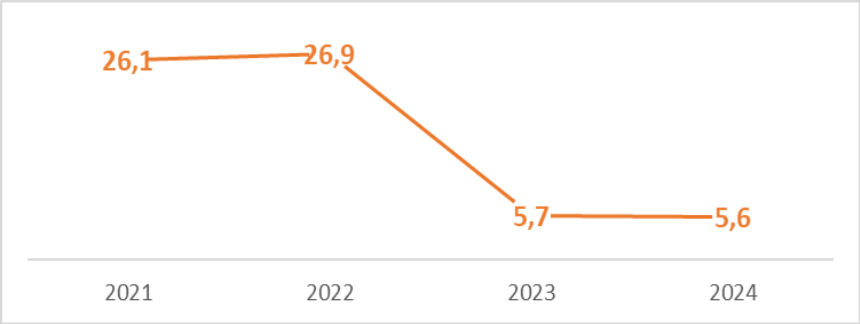


**Gambar 2.20**
**Pravalensi Stunting Kota Tanjungbalai, 2021-2024**

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai berhasil menurunkan prevalensi angka stunting menjadi 5,60 persen dari sebelumnya sebesar 5,70 persen. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota, Forkopimda dan OPD terkait yang telah bersama-sama saling bekerja, serta dukungan program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting. Untuk mengejar target penurunan stunting di Kota Tanjungbalai dikisaran 5,70-5,50 maka Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungbalai bersama Forkopimda melaksanakan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Tanjungbalai baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

### 2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, sedangkan pendidikan yang merata adalah dasar yang penting dalam mengembangkan kapasitas manusia, mendorong mobilitas sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Diharapkan kondisi Pendidikan masyarakat memiliki peran sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat.

**1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar (SD)/ madrasah ibtidaiyah (MI) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP)/ madrasah tsanawiyah (MTs). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk untuk menempuh pendidikan formal yang dihitung untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas.

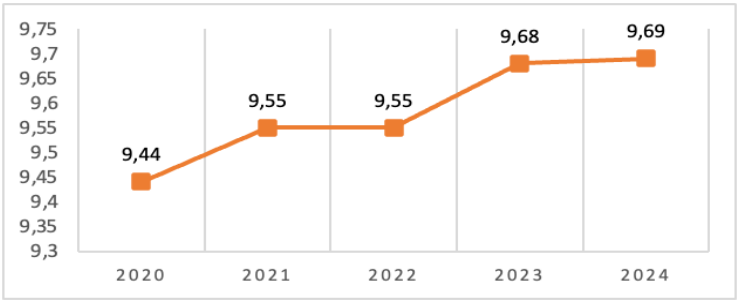


**Gambar 2.21**
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kota Tanjung Balai selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat. Sampai dengan tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Tanjung Balai telah mencapai 9,69 tahun atau setara dengan tamat SLTP, Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,15 tahun atau mencapai Diploma I.

**2. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS Kota Tanjungbalai, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Koefisien Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan, sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

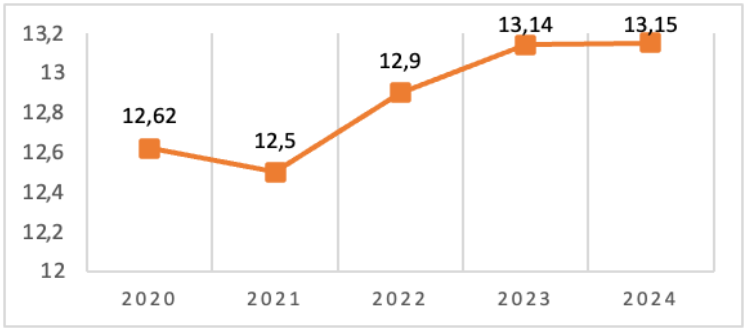


**Gambar 2.22**
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Pada tahun 2020 capaian harapan lama sekolah di Kota Tanjung Balai sebesar 12,50 tahun, secara konsisten terus meningkat menjadi 13,15 tahun pada tahun 2024. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah, pada tahun

2020 sebesar 9,44 tahun meningkat hingga 9,69 tahun pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah sebesar 1,28 persen per tahun, lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang tumbuh 0,66 persen per tahun.

Tren positif dalam Indeks Pendidikan tersebut menandakan adanya komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah kota dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan standar pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Ini adalah indikator penting yang menggambarkan upaya Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, yang berpotensi membawa dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi daerah.

### 3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasar data Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023, IPLM Kota Tanjungbalai mencatatkan skor diangka 57,08 dengan faktor penentu sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.22**

**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tanjungbalai 2024**

| No | Unsur (UPLM) | Skor |
|---|---|---|
| 1 | Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) | 0,7792 |
| 2 | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (IPLM2) | 0,2447 |
| 3 | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) | 1,0000 |
| 4 | Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4) | 0,1684 |
| 5 | Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5) | 1,0000 |
| 6 | Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) | 1,0000 |
| 7 | Jumlah Pemustaka (UPLM7) | 1,0000 |
| **INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT** | | 74,18 |

Sumber: *BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

### 2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kondisi perlindungan sosial yang adaptif menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih Tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

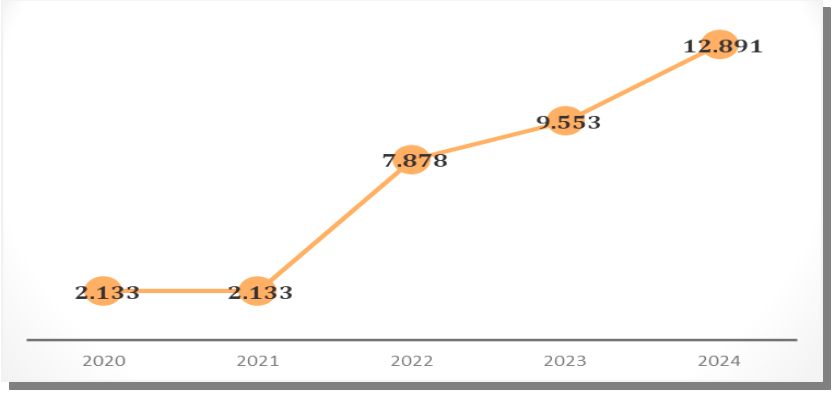


**Gambar 2.23**
**Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, 2020-2024**
*Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, 2025*

Program BPJS ketenagerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi pekerja dan keluarganya dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti Sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat resiko sosial. Selama lima tahun terakhir jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan meningkat dari 2.133 pekerja pada tahun 2020 menjadi 12.891 pekerja pada tahun 2024.

**Tabel 2.23**
**Persentase RT menurut Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki atau Diterima, 2023-2024**

| Jenis Jaminan Sosial | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Jaminan Pensiun/Veteran | 10,93 | 5,92 |
| Jaminan Hari Tua | 6,41 | 4,79 |
| Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja | 5,04 | 3,59 |
| Jaminan/Asuransi Kematian | 4,97 | 5,05 |
| Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) | 0,55 | 0,37 |
| Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) | 1,41 | 0,87 |

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Program BPJS meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua ( JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pada tahun 2024, seluruh jenis jaminan social di atas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, kecuali pada jenis jaminan/asuransi kematian yang meningkat dari 4,97 persen menjadi 5.05 persen.

### 2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

#### 1. Forum Kerukunan Umat Beragama

Beragama maslahat sebagai kebijakan pemerintah, sejalan dengan Asta Cita pemerintahan visi nomor 8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya dan peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, Pemerintah Kota Tanjungbalai membentuk Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB). FKUB berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. FKUB berfungsi sebagai wadah dialog antar pemuka agama, mengawal kebijakan terkait kehidupan beragama, dan menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar umat beragama.

#### 2. Kasus Kejahatan

Statistik kriminal adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan masyarakat pada umumnya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kriminalitas seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran.

**Tabel 2.24**
**Kasus Kriminal di Kota Tanjungbalai, 2022-2023**

| Jenis Kriminal | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pembakaran | 3 | 4 | 3 |
| Kebakaran | 10 | 12 | 10 |
| Pemalsuan mateai, Merek dan Surat | 2 | | |
| Melanggar Kesopanan | | | |
| Pemerkosaan | | | 1 |
| Perjudian | 13 | 8 | 12 |

| Jenis Kriminal | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Penganiayaan Berat | 9 | 7 | |
| Penganiayaan Ringan | 30 | 112 | 114 |
| Pencurian Biasa | 40 | 114 | 104 |
| Pencurian dengan Kekerasan | 2 | 2 | 3 |
| Pemerasan | 5 | 2 | 1 |
| Penggelapan | 7 | 32 | 28 |
| Penipuan | 32 | 29 | 11 |
| Merusak barang Orang Lain | 19 | 8 | 9 |
| Penadahan | | | |
| Pembunuhan | 3 | 1 | 1 |
| Narkotika | 88 | 111 | |
| Pencurian Kendaraaan Bermotor | 35 | 38 | 48 |
| Penculikan | | | |

*Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Jumlah kasus kriminal di Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 tercatat sebanyak 345 kasus, ada penurunan signifikan dibandingkan Tahun 2023 sebanyak 480 kasus. Kasus penganiayaan ringan menjadi yang tertinggi diikuti oleh pencurian biasa. Pendidikan agama sejak dini dapat membantu membentuk karakter individu yang kuat, bertanggung jawab, dan memiliki moralitas yang baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kecenderungan melakukan tindakan criminal.

#### 2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

**1. Indeks Perlindungan Anak**

Indeks Perlindungan Anak dalam RPJPD menjadi fondasi untuk membangun strategi jangka panjang yang bertujuan untuk menjamin setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan positif, sesuai dengan hak asasi dan kebutuhan mereka yang fundamental.

Dari data yang dirilis oleh KemenPPPA dan Bappenas, indeks perlindungan anak di Kota Tanjungbalai tercermin dalam tabel berikut.

**Tabel 2.25**
**Indeks Perlindungan Anak 2022**

| Kabupaten/Kota | Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan | Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | Indeks D5 Perlindungan Khusus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanjungbalai | 42,27 | 73,30 | 71,60 | 23,54 | 68,43 |
| Sumatera Utara | 44,64 | 79,00 | 74,06 | 33,42 | 66,66 |

*Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2022*

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Bappenas, Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 menunjukkan gambaran yang bervariasi dalam berbagai dimensi perlindungan anak.

Indeks D1 yang mencerminkan hak sipil dan kebebasan anak di Kota Tanjungbalai berada pada angka 42,27. Angka ini relatif rendah dan menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam memastikan bahwa hak-hak sipil dan kebebasan anak-anak di Kota Tanjungbalai terjamin. Aspek-aspek seperti hak untuk memiliki identitas, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap informasi harus diperkuat melalui kebijakan yang lebih inklusif dan perlindungan hukum yang lebih ketat.

Indeks D2 yang mengukur lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berada pada angka 73,30, yang merupakan salah satu indeks tertinggi dalam laporan ini. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, anak-anak di Kota Tanjungbalai mendapatkan dukungan yang baik dalam lingkungan keluarga dan akses terhadap pengasuhan alternatif. Ini mencerminkan efektivitas program-program yang mendukung penguatan keluarga dan penyediaan layanan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang memerlukannya.

Indeks D3 yang mencakup kesehatan dasar dan kesejahteraan anak berada pada angka 70,49. Indeks ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Kota Tanjungbalai memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam akses yang lebih merata dan

peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.

Indeks D4 yang mengukur pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya berada pada angka 23,54, yang merupakan indeks terendah di antara semua dimensi. Ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan bahwa anak-anak di Kota Tanjungbalai memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan pemanfaatan waktu luang yang konstruktif. Upaya peningkatan fasilitas pendidikan, program ekstrakurikuler, dan kegiatan budaya perlu ditingkatkan untuk mengatasi kesenjangan ini.

Indeks D5 yang mencakup perlindungan khusus untuk anak berada pada angka 68,43. Ini menunjukkan bahwa ada perlindungan yang cukup baik bagi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus, seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Namun, perlindungan ini harus terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak dan implementasi kebijakan yang lebih efektif.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) keseluruhan untuk Kota Tanjungbalai adalah 56,56, dengan Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) sebesar 53,14 dan Indeks Perlindungan Keluarga Anak (IPKA) sebesar 70,64. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa dimensi yang menunjukkan kinerja baik, seperti lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, masih ada tantangan signifikan dalam hak sipil dan kebebasan serta pendidikan dan kegiatan budaya.

**2. Indeks Pembangunan Gender/Pemberdayaan Gender/Ketimpangan Gender**

**a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

IPG di Kota Tanjungbalai bukan sekadar metrik statistik; ia merupakan kompas yang mengarahkan kebijakan dan inisiatif pembangunan. Mengintegrasikan IPG ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menegaskan komitmen Kota Tanjungbalai dalam mendorong kesetaraan gender sebagai pondasi untuk kemajuan sosial-ekonomi yang inklusif. Dengan memahami dan memprioritaskan kesenjangan gender, kota dapat membuka potensi penuh separuh populasi yang seringkali belum tergali secara optimal.

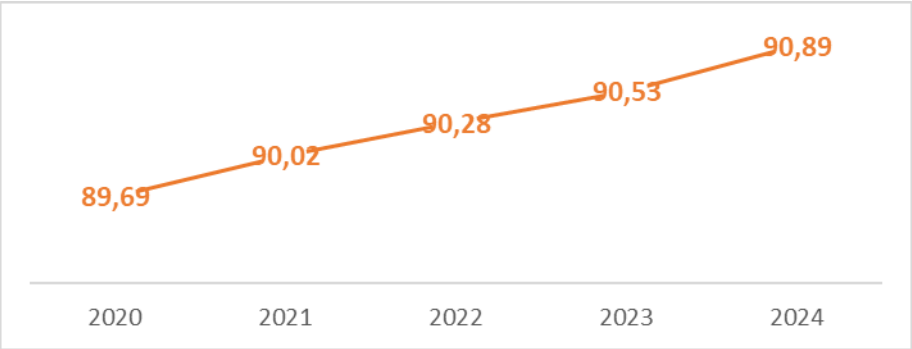


**Gambar 2.24**
**Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024**
*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Dalam pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender adalah prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini mengakui bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial. Keterlibatan penuh dan setara dari semua gender tidak hanya merupakan tujuan pembangunan yang adil dan etis tetapi juga katalisator untuk mencapai efisiensi ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga.

Oleh karena itu, IPG di Kota Tanjungbalai menjadi indikator penting yang merefleksikan sejauh mana ketidakseimbangan gender telah diatasi dan menjadi acuan dalam merumuskan program-program yang dapat memberdayakan perempuan serta menciptakan kesetaraan gender. Penanganan isu gender yang komprehensif dan strategis merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang cepat, tetapi juga pertumbuhan yang adil dan bertahan lama untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

**b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

IDG menunjukkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik. IDG juga mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

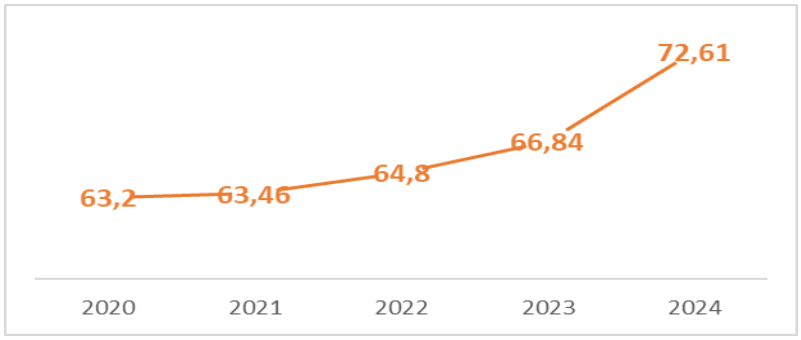


**Gambar 2.25**
**Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024**
*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tanjungbalai dari tahun 2023 ke 2024, dari 66,84 menjadi 72,61, menggambarkan kemajuan signifikan dalam pemberdayaan perempuan di berbagai sektor dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan untuk berkecimpung di bidang ekonomi dan politik serta terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan kian menipis.

**c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Ketimpangan gender adalah keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. IKG berkisar antara 0–1, dengan semakin tinggi indeksnya, semakin timpang capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

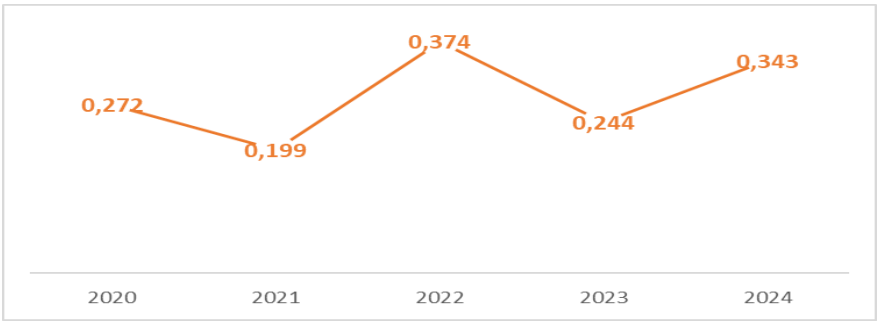


**Gambar 2.26**
**Indeks Ketimpangan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024**
*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Pada tahun 2024, IKG Kota Tanjungbalai adalah 0,343, yang merupakan penurunan 0,099 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender di Kota Tanjungbalai.

### 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah (local competitiveness) menggambarkan kemampuan suatu sektor ekonomi daerah bersaing secara relatif dengan sektor ekonomi yang sama daerah lain dan hinggga saat ini masih menjadi salah satu isu penting dalam membangun ekonomi daerah. Perlunya dilakukan pemetaan daya saing daerah, karena akan menjadi informasi penting dan mendasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana-rencana capaian kebijakan pembangunan daerah.

#### 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

**1. Indeks Pendidikan**

Indeks Pendidikan di Kota Tanjungbalai menunjukkan tren positif selama periode 2019-2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai. Indeks ini merupakan ukuran penting yang menggambarkan kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah. Menggunakan dua komponen utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indeks ini menawarkan gambaran menyeluruh tentang status pendidikan di Kota Tanjungbalai.

Cara menghitung indeks ini dimulai dengan menilai IHLS, yang merupakan perbandingan antara harapan lama sekolah di suatu daerah dengan standar maksimum pendidikan formal yang umumnya ditetapkan sebesar 18 tahun. Ini mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan bisa dijalani oleh anak-anak yang sedang dalam usia sekolah. Selanjutnya, IRLS dihitung dengan membandingkan rata-rata lama sekolah yang telah diterima oleh populasi usia 25 tahun ke atas dengan standar yang sama, yaitu 18 tahun. Ini merefleksikan durasi pendidikan yang secara rata-rata telah diterima oleh warga dewasa. Dengan menggabungkan kedua indeks ini, didapatkan gambaran komprehensif mengenai status pendidikan di suatu wilayah, yang tidak hanya melihat ke depan ke harapan masa depan tetapi juga menilai kondisi saat ini berdasarkan pengalaman pendidikan masa lalu.

Indeks Pendidikan secara keseluruhan kemudian dihitung dengan mengambil ratarata geometris dari IHLS dan IRLS. Ini dilakukan dengan

mengalikan kedua nilai indeks dan mengambil akar kuadrat dari hasil perkalian tersebut. Dengan cara ini, Indeks Pendidikan memberikan nilai yang mencerminkan kombinasi dari aspirasi pendidikan masa depan dan realitas pendidikan masa lalu, memberikan pandangan yang seimbang dan mendalam tentang kualitas dan akses pendidikan dalam suatu populasi.

**Tabel 2.26**
**Indeks Pendidikan Kota Tanjungbalai 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harapan Lama Sekolah | 12,47 | 12,49 | 12,50 | 13,14 | 13,15 |
| Rata-rata Lama Sekolah | 9,24 | 9,26 | 9,44 | 9,68 | 9,69 |
| Indeks Pendidikan | 10,86 | 10,88 | 10,97 | 11,41 | 11,42 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 (diolah)*

Dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan yang signifikan pada Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Tanjungbalai. HLS meningkat dari 12,47 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,15 tahun pada tahun 2024. Sementara itu, RLS juga mengalami peningkatan dari 9,24 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,66 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam memperpanjang durasi pendidikan yang diharapkan dan yang sebenarnya dijalani oleh siswa di kota ini.

Sejalan dengan peningkatan HLS dan RLS, Indeks Pendidikan di Kota Tanjungbalai juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, Indeks Pendidikan berada pada angka 10,86, kemudian meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 11,42 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program dan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan, serta berbagai inisiatif untuk mengurangi angka putus sekolah.

Tren positif dalam Indeks Pendidikan tersebut menandakan adanya komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah kota dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan standar pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Ini adalah indikator penting yang menggambarkan upaya Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, yang berpotensi membawa dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi daerah.

**2. Angka Ketergantungan**

Angka ketergantungan adalah sebuah parameter demografis yang memperbandingkan proporsi penduduk yang tidak produktif (yang mencakup individu berusia 0-14 tahun dan yang berusia lebih dari 65 tahun) dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia yang produktif (usia 15-64 tahun). Penghitungan rasio ketergantungan melibatkan pengambilan jumlah total penduduk yang tidak produktif, dibagi oleh jumlah penduduk yang produktif, dan kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase.

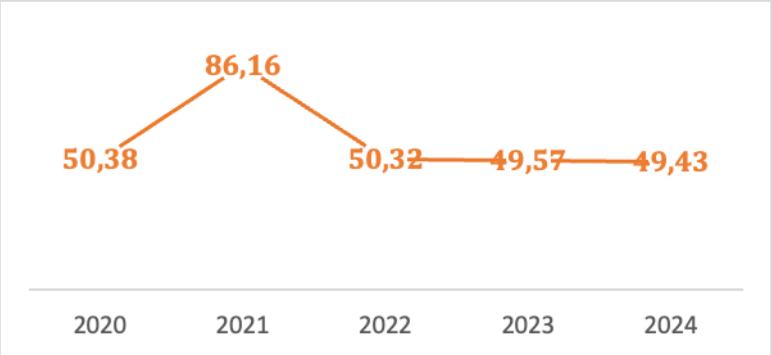


**Gambar 2.27**
**Angka Ketergantungan Kota Tanjungbalai 2020-2024**
*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan di Kota Tanjungbalai berada di angka 58,38. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi dari sekitar 58 penduduk non-produktif. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan drastis dalam Rasio Ketergantungan menjadi 86,16. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan beban ekonomi yang signifikan pada penduduk usia produktif. Lonjakan yang tajam ini mungkin disebabkan oleh peningkatan tajam jumlah penduduk non-produktif atau penurunan jumlah penduduk usia produktif, yang bisa terkait dengan dinamika demografis seperti migrasi, peningkatan angka kelahiran, atau peningkatan angka kematian di kelompok usia produktif.

Pada tahun 2023, Rasio Ketergantungan kembali turun drastis menjadi 49,57 dan sedikit menurun lagi menjadi 49,43 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan pemulihan atau stabilisasi dalam struktur demografis Kota Tanjungbalai. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa penduduk usia produktif dapat mendukung penduduk non-produktif tanpa beban ekonomi yang berlebihan.

### 2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

**1. Rasio Industri Pengolahan**

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

**Tabel 2.27**
**PDRB, Peranan, dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, 2020-2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADHB (Miliar/Rp)** | 1.798,54 | 2.000,08 | 2.145,83 | 2.263,76 | 2.560,33 |
| **ADHK (Miliar/Rp)** | 1.120,94 | 1.172,94 | 1.205,78 | 1.260,24 | 1.365,35 |
| **Proposi terhadap Total PDRB** | 19,59 | 20,76 | 20,50 | 20,20 | 20,97 |
| **Pertumbuhan PDRB** | 1,89 | 4,62 | 2,82 | 4,53 | 8,34 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

Lapangan usaha Industri pengolahan menempati porsi kedua setelah perdagangan dalam pembentukan PDRB Kota Tanjungbalai. Tahun 2024 peranannya mencapai 20,97 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Industri Pengolahan tahun 2024 mencapai 2,56 triliun rupiah, sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai 1.36 triliun rupiah. Laju pertumbuhan industri pengolahan tahun 2024 sebesar 8,34 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 4.53 persen.

**2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum**

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, estoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

**Tabel 2.28**
**PDRB, Peranan, dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi Makan dan Minum, 2020-2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADHB (Miliar/Rp)** | 192,65 | 194,79 | 210,60 | 231,27 | 251,98 |
| **ADHK (Miliar/Rp)** | 139,98 | 141,16 | 149,40 | 161,36 | 169,60 |
| **Proposi terhadap Total PDRB** | 2,10 | 2,02 | 2,01 | 2,06 | 2,06 |
| **Pertumbuhan PDRB** | -0,53 | 0,84 | 5,84 | 8,01 | 5,10 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

Tahun 2023, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Tanjungbalai sebesar 2,06 persen. Kontribusi sublapangan usaha Penyediaan Makan Minum sebesar 1,91 persen (92,46 persen terhadap lapangan usaha), sedangkan sublapangan usaha Penyediaan Akomodasi memberi kontribusi sebesar 0,16 persen (7,54 persen terhadap lapangan usaha).

**3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas, TPAK berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk pekerjaan formal, pekerjaan informal, atau mencari pekerjaan baru.

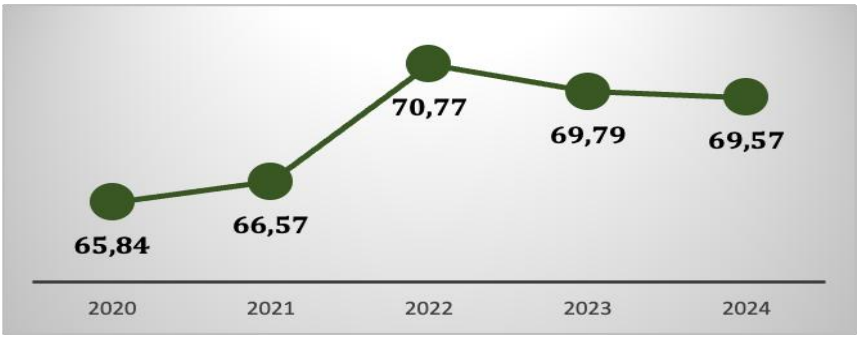


**Gambar 2.28**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Secara keseluruhan, tren TPAK di Kota Tanjungbalai dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang positif, mencerminkan pemulihan ekonomi dan adaptasi yang baik dari penduduk usia kerja dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pada tahun 2020, TPAK Kota Tanjungbalai berada di angka 65,84 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 64,83 persen dari penduduk usia kerja di Kota Tanjungbalai terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2021, TPAK meningkat menjadi 66,57 persen yang mencerminkan adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja meskipun terdapat tantangan dari pandemi COVID-19. Ini menunjukkan adaptasi masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit dengan tetap aktif mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja baru. Pada Tahun 2022 mencatat puncak TPAK dengan angka 70,77 persen, menunjukkan pemulihan yang signifikan dan partisipasi yang sangat tinggi. Namun, pada tahun 2024, TPAK mengalami penurunan menjadi 55,47 persen. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi pasar kerja, kebijakan ekonomi, atau migrasi tenaga kerja.

**4. Tingkat Kesempatan Kerja**

Kesempatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Selama lima tahun terakhir tingkat kesempatan kerja Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 mencapai angka sebesar 93,41 persen meningkat menjadi 95,92 persen pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesempatan kerja di Kota Tanjungbalai.

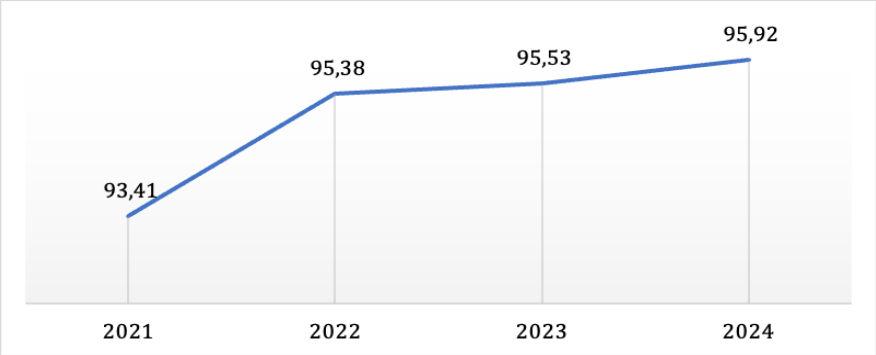


**Gambar 2.29**
**Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2021-2024**
*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2025, (diolah)*

**5. Tenaga Kerja**

Angkatan kerja mengacu pada individu yang berusia antara 15 hingga 64 tahun yang sudah siap untuk bekerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan angkatan kerja adalah individu yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja. Kelompok ini mencakup berbagai alasan ketidakikutsertaan dalam pasar tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja di Kota Tanjungbalai dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2020 jumlah Angkatan kerja meningkat dari 82.977 orang menjadi 93.286 orang pada tahun 2024, sedangkan bukan Angkatan kerja mengalami penurunan dari 43.045 orang menjadi 40.810 orang. Mengetahui nilai Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja penting untuk merancang program-program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif.

**Tabel 2.29**
**Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama**
**Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| No | Jenis Kegiatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A | Angkatan Kerja | 82.977 | 85.276 | 92.132 | 91.966 | 93.286 |
| | 1.Bekerja | 77.196 | 79.653 | 87.876 | 87.857 | 89.481 |
| | 2.Pengangguran terbuka | 5.781 | 5.623 | 4.256 | 4.109 | 3.805 |
| B | Bukan Angkatan Kerja | 43.045 | 42.821 | 38.057 | 39.815 | 40.810 |
| | Total (A+B) | 126.022 | 128.097 | 130.189 | 131.781 | 134.096 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Angkatan kerja di Kota Tanjungbalai, berdasarkan tingkat pendidikan, menunjukkan dominasi lulusan SMA/SMK dalam jumlah penduduk usia kerja yang siap untuk bekerja, diikuti oleh lulusan SD kemudian SMP, sedangkan lulusan Perguruan tinggi masih sangat kecil sebanyak 11.311 orang. Hal ini menandakan masih rendahnya kualitas/mutu yang dimiliki Angkatan kerja di Kota Tanjungbalai, karena diasumsikan bahwa orang yang memiliki pendidikan tinggi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi pula. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka peluangnya untuk melamar pekerjaan di suatu lapangan usaha semakin besar.

**Tabel 2.30**
**Penduduk 15 Tahun ke Atas Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| Tahun | Angkatan Kerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tidak Sekolah/SD | SMP | SMA/SMK | PT | Total |
| **2020** | 25.234 | 14.731 | 33.604 | 9.408 | 82.977 |
| **2021** | 25.709 | 15.494 | 33.091 | 10.982 | 85.276 |
| **2022** | 24.538 | 16918 | 39.046 | 11.630 | 92.132 |
| **2023** | 23.498 | 15.472 | 37.875 | 11.012 | 87.857 |
| **2024** | 26.123 | 15.866 | 39.986 | 11.311 | 93.286 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karenanya pembangunan SDM harus diarahkan kepada penciptaan SDM yang produktif, inovatif dan profesional disamping mampu memanfaatkan, mengembangan dan menguasai IPTEK sehingga mampu bersaing di dunia global, Selanjutnya kualitas SDM juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja yang ada.

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi banyaknya tenaga kerja yang diserap, Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar kemungkinan orang tersebut memperoleh pekerjaan, Tingkat pendidikan para pekerja di Kota Tanjungbalai tergolong relatif rendah, Hal tersebut dapat kita lihat seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.31**
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Tanjungbalai, 2024**

| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Angkatan Kerja | |
|---|---|---|
| | Bekerja | Pengangguran Terbuka |
| **Tidak/belum pernah sekolah; Tidak/belum tamat Sekolah Dasar** | 24.257 | 864 |
| **Sekolah Menengah Pertama** | 16.575 | 561 |
| **Sekolah Menengah Tingkat Atas** | 27.938 | 2.257 |
| **Sekolah Menengah Kejuruan** | 8.242 | 69 |
| **Program Diploma I/II/III** | 1.545 | 96 |
| **Akademi/ Universitas** | 9.319 | 262 |
| **Jumlah** | **87.876** | **4.109** |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2025, (diolah)*

Secara umum, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, pekerjaan di Kota Tanjungbalai didominasi oleh lulusan SMA, dengan banyak peluang di sektor informal dan jasa. Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai yang bekerja didominasi dari tamatan SMA sebesar 27.938 orang, dan pendidikan yang terendah berasal dari tamatan Diploma dan Universitas, sedangkan tingkat pengangguran tertinggi juga didominasi dari tamatan SMA selanjutnya tamatan sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas.

**Tabel 2.32**
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2024**

| Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| **Berusaha Sendiri** | 9.985 | 7.965 | 17.950 |
| **Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar** | 3.439 | 3.828 | 7.267 |
| **Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar** | 2.307 | 825 | 3.132 |
| **Buruh/Karyawan/Pegawai** | 33.507 | 14.844 | 48.351 |

| Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| **Pekerja Bebas Pertanian** | 883 | - | 883 |
| **Pekerja Bebas Non Pertanian** | 519 | 616 | 1.135 |
| **Pekerja Keluarga/tak dibayar** | 2.052 | 7.087 | 9.139 |
| **Jumlah** | **52.692** | **35.165** | **87.857** |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2021*

Penduduk Kota Tanjungbalai yang bekerja dilihat berdasarkan status pekerjaan utama didominasi pada buruh/karyawan/pegawai dengan total keseluruhan sebesar 48.351 orang, kemudian diikuti oleh berusaha sendiri dengan jumlah 17.950 orang. Status pekerjaan utama didominasi oleh perempuan adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar.

**6. Indeks Inovasi Daerah**

Indeks Inovasi Kota Tanjungbalai pada Tahun 2024 yang tercatat sebesar 34,28 menunjukkan posisi Kota Tanjungbalai dalam predikat kurang inovatif. Menurut Kepmendagri No 400.10.11-4898 Tahun 2026, Kota Tanjungbalai berada di peringkat ke-87 dari total 93 kota yang dievaluasi di Indonesia. Skor tersebut mencerminkan sejauh mana inovasi telah diadopsi dan diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan di Tanjungbalai, termasuk dalam pemerintahan, industri, pendidikan, dan masyarakat.

Angka tersebut memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kapasitas inovatifnya. Skor Indeks Inovasi yang berada di bawah rata-rata nasional menandakan bahwa terdapat ruang yang signifikan bagi peningkatan dan pembaharuan di berbagai sektor. Hal ini menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan kota untuk merancang dan menerapkan strategi yang dapat memacu pertumbuhan inovatif, memanfaatkan teknologi terkini, serta mengadopsi praktik terbaik untuk pembangunan berkelanjutan.

### 2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Biru

Ekonomi biru atau "*blue economy*" adalah konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut dan perairan. Di Kota Tanjungbalai, sektor perikanan memegang peranan penting dalam ekonomi lokal, dengan kontribusi yang signifikan terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi biru dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kota ini.

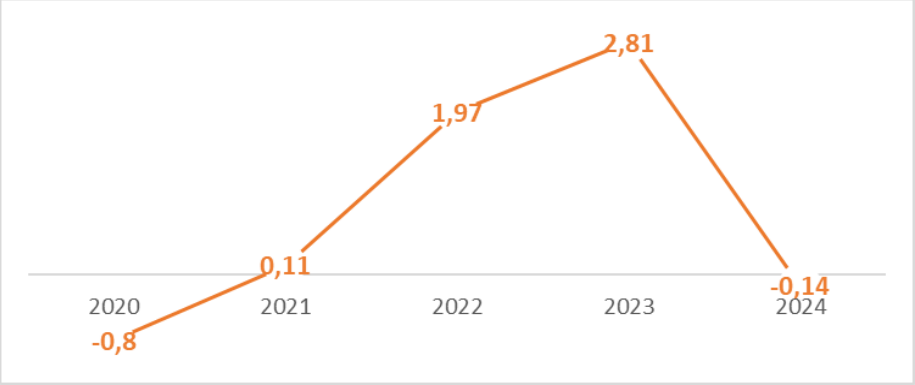


**Gambar 2.30**
**Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan, 2020-2024**

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2025, (diolah)*

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah).

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan sektor perikanan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2020, akibat covid-19 pertumbuhan sektor ini mencapai negatif 0,8 persen, namun pada tahun berikutnya terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 2,81 persen pada tahun 2023, tetapi Kembali mengalami penurunan menjadi 0,18 persen pada Tahun 2024.

Dengan melihat kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi biru memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai. Pengelolaan yang berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya perairan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem laut dan perairan. Peningkatan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan perikanan, pasar ikan, dan fasilitas pengolahan, akan semakin memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap

ekonomi lokal, sekaligus mendukung visi pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

### 2.1.3.4 Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung transformasi digital nasional, maka pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun Langkah-langkah transformasi digital yang dimuat dalam master plan e-Government Kota Tanjungbalai, antara lain: (a) mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, (b) mempersiapkan roadmap transformasi digital, (c) mempercepat integrasi pusat data nasional, (d) mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, ( e ) menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Transformasi Digital adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis atau organisasi, mengubah cara kerja, interaksi dengan pelanggan, dan penyampaian nilai.

Super Platform Kota Tanjungbalai antara lain :

1. Portal Tanjungbalai (https://tanjungbalaikota.go.id)
2. Aplikasi Srikandi
3. Aplikasi SIPD
4. Aplikasi Inaproc pada pengadaan barang dan jasa
5. Aplikasi e-lapor Menpan RB

Percepatan Transformasi Digital seperti :

1. Layanan internet keseluruh OPD dan Ruang Publik,
2. Transformasi server local ke Pusat Data Nasional (PDNS)

Produksi talenta digital Pemerintah Kota telah bekerja sama dengan BKPSDM Kementerian Kominfo untuk membuat program pelatihan untuk ASN dan Masyarakat umum.

### 2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

#### 1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan √

aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR), sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

**Tabel 2.33**
**PDRB, Peranan, dan Pertumbuhan PMTB Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADHB (Miliar/Rp)** | 2956,59 | 3065,78 | 3150,13 | 3418,77 | 3.692,70 |
| **ADHK (Miliar/Rp)** | 1943,36 | 1987,71 | 2025,12 | 2099,85 | 2.136,84 |
| **Proposi terhadap Total PDRB** | 32,2 | 31,83 | 30,1 | 30,5 | 30,25 |
| **Pertumbuhan** | -2,52 | 2,28 | 1,88 | 3,69 | 1,76 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di atas menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020–2024 cenderung berfluktuatif yaitu; -2,52 persen (2020); 2,28 persen (2021); 1,88 persen (2022), 3,69 persen (2023) dan 1,76 persen (2024) . Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh besarnya pembangunan perumahan dari berbagai perusahaan real estate maupun rumah tangga di Kota Tanjungbalai.

**2. Ekspor Barang dan Jasa**

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Tanjungbalai, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 2.34**
**Perkembangan Ekspor Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **ADHB (Miliar/Rp)** | 2.404,09 | 2.715,5 | 3.257,92 | 4.263,78 |
| **ADHK (Miliar/Rp)** | 1.395,36 | 1.470,13 | 1.656,17 | 2.071,49 |
| **Proposi terhadap Total** | 26,19 | 28,19 | 31,13 | 38,04 |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **PDRB** | | | | |
| **Pertumbuhan** | 0,24 | 5,36 | 12,65 | 25,08 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

Secara total, dalam kurun waktu 2020-2023 nilai ekspor barang dan jasa cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.404,09 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 2.715,5 miliar rupiah pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 3.257,92 miliar rupiah, menjadi 4.263,78 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar: 1.395,36 miliar rupiah (2020); 1.470,13 miliar rupiah (2021); 1.656,17 miliar rupiah (2022) dan 2.071,49 miliar rupiah (2023). Sementara itu, pada periode 2020 s.d 2023, proporsi dalam PDRB justru cenderung meningkat dari 26,19 persen pada tahun 2020 menjadi 38,04 persen di tahun 2023. Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2023 mencapai dua puluh lima persen lebih. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya pengiriman barang ke luar negeri seperti Malaysia dan China. Pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 0.24 persen (2020) meningkat menjadi 5,36 persen pada tahun 2021, 12,65 persen pada tahun 2022 dan 25,08 persen pada tahun 2023.

### 2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian berjalan stabil, dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, inflasi yang terkendali, dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi.

**1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**

Rasio pajak terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak dalam kaitannya dengan ukuran perekonomian suatu wilayah. Rasio ini penting karena menunjukkan seberapa baik pemerintah mampu membiayai pengeluarannya melalui penerimaan pajak.

**Tabel 2.35**
**Rasio Pajak terhadap PDRB, 2020-2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pajak (Juta Rp)** | 14.459 | 17.206 | 17.460 | 20.429 | 22.519,50 |
| **PDRB (Miliar Rp)** | 5.763,21 | 5.898,81 | 6.131,04 | 6.428,77 | 6.744,35 |
| **Rasio Pajak terhadap PDRB (%)** | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

Rasio pajak Kota Tanjungbalai dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan, dari 0,25 persen menjadi 0,33 persen. Semakin tinggi rasio pajak, semakin kokoh pula sumber pendanaan yang dimiliki suatu daerah. Dengan fondasi perpajakan yang kuat tersebut dapat mendorong stabilitas ekonomi di Kota Tanjungbalai.

## 2. Laju Inflasi

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kota Tanjungbalai. Ukuran inflasi Kota Tanjungbalai mengacu pada perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar, karena gambaran inflasi Kota Pematangsiantar dianggap dapat mewakili inflasi di Kota Tanjungbalai.

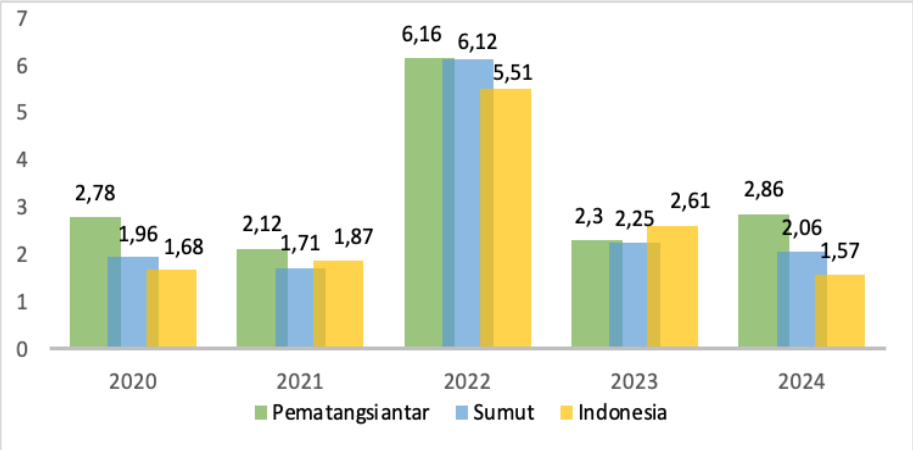


**Gambar 2.31**
**Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar**
**Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2020-2024**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025*

Selama lima tahun terakhir, perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar berfluktuasi. Pada tahun 2020, nilai inflasi Kota Pematangsiantar sebesar 2,78

persen menjadi 2,86 persen pada tahun 2024. Nilai inflasi Kota Pematangsiantar relatif berada di atas provinsi dan nasional. Dalam perekonomian inflasi tidak bisa dihilangkan tetapi dikendalikan agar tetap berada pada posisi aman, tetap seimbang antara penawaran dan permintaan, tidak mengganggu perekonomian, dan tetap berada dalam daya beli masyarakat luas. Inflasi terkendali, kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan meningkat.

### 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan adaptif

**1. Indeks Reformasi Hukum**

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.36**
**Nilai Indeks Reformasi Hukum Kota Tanjungbalai 2024**

| No | Variabel | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi | 19,6 |
| 2 | Kompetensi Perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas | 3,69 |
| 3 | Kualitas re-Regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu | 30 |
| 4 | Penataan database peraturan perundang-undangan | 15 |
| | **Nilai Total Indeks Reformasi Hukum** | **89,6** |

*Sumber: Indeks Reformasi Hukum 2025*

Dengan hasil ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus berkomitmen dalam meningkatkan tata kelola hukum, memastikan regulasi yang dikeluarkan tegat guna, dan memastikan pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel berjalan dengan baik

**2. Indeks Pelayanan Publik**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, skor yang diperoleh Kota Tanjungbalai dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.37**
**Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Tanjungbalai 2024**

| No | OPD | Nilai IKM | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | DPM PTSP | 79,31 | B |
| 2 | Dinas Sosial | 81,36 | B |
| 3 | Dinas Pendidikan | 79,25 | B |
| 4 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan | 78,75 | B |
| 5 | Dinas Kesehatan | 82 | B |
| 6 | RSUD Dr. Tengku Mansyur | 77,17 | B |
| Indeks Pelayanan Publik | | 85,52 | |

*Sumber: Indeks Pelayanan Publik MenPAN RB 2025*

Capaian ini adalah buah dari komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bisa diambil kesimpulan bahwa masih adanya ruang yang lebih besar untuk perbaikan dalam hal penyelenggaraan layanan publik yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

**3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Kota Tanjungbalai berhasil mendapatkan skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan skor 3,24.

**Tabel 2.38**
**Indeks SPBE di Tanjungbalai Tahun 2024**

| No | Variabel | Indeks | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kebijakan | 3,50 | Baik |

| No | Variabel | Indeks | Predikat |
|---|---|---|---|
| 2 | Tata Kelola | 3,00 | Baik |
| 3 | Manajemen | 2,36 | Cukup |
| 4 | Layanan | 3,62 | Baik |
| **Indeks SPBE** | | **3,24** | **Baik** |

*Sumber: KepmenPANRB No 108 tahun 2025*

Peringkat ini didasarkan pada Keputusan Menteri PAN RB Nomor 108 Tahun 2024. Keberhasilan ini mencerminkan upaya signifikan dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen SPBE, termasuk pengelolaan risiko, keamanan informasi, manajemen data, dan audit teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mengadopsi praktik pemerintahan yang efisien, efektif, dan berkesinambungan berbasis teknologi informasi.

### 2.1.4.2 Hukum Berkeadilan

**1. Persentase Penegakan Perda**

Penegakan Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pelanggaran Perda yang diselesaikan dapat dibuktikan dengan laporan rekapitulasi pelanggaran. Penindakan yang dilakukan dapat berupa penertiban, penyegelan, penutupan, pengenaan denda administratif, dan sanksi lainnya.

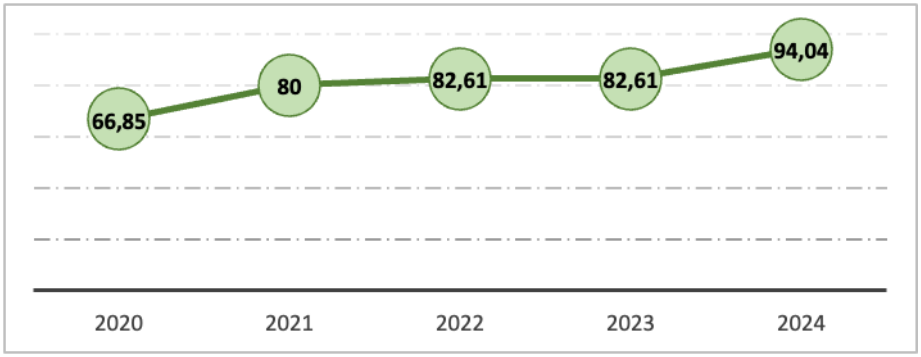


**Gambar 2.32**
**Penegakan Perda di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

*Sumber: Kantor Satpol PP Kota Tanjungbalai, 2025*

Penegakan perda di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 penegakan perda mencapai 66,85 persen kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2021 mencapai 80 persen hingga pada tahun 2024 mencapai 84,04 persen.

**2. Persentase Capaian Aksi HAM**

Presiden pada tanggal 8 Juni 2021 telah menetapkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. RANHAM Tahun 2021-2025 yang merupakan RANHAM generasi ke-5 yang berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu: **(i)** perempuan; **(ii)** anak-anak; **(iii)** penyandang disabilitas; dan **(iv)** kelompok masyarakat adat.

**Tabel 2.39**
**Capaian Aksi HAM Kota Tanjungbalai, 2024**

| Uraian | B04 | B08 | B12 |
|---|---|---|---|
| Aksi I<br>Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang UMKM | 25 | 40 | 100 |
| Aksi II<br>Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat kelompok adat yang berhadapan dengan hukum | 100 | 85 | 85 |
| Aksi III<br>menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesible bagi penyandang disabilitas | 100 | 100 | 90 |
| Aksi IV<br>Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi SPM di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama | 100 | 100 | 100 |
| Aksi V<br>Implementasi pemberian bansos untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya | 100 | 100 | 100 |
| Aksi VI<br>Membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas | 100 | 100 | 30 |

Pelaksanaan Aksi HAM Kota Tanjungbalai dilihat dari pelaksanaan 6 aksi. Pada aksi I, Tanjungbalai telah berhasil membuktikan keseriusan dalam memperhatikan kelompok sasaran perempuan kepala keluarga dengan memberikan pelatihan UMKM. Pada aksi II, capaian pemberian bantuan hukum kepada kelompok sasaran HAM juga sudah cukup baik, tetapi memerlukan sedikit perhatian yaitu pentingnya melakukan sosialisasi bagi para kelompok sasaran agar mengetahui bahwa mereka mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Selanjutnya pada aksi III, juga

memerlukan perhatian serius terhadap pelaksanaan Pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bahkan penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten di bidang tersebut. Seluruh Nilai ini diperoleh setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program-program yang mendukung pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

### 2.1.4.3 Indeks Daya Saing Daerah

Analisis terhadap skor Indeks Daya Saing Sektor Daerah (IDSD) untuk Kota Tanjungbalai mengungkapkan beberapa aspek penting dalam konteks pembangunan dan potensi daerah tersebut. Berdasarkan skor yang diperoleh pada berbagai indikator, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

**Tabel 2.40**
**Indeks Daya Saing Daerah Kota Tanjungbalai 2024**

| Kabupaten/ Kota | Lingkungan Pendukung | | | | SDM | | Pasar | | | | Ekosistem Inovasi | | SKOR IDSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Kota Tanjungbalai | 4,18 | 3,8 | 4,58 | 3,48 | 3,28 | 4,13 | 3,9 | 3,63 | 2,07 | 3,91 | 3,33 | 1,01 | **3,44** |

*Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2025, BRIN*

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024, Kota Tanjungbalai menunjukkan beberapa aspek daya saing yang memerlukan perhatian khusus. Lingkungan pendukung yang perlu mendapat perhatian adalah pilar 2 (infrastruktur) karena hanya mencapai 3,8 dan pilar 4 (stabilitas ekonomi makro) yang mencapai 3,48, sedangkan layanan publik sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya pada paningkatan Sumber daya manusia yang memerlukan perhatian adalah bidang kesehatan dengan skor 3,28. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kompetitif, aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah seistem keuangan yang hanya mencapai 2,07. Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan pemberian KUR bagi para UMKM. Bila memperhatikan ekosistem inovasi, pada aspek kapabilitas inovasi menjadi area yang memerlukan fokus lebih besar. Untuk meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan, pemerintah daerah perlu memperkuat ekosistem inovasi melalui dukungan terhadap teknologi baru, startup, dan kolaborasi antara industri dan lembaga penelitian. Secara keseluruhan, dengan skor IDSD sebesar 3,44, Kota Tanjungbalai memiliki peluang besar

untuk meningkatkan daya saing melalui upaya terpadu dalam peningkatan infrastruktur, kualitas SDM, dan ekosistem inovasi. Selama periode 2022-2024, secara umum Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan daya saing. Pengecualian terdapat pada pilar 12: Kapabilitas inovasi yang relative rendah selama 2022-2024 dibanding pilar lainnya. Bahkan, skor pilar 12 mengalami penurunan pada Tahun 2024. Kota Tanjungbalai memiliki skor kapabilitas inovasi terendah ketiga dibandingkan kabupaten/kota di Sumatera Utara.

### 2.1.5 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

#### 2.1.5.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Kota Tanjungbalai selama periode tahun 2020-2024 dilihat dari Urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan Urusan Sosial.

##### 2.1.5.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai, Berikut ini diuraikan mengenai gambaran umum tentang pendidikan di Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu lima tahun.

**1. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya. Ketidakmampuan membaca dan menulis disebut buta huruf, tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan.

**Tabel 2.41**
**Tingkat Melek Huruf 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2021-2024**

| Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Laki-laki** | 99,92 | 99,63 | 99.93 | 99,25 |
| **Perempuan** | 99,20 | 98,91 | 99,20 | 98,55 |
| **Laki-laki + Perempuan** | 99,57 | 99,27 | 99,56 | 98,91 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Hal yang cukup menarik adalah penurunan angka melek huruf. Angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas Kota Tanjung Balai mengalami penurunan dari 99,57 persen pada 2021 menjadi 99,27 persen pada 2022, kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 99,56. persen dan turun kembali menjadi 98,91 persen. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, angka melek huruf latin laki-laki berumur 15 tahun ke atas lebih besar dibandingkan perempuan, pada tahun 2024, melek huruf latin sebesar 99,25 persen, sedangkan perempuan sebesar 98,55 persen.

**2. Angka Partisipasi Kasar**

APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, Berikut ini diuraikan perkembangan APK Kota Tanjungbalai selama tahun 2020-2024.

**Tabel 2.42**
**Perkembangan APK Kota Tanjungbalai (%), 2020-2024**

| No | Jenjang Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, | SD/MI | 106,35 | 106,75 | 103,01 | 106,70 | 107,87 |
| 2, | SMP/MTs | 84,68 | 90,14 | 89,20 | 102,19 | 92,21 |
| 3, | SMA/MA | 88,32 | 92,29 | 90,07 | 94,55 | 88,98 |
| 4, | PT | 14,46 | 14,27 | 17,97 | 20,89 | |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

**3. Angka Partisipasi Murni**

Keikutsertaan penduduk Kota Tanjungbalai dalam program pendidikan sesuai dengan usia sekolah menunjukan perkembangan yang menggembirakan, Menurut data BPS Kota Tanjungbalai. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) selama lima tahun terakhir relatif tinggi artinya masyarakat sudah sadar akan menyekolahkan anak pada tingkat SD/MI sesuai umur yang ditentukan, sedangkan jenjang pendidikan menengah untuk (SMP/MTs) dan (SMA/MA) masih memerlukan perbaikan, Seperti terlihat pada tabel bahwa APM untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 sebesar 99,02 persen dan APM untuk jenjang SMP/MTs sebesar 89,89 persen, sedangkan APM untuk jenjang SMA/MA sebesar 64,80 persen, Untuk jenjang PT terlihat masih sangat rendah, hanya mencapai 5,34 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa daya saing SDM masyarakat Kota Tanjungbalai khususnya pencari kerja masih sangat rendah.

**Tabel 2.43**
**Perkembangan APM Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| No | Jenjang Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI | 98,50 | 98,82 | 95,80 | 99,71 | 99,02 |
| 2 | SMP/MTs | 81,49 | 87,58 | 89,20 | 89,65 | 89,89 |
| 3 | SMA/MA | 71,22 | 71,32 | 68,21 | 63,07 | 64,80 |
| 4 | PT | 9,50 | 9,48 | 14,98 | 5,34 | |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021*

**4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan**

Persentase penduduk Kota Tanjungbalai yang memiliki ijazah/STTB menurut seluruh tingkat pendidikan masih sangat rendah, Selama Tahun 2020-2021 belum menunjukkan peningkatan secara signifikan, hal tersebut menandakan tingginya angka putus sekolah, bahkan pada tingkat pendidikan dasar.

**Tabel 2.44**
**Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2020-2024**

| Tingkat | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **SD/MI** | 22,54 | 20,74 | 22,38 | 21,60 | 19,89 |
| **SMP/MTs** | 21,26 | 25,63 | 23,41 | 23,06 | 23,38 |
| **SMA/MA** | 31,00 | 35,75 | 35,96 | 37,15 | 38,28 |
| **Perguruan Tertinggi (D IV/S1)** | 5,08 | 7,23 | 10,42 | 10,45 | 9,46 |
| **Tidak Memiliki Ijazah** | | 10,65 | 7,83 | 7,74 | 9,00 |

*Sumber: Indikator Kesejahteraan Kota Tanjungbalai 2024*

Ditinjau dari segi pendidikan yang ditamatkan, tahun 2024 menunjukkan bahwa di Kota Tanjung Balai jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki yaitu tingkat SMA/SMK Sederajat, sedangkan yang terendah yaitu tidak mempunya ijjazah. Untuk tingkat perguruan tinggi lebih sedikit ditamatkan daripada setara SD, SMP, dan SMA oleh penduduk Kota Tanjung Balai di tahun 2024 yang berumur 15 tahun ke atas.

**5. Sarana dan Prasarana Sekolah**

Sampai dengan periode 2024, jumlah sekolah sebagai prasarana pendidikan di Kota Tanjungbalai sebanyak 236 sekolah. Angka tersebut terbagi sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian Taman Kanak-kanak (TK) 25 sekolah, Raudatul Atfal (RA) 39 sekolah, Sekolah Dasar (SD) 81 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 29 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 21 sekolah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 13 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) 11 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9 sekolah, dan Madrasah Aliyah (MA) 8 sekolah.

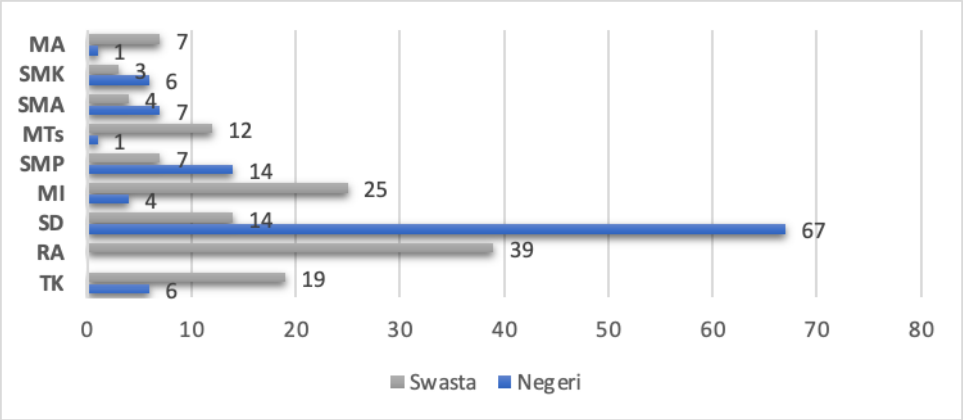


**Gambar 2.33**
**Banyaknya Sekolah Negeri Dan Swasta, 2024**

*Sumber: Indikator Kesejahteraan Kota Tanjungbalai 2024*

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pendidikan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.45**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pendidikan, 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Pendidikan dasar:** | | | | | |
| a | Rasio guru/ murid SD/MI | 1:18 | 1:18 | 1:17 | 1:16 | 1:16 |
| b | Rasio guru/ murid SMP/Mts | 1:15 | 1:15 | 1:13 | 1:13 | 1:14 |
| 2 | APK PAUD 3 – 6 Tahun | 52,04 | 73,25 | 50,73 | 59,18 | 62,57 |
| 3 | **Angka Putus Sekolah** | | | | | |
| a. | SD/MI | 0,12 | - | 0, 26 | 0,26 | 1,26 |
| b. | SMP/MTs | 0, 19 | - | 2, 01 | 2, 01 | 3, 73 |
| 4 | Angka Kelulusan SD/MI (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | **Guru yang memenuhi** | | | | | |

| No | | Indikator Kinerja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kualifikasi S1/D-IV (%)** | | | | | |
| | a | - Jenjang PAUD | - | - | - | 56,70% | 58,75% |
| | b | - Jenjang SD / MI | 90% | 90,09 | 93,26 | 94% | 94% |
| | c | - Jenjang SMP/MTs | 98% | 95,22 | 98% | 98% | 98% |
| 6 | | Persentase Guru TK Bersertifikasi | 5% | 5% | 8% | 9,7% | 9,7% |
| 7 | | Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik | 95 | 94,6 | 94 | 96 | 96 |
| 8 | | Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik | 95 | 99,8 | 94 | 96 | 96 |
| 9 | | Persentase Guru SD Bersertifikasi | 49 | 42,65 | 41,41 | 81,7 | 47,74 |
| 10 | | Persentase Guru SMP Bersertifikasi | 58 | 41,25 | 40,96 | 84,49 | 56,02 |
| 11 | | Kemampuan Literasi | | | | | |
| | a | SD | | | 46,08 | 48,92 | 55,62 |
| | b | SMP | | | 48,36 | 65,05 | 65,69 |
| 12 | | Kemampuan Numerasi | | | | | |
| | a | SD | | | 29,18 | 38,78 | 51,37 |
| | b | SMP | | | 30,87 | 57,02 | 59,34 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025*

Rasio guru mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru, Hal yang sama terjadi pada rasio guru terhadap murid, yang menunjukkan tercukupinya ketersediaan guru, Pada tahun 2020 menunjukkan rasio guru terhadap murid pada tingkat SD/MI mencapai 1:18 menurun menjadi 1:16 pada tahun 2024. Sama halnya dengan rasio guru terhadap murid pada tingkat SMP/MTs juga mengalami penurunan dari 1:15 pada tahun 2020 menjadi 1:14 pada tahun 2024. Menurunnya capaian indikator ini bermanfaat bagi interaksi yang lebih pribadi antara guru dan murid, meningkatkan perhatian dan dukungan individual bagi setiap murid dan guru dapat memberikan bimbingan dan pengajaran yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan murid.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. PAUD penting karena memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Perkembangan APK PAUD selama lima tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian indikator ini sebesar 52,04 persen meningkat menjadi 62,57 persen pada tahun 2024. Rendahnya partisipasi pra sekolah umumnya disebabkan oleh faktor keberadaan orang tua, artinya faktor ekonomi dan persepsi atau minat orang tua yang masih rendah terhadap PAUD.

Selama lima tahun terakhir, persentase anak putus sekolah pada tingkat SD/MI mengalami peningkatan dari 0,12 persen pada tahun 2020 menjadi 1,26 persen pada tahun 2024. Persentase anak putus sekolah pada tingkat SMP/MTS juga mengalami peningkatan dari 0,19 persen pada tahun 2020 menjadi 3,73 persen pada tahun 2024. Penyebab tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh banyak faktor lainnya, diantaranya kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, faktor sosial hingga faktor Kesehatan.

Angka kelulusan SD/MI adalah proporsi antara lulusan SD/MI pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik kelas 6 pada awal tahun ajaran. Indikator ini telah mencapai 100 persen selama lima tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya kualifikasi guru diperjelas dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa guru pada SD/MI dan SMP/MTs harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D,IV) atau sarjana (S1). Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kualifikasi guru pada tingkat pendidikan PAUD sebesar 58,75 persen, Tingkat SD/MI dengan kualifikasi akademik Sarjana atau Diploma IV sebesar 94 persen dan kualifikasi guru pada tingkat pendidikan SMP/MTs dengan kualifikasi akademik Sarjana atau Diploma IV mencapai 98 persen.

Pada dasarnya, sertifikasi guru adalah proses pengujian dan pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Hal ini dapat membantu guru dalam memberikan pendidikan yang relevan dan up-to-date bagi peserta didik di sekolah. Sertifikasi guru PAUD sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Saat ini capaian guru PAUD yang bersertifikasi hanya mencapai 9,7 persen,

sedangkan untuk capaian sertifikasi pada tingkat SD/MI dan SMP/MTS masing-masing sebesar 47,74 persen dan 56,02 persen.

Indikator kemampuan literasi meliputi kemampuan memahami teks, memperoleh informasi, merefleksikan isi bacaan, menggunakan bahasa dengan tepat, dan mampu menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Setiap tahunnya kemampuan literasi siswa tingkat SD mengalami peningkatan dari 46,06 pada tahun 2022 meningkat menjadi 55,62 pada tahun 2024, sama dengan capaian kemampuan literasi tingkat SMP yang mengalami peningkatan dari 48,36 pada tahun 2022 meningkat secara signifikan menjadi 65,69 pada tahun 2024.

Indikator kemampuan numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan angka dan simbol matematika dasar untuk memecahkan masalah. Selama lima tahun terakhir, kemampuan numerasi siswa tingkat SD mengalami peningkatan dari 29,18 pada tahun 2022 meningkat menjadi 51,37 pada tahun 2024, sama dengan capaian kemampuan literasi tingkat SMP yang mengalami peningkatan dari 30,87 pada tahun 2022 meningkat secara signifikan menjadi 59,34 pada tahun 2024.

#### 2.1.5.1.2 Urusan Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat harus dikedepankan seiring pembangunan aspek lainnya.

**1. Jumlah Kematian Bayi**

Jumlah kematian bayi Kota Tanjungbalai belum menunjukkan perbaikan secara signifikan, pada tahun 2024 sebanyak 19 orang, sama dengan jumlah kematian bayi pada tahun sebelumnya, Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi sejak dalam kandungan hingga dilahirkan menjadi fokus perhatian yang harus lebih ditingkatkan ke depan, Tiga penyebab utama kematian bayi adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi perinatal dan diare.

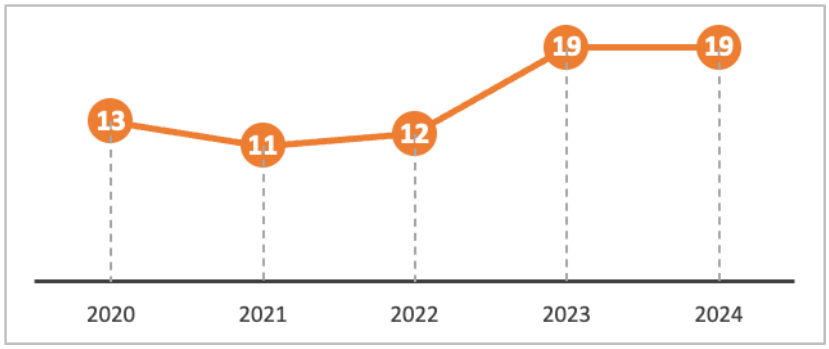


**Gambar 2.34**
**Angka Kematian Bayi dan Balita Kota Tanjungbalai, 2020-2024**
*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2021*

**2. Jumlah Kematian Balita (AKABA)**

Jumlah Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun. Berbeda dengan indikator jumlah kematian bayi, upaya untuk menurunkan jumlah kematian balita sudah menunjukkan perbaikan, Pada tahun 2020 jumlah kematian balita mencapai 28 menurun secara signifikan menjadi 1 orang pada tahun 2024. Penyebab utama kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare, penyakit syaraf dan penyakit saluran pernafasan,

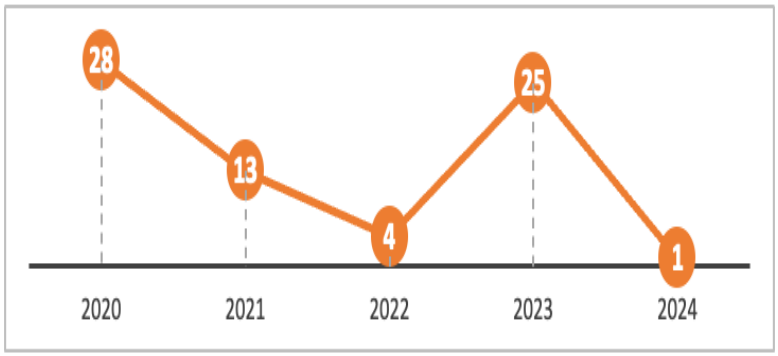


**Gambar 2.35**
**Angka Kematian Balita Kota Tanjungbalai, 2020—2024**
*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2025*

**3. Jumlah Kematian Ibu**

Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kematian ibu terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, Kasus kematian ibu di Kota Tanjungbalai yang terdaftar pada dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi,

Jumlah kematian ibu pada tahun 2023 sebanyak 4 jiwa menurun menjadi 3 jiwa pada tahun 2024. Beberapa faktor risiko yang paling sering menyebabkan kematian ibu, antara lain hipertensi dan pendarahan**.**

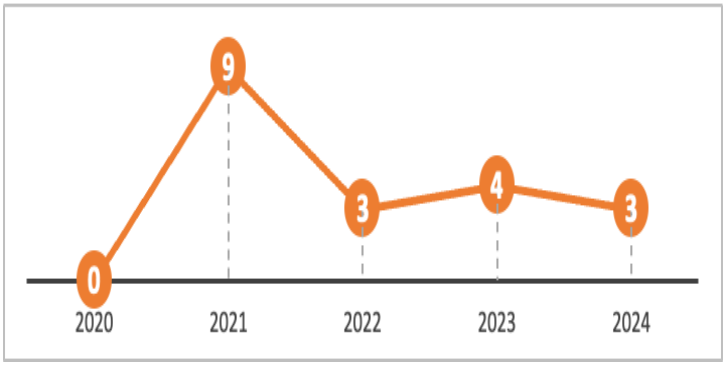


**Gambar 2.36**
**Jumlah Kematian Ibu Kota Tanjungbalai, 2020-2024**
*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2025*

**4. Persentase Penolong Kelahiran**

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kelangsungan hidup bayi adalah persentase penolong kelahiran. Dari kedua jenis penolong yang diklasifikasikan, tenaga kesehatan menjadi penolong kelahiran dengan nilai persentase yang lebih tinggi dari penolong kelahiran lainnya. Pada tahun 2020-2024, persentase kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan sudah mencapai angka 100 persen.

**Tabel 2.46**
**Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| No | Penolong Kelahiran | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Tenaga Kesehatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Non Tenaga Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

**5. Bayi Gizi Buruk**

Angka kelahiran bayi di Kota Tanjungbalai selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2024 jumlah bayi yang lahir di Kota Tanjungbalai tercatat sebanyak 1.778 jiwa.

Di sisi lain, bayi dengan gizi buruk di Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 3 (tiga)

faktor penyebabnya, adalah: kemiskinan, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemberian gizi yang baik serta faktor penyakit bawaan pada anak seperti jantung, TBC, HIV, AIDS dan diare. Pada tahun 2020, terdapat 34 bayi gizi buruk. Setahun berikutnya, jumlah bayi gizi buruk menurun menjadi 3 jiwa, kemudian meningkat lagi secara signifikan menjadi 39 pada tahun 2022.

**Tabel 2.47**
**Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| No | Kategori | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1, | Bayi lahir | 2.723 | 2.596 | 2.668 | 145 | 1.778 |
| 2, | Jumlah BBLR | 25 | 26 | | | 39 |
| 3, | Gizi Buruk | 34 | 3 | 39 | 7 | 25 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

**6. Fasilitas kesehatan**

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan di Kota Tanjungbalai relatif tidak banyak mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 2024 Kota Tanjungbalai tidak memiliki rumah bersalin, sedangkan Posyandu menjadi fasilitas kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai dengan jumlah 120 posyandu, Tujuan mengadakan posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita, serta diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup rata-rata, Posyandu yang ideal adalah jika 1 (satu) posyandu dapat melayani 100 balita/700 kepala keluarga, maka dilihat dari kondisi tersebut Kota Tanjungbalai sudah memenuhi syarat.

**Tabel 2.48**
**Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2020–2024**

| No | Jenis Fasilitas Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah sakit | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rumah bersalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Puskesmas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Posyandu | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5 | Klinik/Balai Kesehatan | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Polindes | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

7. **Tenaga Kesehatan**

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2014 yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, Ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Tanjungbalai masuk kategori kurang, Sampai dengan 2024, perawat menjadi tenaga kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai dengan jumlah 196 orang, berikutnya bidan dan dokter dengan jumlah 179 orang dan 69 orang.

**Tabel 2.49**
**Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kota Tanjungbalai, 2024**

| No | Unit Kerja | Tenaga Medis | | | | Tenaga Non Medis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dokter | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli Gizi | Sanitasi | Kesmas |
| 1 | Datuk Bandar | 4 | 22 | 34 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Datuk bandar Timur | 6 | 27 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Tanjungbalai Selatan | 3 | 30 | 21 | 2 | 1 | - | 5 |
| 4 | Tanjungbalai Utara | 5 | 40 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Sei Tualang Raso | 45 | 27 | 22 | - | 1 | 1 | 9 |
| 7 | Teluk Nibung | 6 | 50 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

Jumlah tenaga dokter pada setiap kecamatan di Kota Tanjungbalai sudah merata, sedangkan untuk dokter gigi masih ada kecamatan belum memilikinya, antara lain: Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Tanjungbalai Utara. Meski demikian, hal tersebut tidak menghambat masyarakat memperoleh layanan kesehatan karena jarak antarkecamatan yang relatif dekat, sementara kebutuhan tenaga dokter di RSUD Tengku Mansyur sebanyak 14 orang yang belum tercukupi.

**Tabel 2.50**
**Banyaknya Tenaga Dokter Menurut Kecamatan Kota Tanjungbalai, 2024**

| No | Kecamatan | Dokter Umum | Dokter Gigi | Ahli Gizi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datuk Bandar | 3 | 1 | - |

| No | Kecamatan | Dokter Umum | Dokter Gigi | Ahli Gizi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Datuk Bandar Timur | 3 | - | - |
| 3 | Tanjungbalai Selatan | 3 | 1 | - |
| 4 | Tanjungbalai Utara | 6 | - | - |
| 5 | Sei Tualang Raso | 4 | 1 | - |
| 6 | Teluk Nibung | 7 | 1 | - |
| **Tanjungbalai** | | **26** | **4** | **-** |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Kesehatan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.51**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kesehatan, 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2 | Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,06 |
| 3 | Rasio dokter per satuan penduduk x 1000 | 0,44 | 0,24 | 0,38 | 0,46 | 0,45 |
| 4 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 | 6,21 | 2,65 | 4,53 | 4,92 | 4,79 |
| 5 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | 45,30 | 36,70 | | 10 | 85 |
| 6 | Cakupan kelurahan UCI (%) | 0 | 64,50 | 64,50 | 22,60 | 100 |
| 7 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Angka keberhasilan pengobatan TB + | 58,30 | 49,40 | 52,30 | 91,50 | 62,70 |
| 9 | Cakupan kunjungan bayi (%) | 66,10 | 70,60 | 98,40 | 96,40 | 73,50 |
| 10 | Prevalensi balita gizi buruk | 0,45 | 0,93 | 0,35 | 0,32 | 0,44 |
| 11 | Cakupan pertolongan persalinan di faskes | 68,90 | 70,80 | 72,80 | 64,30 | 83,90 |
| 12 | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | 0,4 | 0,1 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
| 13 | % kasus stunting anak dibawah dua tahun (Baduta) | 8,8 | 6,61 | 2,86 | 2,43 | 2,43 |

| No | Indikator Kinerja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (gizi kurang dan obesitas | 0,6 | 0,5 | 2,9 | 0,3 | 0,5 |
| 15 | Prevalensi Ibu hamil anemia | 13,5 | 8,75 | 3,2 | 3,62 | 12,3 |
| 16 | Bayi usia kurang dari 6 bulan yang medapatkan ASI eksklusif | 9,70 | 18,20 | 22,50 | 5,70 | 16,2 |
| 17 | Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan | 81,50 | 86,40 | 95,45 | 97,46 | 97,20 |
| 18 | Pelayanan Kesehatan ibu hamil: | | | 62,19 | 75,30 | 87,19 |
| 19 | Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir | | | 72,60 | 66,08 | 87,54 |
| 20 | Pelayanan Kesehatan Balita | | | 61,05 | 62,93 | 96,92 |
| 21 | Pelayanan Kesehatan pd Usia Pendidikan Dasar | | | 32,63 | 26,24 | 72,38 |
| 22 | Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif | | | 45,56 | 20,05 | 40,56 |
| 23 | Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut | | | 33,71 | 46,20 | 72,64 |
| 24 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 32,77 | 10,88 | 53,95 |
| 25 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | | | 60,98 | 49,76 | 99,58 |
| 26 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGI) | | | 72,16 | 56,74 | 83,48 |
| 27 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) | | | 34,19 | 26,11 | 83,60 |
| 28 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 25,31 | 31,45 | 94,00 |
| 29 | Cakupan Jaminan Kesehatan | | | | 95,63 | 98,40 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2025*

#### 2.1.5.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi jalan dikatakan baik apabila dapat memberikan rasa aman, nyaman dan ekonomis kepada pengguna jalan. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam  Kondisi baik dapat diketahui melalui panjang (km) kualitas jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata di atas 40 km/jam. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan terhadap capaian indikator kondisi jalan dalam kondisi baik, yaitu sepanjang 130,60 km dari sebelumnya 125,14 km.

Kondisi perbaikan ini tentunya dapat menurunkan resiko kecelakaan dan secara tidak langsung dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena dapat menghambat lancarnya arus barang dan jasa.

**Tabel 2.52**
**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan, 2021-2024**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Baik** | 120,11 | 122,44 | 125,14 | 130,64 |
| **Sedang** | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,641 |
| **Rusak** | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,31 |
| **Rusak berat** | 51,86 | 51,86 | 46,84 | 41,35 |

*Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025*

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.53**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan (%) | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 |
| 2 | Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir (Menit) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Kapasitas/fungsi drainase (volume areal tangkapan) (M3) | 694,108,725 | 694,108,725 | 694,108,725 | 694,108,725 | 694,108,725 |
| 4 | Jumlah titik LPJU baru yang Terpasang (titik) | 181 | 127 | 211 | 273 | 271 |
| 5 | Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan | 8,018 | 8,199 | 8,326 | 8,357 | 8,628 |

| No | Indikator Kinerja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik | 77 | 77 | 80 | 82 | 85 |
| 7 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%) | 66,35 | 69,89 | 71,11 | 72,54 | 75,43 |
| 8 | Penyediaan air baku (titik) | | | 2 | 4 | 12 |
| 9 | Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) dan sedang (km) | 126,791 | 132,755 | 135,076 | 137,776 | 143,276 |
| 10 | Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%) | | | 63 | 60 | 57 |
| 11 | Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) | | | 65,45 | 67,05 | 69,05 |
| 12 | Rumah tangga pengguna air minum (%) | | | 57,05 | 60,05 | 62,05 |
| 13 | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | | | 51,5 | 63,07 | 53,1 |
| 14 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Smg (%) | 0 | 0 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| 15 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Persentase kesesuaian Tata Ruang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, 2024*

Perbedaan mencolok antara banjir biasa dan banjir rob terletak pada sumber airnya. Pada banjir biasa, air yang menggenang berasal dari curah hujan yang tinggi, sedangkan pada banjir rob, air yang menggenang berasal

dari pasang laut yang dipicu oleh siklus alam. Luas kawasan Kota Tanjungbalai yang terkena banjir dan rob sebesar 19,71 persen dengan lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir rata-rata selama 120 menit.

Genangan dapat terjadi karena daya tampung saluran alam ataupun buatan tidak lagi dapat menampung aliran air hujan yang datang. Keberadaan drainase sangat penting untuk memastikan air hujan tidak menggenang di badan jalan dan keberadaan trotoar untuk pejalan kaki agar dapat terus aman dan nyaman sewaktu melintas. Kapasitas/fungsi drainase dilihat dari volume areal tangkapan sebesar 694,108,725 $m^3$ dan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 69,05 persen.

*Jumlah* penerangan jalan umum (*PJU*) Terpasang di Kota Tanjungbalai sebanyak 271 titik dengan Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun 2024 sebesar 8,628 PJU.

Ruang lingkup pekerjaan dinas PU juga meliputi pembangunan jalan. Berdasarkan tabel diketahui bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 143,27675 km atau sebesar 43 persen.

Penyediaan air baku adalah upaya untuk mendapatkan air dari sumbernya, baik dari permukaan, tanah, maupun hujan, untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan perhitungan kebutuhan air baku berdasarkan jumlah penduduk, jenis kebutuhan, dan waktu. Hingga Tahun 2024 terdapat 12 titik penyediaan air baku. Indikator ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya menyediakan 4 titik air baku.

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar adalah bagian sempadan sungai yang digunakan untuk membangun bangunan tanpa izin. Jika ada bangunan di sempadan sungai, maka bangunan tersebut masuk dalam status quo, artinya bangunan tidak boleh ada perubahan baik berkurang maupun penambahan. Indikator ini mengalami perbaikan setiap tahunnya karena pada tahun 2022 capaiannya sebesar 63 persen menurun menjadi 57 persen pada tahun 2024.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyediaan air minum dilakukan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pada tahun 2024 terdapat 62,05 persen rumah tangga pengguna air minum, dengan proporsi populasi yang

memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan sebesar 53,10 persen.

Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Namun, pada tahun 2024, realisasi RTH di Kota Tanjungbalai baru mencapai 4,4 persen, dilihat dari tabel, rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan sebesar masih 1 persen, Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diterbitkan diganti dengan Persetujuan Banguan Gedung (PBG) melalui aplikasi SIMBG dan dikelola Dinas PU dan indikator persentase kesesuaian tata ruang sebesar 100 persen.

#### 2.1.5.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**1. Pengguna Listrik**

Pemakai listrik pada jenis rumah tangga menjadi jumlah terbesar di Kota Tanjungbalai pada 2024 dengan jumlah 27.718 pelanggan. Daya yang tersambung pada jenis pemakai rumah tangga sebanyak 21.130.800 VA dan jumlah KWH terjual 4.532.767 KWH.

**Tabel 2.54**
**Banyaknya Pelanggan, Daya Tersambung, KWH Terjual dan Nilai Listrik yang Disalurkan Menurut Jenis Pemakai, 2024**

| No | Jenis Pemakai | Pelanggan | Daya Tersambung (VA) | Listrik Terjual (KWH) | Nilai (Juta Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Tangga | 27.718 | 21.130.800 | 4.532.767 | **3.699.982.475** |
| 2 | Bisnis | 985 | 8.905.100 | 1.332.508 | **1.769.522.352** |
| 3 | Industri | 70 | 15.951.500 | 2.846.113 | **3.161.506.211** |
| 4 | Sosial | 736 | 2.493.550 | 526.034 | **340.892.375** |
| 5 | Instansi Pemerintah | 240 | 5.081.200 | 768.192 | **1.308.340.320** |
| **Jumlah** | | **29.749** | **53.562.150** | **10.005.614** | **10.280.243.733** |

*Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025*

Sementara persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan setiap tahunnya, sedangkan

daya listrik yang tersambung masih terbatas tergantung pada gardu induk yang terdapat di Kota Rantau Parapat.

**Tabel 2.55**
**Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2020-2024**

| Tahun | Listrik PLN | Listrik Non PLN | Bukan Listrik |
|---|---|---|---|
| **2020** | 99,12 | 0,57 | 0,31 |
| **2021** | 100 | 0 | 0 |
| **2022** | 99,66 | 0,26 | 0,08 |
| **2023** | 99,99 | 0,01 | 0 |
| **2024** | 100 | 0 | 0 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

**2. Pengguna Air Minum**

Pengguna air minum di Kota Tanjungbalai meliputi rumah tangga yang menggunakan air isi ulang, air kemasan, air leding, air pompa, air sumur, dan air mata air. Terhitung sampai 2024, jumlah pelanggan air minum di Kota Tanjungbalai didominasi oleh rumah tempat tinggal dengan jumlah pelanggan sebanyak 24.222 dan nilai Rp 1,567 miliar.

**Tabel 2.56**
**Banyaknya Pelanggan Air Minum yang Disalurkan dan Nilai Air Minum Menurut Jenis Pemakai di Kota Tanjungbalai, 2024**

| No | Jenis Pemakai | Pelanggan | Air disalurkan (m3) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Tempat Tinggal | 24.222 | 412.119 | **1.567.082.821** |
| 2 | Hotel/Objek Wisata/Pertokoan dan Industri | 3,267 | 77,815 | **418.425.466** |
| 3 | Sosial | 293 | 17,058 | **40.687.608** |
| 4 | Umum | 115 | 2,728 | **4.452.096** |
| 5 | Instansi Pemerintah | 180 | 9,268 | **48.548.736** |
| **Jumlah** | | **28.077** | **518,988** | **2.079.196.727** |

*Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025*

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Selama lima tahun terakhir, rumah tangga pengguna air minum layak mengalami peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2024 terdapat sekitar 91,27 persen rumah tangga yang mendapatkan air minum layak. Angka tersebut tersebut sudah tergolong tinggi karena hampir seluruh RT yang ada di Kota Tanjungbalai yang

menikmati air bersih, hal tersebut didukung penyedia peralatan *Water Treatment Plant (WTP)* atau instalasi pengolahan air yang, saat ini berjumlah 7 buah.

**Tabel 2.57**
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak, 2020-2024**

| Tahun | Layak | Tidak Layak |
|---|---|---|
| **2020** | 83,20 | 16,80 |
| **2021** | 87,20 | 12,80 |
| **2022** | 87,59 | 12,41 |
| **2023** | 100 | 0,00 |
| **2024** | 91,27 | 8,73 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

### 3. Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL).

**Tabel 2.58**
**Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi layak, 2021-2024**

| Tahun | Layak | Tidak Layak |
|---|---|---|
| **2021** | 89,07 | 10,93 |
| **2022** | 93,51 | 6,49 |
| **2023** | 94,37 | 5,63 |
| **2024** | 96,82 | 3,18 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Menurut data BPS pada tahun 2024, Kota Tanjungbalai masih memiliki sanitasi tidak layak sebesar 3,18 persen. Salah satu masalahnya yaitu akses pembuangan tinja. Kondisi sanitasi perlu diperhatikan yaitu penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah dan pengolahan limbah. Sanitasi dirancang untuk menjaga kesehatan manusia dengan menciptakan lingkungan bersih yang mencegah penularan penyakit. Sanitasi yang baik membantu meminimalkan risiko diare dan banyak penyakit lain seperti contohnya kolera, hepatitis, polio, schistosomiasis, dan trachoma.

**4. Kondisi Tempat Tinggal Layak Huni**

Rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi diantaranya: fisik bangunan, Kesehatan dan energi dan segi sosial masyarakat. Rumah layak hini dimaknai dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, sanitasi serta aman bagi aktifitas penghuninya.

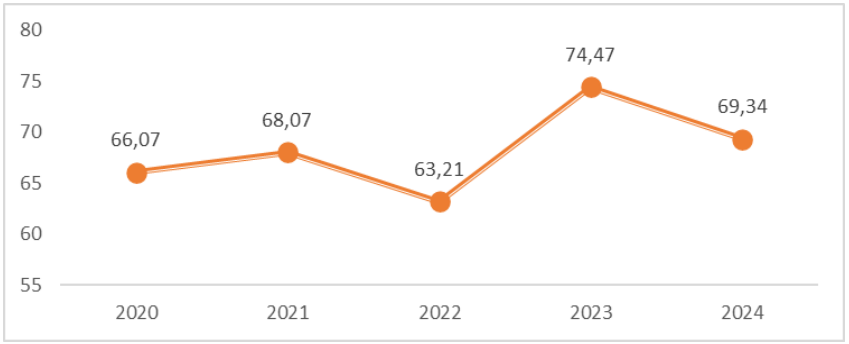


**Gambar 2.37**
**Rumah Layak Huni Kota Tanjungbalai, 2020-2024**
*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Menurut data BPS, hanya ada sekitar 69,34 persen rumah tangga di Kota Tanjungbalai yang memiliki tempat tinggal layak huni, sedangkan sisanya tidak. Pada dasarnya, rumah tidak layak huni adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian layak sesuai ketetapan pemerintah. RTLH memiliki konstruksi bangunan yang tidak andal, luasnya tidak sesuai standar hunian per orang, serta tidak menyehatkan dan/atau membahayakan bagi penghuni.

### 2.1.5.1.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam hal ketertiban umum, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Apabila

dipandang perlu, Polri akan membantu pemerintah daerah, sedangkan Polri menegakkan semua peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam penegakan peraturan daerah, tidak jarang terjadi pelanggaran, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.59**
**Penyelesaian Perkara di Kota Tanjungbalai, 2022-2024**

| Indikator | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **Jumlah Perkara yang Diselesaikan** | 307 | 317 | 350 |
| **Jumlah Seluruh Perkara masuk** | 642 | 560 | 816 |
| **Tingkat Penyelesaian Seluruh Perkara (%)** | 47,8 | 56,61 | 42,89 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

Indikator yang dimaksud pada tabel di atas adalah penyelesaian seluruh perkara yang diselesaikan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai. Jumlah perkara yang masuk atau dilaporkanpada tahun 2024 mengalami peningkatan demikian halnya dengan tingkat penyelesaian perkara yang juga mengalami peningkatan, yaitu terdapat 816 perkara dengan jumlah Perkara yang Diselesaikan sebanyak 350 atau tingkat penyelesaian sebesar 42,89 persen.

**Tabel 2.60**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100,000 orang penduduk | 0,58 | 0,21 | 0,002 | 0,0007 | 0,21 |
| 2 | Persentase pemenuhan bagi korban bencana (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Indeks resiko bencana | 114 | 114 | 114 | 109 | 107,3 |
| 4 | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Rp) | | 115,000,000 | | | |
| 5 | Jumlah kota (kelurahan) tangguh bencana yang terbentuk | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 |
| 6 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) | 65,97 | 70,71 | 69,57 | 73,83 | 66,86 |

| No | Indikator Kinerja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) | 38,63 | 70,71 | 69,57 | 73,83 | 0,09 |
| 8 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban | 81,39 | 29,34 | 2,95 | 100 | 66,33 |
| 9 | Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk | 19,03 | 18,85 | 18,63 | 18,28 | 18,1 |
| 11 | Rasio Penegakan PERDA (%) | 66,85 | 80 | 82,61 | 82,61 | 94,04 |
| 12 | Cakupan patroli petugas Satpol PP (%) | 70 | 77 | 80 | 83 | 90 |
| 13 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada | 119 | 68 | 57 | 57 | 79 |
| 14 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 25 | 35 | 23 | 39 | 50 |
| 15 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 6 | 12 | 39 | 64 | 28 |

Dalam hal penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran, perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok tersebut adalah Polisi Pamong Praja, Kejadian kebakaran pada umumnya terjadi di lokasi dengan tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi, Korelasi antara bangunan gedung, tingkat aktivitas kawasan serta kondisi kawasan seperti kawasan permukiman kumuh, permukiman liar hingga kawasan industri yang kurang tertata, memicu tingginya tingkat kerawanan kebakaran di wilayah perkotaan, Penanganan bencana kebakaran meliputi kegiatan pencegahan,

kesiapsiagan, tanggap darurat, hingga pemulihan dimana memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak yang harus segera ditindaklanjuti.

Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang meninggal, tidak ditemukan dan menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya, Selama lima tahun terakhir indikator ini mengalami penurunan, pada Tahun 2020 terdapat 0,58 persen penduduk yang terdapak akibat bencana menurun menjadi 0,21 persen.

Indeks Risiko Bencana digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana, Dalam konteks ini, kesiapsiagaan masyarakat merupakan salah satu pilar utama yang dapat mengurangi risiko bencana dan meminimalisir dampak yang ditimbulkannya, Indeks resiko bencana Kota Tanjungbalai Tahun 2020 sebesar 114 menurun menjadi 107,3 artinya Pemerintah Kota Tanjungbalai semakin serius dalam menanggulangi bencana.

Seluruh kelurahan di Kota Tanjungbalai sudah menjadi Kelurahan tangguh bencana, artinya yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Untuk mengurangi korban meninggal dan hilang maka perlu melaksanakan edukasi bencana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, Pada Tahun 2024, jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana sebesar 66,86 persen.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri, Selama lima tahun terakhir, capaian indikator ini sudah mencapai target yaitu sebesar 100 persen.

Pada prinsipnya penegakan perda merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk memastikan perda tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, Efektivitas penegakan perda pada tahun 2020 mencapai 66,85 persen meningkat menjadi 94,04 persen pada tahun 2024.

Memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban merupakan indikator SPM yang harus dipenuhi, Pada tahun 2024 terdapat 50 orang korban kebakaran yang mendapatkan bantuan penyelamatan dan evakuasi.

**Tabel 2.61**
**Sarana/Prasarana Keamanan, Ketertiban Umum dan Tanggap Bencana**
**Kota Tanjungbalai, 2024**

| Sarana/Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum | Jumlah | Sarana/Prasarana Tanggap Bencana | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aparat Pamong Praja (orang) | 57 | Transportasi : | |
| Aparat Linmas (orang) | 0 | - Kendaraan Roda 2 | 2 unit |
| Aparat Petugas Patroli Satpol PP | 10 orang | - Kendaraan Roda 4 | 3 unit |
| Kendaraan Operasional Roda 2 | 2 unit | - Kendaraan Roda > 4 | 0 |
| Kendaraan Operasional Roda 4 | 3 unit | Peralatan Komunikasi (Hand Talky) | 8 unit |
| | | Peralatan Kesehatan : | |
| Kebakaran : | | - Mobil Ambulance | 0 unit |
| - Petugas Pemadam Kebakaran | 115 orang | - Tandu | 0 unit |
| - Mobil Pemadam Kebakaran | 8 unit | - Tabung Oksigen | 0 unit |
| - Pos Pemadam Kebakaran | 1 unit | - Peralatan Kesehatan Lainnya | 0 unit |
| - Becak ( Roda 3 ) | 3 unit | | |
| | | Peralatan Hunian Sementara: | |
| | | - Tenda | 0 unit |
| | | - Dapur Umum | 0 unit |
| | | - Generator | 0 unit |

*Sumber: Satpol PP Kota Tanjungbalai, 2025*

### 2.1.5.1.6 Urusan Wajib Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS. Pada Tahun 2024 terdapat 20.597 PMKS dengan jumlah jenis PMKS yang terbanyak adalah fakir miskin sebanyak 21.112.

**Tabel 2.62**
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungbalai, 2023-2024**

| No | Jenis PMKS | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anak Balita Terlantar | - | - |
| 2 | Anak Terlantar | 12 | 12 |
| 3 | Anak Berhadapan dengan Hukum | 44 | 44 |
| 4 | Anak Jalanan | 1 | - |
| 5 | Anak dengan Kedisbilitasan | 131 | 131 |
| 6 | Anak Korban Tindak Kekerasan | - | - |
| 7 | Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | 1 | 1 |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | 583 | 583 |
| 9 | Penyandang Disabilitas | 105 | 621 |
| 10 | Tuna Susila | - | - |
| 11 | Gelandangan | - | - |
| 12 | Pengemis | 1 | 1 |
| 13 | Pemulung | 30 | 30 |
| 14 | Kelompok Minoritas | - | - |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 19 | 19 |
| 16 | Orang dengan HIV AIDS (ODH) | - | - |
| 17 | Korban Penyalahgunaan | 18 | 18 |
| 18 | Korban Trafficking | - | - |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | - | - |
| 20 | Pekerja Migran bermasalah sosial | 1 | 1 |
| 21 | Korban Bencana Alam | - | - |
| 22 | Korban Bencana Sosial | 32 | 32 |
| 23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 702 | 702 |
| 24 | Fakir Miskin | 18904 | 18904 |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 13 | 13 |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil | - | 0 |
| **JUMLAH** | | **20.597** | **21.112** |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, 2025*

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Sosial dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.63**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Sosial, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah PMKS | 35,399 | 28,769 | 28,884 | 20,597 | 21,112 |
| 2 | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | 16,451 | 19,751 | 22,077 | 19,046 | 20,561 |
| 3 | PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 16,451 | 19,751 | 21,708 | 18,478 | 20,277 |
| 4 | Cakupan disabilitas miskin yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar (%) | 8,18 | | 4,24 | 6,93 | 3,7 |
| 5 | Persentase Rumah Tangga miskin yang memperoleh Program PKH (%) | 38,83 | 48,66 | 42,95 | 47,43 | 44,55 |
| 6 | Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 40,81 | 26,22 | 61,38 | 99,01 | 51,69 |
| 7 | Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 33,33 | 75 | 83,33 | 91,67 | |
| 8 | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 17,55 | 48,42 | 64,19 | 35,51 | 20,58 |
| 9 | Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | | 100 | 100 | 100 | 0 |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, 2025*

Pembangunan pada Urusan Sosial salah satunya diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multidimensional. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pembangunan di bidang sosial diantaranya melalui pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS), serta pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PMKS Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali tahun 2024 yang mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024 terdapat 21.112 orang PMKS, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 20,597 orang PMKS.

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada Tahun 2024 capaian Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sekaligus memperoleh bantuan sosial sebesar 97 persen. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan, pemerintah pusat juga memberikan bantuan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah penerima PKH setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2024 terdapat 44,55 persen masyarakat miskin yang mendapat bantuan PKH. Dalam pelaksanaan program ini dikenal ada istilah graduasi, artinya masyarakat yang tingkat pendapatannya sudah di atas garis kemiskinan, diharapkan keluar sebagai penerima manfaat,

Program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya: berbasis keluarga, berbasis komunitas, berbasis residensial, dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik dan terapi psikososial, Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2024 mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 99,09 persen menjadi 51,69 persen.

Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2024 juga mengalami oenurunan dari 35,51 persen menjadi 20,58 persen, bahkan karena keterbatasan anggaran, pada tahun 2024, tidak ada gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial.

#### 2.1.5.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Penduduk dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran berkaitan dengan beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal mengakibatkan jumlah lapangan kerja yang terbatas. Kedua, kurangnya kesesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, rendahnya kualitas Pendidikan. Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Tenaga Kerja dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.64**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Tenaga Kerja, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan | **2.133** | **2.133** | **7.878** | **9.553** | **12.891** |
| 2 | Upah Minimum Kota Tanjungbalai | 2.822.425,35 | 2.822.425,35 | 2.829.107,00 | 3.022.759,00 | 3.244.606,00 |

*Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, 2025*

Hingga saat ini, sudah ada 4 program BPJS Ketenagakerjaan yang dikenal di kalangan pekerja yaitu: jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pension. Selama lima tahun terakhir jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan mengalami peningkatan dari 2.133 peserta pada tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 12.891 pada tahun 2024.

Upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur secara serentak pada tanggal 1 Nopember. Selain UMP, gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan rekomendasi bupati/wali kota. Pada Tahun 2024, ditetapkan bahwa upah minimum Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 3.244.606.

### 2.1.5.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kegiatan fasilitasi kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja serta pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

**Tabel 2.65**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 89,69 | 90,02 | 90,28 | 90,53 | 90,89 |
| 2 | Jumlah Forum Anak yang terbentuk (SK) | 20 | 20 | 20 | 26 | 27 |
| 3 | Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak | 24 Indikator | 24 Indikator | 24 Indikator | 24 Indikator | 24 Indikator |
| 4 | Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dlm rangka KLA (lokasi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Rasio KDRT (kasus) | 10 | 12 | 15 | 8 | 21 |
| 6 | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus) | 21 | 40 | 64 | 68 | 75 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 50,91 | 54,21 | 49,50 | 54,38 | - |
| 8 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) | 50,91 | 54,21 | 49,50 | 54,38 | - |
| 9 | Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) | 46,70 | 50,81 | 55,55 | 56,16 | - |
| 10 | Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD (%) | 20 | 20 | 20 | 24 | - |
| 11 | Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 50,91 | 54,21 | 49,50 | 54,38 | - |
| 12 | Cakupan program pengarusutamaan gender | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan | 9 Kasus | 17 Kasus | 31 Kasus | 29 Kasus | 34 Kasus |
| 14 | Pemberdayaan terhadap korban KDRT | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 15 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 63,28 | 63,46 | 64,08 | 66,84 | 70,61 |
| 16 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 89,69 | 90,02 | 90,28 | 90,53 | 90,89 |
| 17 | Persentase perempuan di lembaga legislatif | 20 | 20 | 20 | 24 | - |
| 18 | Persentase perempuan di lembaga pemerintahan | 50,91 | 54,21 | 49,50 | 54,38 | - |
| 19 | Jumlah Anak Korban Kekerasan (orang) | 11 | 19 | 45 | 43 | 44 |
| 20 | Prevalensi kekerasan terhadap anak (%) | 9 | 0,029 | 0,076 | 0,073 | 0,073 |
| 21 | Jumlah LPM yang aktif | | | | | 31 Kelurahan 6 Kecamatan |
| 22 | Jumlah kelompok binaan | PEKKA | PEKKA | PEKKA | PEKKA | - |

*Sumber: Dinas P3A&PM Kota Tanjungbalai, 2025*

IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor pembangunan gender saling berinteraksi. Berdasarkan data BPS, IPG Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dari 90,28 pada tahun 2022 menjadi 90,53 pada tahun 2023. Kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta dengan perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Selain itu pemerintah juga serius dalam memperhatikan kepentingan/ kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat, terlihat dari sudah cukup banyaknya forum-forum anak yang terbentuk di tingkat kelurahan dan kecamatan, guna mewujudkan Kota Tanjungbalai sebagai Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Tanjungbalai juga sangat peduli terhadap penanganan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Pada Tahun 2024 terdapat 75 kasus pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terselesaikan.

#### 2.1.5.1.9 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.66**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pangan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | 89 | 91,4 | 86,6 | 88,6 |
| 2 | Cakupan Daerah Rentan Pangan (Kelurahan) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Ketersediaan Pangan Penduduk (Kkal/ Kapita/hari) | 2147,54 | 2222,52 | 2133,16 | 2138,55 | 2065,3 |

*Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai, 2025*

### 2.1.5.1.10 Urusan Lingkungan Hidup

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan lingkungan hidup dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.67**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Lingkungan Hidup, 2020-2024**

| No. | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Lingkungan (jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi) | 50 | 54 | 58 | 61 | 63 |
| 2. | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%) | 94 | 94 | 95 | 95 | 98 |
| 3. | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4. | Jumlah Limbah B3 yang dikelola usaha dan/atau kegiatan (ton) | 19,1 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
| 5. | Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) | 62,79 | 62,49 | 62,10 | 61,96 | 63,80 |
| 6. | Indeks kualitas air (IKA) | 53,87 | 53,71 | 53,42 | 53,33 | 55,71 |
| 7. | Indeks kualitas lahan (IKL) | 22,65 | 22,65 | 22,88 | 25,81 | 27,4 |
| 8. | Indeks kualitas udara (IKU) | 92,78 | 92,21 | 91,38 | 89,52 | 90,98 |
| 9. | Persentase Ruang Terbuka Hijau (%) | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 10. | Persentase jumlah sampah diangkut dari sumber sampah ke TPA (%) | 71,59 | 74,80 | 73,86 | 63,74 | 68,88 |
| 11. | Persentase jumlah sampah yang dilakukan penanganan dan pengurangan (%) | 75,60 | 78,91 | 78,80 | 78,25 | 71,43 |
| 12. | Jumlah Bank Sampah yang beroperasional | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Produksi Lumpur Tinja ($m^3$) | 32.124,93 | 32.419,30 | 32.804,01 | 33.428,53 | 33.880,58 |
| 14 | Penurunan emisi gas rumah kaca | | | | | 0,5 |
| 15 | Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, 2025*

Kinerja pembangunan pada urusan lingkungan hidup yang diukur berdasarkan indikator pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Lingkungan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Tanjungbalai. SKKL diterbitkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memilliki Amdal atau atau dokumen sejenis Amdal (DELH dan sejenisnya), sedangkan PKPLH diterbitkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memilliki UKL UPL atau dokumen sejenis UKL UPL (DPLH dan sejenisnya). Tujuan pengawasan ini adalah dalam rangka terselenggaranya pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk mencegah atau meminimalkan dampak negatif.

Pada Tahun 2024 pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Lingkungan dilakukan terhadap seluruh usaha dan/atau kegiatan yang berada di Kota Tanjungbalai yang wajib UKL UPL berjumlah 63 usaha dan/atau kegiatan dan tidak ada pengawasan terhada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dengan Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, karena Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak pernah menerbitkan SKKL, dimana persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2024 adalah 98% dan jumlah Limbah B3 yang dikelola usaha dan/atau kegiatan pada tahun 2024 adalah 10,1 ton menurun dari tahun 2020 sebesar 19,1 ton. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada tahun 2020 adalah puncak dari pandemi Covid-19 yang banyak menghasilkan limbah B3 Medis.

Kinerja pembangunan pada urusan lingkungan hidup yang diukur berdasarkan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, IKLH merupakan hasil penggabungan analisis dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pada tahun 2020 nilai IKLH sebesar 63,5 meningkat menjadi 63,8 pada tahun 2024, Kisaran nilai $50 \leq IKLH \leq 60$ artinya Kota Tanjungbalai berada pada predikat sedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung dengan membanding luas tutupan vegetasi dengan luas wilayah administratifnya, termasuk perhitungan IKL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman keanekaragaman hayati. IKL Kota Tanjungbalai berdasarkan kondisi eksisting tutupan lahannya adalah 12 persen sehingga Indeks kualitas lahan (IKL) pada tahun 2024 adalah sebesar 27,4 yang artinya kualitas tutupan lahan yang rendah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) menggunakan parameter kualitas air yaitu DO, Fecal Coliform, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan BOD pada air permukaan sungai dengan priode pemantauan 2 kali setiap tahunnya pada titik pantau hulu dan hilir. Pada tahun 2020 nilai IKA sebesar 53,87 dan naik menjadi 55,71 pada tahun 2024, Kisaran nilai 50≤IKA≤60 artinya indeks kualitas air Kota Tanjungbalai berada pada predikat sedang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan indeks kualitas udara (IKU) hanya menggunakan dua parameter saja yaitu $NO_2$ dan $SO_2$, Parameter $NO_2$ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan $SO_2$ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Pada tahun 2020 nilai IKU sebesar 92,78 menurun menjadi 90,98 pada tahun 2024, Kisaran nilai 75-100 artinya tingkat polusi udara sedang. Penurunan kualitas udara dapat diterima mengingat pada tahun 2020 diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehubungan dengan Pandemi Covid 2019, namun untuk tahun-tahun selanjutnya relatif stabil walaupun untuk beberapa polutan selain parameter $NO_2$ dan $SO_2$ tersebut mungkin terdapat masalah kesehatan yang moderat bagi sejumlah kecil orang yang sangat sensitif terhadap polusi udara.

Timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan dampak lingkungan yang buruk dan pada akhirnya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Secara umum kinerja pembangunan pada urusan lingkungan hidup dari sektor pengolaan

sampah terlihat persentase volume sampah terangkut dari sumber sampah ke TPA mengalami penurunan dari 71,59 persen pada tahun 2020 menjadi 68,88 persen tahun 2024, dengan persentase jumlah sampah yang dilakukan penanganan dan pengurangan sebesar 75,60 persen pada tahun 2020 dan 71,43 pada tahun 20024. Penurunan kinerja pengeloaan sampah ini disebabkan oleh sarana dan prasarana persampahan yang masih rendah rasionya dibandingkan dengan timbulan sampah perkapita, disamping karena rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seperti terlihat dalam pengelolaan sampah yang mengadopsi konsep 3R, yaitu reduce (mereduksi timbulan sampah), reuse (pemanfaatan kembali), dan recyle (daur ulang). Dimana fasilitas yang mengelola sampah dengan prinsip 3R melalui bank sampah masih rendah dan hanya tersedia sebanyak 2 unit untuk melayani seluruh Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan IPLT No. CT/AL/ReTC/001/98, setiap manusia menghasilkan lumpur tinja sebanyak 0,5 liter per hari atau 0,1825 m3 per tahun, produksi lumpur tinja di Kota Tanjungbalai adalah sebesar 32.124,93 m3 /tahun (2024) menjadi 33.880,58 m3 /tahun (2029) atau selama pada priode tahun 2020-2024 adalah sebesar 164.657,34 m3. Material yang terkandung dalam lumpur tinja berupa padatan zat – zat organik, lemak, minyak, pasir (grit) yang dapat berpotensi sebagai tempat pertumbuhan virus penyebab penyakit, bakteri dan parasit. Lumpur tinja masih memiliki kandungsan zat organik yang tinggi sehingga perlu dilakukan pengolahan (treatment) terhadap lumpur tinja. Karena jika lumpur tinja dibuang secara langsung ke tanah, akan berbahaya bagi ekosistem lingkungan.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Rendahnya timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan infrastruktur

pengolahan sampah, dan kurangnya efektivitas dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah.

#### 2.1.5.1.11 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Usia perkawinan pertama seorang wanita sangat berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga serta kesehatan ibu, dan anak yang dilahirkan. Semakin rendah usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan melahirkan. Kondisi ini disebabkan belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau belum siapnya mental menghadapi proses kehamilan. Sebaliknya semakin tinggi usia perkawinan yang melampaui batas yang dianjurkan juga sangat beresiko pada masa kehamilan dan melahirkan. Batasan usia perkawinan dibawah umur adalah dibawah 17 tahun. Persentase wanita berusia 10 tahun keatas yang berstatus pernah kawin di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.68**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengendalian angka kelahiran (TFR) | 2,93 | 2,93 | 2,78 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Jumlah peserta KB aktif | 140250 | 138124 | 137168 | 181670 | 176330 |
| 3 | Rasio Akseptor KB per 100 PUS | 62,13 | 61,13 | 62,13 | 66,82 | 65,07 |
| 4 | Jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan | 300 | 300 | 225 | 375 | 140 |
| 5 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 700 | 865 | 560 | 927 | 2725 |
| 6 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 550 | 600 | 312 | 634 | 1358 |
| 7 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | 450 | 500 | 525 | 580 | 600 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cakupan PUS yang isterinya <20th | 28,1 | 30,51 | 31,49 | 32,99 | 34,39 |
| 9 | Cakupan Tingkat Putus Alat Kontrasepsi (DO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cakupan peserta KB aktif | 140250 | 138124 | 137168 | 181670 | 176330 |
| 11 | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern | 4,105 | 4,748 | 4,978 | 5,123 | 5,158 |
| 12 | Cakupan PUS unmet need | 15,00 | 15,75 | 15,52 | 12,32 | 13,89 |

*Sumber: Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai, 2025*

### 2.1.5.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah. Peningkatan/ penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan.

Database kependudukan sangat diperlukan sebagai data/ bahan/ masukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum, Sejak tahun 2016-2020 Kota Tanjungbalai telah mewujudkan ketersediaan database kependudukan. KTP berbasis NIK merupakan KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Disduk & Catpil telah menerapkan KTP berbasis NIK. Berikut adalah gambaran tertib administrasi kependudukan selama kurun waktu 2020- 2024.

**Tabel 2.69**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | | 99,13% | 97,98% | 96,49% | 98,80% |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rasio bayi berakta kelahiran | | 62,56% | 99,90% | 99,90% | 99,89% |
| 3 | Rasio pasangan berakta nikah | | 60,90% | 69,52% | 71,22% | 73,61% |
| 4 | Rasio penduduk ber NIK (Nomor Induk Kependudukan) | | 99,13% | 97,98% | 96,49% | 98,80% |
| 5 | Persentase anak yang memiliki akte kelahiran (0- 5 Tahun) | | 62,56% | 99,90% | 99,90% | 99,89% |
| 6 | Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran | | 99,37% | 99,62% | 96,49% | 99,72% |
| 7 | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) (ada/tidak ada) | **Ada** | **Ada** | **Ada** | **Ada** | **Ada** |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, 2025*

Indikator ini meliputi penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standard pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP, Berdasarkan data di atas cakupan indikator ini mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2021 telah mencapai 99,13 persen menurun menjadi 98,80 persen pada tahun 2024, Artinya 98,80 persen dari jumlah penduduk di Kota Tanjungbalai telah memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK.

Salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah adalah peningkatan kepemilikan akta kelahiran, Indikator ini juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 mencapai angka 62,56 persen, meningkat menjadi 99,89 persen pada tahun 2024. Dalam upaya peningkatan indikator tersebut, Dinas Disduk Catpil berencana untuk bekerjasama dengan tenaga kesehatan, rumah sakit dan puskesmas untuk dapat membantu menerbitkan dokumen akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir.

Pasangan yang memiliki akte perkawinan di Kota Tanjungbalai masih relatif rendah. Pada tahun 2020 masih hanya mencapai 60,90 persen pasangan menikah mendaftarkan perkawinan mereka ke Dinas Disduk Catpil mengingkat menjadi 73,61 persen pada tahun 2024. Berdasarkan kondisi tersebut diharapkan agar dinas terkait melakukan sosialisasi atau kegiatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akta

perkawinan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, terutama akta perkawinan.

### 2.1.5.1.13 Urusan Perhubungan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan prasarana dan fasiltas perhubungan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2024.

**Tabel 2.70**
**Prasarana dan Sarana Perhubungan Kota Tanjungbalai, 2024**

| No, | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Moda Angkutan Barang : | | |
| | - Truk barang umum | 22 Unit | |
| | - Mobil box | 18 Unit | |
| | - Mobil tangka | 8 Unit | |
| 2 | Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan : | | |
| | - Ferry | 6 Unit | |
| | - Kapal komersil | - | |
| 3 | Moda Angkutan Umum : | | |
| | - Bus | 135 Unit | |
| | - Angkutan Kota | 1 Unit | |
| | - Becak | 735 Unit | |
| 4 | Jumlah Perusahaan Angkutan Umum (swasta) | 15 | |
| 5 | Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum | 1 Unit | Tidak beroperasi |
| 6 | Jumlah Terminal : | | |
| | - Terminal Tipe B | 1 | Tidak beroperasi |
| | - Terminal Tipe C | 5 | Tidak beroperasi |
| | - Jumlah penumpang masuk melalui terminal tipe B | Nihil | Tidak beroperasi |
| | - Jumlah penumpang keluar melalui terminal tipe B | Nihil | Tidak beroperasi |
| 7 | Jumlah stasiun kereta api | 1 | |
| 8 | Jumlah barang menggunakan angkutan kereta api | 1.827.000 KG | |

| No, | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 9 | Jumlah penumpang kereta api | 234.931 Orang | |
| 10 | Jumlah kapal penumpang regional | - | |
| 11 | Jumlah pelabuhan penumpang | 1 | |
| 12 | Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (milik swasta) | 1 | |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, 2025*

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perhubungan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.71**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perhubungan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Terminal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Jumlah penumpang moda transportasi massal /BRT/KA | 6.139 | 62.570 | 19.599 | 24.791 | 34.931 |
| 3 | Ketersediaan sarana pendukung moda | | | | | |
| | - Transportasi massal | 166 | 140 | 141 | 141 | 141 |
| | - Jumlah halte BRT | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Cakupan wilayah terlayani transportasi (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, 2025*

Pada Kota Tanjungbalai terdapat terminal bus (stasiun bus) untuk bus kota dan antarkota, serta terminal laut (pelabuhan) untuk kapal feri atau kapal laut dengan jumlah terminal sebanyak 6 tempat. Pada tahun 2020 jumlah arus penumpang angkutan umum mencapai 590,702 orang. Moda angkutan umum yang beroperasi yaitu mulai Bus AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi), Minibus, angkutan perkotaan (angkot) dan becak dengan jumlah moda angkutan umum sekitar 982 unit.

Jumlah barang yang terangkut oleh angkutan umum pada tahun 2016 sebanyak 69,761 ton, meningkat menjadi 106,879 ton pada tahun 2020, sedangkan jumlah penumpang yang diangkut pada tahun 2016 sebesar 523,467 orang meningkat menjadi 590,720 orang.

Kereta api dipilih karena kemampuannya mengangkut muatan dalam jumlah besar melalui jarak yang jauh, mengangkut penumpang dalam jumlah besar untuk jarak sedang, Kereta api bukan hanya alternatif pilihan transportasi rakyat yang murah, tetapi juga bebas dari kemacetan jalan, Jumlah penumpang kereta api 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, sedangkan jumlah penumpang Pelabuhan Teluk Nibung pada Tahun 2020 sebanyak 106,879 orang,

#### 2.1.5.1.14 Urusan Persandian

Urusan Persandian dilakukan untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini, kinerja diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi serta *software* yang terpasang pada server agar melindungi data dan informasi pemerintahan dari gangguan external. Selain itu juga penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada beberapa aplikasi yang digunakan OPD, sehingga data dan informasi yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat terlindungi keamanannya.

**Tabel 2.72**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Persandian, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Pelayanan Persandian (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tanjungbalai (PD) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3 | Tersedianya SDM dan Sarpras Persandian (orang) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai, 2025*

#### 2.1.5.1.15 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun

disumbangkan dari PMDN dan laju investasi, terlihat sebagai berikut:

**Tabel 2.73**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Koperasi dan UKM, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina (%) | | | | 2 | 2 |
| 2 | Jumlah UMKM yang dibina | 105 | 58 | 30 | 60 | 0 |
| 3 | Jumlah koperasi aktif | 107 | 107 | 110 | 114 | 118 |
| 4 | Jumlah seluruh koperasi | 259 | 263 | 264 | 268 | 272 |
| 5 | Persentase koperasi aktif (%) | 41,31 | 40,68 | 41,67 | 42,54 | 43,38 |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai, 2025*

Usaha mikro dan kecil mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Tanjungbalai. Pada tahun 2023 terdapat 60 unit Jumlah Usaha mikro dan kecil yang dibina.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, Indikator Persentase Koperasi Aktif menggambarkan kinerja koperasi dan waktu ke waktu, Selama lima tahun terakhir terlihat bahwa kualitas koperasi di Kota Tanjungbalai masih cukup rendah dibuktikan dengan keberadaan koperasi aktif lebih sedikit dari koperasi tidak aktif,Indikator koperasi aktif pada tahun 2020 sampai tahun 2024 terus meningkat, dengan persentase koperasi aktif pada tahun 2020 mencapai 43,38 persen dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 118 koperasi.

### 2.1.5.1.16 Urusan Penanaman Modal

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal antara lain nilai investasi yang disumbangkan dari PMDN dan laju investasi, terlihat sebagai berikut:

**Tabel 2.74**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Penanaman Modal, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah dan nilai penanaman modal daerah (Rp) | 73.726.524.820 | 21.850.000.000 | 25.915.277.971 | 3.412.244.705 | 47.821.324.769 |
| 2 | Laju pertumbuhan investasi (%) | | 250 | 4 | 75 | 12 |
| 3 | Jumlah investor berskala nasional | 28 | 19 | 44 | 46 | 39 |
| 4 | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp) | 73.726.524.820 | 21.850.000.000 | 25.915.277.971 | 43.998.864.597 | 34.122.444.705 |
| 5 | Persentase ijin terbit sesuai SP | 507 | 512 | 1.406 | 334 | 489 |

*Sumber: Dinas PM&P2TSP, 2025*

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

### 2.1.5.1.17 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berbagai upaya pembinaan bidang kepemudaan & olahraga kerap dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai baik pembinaan terhadap atlet, pemuda dan anak-anak sekolah, yang salah satu diantaranya adalah membina pemuda dengan kegiatan olahraga, Selanjutnya selain pembinaan pendidikan formal dalam kelas, masih terdapat kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk pembinaan yang dapat melatih keterampilan siswa/pemuda di bidang tertentu, misalnya pramuka, olah raga, kegiatan keagamaan dan musik, Sementara itu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata telah dilakukan pembinaan terhadap atlit yang masih bersekolah untuk berbagai cabang olahraga sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 2.75**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif | 26 | 26 | 26 | 56 | 56 |
| 2 | Jumlah organisasi olahraga | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| 3 | Jumlah kegiatan kepemudaan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jumlah kegiatan olahraga | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 5 | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lapangan olahraga | 99 | 99 | 100 | 100 | 102 |
| 7 | Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

*Sumber: Dinas Olahraga dan Kepemudaaan Kota Tanjungbalai, 2025*

Organisasi pemuda merupakan wadah yang menampung kreatifitas, bakat serta ide-ide para pemuda untuk direalisasikan menjadi kegiatan yang positif, Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi pemuda yang aktif sebanyak 56 organisai. Pembinaan olahraga bertujuan untuk mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis. Pada tahun 2024 terdapat 29 jumlah organisasi olahraga.

Indikator jumlah klub olahraga per 10,000 penduduk sebanyak 8 meliputi cabang olahraga bola volli, sepakbola, futsal, bulu tangkis, tennis meja, tennis, dan lain-lain. Sarana dan prasarana olahraga adalah sumberdaya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan kegiatan olahraga meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapan, Jumlah gedung olahraga yang terdapat di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir berjumlah 12 dan 3 buah dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu Gedung Serbaguba, Gedung Olahraga Mini dan Stadion Asahan Sakti.

### 2.1.5.1.18 Urusan Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai setiap tahunnya selalu menerbitkan buku Tanjungbalai Dalam Angka. Dalam buku tersebut dimuat data-data mengenai Kota Tanjungbalai yang berhubungan dengan keadaan

geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, perindustrian, perdagangan, transportasi, keuangan, pengeluaran penduduk, pendapatan regional dan kemiskinan, Untuk buku PDRB Kota Tanjungbalai, selama Tahun 2020-2024 selalu diterbitkan oleh BPS Kota Tanjungbalai. Data-data yang diterbitkan oleh BPS menjadi rujukan bagi penyusun kebijakan di masa yang akan datang.

**Tabel 2.76**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Statistik, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku "Kota/Kabupaten Dalam Angka" | ada | ada | Ada | ada | ada |
| 2 | Buku "PDRB Kota /Kab" Banyaknya Publikasi Data (jenis) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

*Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

### 2.1.5.1.19 Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan dan informatika di Kota Tanjungbalai secara umum berkaitan dengan pelayanan informasi publik dan penyediaan infrastruktur berbasis teknologi informatika untuk menunjang kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan yang juga ditujukan dalam rangka menuju Kota Tanjungbalai sebagai *smart city*.

**Tabel 2.77**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Komunikasi dan Informatika, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah wifi di area public | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Jumlah jaringan komunikasi (lokasi) | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 3 | Jumlah penyiaran radio/TV local | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Presentase Pelayanan Informasi Publik | 90% | 93% | 94% | 95% | 95% |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025*

Jumlah WiFi di area publik di Tanjung Balai, tergantung pada lokasi dan tipe area publik. Secara umum, WiFi publik tersedia di berbagai tempat seperti kafe, pelabuhan, pusat perbelanjaan, perpustakaan, dan stasiun kereta api.

#### 2.1.5.1.20 Urusan Kebudayaan

Kota Tanjungbalai dikenal dengan julukan sebagai "Kota Kerang", hal ini dikarenakan dulu Kota Tanjungbalai pernah menghasilkan kerang dalam jumlah yang besar, tetapi belakangan ini produksi kerang jauh menurun karena ekosistem yang tidak mendukung, Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kota Tanjungbalai, maka setiap tahun akan diadakan pesta kerang yang menggelar pekan budaya melayu dengan tujuan kegiatan tersebut dapat melestarikan kebudayaan asli Kota Tanjungbalai, Kegiatan pesta kerang tersebut diisi dengan acara pameran kerajinan masyarakat Kota Tanjungbalai, tari-tarian melayu, dan perlombaan.

**Tabel 2.78**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kebudayaan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat kearifan budaya lokal | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | Persentase apresiasi terhadap kesenian lokal | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 3 | Tingkat pelestarian warisan budaya | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Jumlah sanggar seni dan budaya | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 5 | Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: Dinas Pendidikan, 2025*

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

### 2.1.5.1.21 Urusan Perpustakaan

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.

**Tabel 2.79**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perpustakaan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah perpustakaan milik Pemerintah | 117 | 120 | 121 | 122 | 122 |
| 2 | Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 |
| 3 | Jumlah pengunjung perpustakaan (orang) | 11.901 | 9.679 | 12.814 | 13.888 | 11.171 |
| 4 | Jumlah Peminjam Buku Perpustakaan | 4.623 | 3.330 | 3.006 | 3.020 | 994 |
| 5 | Jumlah Koleksi buku perpustakaan | 22.966 | 22.966 | 23.368 | 23.368 | 23.430 |
| 6 | Peningkatan Budaya Baca /gemar membaca (%) | 0,068 | 0,054 | 0,071 | 0,076 | 0,06 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Tanjungbalai, 2025*

Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa jadi tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar masyarakat dapat mendidik dirinya sendiri, tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, Jumlah perpustakaan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 terdapat 122 buah meliputi perpustakaan daerah, dan sekolah.

Salah satu parameter menunjukkan berhasilnya layanan perpustakaan adalah dengan melihat intensitas kunjungan dan frekuensi peminjaman koleksi perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2020 terdapat 11.901 pengunjung menurun menjadi 11.171 pengunjung pada tahun 2024.

Bentuk pelayanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya tercermin dalam koleksi bahan pustaka lengkap, Tiap-tiap perpustakaan pasti berbeda-beda dalam hal koleksi ini karena disesuaikan dengan fungsi dan tujuan masing-masing namun satu hal yang sama yaitu hendaknya semua perpustakaan lengkap koleksinya, Pada tahun 2020 jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah sebanyak 22.960 buku, meningkat menjadi 23.430 buku pada tahun 2024, artinya terjadi peningkatan jumlah koleksi buku sebesar 2,05 persen.

#### 2.1.5.1.22 Urusan Kearsipan

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.80**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kearsipan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah arsip dengan system administrasi yang baik | 100 | 50 | 50 | 100 | 119 |
| 2 | Tingkat ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara (%) | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| 3 | Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan /dipelihara | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Tanjungbalai, 2025*

#### 2.1.5.1.23 Urusan Perikanan

Perkembangan produksi ikan menurut asal tangkapan di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, Ada beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya ini seperti bantuan pembinaan oleh Pemerintah Kota Tanjugbalai, baik dalam bentuk pembinaan kelompok masyarakat pesisir, pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan serta bantuan alat tangkap kepada nelayan.

**Tabel 2.81**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perikanan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok Nelayan | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 2 | Produksi perikanan budidaya (ton) | 220 | 225,00 | 110,99 | 35,39 | 120,00 |
| 3 | Produksi perikanan tangkap (ton) | 32.635,30 | 32.943,17 | 28.342,83 | 10.716,13 | 12.030,51 |
| 4 | Produksi olahan hasil perikanan (Ton) | 8.391,52 | 8.793,23 | 9158,73 | 1.072,36 | 1.203,82 |
| 5 | Meningkatkan konsumsi ikan Kg/ kapita/tahun | 53,75 | 54 | 49,82 | 57,83 | 57,18 |
| 6 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan (persen) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Tanjungbalai, 2025*

Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Hal ini penting karena dapat membangkitkan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari segi kesehatan, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi masyarakat karena ikan merupakan bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2020 sebanyak 53,75 kg/kapita/tahun meningkat menjadi 57,18 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Data tersebut merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Kota Tanjungbalai selama satu tahun yang dikonversi setara ikan utuh segar.

Produksi perikanan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya. Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya mencapai 220 ton menurun menjadi sebesar 120 ton pada tahun 2024. Penurunan produksi juga dialami Produksi perikanan tangkap, yaitu dari 32.635,30 ton pada tahun 2020 menjadi 12.030,51 ton pada tahun 2024.

Jumlah bina kelompok digunakan untuk mengetahui jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, Selama lima tahun terakhir terdapat 15 kelompok yang perlu mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah.

### 2.1.5.1.24 Urusan Pariwisata

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pariwisata dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.82**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pariwisata, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Kenaikan Kunjungan wisata (%) | 0 | 178 | 242 | -125 | 61 |
| 2 | Jumlah wisatawan yang berkunjung (orang) | 0 | 17.803 | 46.224 | 14.026 | 24.181 |

*Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai, 2025*

Jumlah kunjungan wisata ke kota selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan, Pada tahun 2021 indikator ini mencapai 17.803 orang meningkat menjadi 24.181 orang pada tahun 2024. Tempat wisata yang dapat dikunjungi antara lain: lapangan Sultan Abdul Jalil, Jembatan Tabayang, Pulau Besusen, Vihara Tri Ratna dan Kelenteng Dewi Samudera, Untuk mendukung peningkatan kunjungban wisata diperlukan ketersediaan infrastruktur pendukung, keberadaan obyek wisata dan atraksi wisata yang didukung dengan sistem promosi dan pemasaran yang baik.

### 2.1.5.1.25 Urusan Pertanian

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pertanian dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.83**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pertanian, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang) | 1.657 | 1.740 | 1.776 | 1.811 | 1.857 |
| 2 | Jumlah tenaga penyuluh Pertanian (orang) | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok) | 103 | 105 | 126 | 159 | 160 |
| 4 | Jumlah kawasan pertanian perkotaan (kelurahan) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5 | Jumlah Produksi Peternakan(Ton) | 252.810,00 | 189,31 | 188.128 | 72.231 | 17.444 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jumlah Produksi Pertanian (Ton) | 1.361 | 1.162 | 1.415 | 1.395 | 1.724 |
| 7 | Produksi komoditas holtikultura (Ton) | 892 | 1.175 | 630 | 1 | 1 |

*Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai, 2025*

### 2.1.5.1.26 Urusan Perdagangan

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Tanjungbalai memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Tanjungbalai. Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perdagangan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.84**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perdagangan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pengawasan Barang yang beredar (kali) | 4 | 4 | 8 | 9 | 13 |
| 2 | Persentase alat UTTP bertera (%) | | 0,83 | 13,91 | 2,25 | 57,67 |

*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai, 2025*

Dalam rangka meningkatkan Perlindungan terhadap Konsumen dan Pengamanan Perdagangan di Kota Tanjungbalai, dilakukan pengawasan terhadap alat UTTP bertera sesuai standar. Pada tahun 2021 alat UTTP bertera mencapai 0,83 meningkat dibandingkan dengan keadaaan 2024 menjadi sebesar 70 persen.

### 2.1.5.1.27 Urusan Perindustrian

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, hasil atau capaian pembangunan dalam urusan perindustrian juga berdampak pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat dan

mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini menjadikan sektor industri memiliki peran penting bagi perekonomian Kota Tanjungbalai.

**Tabel 2.85**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perindustrian, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Industri Kecil dan Menengah | 440 | 455 | 501 | 512 | 534 |
| 2 | Cakupan bina kelompok pengrajin | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Jumlah kluster industry | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |

*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai, 2025*

### 2.1.5.1.28 Urusan Perencanaan

Dalam Unsur Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan.

**Tabel 2.86**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perencanaan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dgn Perwal tepat waktu | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah Penelitian yang Dilaksanakan | | | | | |
| 4 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai, 2025*

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran, Bapperida memiliki tugas dan fungsi dalam menyediakan dokumen perencanaan antara lain; Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selama lima tahun terakhir Bapperida selalu

menyediakan dan menyusun dokumen dimaksud. Salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodasi dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan.

#### 2.1.5.1.29 Urusan Keuangan

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Keuangan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.87**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Keuangan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opini BPK | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| 2 | Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah) (%) | 10,41 | 6,67 | 10,2 | 12,77 | 11,8 |

*Sumber: BPKPD Kota Tanjungbalai, 2025*

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Selama tiga tahun terakhir, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tanjungbalai adalah Wajar dengan Pengecualian (WDP) yaitu opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Pada Tahun 2023 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tanjungbalai adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini jenis ini diberikan jika hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retibusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pada tahun 2024

tingkat kemandirian keuangan Kota Tanjungbalai sebesar 11,8 persen, menurun bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 12,77 persen.

#### 2.1.5.1.30 Urusan Kepegawaian

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Keuangan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.88**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kepegawaian, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang Jabatannya | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 |

*Sumber: BKPSDM Kota Tanjungbalai, 2025*

Pendidikan dan pelatihan adalah hal penting karena merupakan suatu usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Agar para ASN yang memiliki jabatan menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan dengan baik dan berhasil maka diberikan diklat struktural ASN, Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih tergolong rendah.

#### 2.1.5.1.31 Urusan Pengawasan

Untuk melihat keberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pengawasan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

**Tabel 2.89**
**Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pengawasan, 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 2 | Level 3 |
| 2 | Tingkat Maturitas SPIP (leveling) | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jumlah penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan: | | | | | |
| | -BPK (%) | | 80,59 | 82,01 | 83,64 | 82,7 |
| | -Inspektorat Provinsi | | | | 87,93 | |
| | -Inspektorat Kota | 79,45 | 57,58 | 4,4 | 79,69 | 74,14 |

*Sumber: Inspektorat Kota Tanjungbalai, 2025*

**Tabel 2.90**
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**
**Terhadap Capaian Kinerja**

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pertumbuhan PDRB (%) | 5,56 | 5,70 | 5,62 | 5,73 | 5,70 | 5,80 | 5,73 | | 5,80 | | Tercapai |
| | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4,00 | 3,80 | 3,90 | 3,70 | 3,80 | 3,60 | 3,70 | | 3,60 | | Belum Tercapai |
| | B. Pertambangan dan Penggalian | 6,00 | 5,50 | 5,20 | 5,80 | 5,50 | 5,90 | 5,80 | | 5,90 | | Tercapai |
| | C. Industri Pengolahan | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 6,00 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | | Tercapai |
| | D. Pengadaan Listrik dan Gas | 5,00 | 5,60 | 5,20 | 6,00 | 5,60 | 6,20 | 6,00 | | 6,20 | | Tercapai |
| | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,20 | 5,40 | 5,30 | 5,50 | 5,40 | 5,60 | 5,50 | | 5,60 | | Tercapai |
| | F. Konstruksi | 6,20 | 5,95 | 6,00 | 5,90 | 5,95 | 5,80 | 5,90 | | 5,80 | | Belum Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,80 | 6,40 | 6,20 | 6,50 | 6,40 | 5,84 | 6,50 | | 6,55 | | Belum Tercapai |
| | H. Transportasi dan Pergudangan | 4,40 | 5,40 | 4,80 | 5,90 | 5,40 | 5,15 | 5,90 | | 6,10 | | Belum Tercapai |
| | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,00 | 5,20 | 5,40 | 5,10 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | | 5,10 | | Tercapai |
| | J. Informasi dan Komunikasi | 8,40 | 8,40 | 8,20 | 8,80 | 8,40 | 4,88 | 8,80 | | 8,90 | | Belum Tercapai |
| | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,20 | 3,60 | 3,40 | 4,00 | 3,60 | 1,78 | 4,00 | | 4,30 | | Belum Tercapai |
| | L. Real Estatet | 5,30 | 5,53 | 5,40 | 5,80 | 5,53 | 3,11 | 5,80 | | 6,00 | | Belum Tercapai |
| | M,N. Jasa Perusahaan | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,80 | 5,40 | 3,27 | 5,80 | | 6,00 | | Belum Tercapai |
| | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 7,30 | 7,20 | 3,14 | 7,30 | | 7,40 | | Belum Tercapai |
| | P. Jasa Pendidikan | 6,20 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 3,53 | 7,00 | | 7,30 | | Belum Tercapai |
| | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,00 | 5,30 | 5,40 | 5,20 | 5,30 | 6,37 | 5,20 | | 5,10 | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| | R,S,T,U. Jasa lainnya | 7,50 | 6,42 | 7,00 | 8,08 | 7,20 | 6,81 | 7,30 | | 7,40 | | Belum Tercapai |
| 2. | PDRB ADHB (miliar) | 10.758.863,51 | 10,466,70 | 11.685.405,92 | 11.209,49 | 12.705.023,65 | 12.207,74 | 13.762.386,63 | | 14.911.881,29 | | Belum Tercapai |
| 3. | PDRB ADHK 2010 | 6.383.531,32 | 6.131,04 | 6.740.626,96 | 6.428,77 | 7.125.647,96 | 6.744,35 | 7.539.977,43 | | 7.980.914,13 | | Belum Tercapai |
| 4 | PDRB per kapita (Rp. Juta) | 60,25 | 58,23 | 65,14 | 61,20 | 70,47 | 65,76 | 76,27 | | 82,60 | | Belum Tercapai |
| 5 | Indeks Gini (poin) | 0,268 | 0,245 | 0,266 | 0,238 | 0,265 | 0,236 | 0,263 | | 0,261 | | Tercapai |
| 6 | Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan | 12,78 | 11,97 | 12,23 | 11,97 | 11,68 | 11,97 | 11,14 | | 10.86 | | Belum Tercapai |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin) | 69,79 | 75,95 | 70,36 | 75,95 | 70,93 | 75,95 | 71,5 | | 72,07 | | Tercapai |
| 8 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 9,59 | 9,55 | 9,67 | 9,68 | 9,75 | 9,69 | 9,83 | | 9,90 | | Belum Tercapai |
| 9 | Angka Usia Harapan Hidup (tahun) | 63,85 | 63,87 | 64,14 | 74,01 | 64,43 | 74,18 | 64,72 | | 65,01 | | Tercapai |
| 10 | Persentase Balita Gizi Buruk (%) | 70,00% | 0,35% | 0,60% | 0,32% | 0,50% | 0,44% | 0,40% | | 0,30% | | Tercapai |
| 11 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,30% | 4,62% | 6,00% | 4,47% | 5,70% | 4,08% | 5,50% | | 5,30% | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 12 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | 15,00% | 17,00% | 16,00% | 14,66% | 17,00% | 13,80% | 18,00% | | 19,00% | | Tercapai |
| 13 | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | WTP | | Tercapai |
| 14 | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB | 17% | 17% | 17% | 15% | 17% | 14% | 18% | | 18% | | Tercapai |
| | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita | 1.081.692 | 11.589 | 1.133,201 | 11.753 | 11.847 | 12.264 | 12.053 | | 120.53 | | Belum Tercapai |
| 2. | Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita | 41,17 | 42,41 | 41,99 | 43,25 | 42,41 | 43,12 | 43,25 | | 44,12 | | Tercapai |
| 3. | Produktivitas Total Daerah | 113,96 | 119,82 | 115,21 | 120,41 | 119,82 | 127,11 | 123,41 | | 127,11 | | Belum Tercapai |
| | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | |
| | **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 1.1. | Angka Partisipasi Kasar : | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Angka Partisipasi Kasar PAUD | 53,00 | | 54,00 | | 55,00 | 113,72 | 56,00 | | 57,00 | | Tercapai |
| 1.1.2 | Angka Partisipasi Kasar SD/MI | 102,96 | 101,01 | 103,02 | 106,70 | 103,05 | 107,87 | 103,07 | | 103,10 | | Tercapai |
| 1.1.3 | Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs | 98,37 | 89,20 | 98,40 | 102,19 | 98,45 | 92,21 | 98,61 | | 98,74 | | Belum Tercapai |
| 1.2. | Angka Pendidikan yang Ditamatkan | 2.600,00 | | 2.650,00 | | 2.700,00 | 6.696 | 2.750,00 | | 2.800,00 | | Tercapai |
| 1.3 | Angka Partisipasi Murni : | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 93,26 | 95,80 | 93,30 | 99,71 | 93,42 | 94,96 | 93,56 | | 93,74 | | Belum Tercapai |
| 1.3.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 87,45 | 89,20 | 87,62 | 89,65 | 87,84 | 81,82 | 88,02 | | 88,26 | | Tercapai |
| 1.4 | Angka Partisipasi Sekolah : | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A | 97,50 | 99,76 | 98,60 | 99,71 | 99,70 | 94,96 | 99,70 | | 99,70 | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 1.4.2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | 74,60 | 77,50 | 74,80 | 97,05 | 77,50 | 81,82 | 78,80 | | 79,50 | | Tercapai |
| 1.5 | Angka Putus Sekolah : | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,30 | | 0,28 | | 0,27 | 1,26 | 0,26 | | 0,25 | | Belum tercapai |
| 1.5.2 | Angka Putusi Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,25 | | 0,23 | | 0,22 | 3,73 | 0,21 | | 0,20 | | Tercapai |
| 1.6 | Fasilitas Pendidikan : | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%) | 90,00 | 94,00 | 92,00 | 96,00 | 94,00 | 96,00 | 95,00 | | 99,00 | | Tercapai |
| 1.6.2 | Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik (%) | 92,00 | 94,00 | 94,00 | 90,00 | 96,00 | 96,00 | 97,00 | | 99,00 | | Tercapai |
| 1.6.3 | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 | | 100,00 | | Tercapai |
| 1.7 | Persentase guru SD bersertifikat pendidik | 81,00 | 41,41 | 82,00 | 81,70 | 83,00 | 47,74 | 84,00 | | 85,00 | | Belum Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 1.8 | Persentase guru SMP bersertifikat pendidik | 81,00 | 40,96 | 82,00 | 84,49 | 83,00 | 56,02 | 84,00 | | 85,00 | | Belum Tercapai |
| 2. | Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup | 6 | 4 | 5 | 6,5 | 4 | 1,94 | 3 | | 2 | | Tercapai |
| 2.2. | Angka Kelangsungan Hidup Bayi | -5 | -3 | -5 | -5,5 | -3 | -0,94 | -2 | | -1 | | Tercapai |
| 2.3. | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup | 8 | 5 | 6 | 6,8 | 5 | 2 | 4 | | 3 | | Tercapai |
| 2.4. | Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup | 4 | 2 | 3 | 4,5 | 2 | 1,94 | 1 | | 0 | | Tercapai |
| 2.5. | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | 150 | 80 | 100 | 96 | 80 | 0 | 60 | | 40 | | Tercapai |
| 2.6. | Rasio Posyandu per Satuan Balita | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 14,21 | 7,4 | | 7,4 | | Tercapai |
| 2.7. | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,1277010094 | 0,6 | 18,33 | 0,8 | | 1 | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 2.8. | Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01064175078 | 0,02 | 50 | 0,02 | | 0,03 | | Tercapai |
| 2.9 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 100% | | 100% | | 100% | 0 | 100% | | 100% | | Belum Tercapai |
| 2.10 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 100% | | 100% | | 100% | 0 | 100% | | 100% | | Belum Tercapai |
| 2.11 | Cakupan peserta JKN | 80% | | 85% | | 90% | 95,91 | 95% | | 100% | | Tercapai |
| 2.12 | Persentase imunisasi dasar lengkap | 55% | | 70% | | 80% | 7,2 | 90% | | 100% | | Belum Tercapai |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Pekerjaan Umum : | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 133,759 | 135,076 | 136,625 | 137,776 | 139,491 | 143,270 | 142,740 | | 145,224 | | Belum Tercapai |
| 3.1.2. | Persentase penduduk berakses air minum | 57,00% | 57,05% | 60,00% | 60,05% | 62,00% | 62,05% | 65,00% | | 67,00% | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 3.1.3. | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 65,00% | 65,45% | 67,00% | 67,05% | 69,00% | 69,05% | 72,00% | | 74,00% | | Tercapai |
| 3.2. | Penataan Ruang : | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | ADA | | ADA | | ADA | ADA | ADA | | ADA | | Tercapai |
| 3.2.2. | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 20,50% | 16,04% | 20,51% | 20,33% | 20,52% | 20,33% | 20,53% | | 20,54% | | Tercapai |
| 4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Rasio rumah layak huni | 0,15 | 0.47% | 0,16 | 0.11% | 0,17 | 1,05 | 0,18 | | 0,19 | | Tercapai |
| 4.7. | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 24,62% | 0.47% | 25,62% | 0.11% | 26,62% | 15,4 | 27,62% | | 28,62% | | Tercapai |
| 4.6. | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 4,71% | 0.47% | 3,71% | 0.11% | 2,71% | 8,98 | 1,71% | | 0,71% | | Belum Tercapai |
| 5. | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 5.1. | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 0,85% | | 0,87% | | 0,88% | 0,88 | 0,89% | | 0,89% | | Tecapai |
| 5.2. | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 80% | 81% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | | 83% | | Tercapai |
| 5.3. | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | | Tercapai |
| 5.4. | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | | Tercapai |
| 5.5. | Persentase Penegakan Perda | 80% | 78% | 82% | 82% | 81% | 94,04 | 82% | | 82% | | Tercapai |
| 6. | Sosial | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 60,60% | 76,.43 | 60,53% | 89.79 | 60,59% | 98.45 | 61,12% | | 61,23% | | Tercapai |
| 6.2. | Persentase PMKS yang tertangani | 58,85% | 75.16 | 58,86 | 92.55 | 58,84% | 99,09 | 59,43% | | 59,45% | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| | **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun (Kasus) | 53,00 | 62.50 | 49,00 | 50 | 45,00 | 150 | 41,00 | | 37,00 | | Belum Tercapai |
| 1.2. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 55,00 | 40 | 60,00 | 25 | 65,00 | 33 | 70,00 | | 75,00 | | Belum Tercapai |
| 1.3. | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 25,00 | 52.78 | 30,00 | 54 | 35,00 | 25 | 40,00 | | 45,00 | | Belum Tercapai |
| 1.4. | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. | 83,00 | 81.50% | 85,00 | 85.80% | 87,00 | 85.80% | 89,00 | | 91,00 | | Belum Tercapai |
| 1.5. | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | | Nihil | | Tercapai |
| 1.6. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 75,00 | 71.43 | 78,00 | 79 | 81,00 | 38 | 84,00 | | 87,00 | | Belum Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 1.7. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 75,00 | 71.43 | 78,00 | 79% | 81,00 | 38 | 84,00 | | 87,00 | | Belum Tercapai |
| 1.8. | Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 79,00 | 71.43% | 82,00 | 79% | 85,00 | 38% | 88,00 | | 91,00 | | Belum Tercapai |
| 2. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 20% | 40.49 | 20% | 54.38 | 22% | 54.38 | 22% | | 25% | | Tercapai |
| 2.2. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 20% | 20% | 20% | 24% | 24% | 32 | 25% | | 25% | | Tercapai |
| 2.3. | Rasio KDRT | 100% | 15% | 100% | 8% | 100% | 25 | 100% | | 100% | | Tercapai |
| 2.4 | Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan | 100% | | 100% | | 100% | 25 | 100% | | 100% | | Belum Tercapai |
| 2.5 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 70,00% | | 75,00% | | 80,00% | | 85,00% | | 90,00% | | |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 2.6 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | 100% | 99.76 | 100% | 99.71 | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 2.7 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP | 82% | 87.07 | 90% | 89,65 | 90% | | 90% | | 100% | | |
| 2.8 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA | 82% | 77,41 | 82% | 63.07 | 92% | | 92% | | 100% | | |
| 3. | Pangan | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ketersediaan pangan utama | 25,90% | | 26,42% | | 27,48% | 8,55 | 28,03% | | 28,59 | | Belum Tercapai |
| 4 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup | 61,02 | | 61,61 | | 62,20 | 63,8 | 62,80 | | 63,39 | | Tercapai |
| 5 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | 99,40% | 97,98% | 99,50% | 96,49% | 99,60% | 99,16 | 99,70% | | 99,80% | | Belum Tercapai |
| 5.2 | Rasio bayi berakte kelahiran | 99,99% | 99.9% | 100% | 99.9% | 100% | 99,72 | 100% | | 100% | | Belum Tercapai |
| 5.3 | Rasio pasangan berakte nikah | 56,63% | 69.52 | 60% | 71.22 | 70% | 73,54 | 80% | | 85% | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 5.4 | Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten/kota | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | | ADA | | Tercapai |
| 5.5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | SUDAH | 97.98 | SUDAH | 96.49 | SUDAH | 98.8 | SUDAH | 98,8 | SUDAH | | Tercapai |
| 6 | Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase LPM Berprestasi | 60% | | 70% | | 80% | 80 | 90% | | 100% | | Tercapai |
| 7 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | 1,44 | | 1,44 | | 1,43 | 1,37 | 1,43 | | 1,43 | | Tercapai |
| 7.2 | Total Fertility Rate (TFR) | 2,93 | 2.78 | 2,90 | 2.9 | 2,85 | 2.9 | 2,80 | | 2,75 | | Belum Tercapai |
| 7.3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2,98 | 2,98 | 2,95 | 2,95 | 2,90 | 3,39 | 2,85 | | 2,80 | | Belum Tercapai |
| 7.4 | Ratio Akseptor KB | 66,90 | 69,89 | 66,65 | 69,60 | 66,70 | 70,19 | 66,75 | | 66,80 | | Belum Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 7.5 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | 36/100 | | 35/100 | | 35/100 | | 33/100 | | 32/100 | | |
| 7.6 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | 16,75 | 48,53 | 16,70 | 10,3 | 16,65 | 6,4 | 16,60 | | 16,55 | | Tercapai |
| 7.7. | Rata-rata usia kawin pertama wanita | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | 23,00 | | |
| 8 | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Rasio ijin trayek | 1 : 1600 | 1 1600 | 1 : 1600 | 1 1600 | 1 : 1300 | 1 1600 | 1 : 1300 | | 1 : 1300 | | Tercapai |
| 9.6. | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | 80% | 0 | 70% | 0 | 60% | 0 | 50% | | 40% | | Belum Tercapai |
| 9.7. | Pemasangan Rambu-Rambu | 10% | 10 | 20% | 11 | 50% | 11 | 75% | | 100% | | Belum Tercapai |
| 9 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase keterbukaan informasi publik | 100% | | 100% | | 100% | 98 | 100% | | 100% | | Belum Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 9.2 | Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 100% | | 100% | | 100% | 98 | 100% | | 100% | | Belum Tercapai |
| 10 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Persentase koperasi aktif | 45,73% | 46,71% | 46,15% | 46,92% | 46,56% | 44,28% | 46,96% | | 47,37% | | Belum Tercapai |
| 10.2 | Persentase koperasi sehat | 38,98% | | 40,00% | | 40,98% | 41,93 | 41,96% | | 41,96% | | Tercapai |
| 10.4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang unggul | 35,00% | 10,39% | 41,00% | 13,34% | 44,00% | 12.25% | 46,00% | | 48,00% | | Tercapai |
| 11 | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Jumlah investor | 4 | | 7 | | 8 | 11 | 9 | | 10 | | Tercapai |
| 11.2 | Jumlah nilai investasi | 18.351.330 | | 19.351.330 | | 19.835.113 | 58.042.873 | 19.945.181 | | 19.995.018 | | Tercapai |
| 11.3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 15 | 25 | 17 | 187 | 19 | 67 | 20 | | 23 | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 11.4 | Nilai IKM | 87 | | 87 | | 87 | 96 | 88 | | 88 | | Tercapai |
| 12 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 30% | 74% | 35% | 100% | 40% | 100% | 45% | | 50% | | Tercapai |
| 12.2 | Persentase wirausaha muda | 35% | 2,06% | 40% | 2,07% | 45% | 1,99% | 2,63 | | 55% | | Tercapai |
| 12.3 | Jumlah atlet berprestasi | 27,00 | 63 | 30,00 | 23 | 32,00 | 49 | 34,00 | | 35,00 | | Tercapai |
| 12.4 | Jumlah prestasi olahraga | 9,00 | 10 | 10,00 | 5 | 11,00 | 11 | 12,00 | | 13,00 | | Tercapai |
| 3 | Statistik | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | ADA | | ADA | | ADA | ADA | ADA | | ADA | | Tercapai |
| 13.2 | Buku "kabupaten dalam angka | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | | ADA | | Tercapai |
| 13.3 | Buku "PDRB" | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | | ADA | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 13.4 | Persentase data statistik sektoral yang dikelola | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | | 100% | | Tercapai |
| 14 | Persandian | | | | | | | | | | | |
| 14.2 | Pesentase sumberdaya keamanan informasi dibangun untuk pengamanan informasi | 30% | | 50% | | 50% | 50 | 70% | | 100% | | Tercapai |
| 15 | Kebudayaan | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | 1 | 5,00 | | 5,00 | | Belum Tercapai |
| 15.2 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | - | | 1,00 | | 1,00 | 1 | 1,00 | | 1,00 | | Tercapai |
| 16 | Perpustakaan | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | 44.500 Org | 1.510 | 44.600 Org | 18.184 | 44.700 Org | 11.174 | 44.800 Org | | 44.900 Org | | Belum Tercapai |
| 16.2 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | 1,145 | 1,139 | 1,152 | 1,139 | 1,158 | 0,002 | 1,164 | | 1,170 | | Belum Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 16,3 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | 50,00% | | 35,00% | | 35,00% | 0 | 35,00% | | 35,00% | | Belum Tercapai |
| 17 | Kearsipan | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 100% | 75% | 100% | 40% | 100% | 25 | 100% | | 100% | | Belum Tercapai |
| 17.2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | | 6 | | Belum Tercapai |
| | **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Kunjungan wisata | 10.000 | 46,224 | 11.000 | 14,026 | 12.000 | 24,181 | 13.000 | | 14.000 | | Tercapai |
| 1.3 | PAD sektor pariwisata | 800.000.000 | 1.246.060.591 | 900.000.000 | 1.321.668.989 | 1.000.000.000 | 11.577.658.751 | 1.100.000.000 | | 1.200.000.000 | | Tercapai |
| 2 | Pertanian | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 530 | | 535 | | 540 | 88,61 | 545 | | 550 | | Belum Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 2.2. | Nilai Tukar Petani | 103 | | 104 | | 105 | 32,4 | 106 | | 107 | | Belum Tercapai |
| 3 | Perdagangan | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 22,84 | | 23,12 | | 23.40 | 24,46 | 23,68 | | 23,96 | | Tercapai |
| 3.2 | Ekspor Bersih Perdagangan | 200 Ton | 37,211 | 250 Ton | 24,908,00 | 300 Ton | 44.158,28 | 350 Ton | | 400 Ton | | Tercapai |
| 4 | Perindustrian | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB | 19,73 | | 20,02 | | 20,3 | 20,97 | 20,59 | | 20,88 | | Tercapai |
| 5 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Produksi perikanan tangkap(ton/th) | 32.943,17 | | 33.272,60 | | 33.605,33 | 12.030 | 33.941,38 | | 34.280,79 | | Belum Tercapai |
| 5.2 | Produksi perikanan budidaya (ton/th) | 225,00 | | 228,00 | | 233,00 | 120 | 237,00 | | 241,00 | | Belum Tercapai |
| 5.2 | Konsumsi ikan/kapita/tahun | 56,00 | | 57,00 | | 58,00 | 57,18 | 59,00 | | 60,00 | | Belum Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 5.4 | Nilai tukar nelayan | 104,00 | 104 | 104,00 | 105 | 105,00 | 105 | 105,00 | | 106,00 | | Tercapai |
| | **Layanan Urusan** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | | 100% | | Tercapai |
| 1.2 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | | Tercapai |
| 1.3 | Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti | 100% | | 100% | | 100% | 100 | 100% | | 100% | | Tercapai |
| 2. | Keuangan | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WDP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | | WTP | | Tercapai |
| 2.2 | Persentase SILPA terhadap APBD | 1,54 | 7,18% | 1,23 | 4,69% | 0,94 | 1,53 | 0,78 | | 0,62 | | Belum Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 2.3 | Persentase PAD terhadap APBD | 15 | | 16 | | 17 | 14,35 | 18 | | 19 | | Belum Tercapai |
| 2.4 | Cakupan aset Daerah yang termanfaatkan | 100 | | 100 | | 100 | 80 | 100 | | 100 | | Belum Tercapai |
| 2.5 | Persentase belanja pendidikan (20%) | 20 | 22,25% | 20 | 30,47% | 20 | 22,14 | 20 | | 20 | | Tercapai |
| 2.6 | Persentase belanja kesehatan (10%) | 10 | 26,83% | 10 | 21,26% | 10 | 29,46 | 10 | | 10 | | Tercapai |
| 2.7 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tercapai |
| 3. | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Indeks profesionalitas ASN | 71-80 (sedang) | | 71-80 (sedang) | | 71-80 (sedang) | 79,63 | 71-80 (sedang) | | 81-90 (Tinggi) | | Tercapai |
| 4. | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 100% | | 100% | | 100% | 100 | 100% | | 100% | | Tercapai |
| 4.2. | Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah | 100% | | 100% | | 100% | 100 | 100% | | 100% | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| 5. | Pengawasan | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Persentase tindak lanjut temuan | 80,45% | 4,4% | 81,45% | 79,69% | 82,45% | 74,14% | 83,45% | | 84,45% | | Belum Tercapai |
| 5.2. | Persentase pelanggaran pegawai | 69% | 3% | 72% | 3% | 75% | 9% | 78% | | 81% | | Belum Tercapai |
| 5.3 | Jumlah temuan BPK | 59 | 767 | 68 | 679 | 76 | 679 | 85 | | 94 | | Tercapai |
| 6. | Sekretariat Dewan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | | ADA | | Tercapai |
| 6.2. | Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | | ADA | | Tercapai |

| No. | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | | | | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | Realisasi | Tahun 2023 | Realisasi | Tahun 2024 | Realisasi | Tahun 2025 | Realisasi | Tahun 2026 | Realisasi | |
| | Tahunan (RKPD) | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA | | ADA | | Tercapai |

### 2.1.6 Kerjasama Daerah

Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, sebagaimana pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan "bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan",

Mengacu pada Undang-Undang tersebut di atas dan cakupan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai meliputi: kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Perkembangan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut,

**Tabel 2.91**
**Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| NO | BENTUK DOKUMEN/JENIS KERJASAMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) | | | | |
| | TANGGAL MoU | NOMOR | PERIHAL | PIHAK YANG BEKERJASAMA | JANGKA WAKTU |
| 1 | 18/11/2021 | | Kerjasama dalam Pengendalian Inflasi Daerah | Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Pemerintah Kota Tanjungbalai | 18/11/2024 |
| 2 | 13/09/2021 | | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran | 13/09/2026 |
| 3 | 05/10/2021 | | Pembentukan Produk Hukum Daerah | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara | 13/09/2026 |
| 4 | 09/12/2021 | | Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional | BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tanjungbalai | 30/11/2026 |

| NO | BENTUK DOKUMEN/JENIS KERJASAMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) | | | | |
| | TANGGAL MoU | NOMOR | PERIHAL | PIHAK YANG BEKERJASAMA | JANGKA WAKTU |
| 5 | 21/04/2022 | B-65/DJAI/HK.04.02/2022 415.4/7508 | Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) | Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai | 1 tahun |
| 6 | 05/04/2022 | 100/6404/Pem/2022 011033/MoU/2022/215 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Universitas Prima Indonesia | 5 tahun |
| 7 | 17/02/2022 | *415,14/3301058/II.3-AU/UMSU/F/2022* | | *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Tanjungbalai* | |
| 8 | 05/03/2023 | 14/NK/TAPEM-TAHUN 2023<br>415.4/6500/2023 | Kerja Sama Antar Daerah | Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Pemerintah Kabupaten Asahan | 05/03/2028 |
| 9 | | 415.4/5606/2023 | Pemanfaatan Sumber Daya dan Pemberdayaan Masyarakat Islam | Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | (5 tahun) |
| 10 | 03/04/2023 | 415,4/6332/2023 23/NKB/R/UI/2022 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat | Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Universitas Indonesia | (5 tahun) |
| 11 | 25/07/2023 | 39/Kominfo/BLSDM/HK.04.02/06/2023 415.4/13015 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai | Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika | 25/07/2024 |
| 12 | 06/10/2023 | 415.4/18100/2023 3046/E/G.13/X/2023 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya | Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Universitas Islam Sumatera Utara | 06/10/2027 |

### 2.1.7 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 18, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal,

Untuk mencapai target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas, Guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum, Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah, Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunan daerah tersebut,Dalam rangka memenuhi urusan wajib daerah terkait pelayanan dasar, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai menerapkan 6 (enam) bidang urusan antara lain:

**Tabel 2.92**
**Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan dalam RPJMD yang mendukung Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kota Tanjungbalai**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi Pencapaian SPM | Batas Waktu Capaian | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP,MTS) | 92,19% | 1 tahun | Dinas Pendidikan |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan) | 88,47% | 1 tahun | Dinas Pendidikan |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi Pencapaian SPM | Batas Waktu Capaian | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 54,71% | 1 tahun | Dinas Pendidikan |
| 4 | Pelayanan Kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 87,19% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 5 | Pelayanan Kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 86,37% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 6 | Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | 87,54% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 7 | Pelayanan Kesehatan balita | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | 96,92% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 8 | Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | 72,38% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 9 | Pelayanan Kesehatan pada usia produktif | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | 40,56% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 10 | Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut | Jumlah warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan. | 72,64% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi Pencapaian SPM | Batas Waktu Capaian | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi | Jumlah warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 53,95% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 12 | Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus | Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 Tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 99,58% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 13 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 83,48% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 14 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 83,60% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 15 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Jumlah Warga Negara dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | 94,00% | 1 tahun | Dinas Kesehatan |
| 16 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | 1 tahun | Dinas PU |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi Pencapaian SPM | Batas Waktu Capaian | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Penyediaan Pelayanan Pengelolahan Air Limbah Domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik | 83,78% | 1 tahun | Dinas PU |
| 18 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100,00% | 1 tahun | Perumahan Rakyat |
| 19 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten /kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni | 100,00% | 1 tahun | Perumahan Rakyat |
| 20 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 85,00% | 1 tahun | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 21 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100,00% | 1 tahun | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi Pencapaian SPM | Batas Waktu Capaian | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 92,00% | 1 tahun | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 23 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial | 93,85% | 1 tahun | Dinas Sosial |
| 24 | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial | Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial | 91,67% | 1 tahun | Dinas Sosial |
| 25 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial | 92,31% | 1 tahun | Dinas Sosial |
| 26 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti sosial | 0,00% | 1 tahun | Dinas Sosial |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi Pencapaian SPM | Batas Waktu Capaian | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencan daerah Kabupaten /Kota | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 100,00% | 1 tahun | Dinas Sosial |

## 2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan evaluasi pelaksanaan APBD selama lima tahun terakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, penting untuk memahami jenis-jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Analisis ini juga sangat penting dalam menyusun RPJMD Kota Tanjungbalai. Dengan memahami kondisi keuangan daerah, baik dari data historis maupun proyeksi ke depan, Kota Tanjungbalai dapat merencanakan dan mengelola sumber daya keuangannya secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Gambaran keuangan daerah ini memberikan dasar yang kuat dalam menentukan prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, serta strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Bagian ini akan menampilkan perkembangan APBD Kota Tanjungbalai selama periode Tahun Anggaran 2020-2024 serta gambaran Neraca Daerah Kota Tanjungbalai pada periode Tahun Anggaran 2020-2024 dan juga proyeksi keuangan daerah Kota Tanjungbalai untuk periode Tahun Anggaran 2026-2030. Dengan demikian, analisis keuangan daerah ini menjadi komponen kunci dalam menyusun

RPJMD yang realistis dan berkelanjutan, memastikan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada kapasitas keuangan yang nyata dan dapat diandalkan.

### 2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

Bagian ini akan menampilkan perkembangan realisasi APBD Kota Tanjungbalai dari Tahun Anggaran 2020-2024 yang terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi pendapatan Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, total pendapatan tercatat sebesar Rp.609.732.713.965,45, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.606.572.884.754,90. Meskipun ada penurunan sedikit pada tahun 2021, pendapatan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp.599.515.440.812,47. Puncaknya tercatat pada tahun 2023 dan 2024, dengan pendapatan masing-masing sebesar Rp.647.825.876.821,76 dan Rp.651.320.368.865,02. Kenaikan pendapatan ini menunjukkan adanya potensi pengelolaan sumber daya yang semakin baik seiring berjalannya waktu, meskipun ada fluktuasi dalam beberapa tahun.

Realisasi belanja daerah Kota Tanjungbalai mengalami tren peningkatan yang relatif stabil sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, belanja tercatat sebesar Rp.596.252.335.102,39, yang mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp.567.911.449.159,38. Namun, belanja kembali meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah Rp.616.763.976.369,52, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar Rp.666.244.847.828,79 dan Rp.663.417.790.308,93. Kenaikan belanja ini mencerminkan adanya alokasi anggaran yang semakin besar untuk kegiatan dan program yang mendukung pembangunan daerah.

Realisasi pembiayaan netto Kota Tanjungbalai menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pembiayaan netto tercatat sangat rendah, yaitu Rp.2.155.399.718,33. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang sangat besar dengan total Rp.11.681.203.883,39. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan pembiayaan netto yang sangat tinggi, mencapai Rp.50.342.639.478,91. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp.32.978.416.588,86, pembiayaan netto masih tetap tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah mengalami kecenderungan yang lebih besar dalam mendukung kegiatan yang memerlukan sumber dana eksternal atau pembiayaan jangka panjang.

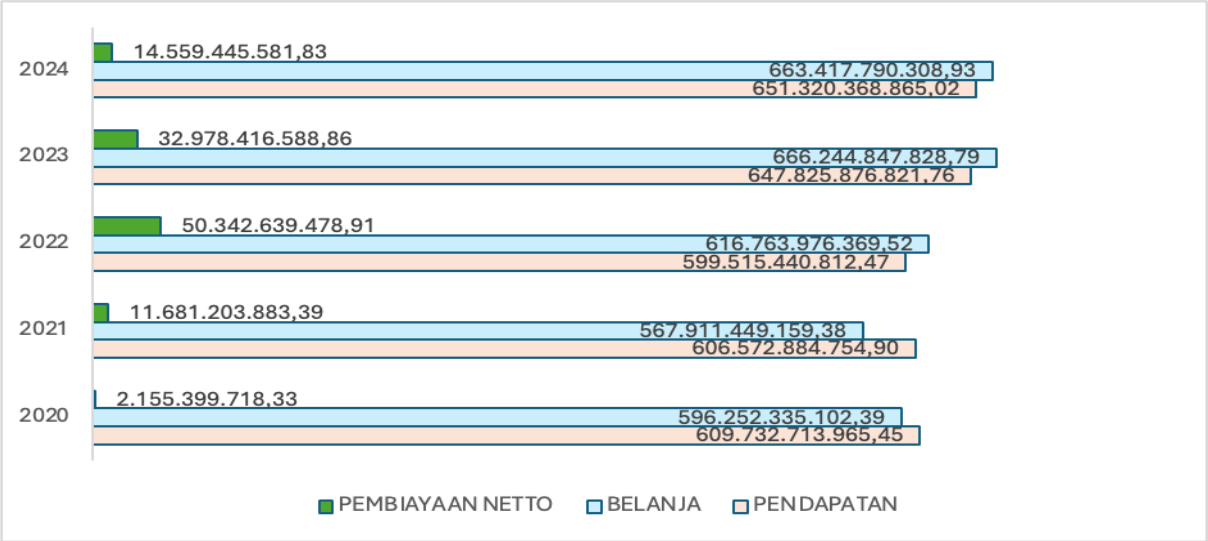


**Gambar 2.38**
**Perbandingan Realisasi Keuangan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024**
*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

Secara keseluruhan, realisasi keuangan daerah Kota Tanjungbalai pada periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dan belanja yang stabil, meskipun pembiayaan netto menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, mencerminkan kebutuhan pembiayaan yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan pemenuhan anggaran daerah.

### 2.2.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara lebih detail kinerja untuk masing-masing komponen utama APBD Kota Tanjungbalai ini akan dibahas sebagaimana berikut.

#### 2.2.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Kota Tanjungbalai menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil sepanjang periode 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,21%. Pada tahun 2020, total pendapatan tercatat sebesar Rp.609.733 juta dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp.606.573 juta. Namun, pendapatan kembali meningkat pada tahun 2022 dengan nilai Rp.599.515 juta dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi Rp.647.826 juta dan Rp.651.320 juta, masing-masing. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,29%. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp.63.479 juta dan mengalami penurunan pada tahun

2021 menjadi Rp.58.650 juta. Namun, seiring berjalannya waktu, PAD meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi Rp.61.142 juta, dan mencapai Rp.82.710 juta pada tahun 2023 serta Rp.78.493 juta pada tahun 2024. Kenaikan yang cukup besar pada komponen ini menunjukkan adanya potensi optimisasi dalam pengelolaan sumber pendapatan lokal.

Pajak Daerah sebagai komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,45%. Pada tahun 2020, pajak daerah tercatat sebesar Rp.14.459 juta dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp.17.206 juta. Angka ini terus naik pada tahun 2022 menjadi Rp.17.460 juta, dan meningkat lebih lanjut pada tahun 2023 dan 2024 menjadi Rp.20.429 juta dan Rp.22.526 juta. Kenaikan yang signifikan ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran pajak dan pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber pendapatan ini.

**Tabel 2.93**

**Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)**

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **1** | **Pendapatan** | **609.733** | **606.573** | **599.515** | **647.826** | **651.320** | **0,21%** |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **63.479** | **58.650** | **61.142** | **82.710** | **78.493** | **5,29%** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 14.459 | 17.206 | 17.460 | 20.429 | 22.526 | 7,45% |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 16.892 | 1.663 | 24.732 | 3.456 | 3.778 | 239,33% |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.926 | 6.072 | 7.939 | 7.146 | 7.419 | 3,24% |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 27.201 | 33.709 | 11.011 | 51.679 | 44.768 | 72,35% |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **525.992** | **527.865** | **538.373** | **565.115** | **564.730** | **-0,54%** |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 502.574 | 500.671 | 502.484 | 525.848 | 532.343 | -0,47% |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 23.418 | 27.194 | 33.875 | 39.267 | 32.387 | 0,64% |
| **1.3** | **Pendapatan lainnya** | **20.261** | **20.058** | **0** | **0** | **8.096** | **0,00%** |

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

Retribusi Daerah menunjukkan lonjakan yang sangat besar dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 239,33%. Pada tahun 2020, retribusi daerah tercatat sebesar Rp.16.892 juta dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi hanya Rp.1.663 juta. Namun, pada tahun 2022, retribusi daerah kembali meningkat menjadi Rp.24.732 juta, dan meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, retribusi mencapai Rp.3.456 juta dan Rp.3.778 juta pada tahun 2024. Fluktuasi yang signifikan ini mengindikasikan adanya perubahan kebijakan atau pengaruh eksternal terhadap penerimaan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,24%. Pada tahun 2020, nilai komponen ini tercatat sebesar Rp.4.926 juta, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.6.072 juta. Pada tahun 2022 dan 2023, komponen ini terus menunjukkan angka yang stabil masing-masing sebesar Rp.7.939 juta dan Rp.7.146 juta, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp.7.419 juta. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan aset daerah yang cukup baik meskipun ada fluktuasi kecil.

Pendapatan transfer menunjukkan adanya penurunan rata-rata tahunan sebesar -0,54%. Pada tahun 2020, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp.525.992 juta dan sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.527.865 juta. Namun, pada tahun 2022, nilai transfer turun menjadi Rp.538.373 juta, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp.564.730 juta pada tahun 2024. Penurunan ini mungkin menunjukkan berkurangnya bantuan atau dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah lainnya. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar -0,47%. Pada tahun 2020, pendapatan ini tercatat sebesar Rp.502.574 juta dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi Rp.500.671 juta. Meskipun ada fluktuasi kecil, angka ini tetap stabil dalam periode 2022-2024, menunjukkan adanya ketergantungan yang relatif besar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer antar daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,64%. Pada tahun 2020, tercatat Rp.23.418 juta, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.27.194 juta. Pada tahun 2022 dan 2023, transfer antar daerah mengalami fluktuasi dengan masing-masing nilai Rp.33.875 juta dan Rp.39.267 juta, namun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp.32.387 juta.

Pendapatan lainnya menunjukkan angka yang stabil dengan sedikit variasi sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, pendapatan lainnya tercatat sebesar Rp.20.261 juta dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi Rp.20.058 juta. Pada

tahun 2022, tidak ada pendapatan yang tercatat, namun pada tahun 2023 dan 2024, pendapatan lainnya tercatat masing-masing sebesar Rp 8.096 juta. Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi antara komponen-komponen tertentu. Ada kenaikan yang signifikan pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sementara Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah cenderung stabil atau mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjaga keberlanjutan dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Proporasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Kota Tanjungbalai menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan daerah sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, PAD menyumbang sekitar 10,41% dari total pendapatan, dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah yang tercatat sebesar 86,27%. Namun, pada tahun 2021, proporsi PAD mengalami sedikit penurunan menjadi 9,67%, meskipun masih dominan. Pada tahun 2022, PAD semakin menurun menjadi hanya 3,31% dari total pendapatan, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer yang mencapai 87,02%. Pada tahun 2023, proporsi PAD tercatat sebesar 12,77%, meskipun Pendapatan Transfer masih mendominasi dengan 87,23%. Tahun 2024 menunjukkan sedikit peningkatan PAD menjadi 12,05%, sementara Pendapatan Transfer tetap mendominasi dengan 86,71%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan PAD, daerah ini masih sangat bergantung pada sumber pendapatan eksternal, terutama Pendapatan Transfer.

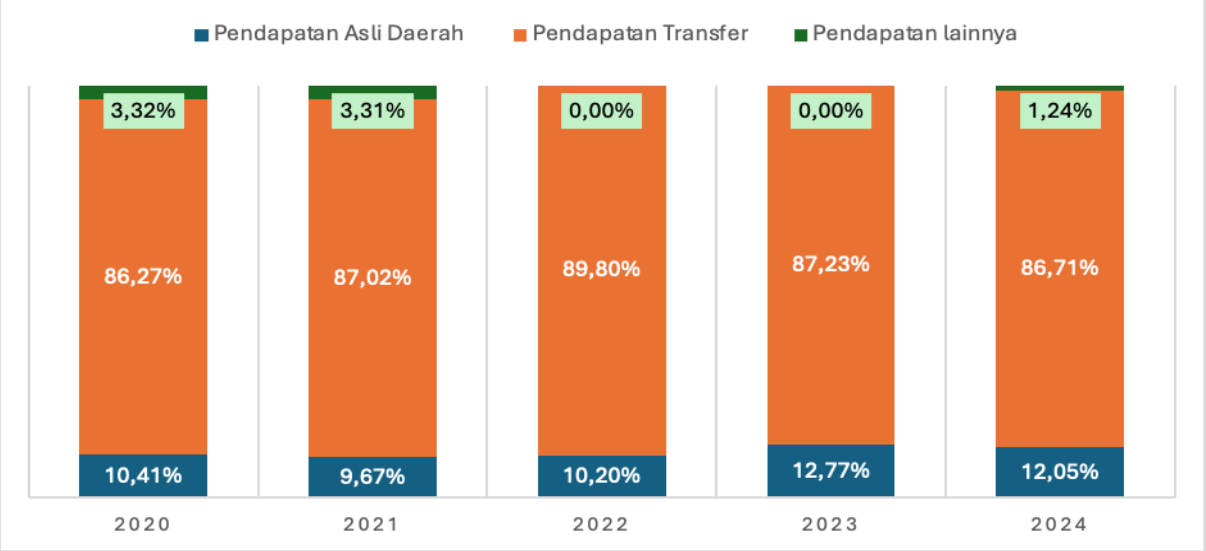


**Gambar 2.39**
**Proporsi Anggaran Komponen Pendapatan APBD Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

Pendapatan Transfer, baik dari pemerintah pusat maupun antar daerah, menunjukkan angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PAD. Pada tahun 2020, Pendapatan Transfer menyumbang 86,27% dari total pendapatan daerah, yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, kontribusi Pendapatan Transfer meningkat menjadi 87,02%. Kemudian, pada tahun 2022, Pendapatan Transfer mencapai 89,80% dari total pendapatan daerah, dengan PAD hanya berkontribusi sekitar 3,31%. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan ketergantungan yang besar terhadap dana transfer untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2023, kontribusi Pendapatan Transfer sedikit menurun menjadi 87,23%, namun tetap mendominasi, diikuti dengan kontribusi PAD yang mencapai 12,77%. Pada tahun 2024, Pendapatan Transfer kembali menurun menjadi 86,71%, namun tetap berperan besar dalam struktur pendapatan daerah.

Pendapatan lainnya dalam APBD Kota Tanjungbalai memiliki kontribusi yang kecil namun terus menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kontribusi Pendapatan Lainnya tercatat sebesar 3,32% dari total pendapatan. Pada tahun 2021, angka ini sedikit menurun menjadi 3,31%. Namun, pada tahun 2022, tidak ada kontribusi signifikan dari Pendapatan Lainnya (0,00%). Pada tahun 2023 dan 2024, Pendapatan Lainnya kembali tercatat dengan kontribusi kecil, masing-masing sebesar 0,00% dan 1,24%. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan pada sumber-sumber pendapatan lain yang tidak bersumber dari pajak atau transfer, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau kebijakan daerah yang berubah-ubah.

Secara keseluruhan, Pendapatan Transfer masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah Kota Tanjungbalai sepanjang periode 2020-2024. Meskipun ada usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kontribusinya masih tergolong rendah dan fluktuatif, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Pendapatan Lainnya mengalami fluktuasi yang signifikan dan tidak stabil, sehingga perlu perhatian lebih lanjut untuk menggali potensi pendapatan lain yang dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.

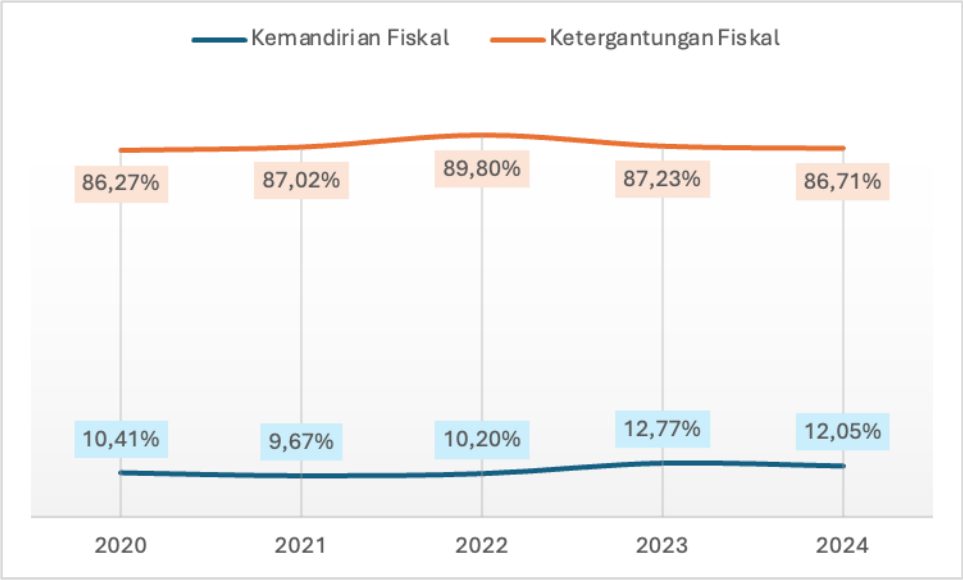


**Gambar 2.40**
**Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

Derajat Kemandirian Fiskal Kota Tanjungbalai pada periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dan relatif rendah. Pada tahun 2020, Derajat Kemandirian Fiskal tercatat sebesar 10,41%, yang mengindikasikan bahwa hanya sekitar 10,41% dari total pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara sisanya bergantung pada sumber pendapatan eksternal, seperti transfer dari pemerintah pusat atau antar daerah. Pada tahun 2021, Derajat Kemandirian Fiskal sedikit menurun menjadi 9,67%, menunjukkan penurunan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2022, meskipun ada sedikit peningkatan dalam PAD, Derajat Kemandirian Fiskal hanya mencatatkan angka sebesar 10,20%. Peningkatan kecil ini tidak terlalu signifikan dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer eksternal. Tahun 2023 dan 2024, meskipun ada sedikit peningkatan menjadi 12,77% dan 12,05%, angka tersebut masih menunjukkan bahwa Kota Tanjungbalai sangat bergantung pada Pendapatan Transfer, dengan kontribusi PAD yang rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan PAD yang lebih optimal.

Rasio Ketergantungan Fiskal Kota Tanjungbalai, yang menunjukkan sejauh mana pendapatan daerah bergantung pada dana transfer, menunjukkan angka yang cukup tinggi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan Fiskal tercatat sebesar 86,27%, yang berarti bahwa sekitar 86% dari total pendapatan

daerah berasal dari sumber pendapatan eksternal, khususnya transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah. Angka ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 87,02%, dan terus meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 89,80%, dengan kontribusi yang hampir seluruhnya berasal dari Pendapatan Transfer. Pada tahun 2023, Rasio Ketergantungan Fiskal sedikit menurun menjadi 87,23%, namun tetap mencerminkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber pendapatan eksternal. Pada tahun 2024, meskipun ada penurunan kecil menjadi 86,71%, Rasio Ketergantungan Fiskal masih menunjukkan dominasi transfer dalam struktur pendapatan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer ini mengindikasikan bahwa Kota Tanjungbalai belum berhasil mencapai tingkat kemandirian fiskal yang optimal dan masih sangat bergantung pada bantuan dari luar daerah.

Secara keseluruhan, analisis terhadap Derajat Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal menunjukkan bahwa Kota Tanjungbalai masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian fiskal yang optimal. Derajat Kemandirian Fiskal yang rendah dan Rasio Ketergantungan Fiskal yang tinggi menggambarkan ketergantungan yang besar terhadap pendapatan transfer. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada transfer eksternal agar keuangan daerah lebih berkelanjutan dan mandiri.

Pajak Daerah merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai. Pada tahun 2020, kontribusi Pajak Daerah tercatat sebesar 22,78% dari total PAD, yang kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 29,34%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang lebih efektif dalam pengumpulan pajak. Pada tahun 2022, meskipun ada sedikit penurunan menjadi 28,56%, Pajak Daerah masih menjadi bagian terbesar dari PAD. Pada tahun 2023 dan 2024, kontribusinya kembali meningkat menjadi 24,70% dan 28,70%, masing-masing. Kenaikan ini mencerminkan potensi pemungutan pajak yang semakin baik, meskipun masih terdapat fluktuasi dalam kontribusinya terhadap PAD.

Retribusi Daerah, yang merupakan sumber pendapatan penting berikutnya, mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, kontribusi Retribusi Daerah tercatat sebesar 26,61% dari total PAD, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi hanya 10,35%. Pada tahun 2022, kontribusi Retribusi Daerah lebih menurun lagi menjadi 8,01%, dan pada tahun 2023 tercatat 8,64%, dengan sedikit kenaikan pada tahun 2024 menjadi 9,45%. Penurunan yang cukup besar pada komponen ini mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan atau faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

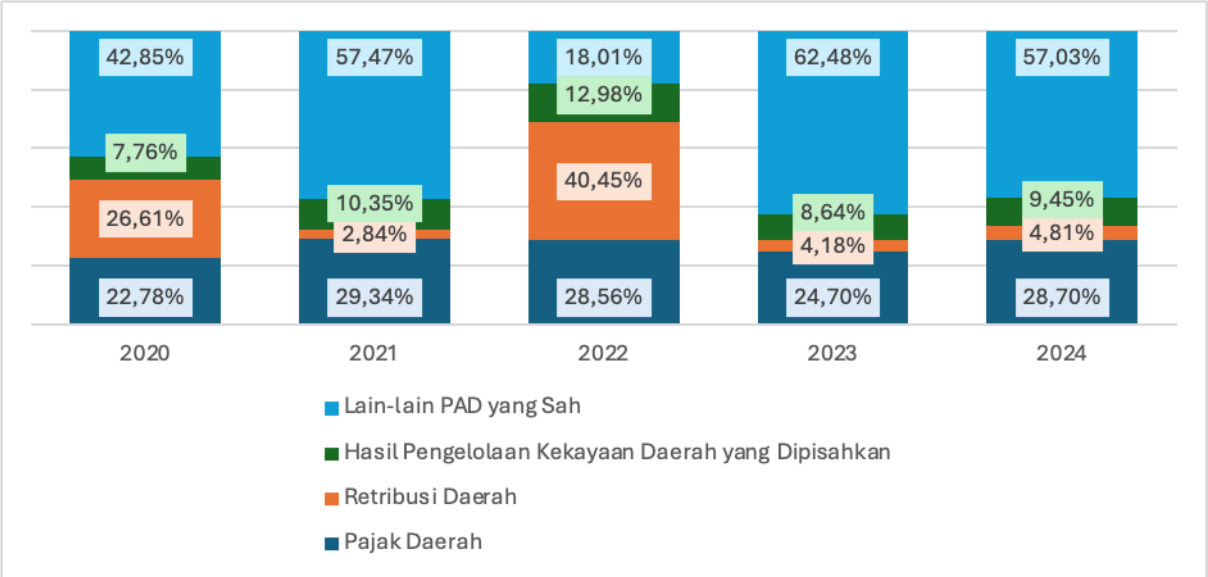


**Gambar 2.41**
**Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan kontribusi yang sangat kecil terhadap total PAD, tetapi tetap berperan dalam pendapatan daerah. Pada tahun 2020, kontribusinya tercatat sebesar 7,76%, yang kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 2,84%. Pada tahun 2022, kontribusi ini meningkat sedikit menjadi 2,98%, dan pada tahun 2023 dan 2024, tercatat 4,18% dan 4,81%, masing-masing. Meskipun kontribusinya kecil, pengelolaan aset daerah yang dipisahkan ini tetap memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan daerah, meskipun perlu ada upaya lebih untuk memaksimalkan potensi pengelolaannya.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap total PAD sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, kontribusinya tercatat sebesar 42,85%, yang kemudian meningkat menjadi 57,47% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kontribusi Lain-lain PAD yang Sah meningkat lagi menjadi 62,48%, dan tetap dominan hingga tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 57,03%. Kenaikan yang signifikan pada komponen ini mencerminkan bahwa daerah semakin mengandalkan sumber pendapatan lainnya yang sah untuk mendukung keberlanjutan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, PAD Kota Tanjungbalai mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2020-2024, dengan kontribusi terbesar berasal dari Lain-lain PAD yang Sah, diikuti oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Meskipun Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan tren positif, kontribusi Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan yang signifikan, yang menunjukkan adanya ketidakstabilan pada sumber pendapatan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Tanjungbalai untuk terus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan berbagai sumber PAD, serta menggali potensi baru untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

### 2.2.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup semua kewajiban daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Komponennya terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Evaluasi kinerja belanja daerah Kota Tanjungbalai perlu dilakukan untuk menilai realisasi kebijakan pembelanjaan selama periode 2020-2024, yang akan menjadi dasar perencanaan belanja daerah di masa mendatang guna meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan Kota Tanjungbalai.

Total belanja Kota Tanjungbalai menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil selama periode 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,69%. Pada tahun 2020, total belanja tercatat sebesar Rp 596.907 juta, yang kemudian menurun sedikit pada tahun 2021 menjadi Rp 567.911 juta. Pada tahun 2022, belanja meningkat menjadi Rp 616.764 juta, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai masing-masing sebesar Rp 666.245 juta dan Rp 663.417 juta. Kenaikan belanja ini mencerminkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung program-program pembangunan daerah. Kinerja Belanja APBD Kota Tanjungbalai periode 2020-2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.94**
**Rata-rata Pertumbuhan Belanja Kota Tanjungbalai Periode 2020-2024**
**(Juta Rupiah)**

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Belanja | 596.907 | 567.911 | 616.764 | 666.245 | 663.417 | 0,69% |
| 1.1 | Belanja Operasi | 529.092 | 523.211 | 547.656 | 586.583 | 596.195 | 1,74% |
| 1.2 | Belanja Modal | 53.908 | 44.391 | 67.589 | 79.662 | 66.570 | -1,60% |
| 1.3 | Belanja Tidak Terduga | 13.907 | 310 | 1.519 | 0 | 652 | 0% |

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

Belanja operasional Kota Tanjungbalai menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,74%. Pada tahun 2020, belanja operasional tercatat sebesar Rp 529.092 juta, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp 523.211 juta. Namun, belanja operasional meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 547.656 juta, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, tercatat masing-masing sebesar Rp 586.583 juta dan Rp 596.195 juta. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan kegiatan operasional yang harus didanai untuk menjaga kelancaran administrasi dan pelayanan publik.

Belanja modal, yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah, mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp.53.908 juta, yang kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi Rp.44.391 juta. Pada tahun 2022, belanja modal meningkat menjadi Rp.67.589 juta, dan puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan belanja modal sebesar Rp.79.662 juta. Namun, pada tahun 2024, belanja modal kembali menurun menjadi Rp.66.570 juta. Penurunan ini mencerminkan adanya penghematan atau perubahan prioritas dalam pengeluaran belanja modal, meskipun belanja modal tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Belanja tidak terduga, yang diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak atau keadaan darurat, menunjukkan fluktuasi yang cukup besar pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020, belanja tidak terduga tercatat sebesar Rp.13.907 juta. Namun, pada tahun 2021, nilai belanja tidak terduga turun drastis menjadi hanya Rp.310 juta. Pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi Rp.1.519 juta, tetapi pada tahun 2023 tercatat 0, yang mengindikasikan tidak ada alokasi untuk belanja tidak terduga pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, alokasi untuk belanja tidak terduga kembali tercatat sebesar Rp.652 juta. Fluktuasi ini menunjukkan adanya kebijakan yang lebih terencana dalam alokasi belanja untuk kebutuhan mendesak.

Secara keseluruhan, belanja daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan tren peningkatan yang stabil, terutama dalam komponen belanja operasional yang terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan publik. Belanja modal mengalami fluktuasi yang cukup besar, mencerminkan perubahan prioritas dalam pembangunan infrastruktur, sementara belanja tidak terduga menunjukkan adanya kebijakan yang lebih selektif dalam penggunaan anggaran untuk kebutuhan mendesak. Meskipun ada kenaikan dalam alokasi belanja, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk mencapai efisiensi dan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.

Proporsi belanja operasional dalam total belanja daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan kontribusi yang konsisten selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, belanja operasional tercatat sebesar 88,64% dari total belanja daerah, yang kemudian meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 92,13%. Pada tahun 2022, angka ini sedikit menurun menjadi 88,80%, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, dengan kontribusi masing-masing sebesar 88,04% dan 89,87%. Kenaikan ini menunjukkan adanya prioritas yang terus diberikan untuk pembiayaan kegiatan operasional yang mendukung pelayanan publik dan administrasi daerah, yang tetap mendominasi struktur belanja daerah.

Belanja modal, yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah, menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar 9,03%, yang kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi hanya 0,05%. Pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi 2,33%, namun kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024, dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,25% dan 0,10%. Penurunan yang sangat tajam ini mengindikasikan adanya penghematan atau perubahan prioritas belanja daerah, yang mungkin mengarah pada pengurangan atau penundaan beberapa proyek pembangunan yang sebelumnya direncanakan.

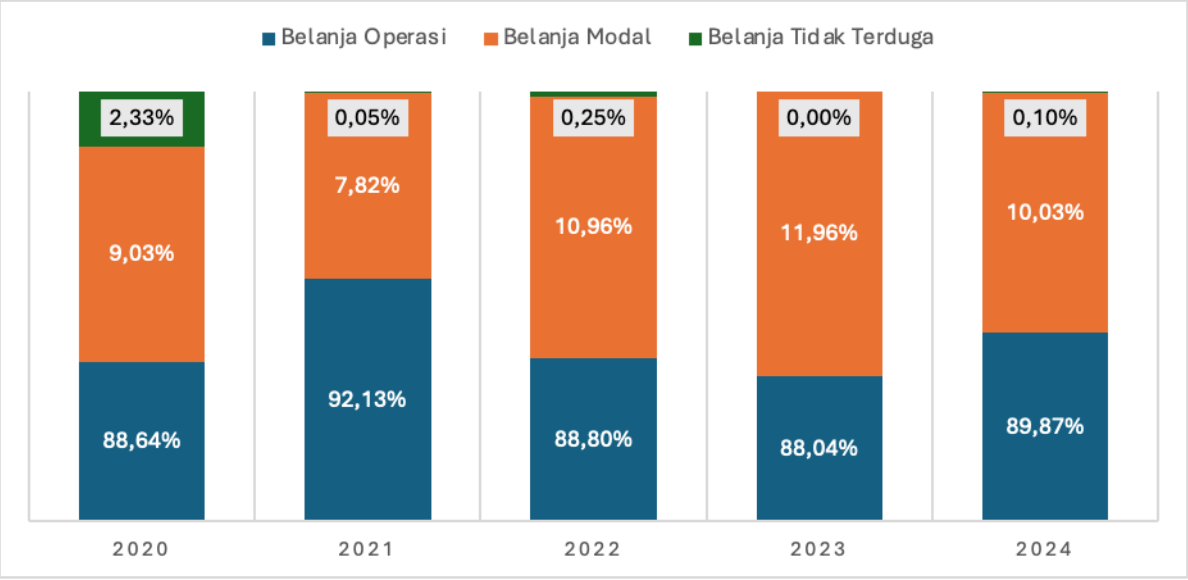


**Gambar 2.42**
**Proporsi Realisasi Belanja Kota Tanjungbalai, 2020-2024**
*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

Belanja tidak terduga, yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak atau keadaan darurat, menunjukkan kontribusi yang sangat kecil selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, belanja tidak terduga tercatat sebesar 2,33%, tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis menjadi hanya 0,05%. Pada tahun 2022, belanja

tidak terduga mengalami peningkatan menjadi 7,82%, yang menunjukkan adanya alokasi yang lebih besar untuk kebutuhan mendesak pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023, angka ini kembali turun menjadi 0%, dan pada tahun 2024, belanja tidak terduga tercatat sebesar 0,10%. Fluktuasi besar pada komponen ini menunjukkan ketidakstabilan dalam pengelolaan belanja tidak terduga, yang perlu dikelola lebih hati-hati agar dapat menghadapi keadaan darurat dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, proporsi belanja daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan dominasi pada belanja operasional yang terus meningkat, mencerminkan fokus yang tinggi terhadap kegiatan operasional dan pelayanan publik. Meskipun belanja modal mengalami penurunan yang signifikan, yang mungkin mencerminkan pengurangan proyek pembangunan atau penghematan dalam hal infrastruktur, belanja tidak terduga menunjukkan fluktuasi yang besar yang perlu lebih dioptimalkan pengelolaannya. Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara pengelolaan belanja operasional yang besar dengan kebutuhan akan investasi dalam belanja modal untuk mendukung pembangunan jangka panjang dan memperhatikan alokasi untuk belanja tidak terduga yang lebih stabil.

#### 2.2.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai terdiri dari dua komponen: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk penyertaan modal.

Adapun kinerja pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai periode tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.95**
**Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024**
**(Juta Rupiah)**

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Pembiayaan Daerah | 2.155,40 | 11.681,20 | 50.342,64 | 32.978,42 | 14.559,00 | 124,71% |
| 1.1 | **Penerimaan** | **5.455,40** | **14.981,20** | **50.342,64** | **32.978,42** | **14.559,00** | 56,81% |

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **Pembiayaan** | | | | | | |
| 1.1.1 | SiLPA TA Sebelumnya | 5.455,40 | 14.981,20 | 50.342,64 | 32.978,42 | 14.559,00 | 56,81% |
| 1.1.2 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 1.2 | **Pengeluaran Pembiayaan** | **3.300,00** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.2.1 | Penyertaan Modal | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

Pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, total pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp.2.155,40 juta, yang kemudian meningkat secara drastis pada tahun 2021 menjadi Rp.11.681,20 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan yang lebih besar untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2022, pembiayaan daerah melonjak tajam menjadi Rp.50.342,64 juta, dan meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp.32.978,42 juta, pembiayaan daerah kembali mencatatkan angka yang tinggi pada tahun 2024 sebesar Rp.14.559,00 juta. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 124,71% menunjukkan adanya ketergantungan yang besar terhadap sumber pembiayaan eksternal, serta kebutuhan untuk pembiayaan yang lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan, yang mencakup penerimaan dari sumber pembiayaan eksternal, menunjukkan angka yang serupa dengan pembiayaan daerah. Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp.5.455,40 juta, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.14.981,20 juta. Pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan kembali tercatat sebesar Rp.50.342,64 juta, sejalan dengan pembiayaan daerah yang mengalami lonjakan tajam. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan, masing-masing menjadi Rp.32.978,42 juta dan Rp.14.559,00 juta. Penerimaan pembiayaan juga mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 56,81%, yang menunjukkan adanya ketergantungan pada pembiayaan eksternal, terutama dalam bentuk penerimaan yang berasal dari sumber lain, seperti pinjaman daerah dan pembiayaan luar lainnya.

Pengeluaran pembiayaan di Kota Tanjungbalai tercatat lebih stabil dan tidak mengalami fluktuasi besar selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 dan 2021, pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp.3.300,00 juta masing-masing, yang menunjukkan pengeluaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman daerah atau kewajiban lainnya. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, pengeluaran pembiayaan tercatat tidak ada (Rp 0,00 juta), yang menunjukkan bahwa tidak ada pengeluaran terkait dengan pembiayaan daerah yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Tanjungbalai mungkin telah menyelesaikan kewajiban pembiayaan sebelumnya, atau terdapat kebijakan untuk menunda pengeluaran pembiayaan yang lebih besar dalam periode tersebut.

Penerimaan kembali pembiayaan pinjaman daerah mencatatkan angka yang tetap selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 hingga 2024, penerimaan ini tercatat sebesar Rp.1.000,00 juta pada tahun 2020, dan meningkat pada tahun 2022 hingga 2024 menjadi Rp.1.200,00 juta per tahun. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menerima kembali pembayaran pinjaman daerah, meskipun jumlahnya tidak mengalami fluktuasi yang signifikan.

Secara keseluruhan, pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang signifikan dalam periode 2020-2024, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022. Ketergantungan yang besar terhadap pembiayaan eksternal dan penerimaan pembiayaan mencerminkan kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat untuk mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan stabil dan lebih terkontrol, dengan tidak adanya pengeluaran signifikan pada tahun-tahun terakhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan eksternal meningkat, pengelolaan keuangan daerah semakin efisien, dan perlu lebih diperhatikan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah.

#### 2.2.2.5 Neraca Daerah

Neraca keuangan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu yang mencerminkan sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah serta kewajiban yang harus dipenuhi. Melalui neraca, dapat dilihat kemampuan keuangan jangka pendek dan panjang pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban, serta sejauh mana aset yang dimiliki dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Laporan Neraca Daerah Kota Tanjungbalai penting untuk dilihat karena memberikan informasi kepada stakeholders terkait

tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca Daerah Kota Tanjungbalai untuk 5 tahun terakhir tersaji pada gambar di bawah.

## Tabel 2.96

## Neraca Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | |
| **ASET LANCAR** | | | | | |
| Kas di Kas Daerah | 13.270.843.271,08 | 47.546.387.349,24 | 31.541.335.797,07 | 8.418.094.564,50 | 387.099.781,69 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0 | 0 | 22.000.000,00 | 0 | 105.504.638,00 |
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah | 0 | 2.144.901.350,00 | 1.195.831.004,79 | 3.950.260.142,28 | 1.013.820.739,53 |
| Kas di Bendahara BOS | 503.754.482,32 | 244.043.025,68 | 199.763.515,25 | 66.458.566,29 | 0 |
| Kas di Bendahara FKTP | 1.206.606.130,00 | 407.307.754,00 | 135.173.604,76 | 2.124.632.308,76 | 112.353.061,76 |
| Kas Lainnya | 0 | 236.322,00 | 6.163.681,00 | 13.173.901,00 | 0, |
| Setara kas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investasi Jangja Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piutang Pajak Daerah | 21.502.480.161,00 | 23.868.673.302,00 | 26.538.905.708,00 | 28.296.235.443,00 | 31.225.384.713,00 |
| Piutang Retribusi Daerah | 1.187.455.188,00 | 1.187.455.188,00 | 2.107.186.188,00 | 2.249.892.188,00 | 2.427.708.500,00 |
| Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 14.091.695.408,70 | 15.268.474.569,74 | 15.758.303.042,08 | 15.657.836.633,46 | 15.617.038.445,46 |
| Piutang transfer pemerintah pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 6.569.537.679,00 | 0 | 0 | 19.473.183.784,00 | 28.552.134.349,00 |
| Piutang Lainnya | 27.793.400,00 | 27.793.400,00 | 0 | 0 | 0 |
| Penyisihan Piutang | -21.014.127.542,74 | -22.361.357.839,63 | -30.370.612.483,84 | -41.942.926.687,73 | -43.382.255.200,17 |
| Beban dibayar di muka | 0 | 0 | | | |
| Persediaan | 6.913.183.826,37 | 8.234.245.626,94 | 7.314.604.153,81 | 9.700.544.412,27 | 10.456.638.094,97 |
| **JUMLAH ASET LANCAR** | **44.259.222.003,73** | **76.568.160.047,97** | **54.448.654.210,92** | **48.007.385.255,83** | **47.358.673.040,18** |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | |
| Investasi Permanen | 49.049.319.690,40 | 50.837.756.972,65 | 49.384.609.326,30 | 47.930.353.308,02 | 43.405.419.545,02 |
| **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG** | **49.049.319.690,40** | **50.837.756.972,65** | **49.384.609.326,30** | **47.930.353.308,02** | 43.405.419.545,02 |
| **ASET TETAP** | | | | | |
| Tanah | 525.338.551.074,00 | 527.171.065.829,00 | 528.727.590.702,00 | 531.015.867.995,00 | 532.984.158.310,42 |
| Peralatan dan Mesin | 307.241.062.033,73 | 273.907.739.048,99 | 282.860.454.399,27 | 298.910.768.515,82 | 318.517.049.673,36 |

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gedung dan Bangunan | 461.042.021.482,93 | 468.074.977.292,63 | 478.253.086.256,81 | 498.662.729.755,09 | 519.159.295.303,89 |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 888.729.219.604,58 | 922.285.985.854,84 | 1.092.211.303.148,74 | 1.125.446.588.390,75 | 1.175.765.373.057,50 |
| Aset Tetap Lainnya | 52.008.044.383,07 | 54.006.059.540,02 | 56.684.571.390,02 | 59.912.047.258,83 | 62.837.770.426,83 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 14.796.294.600,00 | 14.796.294.600,00 | 15.422.025.801,30 | 25.166.438.162,78 | 27.510.608.123,69 |
| Akumulasi Penyusutan | -1.053.054.992.118,07 | -1.117.593.344.398,28 | -1.210.567.273.474,55 | -1.362.689.816.202,84 | -1.311.329.644.058,55 |
| **JUMLAH ASET TETAP** | **1.196.100.201.060,24** | **1.142.648.777.767,20** | **1.243.591.758.223,59** | **1.176.424.623.875,43** | **1.325.444.610.837,14** |
| **ASET LAINNYA** | | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 1.156.565.135,00 | 1.156.565.135,00 | -22.001.600,00 | 0 | 28.207.625.860,25 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0 | 0 | 932.234.713,64 | 910.233.113,64 | 5.028.565.443,00 |
| Aset Tidak Berwujud Lainnya | 3.638.409.738,00 | 3.765.972.241,00 | 3.958.002.241,00 | 5.028.565.443,00 | 130.163.641.707,57 |
| Aset Lain-lain | 63.305.202.162,00 | 122.321.166.374,38 | 137.754.062.581,88 | 124.871.212.421,83 | -4.445.276.342,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 0 | 0 | 0 | -110.538.742.911,65 | -120.744.673.004,11 |
| Treasury Deposit Facility (TDF) | 0 | 0 | 0 | 2.451.470.000,00 | 358.130.000,00 |
| **JUMLAH ASET LAINNYA** | **68.100.177.035,00** | **127.243.703.750,38** | **142.622.297.936,52** | **22.722.738.066,82** | **38.568.013.664,71** |
| **JUMLAH ASET** | 1.357.508.919.789,37 | 1.397.298.398.538,20 | **1.490.047.319.697,33** | **1.295.085.100.506,10** | **1.454.776.717.087,05** |
| **KEWAJIBAN** | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0 | 236.322,00 | 6.163.681,00 | 13.173.901,00 | 0 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 1.369.746.521,12 | 1.369.746.521,12 | 1.369.746.521,12 | 1.369.746.521,12 | 1.369.746.521,12 |
| Utang Belanja | 481.099.859,35 | 529.359.896,47 | 9.373.321.086,18 | 13.362.495.224,41 | 50.995.097.357,49 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **1.850.846.380,47** | **1.899.342.739,59** | **10.749.231.288,30** | **14.745.415.646,53** | **52.364.843.878,61** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **1.850.846.380,47** | **1.899.342.739,59** | **10.749.231.288,30** | **14.745.415.646,53** | **52.364.843.878,61** |
| **EKUITAS** | | | | | |
| EKUITAS | 1.355.658.073.408,90 | 1.395.399.055.798,61 | 1.479.298.088.409,03 | 1.280.339.684.859,57 | 1.402.411.873.208,44 |
| **JUMLAH EKUITAS** | 1.355.658.073.408,90 | 1.395.399.055.798,61 | **1.479.298.088.409,03** | **1.280.339.684.859,57** | 1.402.411.873.208,44 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **1.357.508.919.789,37** | **1.397.298.398.538,20** | **1.490.047.319.697,33** | **1.295.085.100.506,10** | **1.454.776.717.087,05** |

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai, 2024*

Total aset Kota Tanjungbalai menunjukkan fluktuasi pergerakan selama lima tahun terakhir. Nilai aset melonjak dari sekitar Rp.1,35 triliun (2020) menjadi puncaknya Rp.1,49 triliun (2022), sebelum menurun menjadi Rp.1,29 triliun (2023) dan kembali meningkat menjadi Rp.1,45 triliun di tahun 2024. Kontributor terbesar terhadap total aset adalah aset tetap, yang stabil berada di atas Rp.1,1 triliun sejak 2020. Aset lancar juga menunjukkan pertumbuhan pesat dari hanya Rp.44,25 miliar (2020) menjadi puncaknya Rp.76,56 miliar (2021), meskipun kemudian menurun di tahun 2024 menjadi Rp.47,35 miliar. Investasi jangka panjang tetap relatif stabil, sementara aset lainnya sangat fluktuatif, naik pada 2020–2021, lalu turun di periode 2022-2024. Peningkatan aset tetap mencerminkan investasi yang konsisten terhadap infrastruktur atau aset jangka panjang daerah. Namun, turunnya nilai aset lancar dan aset lainnya di 2024 menunjukkan kemungkinan adanya likuiditas yang melemah atau realokasi kekayaan daerah. Fluktuasi tajam pada "aset lainnya" juga dapat mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan pencatatan atau perubahan nilai wajar atas aset non-rutin. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan aset yang efisien dan akuntabel agar kekayaan daerah memberikan manfaat berkelanjutan.

Kewajiban Kota Tanjungbalai relatif kecil dibandingkan dengan total aset, dan seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek. Jumlah kewajiban tertinggi terjadi pada 2024, sebesar Rp.52,36 miliar, meningkat dari hanya Rp.1,85 miliar (2020). Tahun 2021 menunjukkan peningkatan tipis kewajiban, namun meningkat tajam kembali setelahnya. Rendahnya kewajiban jangka pendek menunjukkan tingkat utang yang sangat terkendali dan rasio solvabilitas yang sehat. Namun, peningkatan tajam pada tahun 2023 dan 2024 dapat mencerminkan adanya tekanan likuiditas jangka pendek atau kewajiban yang jatuh tempo dalam periode tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan kewajiban ini diiringi dengan kapasitas pembayaran yang memadai, serta menjaga agar utang jangka pendek tidak menjadi beban yang mengganggu stabilitas fiskal.

Ekuitas daerah berfluktuasi dari Rp.1,35 triliun (2020) menjadi Rp.1,49 triliun (2022) sebelum menurun menjadi Rp.1,29 triliun di tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi Rp.1,45 triliun pada tahun 2024.. Kenaikan pada ekuitas dapat menunjukkan hasil akumulasi surplus

anggaran, revaluasi aset, atau pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan akuntabel. Penurunan di tahun 2023 perlu dicermati apakah disebabkan oleh defisit, penurunan nilai aset, atau faktor lain yang mempengaruhi posisi keuangan bersih. Penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan ekuitas dan optimalisasi pemanfaatannya demi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dari neraca di atas, kemampuan keuangan pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dianalisis melalui beberapa rasio keuangan. Rasio yang dianalisis termasuk Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, yang diukur melalui current ratio (rasio lancar) dan quick ratio (rasio cair). Sedangkan Rasio Solvabilitas mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang, serta memberikan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio ini diukur melalui rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Hasil perhitungan rasio-rasio tersebut disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.97**
**Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Neraca Daerah**
**Kota Tanjungbalai, 2020-2024**

| Rasio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 23,91 | 40,31 | 5,07 | 3,26 | 0,90 |
| Quick ratio | 20,18 | 35,98 | 4,38 | 2,60 | 0,70 |
| Rasio total hutang terhadap total aset | 0,14 | 0,14 | 0,72 | 1,14 | 3,60 |
| Rasio hutang terhadap modal | 0,001 | 0,001 | 0,007 | 0,012 | 0,037 |

*Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai*

Berikut penjelasan dari hasil tabel di atas:

1. **Rasio Lancar (*Current Ratio*)**

   *Current ratio* merupakan indikator yang mengukur kemampuan pemerintah Kota Tanjung Balai dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Current Ratio Kota Tanjungbalai menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sangat tinggi, yaitu 23,91, yang mencerminkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang sangat besar. Namun, seiring berjalannya waktu, Current Ratio

menurun tajam pada tahun 2021 menjadi 40,31, yang masih menunjukkan kecukupan likuiditas yang sangat baik, tetapi mulai lebih realistis. Pada tahun 2022, rasio ini turun drastis menjadi 5,07, dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi 3,26. Pada tahun 2024, angka ini turun lebih lanjut menjadi 0,90, yang menunjukkan bahwa Kota Tanjungbalai mulai menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Penurunan tajam ini perlu diperhatikan karena menunjukkan bahwa likuiditas daerah semakin terbatas.

2. **Rasio Cair (*Quick Ratio*)**

   *Quick ratio* adalah ukuran kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan atau aset yang kurang likuid. Rasio ini lebih konservatif dibanding *current ratio*. Quick Ratio Kota Tanjungbalai juga mengalami penurunan yang signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, Quick Ratio tercatat sebesar 20,18, yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Namun, angka ini menurun menjadi 35,98 pada tahun 2021 dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, Quick Ratio tercatat 4,38, yang menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, likuiditas jangka pendek masih cukup baik. Namun, pada tahun 2023, Quick Ratio turun tajam menjadi 2,60, dan pada tahun 2024, angka ini turun lagi menjadi 0,70, yang mencerminkan ketergantungan yang lebih besar terhadap sumber daya yang kurang likuid, seperti persediaan atau aset lainnya. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan kualitas likuiditas yang cukup signifikan, dan perlu perhatian lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah.

3. **Rasio Total Hutang terhadap Total Aset**

   Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi aset pemerintah Kota Tanjung Balai yang didanai oleh kewajiban atau utang. Rasio total hutang terhadap total aset Kota Tanjungbalai menunjukkan peningkatan yang cukup besar selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,14, yang menunjukkan

bahwa hutang daerah masih relatif rendah dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Namun, angka ini meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 0,72, dan terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan rasio 1,14 pada tahun 2022, 3,60 pada tahun 2024, dan angka yang lebih tinggi pada tahun 2023. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa Kota Tanjungbalai semakin bergantung pada utang untuk membiayai kegiatan dan proyek-proyek pembangunan, yang dapat meningkatkan risiko keuangan daerah jika tidak dikelola dengan hati-hati.

4. **Rasio Hutang terhadap Modal**

   Rasio hutang terhadap modal menggambarkan sejauh mana utang digunakan dalam struktur modal pemerintah daerah. Rasio hutang terhadap modal menunjukkan angka yang sangat rendah selama periode 2020-2024, yang mengindikasikan bahwa Kota Tanjungbalai memiliki struktur permodalan yang cukup kuat. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,001, yang berarti bahwa tingkat hutang terhadap modal sangat rendah. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,007, dan pada tahun-tahun berikutnya, rasio ini terus meningkat menjadi 0,012 pada tahun 2022, 0,037 pada tahun 2024, dan sedikit lebih tinggi pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan, rasio ini tetap berada pada level yang rendah, yang menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Tanjungbalai terhadap hutang untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan masih relatif terkendali.

Secara keseluruhan, rasio keuangan Kota Tanjungbalai menunjukkan tren penurunan dalam likuiditas, yang tercermin dari penurunan drastis pada Current Ratio dan Quick Ratio selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa daerah semakin menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas jangka pendek. Di sisi lain, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan peningkatan ketergantungan terhadap utang untuk membiayai kegiatan daerah. Pemerintah daerah perlu memperhatikan tren ini dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan bijaksana untuk menghindari potensi risiko

keuangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian, perhatian khusus perlu diberikan terhadap rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2024 yang mencapai angka 3,60. Angka ini mengindikasikan bahwa total kewajiban telah melebihi total aset yang dimiliki, suatu kondisi yang dapat membahayakan stabilitas keuangan daerah apabila tidak segera diatasi. Di sisi lain, rasio hutang terhadap modal yang sangat rendah dan stabil menunjukkan bahwa pembiayaan daerah masih sangat bergantung pada sumber daya internal atau modal sendiri, serta menunjukkan kehati-hatian dalam penggunaan utang.

Dalam rangka memperkuat posisi keuangan dan menjaga kesinambungan fiskal, beberapa solusi strategis dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pertama, diperlukan langkah-langkah pengendalian kewajiban dan pengurangan utang secara bertahap melalui kebijakan fiskal yang disiplin dan efisien. Kedua, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki agar memberikan nilai tambah ekonomi, misalnya melalui kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak swasta. Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pasif seperti SiLPA, serta memperkuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Keempat, efisiensi belanja juga perlu menjadi prioritas dengan menekankan pada kualitas pengeluaran, terutama untuk belanja modal dan operasional yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Terakhir, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik harus terus dijaga untuk mendukung kepercayaan publik dan stabilitas fiskal jangka panjang.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat memperkuat struktur keuangannya, menjaga stabilitas fiskal, serta meningkatkan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan.

### 2.2.3 Kebijakan Anggaran APBD Tahun 2020-2024

Analisis Kebijakan anggaran APBD Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari dua kebijakan utama, yatu kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Perlu dicatat bahwa periode ini dihadapkan dengan adanya krisis akibat Pandemi COVID-19. Sebagaimana terlihat dalam kinerja belanja yang telah dijelaskan sebelumnya kebijakan belanja Kota Tanjungbalai dalam periode ini sangat dipengaruhi oleh krisis ini. Hal ini dapat dilihat dari proporsi belanja tidak terduga yang naik dan pengetatan terhadap belanja modal pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Kebijakan anggaran belanja lainnya dapat dilihat pada belanja pegawai. Belanja pegawai APBD Kota Tanjungbalai tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan anggaran belanja yang relatif tidak berubah. Secara proporsi belanja pegawai juga secara umum mengalami tren tidak berubah, bahkan cenderung menurun. Proporsi belanja pegawai tahun 2024 sebesar 44,72%, jauh menurun dari tahun 2020 yang mencapai lebih dari 50%. Jika dilihat dari proporsi belanja barang dan jasa yang relatif juga turun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa secara umum kebijakan anggaran APBD Kota Tanjungbalai terutama setelah puncak pandemi diarahkan pada belanja yang lebih produktif.

**Tabel 2.98**
**Analisis Proporsi Belanja Pegawai Kota Tanjungbalai**
**Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Belanja | 596.907 | 567.911 | 616.764 | 666.245 | 663.417 |
| Belanja Pegawai | 300.385 | 305.157 | 291.578 | 292.117 | 296.679 |
| Persentase Belanja Pegawai | 50,32% | 53,73% | 47,28% | 43,85% | 44,72% |

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

Sementara itu, kebijakan pembiayaan Kota Tanjungbalai 5 tahun terakhir cenderung lebih pada kebijakan defisit anggaran ketika kondisi perekonomian stabil dan cenderung melakukan kebijakan surplus anggaran ketika krisis. Dapat dilihat pada tahun 2022-2024, terjadi defisit anggaran. Sementara di tahun pandemi (2020-2021) terjadi surplus anggaran. Hal ini menunjukkan kebijakan pembiayaan yang cukup progresif ketika perekonomian relatif stabil. Dari segi SILPA TA sebelumnya relatif mengalami tren peningkatan. Detail kebijakan anggaran pembiayaan Kota Tanjungbalai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.99**
**Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran**
**Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 609.733 | 606.573 | 599.515 | 647.826 | 651.320 |
| 2 | Belanja Daerah | 596.907 | 567.911 | 616.764 | 666.245 | 663.417 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| A | Surplus/ Defisit riil | 9.526 | 35.361 | (17.249) | (18.419) | (12.097) |
| 4 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 5.455 | 14.981 | 50.343 | 32.978 | 14.559 |
| 5 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah | 6.455 | 14.981 | 51.543 | 34.178 | 14.559 |
| A+B | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | 15.981 | 50.343 | 34.294 | 15.759 | 2.462 |

*Sumber: Bapperida Kota Tanjungbalai*

### 2.2.4 Proyeksi Keuangan Kota Tanjungbalai

Perlu dilakukan proyeksi terhadap APBD Kota Tanjungbalai guna mengevaluasi kapasitas keuangan daerah dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi ini sebaiknya didasarkan pada kinerja keuangan masa lalu, dengan mempertimbangkan pula kondisi ekonomi ke depan serta arah kebijakan yang akan ditempuh. Berdasarkan uraian mengenai kinerja keuangan Kota Tanjungbalai sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prospek perkembangan kota ini dalam lima tahun ke depan cukup menjanjikan. Hal ini terlihat dari tren peningkatan pendapatan dan belanja yang berlangsung secara konsisten, serta perbaikan proporsi dalam beberapa aspek, seperti meningkatnya kontribusi PAD, membaiknya tingkat kemandirian fiskal, dan naiknya proporsi belanja modal.

Selain mencermati tren positif tersebut, penyusunan proyeksi APBD Kota Tanjungbalai untuk lima tahun ke depan juga harus mempertimbangkan asumsi mengenai perkembangan ekonomi di masa mendatang. Dua asumsi utama yang dijadikan dasar dalam proyeksi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil serta inflasi yang terkendali. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan Kota Tanjungbalai dan asumsi nasional, berikut adalah asumsi pertumbuhan dan inflasi Kota Tanjungbalai untuk lima tahun ke depan.

**Tabel 2.100**
**Asumsi Pertumbuhan dan Tingkat Inflasi tahun 2026-2030**

| No. | Uraian | Asumsi |
|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 5,25 – 5,75 |
| 2 | Inflasi (%) | 1,5 - 3,5 |

Asumsi ini tentu perlu diperkuat dengan kebijakan yang tepat dan memiliki dampak nyata. Arah kebijakan pembangunan dalam lima tahun ke depan akan berperan penting terhadap efektivitas pencapaian target APBD Kota Tanjungbalai yang telah diproyeksikan.

Proyeksi keuangan Kota Tanjungbalai untuk periode 2026 hingga 2030 disusun sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan panjang. Proyeksi ini mencakup estimasi pendapatan, belanja, serta surplus/defisit anggaran, dan memberikan gambaran tentang arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah daerah. Di dalamnya, komponen utama pendapatan terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan belanja terbagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan menggunakan pendekatan tren dan asumsi pertumbuhan moderat, proyeksi ini diharapkan menjadi dasar dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.

### 2.2.4.1 Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan Pemerintah Kota Tanjungbalai pada periode tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Total pendapatan daerah diperkirakan tumbuh secara bertahap dari Rp.696,56 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp.718,88 miliar pada tahun 2030. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi, yang jumlahnya meningkat dari Rp.600,25 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp.619,46 miliar pada tahun 2030. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, dari Rp.84,00 miliar menjadi Rp.86,72 miliar selama lima tahun. Proyeksi pada pos "Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah," menunjukkan peningkatan tipis dari Rp.12,30 miliar menjadi Rp.12,69 miliar. Secara umum, proyeksi ini mencerminkan stabilitas fiskal yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah, dengan catatan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan kontribusi PAD agar struktur pendapatan lebih mandiri dan berkelanjutan.

**Tabel 2.101**
**Proyeksi Pendapatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2026-2030**

| URAIAN | PROYEKSI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **PENDAPATAN** | **696.561.247.823** | **702.076.622.534** | **707.636.120.242** | **713.240.093.932** | **718.888.899.411** |
| A. PENDAPATAN ASLI DAERAH | 84.004.373.733 | 84.676.408.723 | 85.353.819.993 | 86.036.650.553 | 86.724.943.757 |
| B. PENDAPATAN TRANSFER | 600.256.874.090 | 605.001.813.811 | 609.784.713.049 | 614.605.875.482 | 619.465.607.213 |
| C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 12.300.000.000 | 12.398.400.000 | 12.497.587.200 | 12.597.567.898 | 12.698.348.441 |

### 2.2.4.2 Proyeksi Belanja

Selaras dengan proyeksi pendapatan, total belanja Pemerintah Kota Tanjungbalai juga diproyeksikan meningkat secara bertahap dari Rp698,56 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp720,88 miliar pada tahun 2030. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja, dengan tren kenaikan dari Rp629,08 miliar menjadi Rp649,22 miliar selama periode lima tahun, mencerminkan dominasi pengeluaran rutin dalam APBD seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja hibah. Belanja modal, yang mencerminkan investasi pemerintah untuk pembangunan fisik, menunjukkan peningkatan moderat hingga tahun 2029, dari Rp67,27 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp69,45 miliar pada tahun 2030.. Sementara itu, belanja tak terduga stabil pada Rp2,2 miliar, sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah terhadap keadaan darurat atau bencana. Tidak terdapat alokasi untuk belanja transfer dalam lima tahun ke depan. Dengan struktur belanja yang defisit, pemerintah perlu memperhatikan fleksibilitas anggaran agar memiliki ruang fiskal untuk pembiayaan prioritas strategis dan darurat.

**Tabel 2.102**
**Proyeksi Belanja APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2026-2030**

| Uraian | Proyeksi Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **BELANJA** | **698.561.247.823** | **704.075.022.534** | **709.632.907.442** | **715.235.255.428** | **720.882.422.200** |
| A. Belanja Operasi | 629.083.405.837 | 634.058.957.812 | 639.074.314.202 | 644.129.793.443 | 649.225.716.518 |
| B. Belanja Modal | 67.277.841.986 | 67.816.064.722 | 68.358.593.240 | 68.905.461.986 | 69.456.705.681 |
| C. Belanja Tak Terduga | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 |
| D. Belanja Transfer | - | - | - | - | - |
| **SURPLUS/DEFISIT** | **-2.000.000.000** | **-1.998.400.000** | **-1.996.787.200** | **-1.995.161.497** | **-1.993.522.789** |

Seluruh tahun dalam periode proyeksi menunjukkan kondisi anggaran defisit, di mana pendapatan lebih kecildibandingkan belanja, menghasilkan defisit anggaran. Kebijakan anggaran defisit menunjukkan pendekatan keuangan daerah yang berorientasi pada pembiayaan melalui utang atau penerimaan pembiayaan eksternal untuk menutupi kekurangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pendekatan ini sering kali digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan atau program-program prioritas yang memerlukan dana lebih besar daripada

kemampuan pendapatan yang ada dalam anggaran. Pendekatan ini juga membatasi fleksibilitas fiskal, sehingga disarankan untuk tetap menyisakan ruang bagi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam praktiknya, sebagai cadangan untuk situasi darurat atau peluang investasi yang strategis.

### 2.2.4.3 Proyeksi Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang tercatat pada tabel menunjukkan adanya alokasi yang cukup besar setiap tahun, dengan nilai proyeksi yang konsisten dari tahun 2026 hingga 2030, yakni Rp 2.000.000.000 pada tahun 2026, menurun sedikit menjadi Rp 1.998.400.000 pada tahun 2027 dan seterusnya, dengan sedikit penurunan pada tahun 2028 hingga 2030. Proyeksi penerimaan pembiayaan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), yang menunjukkan adanya kelebihan anggaran yang tidak digunakan pada tahun sebelumnya dan dapat dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, di mana kelebihan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan di tahun yang akan datang.

**Tabel 2.103**
**Proyeksi Pembiayaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2026-2030**

| Uraian | Proyeksi Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **PEMBIAYAN DAERAH** | | | | | |
| **PENERIMAAN Pembiayaan** | **2.000.000.000** | **1.998.400.000** | **1.996.787.200** | **1.995.161.497** | **1.993.522.789** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 2.000.000.000 | 1.998.400.000 | 1.996.787.200 | 1.995.161.497 | 1.993.522.789 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **2.000.000.000** | **1.998.400.000** | **1.996.787.200** | **1.995.161.497** | **1.993.522.789** |
| **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Pembiayaan Netto** | **2.000.000.000** | **1.998.400.000** | **1.996.787.200** | **1.995.161.497** | **1.993.522.789** |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, tercatat sebesar Rp 2.000.000.000 pada tahun 2026 dan sedikit berkurang pada tahun 2027 menjadi Rp 1.998.400.000, dengan angka yang serupa di tahun-tahun berikutnya hingga 2030. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan, masih ada surplus atau kelebihan dalam penerimaan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain atau menambah cadangan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, proyeksi pembiayaan APBD Kota Tanjungbalai menunjukkan strategi pengelolaan keuangan yang berhati-hati dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan kelebihan anggaran dari tahun sebelumnya. Tidak adanya pembiayaan daerah yang tercatat mencerminkan pengelolaan anggaran yang tidak bergantung pada utang eksternal. Surplus penerimaan pembiayaan yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan kestabilan fiskal yang baik dan kesiapan untuk menghadapi kebutuhan pembiayaan di masa depan tanpa perlu meningkatkan beban utang daerah.

## 2.3 Permasalahan Daerah

Pembahasan terkait permasalahan dan isu strategis pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tanjungbalai berfokus pada identifikasi dan analisis berbagai permasalahan serta isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah. Permasalahan yang diidentifikasi dalam bab ini merupakan kondisi riil yang menunjukkan kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Proses identifikasi ini didasarkan pada data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan KLHS RPJMD dan evaluasi kinerja pembangunan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Isu strategis yang diangkat dalam bab ini tidak hanya terbatas pada konteks lokal, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh global, nasional, dan regional yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Kota Tanjungbalai. Analisis isu strategis ini mencakup berbagai aspek penting seperti geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya

saing, dan pelayanan umum. Dengan memahami isu-isu ini, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dan efektif dalam menghadapi dinamika pembangunan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Pembagian masalah dan isu strategis akan memperhatikan tata urutan dalam gambaran umum kondisi daerah, memastikan setiap permasalahan dan isu diuraikan secara sistematis dan terstruktur.

Penyusunan dalam bab ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi perumusan kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Melalui identifikasi permasalahan dan isu strategis yang komprehensif, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan akan lebih terarah dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Tanjungbalai secara keseluruhan.

### 2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa depan dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Kesenjangan ini mencerminkan disparitas antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dan implementasi nyata di lapangan, yang disebabkan oleh berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Analisis permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengungkap penyebab mendasar dari kesenjangan ini, termasuk inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, kurangnya kapasitas kelembagaan, serta kendala regulasi dan kebijakan. Dengan demikian, identifikasi permasalahan ini menjadi langkah awal yang krusial untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, serta memperkuat kemampuan

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

#### 2.3.1.1 Permasalahan Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Masalah utama yang dilaporkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tanjungbalai mencakup berbagai aspek penting seperti capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan daya dukung daya tampung (DDDT) lingkungan hidup, yang meliputi air, udara, dan pangan. Capaian TPB menunjukkan bahwa dari 222 indikator, 70 indikator telah tercapai sesuai target nasional, 80 indikator belum mencapai target nasional, 60 indikator tidak ada data, dan 12 indikator dieliminasi karena tidak relevan atau bukan kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai . Hal ini menekankan pentingnya upaya yang lebih keras untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Pada aspek daya dukung dan daya tampung air, Kota Tanjungbalai menghadapi defisit yang signifikan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 185.647 jiwa dan kebutuhan air rata-rata per orang sebesar 219 $m^3$/tahun, total kebutuhan air mencapai 40.656.693 $m^3$/tahun. Namun, produksi air yang disalurkan di Kota Tanjungbalai hanya 518,988 $m^3$/tahun, sehingga terjadi defisit air sebesar 40.137.705 $m^3$/tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Daya dukung dan daya tampung udara juga menunjukkan adanya permasalahan yang perlu diatasi. Kualitas udara di Kota Tanjungbalai mengalami tekanan akibat tingginya emisi polutan dari berbagai aktivitas industri dan kendaraan bermotor. DDDTLH dengan pendekatan jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara menunjukkan kondisi yang tinggi di beberapa kecamatan, namun perlu upaya lebih untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara secara menyeluruh.

Permasalahan pada aspek pangan sangat menonjol dengan status defisit pangan, khususnya beras. Dengan jumlah penduduk 185.647 jiwa dan tingkat konsumsi rata-rata per orang sebesar 109 kg/tahun, total konsumsi beras mencapai 19.099,3 ton/tahun. Namun, ketersediaan pangan beras di Kota Tanjungbalai hanya 830,4 ton/tahun, sehingga terjadi

defisit pangan sebesar 18.268,9 ton/tahun. Hal ini menekankan pentingnya upaya peningkatan ketersediaan pangan lokal serta efisiensi distribusi dan penyimpanan pangan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di masa depan.

Selain itu, daya dukung dan daya tampung serat serta bahan bakar juga menunjukkan kondisi yang kritis. Produksi serat yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti tekstil dan industri lainnya masih sangat terbatas. Sementara itu, kebutuhan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat juga mengalami defisit. Sumber daya genetik yang penting untuk keanekaragaman hayati juga mengalami tekanan, dengan banyaknya spesies yang terancam punah akibat kerusakan habitat.

Pengaturan iklim dan mitigasi bencana menjadi perhatian utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi masyarakat dari risiko bencana. Perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menjadi tantangan besar. Kota Tanjungbalai perlu memperkuat strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

### 2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan

Pengindentifikasian permasalahan pembangunan di Kota Tanjungbalai merupakan perumusan dari Bab II dan laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang dominan.

### 2.3.1.2.1 Aspek Geografis dan Demografis

**Gambar 2.43**

**Ringkasan Permasalahan Aspek Geografis dan Demografi Kota Tanjungbalai**

Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai

Memahami permasalahan aspek geografi dan demografi adalah langkah krusial dalam perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik fisik suatu wilayah, seperti letak geografis, topografi, iklim, dan sumber daya alam yang dimiliki. Sedangkan aspek demografi mencakup data dan informasi tentang jumlah penduduk, kepadatan, distribusi, pertumbuhan, serta struktur usia dan jenis kelamin penduduk. Kedua aspek ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh besar terhadap berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan.

Kota Tanjungbalai, dengan kondisi geografisnya yang berada di dataran rendah dan dekat dengan aliran Sungai Asahan, rentan terhadap bencana alam seperti banjir. Perubahan iklim global juga memperparah kondisi ini dengan peningkatan curah hujan dan kenaikan permukaan air laut. Selain itu, alih fungsi lahan yang tidak terkendali dari pertanian ke perumahan dan industri mengancam ketahanan pangan lokal dan

mengurangi kapasitas lahan untuk menyerap air hujan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan tata ruang yang matang dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga kualitas lingkungan.

Dari segi demografi, pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang meningkat di Kota Tanjungbalai menambah tekanan pada infrastruktur dan layanan publik yang ada. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi menunjukkan bahwa banyak penduduk belum menikmati kesejahteraan yang layak. Memahami kondisi demografi ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan aspek geografi dan demografi, perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan inklusif, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.

## A. Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRW

Pemanfaatan ruang di Kota Tanjungbalai belum optimal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW mencerminkan permasalahan tata kelola yang serius, dimana persentase alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih di bawah target minimal 20% dari luas wilayah kota. RTH sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan menyediakan ruang publik yang sehat bagi masyarakat. Namun, kurangnya RTH yang memadai menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang belum diterapkan secara efektif. Pemanfaatan lahan yang tidak terencana dengan baik menyebabkan lingkungan perkotaan menjadi semakin terdegradasi.

Kurangnya penegakan aturan tata ruang dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. Banyak lahan yang awalnya diperuntukkan bagi pertanian atau kawasan hijau diubah menjadi kawasan perumahan atau industri tanpa mempertimbangkan dampak

lingkungannya. Alih fungsi lahan ini tidak hanya mengurangi luas RTH tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak dari praktek ini sangat luas, mencakup peningkatan polusi udara, hilangnya habitat alami, dan berkurangnya ruang untuk aktivitas rekreasi masyarakat.

Kondisi ini berdampak negatif terhadap kualitas udara dan kesejahteraan masyarakat. Ketiadaan RTH yang memadai mengurangi kemampuan lingkungan untuk menyerap polutan, sehingga kualitas udara menurun. Udara yang bersih adalah faktor penting untuk kesehatan masyarakat, dan kekurangan RTH memperburuk kondisi kesehatan terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Selain itu, kurangnya RTH juga mempengaruhi kesejahteraan mental dan sosial masyarakat, karena ruang hijau menyediakan tempat untuk rekreasi dan interaksi sosial yang penting untuk keseimbangan hidup perkotaan.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap RTRW mengurangi kemampuan kota untuk menghadapi bencana alam seperti banjir. RTH berfungsi sebagai daerah resapan air yang penting untuk mengurangi risiko banjir. Ketika lahan hijau dialih fungsikan tanpa perencanaan yang baik, kapasitas resapan air berkurang secara signifikan, meningkatkan risiko banjir saat curah hujan tinggi. Belum optimalnya pembangunan bangunan gedung secara terpadu sesuai RTRW mengakibatkan perencanaan yang tidak matang dan berkelanjutan. Peningkatan dan penataan kota yang berkelanjutan sesuai RTRW perlu ditingkatkan untuk mencapai keseimbangan ekologis dan fungsional. Kebijakan yang ketat dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## B. Meningkatnya Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan dan fungsi lain di Kota Tanjungbalai terus meningkat, menyebabkan pengurangan signifikan pada luas lahan pertanian produktif yang sangat penting bagi ketahanan pangan lokal. Berdasarkan data, luas lahan pertanian menurun dari 1.951 hektar pada tahun 2018 menjadi hanya 1.886 hektar pada tahun 2022. Sebaliknya, lahan bukan pertanian meningkat dari 3.707 hektar pada tahun 2018 menjadi 4.166 hektar pada tahun 2022. Perubahan ini

mencerminkan peningkatan pesat dalam alih fungsi lahan yang mengancam ketahanan pangan lokal karena produksi pangan menjadi terbatas, sementara permintaan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Dampaknya, kota ini menjadi lebih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan.

Alih fungsi lahan tidak hanya mengancam ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan risiko banjir dan degradasi lingkungan. Ketika lahan pertanian yang berfungsi sebagai daerah resapan air diubah menjadi perumahan dan industri, kemampuan lahan untuk menyerap air hujan berkurang drastis. Ini mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, yang tidak hanya merusak properti dan infrastruktur tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, alih fungsi lahan tanpa perencanaan yang matang memperburuk kualitas lingkungan, dengan meningkatnya erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi yang disebabkan oleh aktivitas industri dan urbanisasi.

Salah satu permasalahan yang memperparah situasi ini adalah status kepemilikan lahan jalan yang masih belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Kota Tanjungbalai. Sebagian besar lahan jalan masih milik masyarakat, yang menghambat upaya pemerintah untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, sistem drainase, dan fasilitas publik lainnya. Kepemilikan lahan yang tidak jelas dan tumpang tindih menyebabkan proses pembangunan menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga menghambat kemajuan pembangunan kota secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan survei awal secara menyeluruh agar status lahan yang akan dibangun dapat diketahui dan dioptimalkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain itu, kurangnya infrastruktur penyediaan air bersih dan sanitasi akibat alih fungsi lahan yang tidak terkontrol juga menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Perumahan dan industri yang baru dibangun sering kali tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, yang esensial untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa infrastruktur ini, risiko penyakit menular dan masalah kesehatan lainnya meningkat, serta kualitas hidup

masyarakat menurun. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih baik dan pengawasan yang ketat terhadap alih fungsi lahan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan dan industri dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tanjungbalai.

## C. Kerentanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Tanjungbalai rentan terhadap bencana alam seperti banjir, terutama karena posisinya di dataran rendah dan dekat dengan aliran Sungai Asahan dan Sungai Silau. Perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan curah hujan dan kenaikan permukaan air laut memperparah risiko banjir. Selain itu, peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca mengancam produktivitas pertanian dan kesehatan masyarakat. Sarana transportasi/jalan menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih rusak atau buruk, dan kurangnya saluran drainase di Kota Tanjungbalai memperparah dampak banjir.

Masalah ini semakin diperburuk oleh sedimentasi yang terjadi di Sungai Asahan. Sedimentasi meningkatkan risiko banjir karena mengurangi kapasitas sungai untuk menampung air, sehingga air meluap ke daerah sekitarnya saat curah hujan tinggi. Selain itu, sedimentasi juga mengancam ekosistem sungai, pelayaran, dan perikanan. Akumulasi sedimen di dasar sungai dapat merusak habitat ikan, mengganggu jalur migrasi ikan, dan mengurangi keberhasilan pemijahan. Hal ini berdampak negatif pada keberlanjutan perikanan lokal yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat.

Selain banjir, perubahan iklim juga berpotensi meningkatkan frekuensi dan intensitas badai tropis yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan pemukiman. Perubahan pola cuaca yang ekstrem juga dapat menyebabkan kekeringan berkepanjangan, yang tidak hanya mengancam ketahanan pangan tetapi juga mengganggu pasokan air bersih. Kekeringan dapat mengakibatkan penurunan produksi pertanian yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

Data dari BNPB menunjukkan bahwa risiko bencana di Tanjungbalai juga mencakup kejadian gelombang ekstrem dan abrasi yang dapat

merusak kawasan pesisir dan mengganggu aktivitas ekonomi lokal. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 mencatat bahwa wilayah Kota Tanjungbalai memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, termasuk banjir, gelombang ekstrem, dan abrasi. Indeks Risiko Bencana di Kota Tanjungbalai menunjukkan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi. Data ini menekankan bahwa wilayah yang paling rawan bencana terutama berada di kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur. Risiko bencana seperti banjir memerlukan upaya mitigasi yang lebih intensif dan komprehensif untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu langkah penting dalam mitigasi adalah peningkatan sistem peringatan dini yang efektif, yang dapat memberikan informasi tepat waktu kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti sistem drainase yang lebih baik, sangat krusial untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Pengembangan dan perbaikan drainase serta infrastruktur jalan/jembatan diperlukan untuk mengurangi risiko banjir dan kerusakan akibat bencana alam. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, dan pelestarian ekosistem sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan mitigasi risiko bencana di Kota Tanjungbalai.

## D. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Belum Optimal

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tanjungbalai menunjukkan skor yang relatif rendah, terutama pada komponen kualitas air dan tanah. Kualitas air yang buruk disebabkan oleh pencemaran dari limbah domestik dan industri, sedangkan tutupan lahan yang rendah menunjukkan degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Pengelolaan limbah yang tidak memadai menyebabkan pencemaran air dan tanah yang serius, mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem lokal.

Pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai belum optimal karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. Banyak usaha belum tertib dalam pengolahan limbah, yang memperburuk kualitas lingkungan hidup. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah dan pengawasan terhadap praktik

pembuangan limbah menyebabkan banyak sampah dan limbah yang tidak dikelola dengan baik, mencemari lingkungan dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Peningkatan pengolahan sampah dan pengawasan terhadap pengusaha untuk tertib dalam pengolahan limbah sangat diperlukan.

Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk penyediaan tempat pembuangan sampah yang memadai, fasilitas daur ulang, dan sistem pengangkutan sampah yang efisien, sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik harus ditingkatkan.

**E. Ketahanan Pangan Masih Rendah**

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tanjungbalai berada pada skor rendah, menempatkannya di antara kota-kota dengan ketahanan pangan terendah di Indonesia. Keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan dan industri merupakan salah satu penyebab utama rendahnya ketahanan pangan. Luas lahan pertanian yang semakin menyusut berdampak langsung pada rendahnya produksi pangan lokal, terutama beras, yang merupakan bahan pokok utama. Data menunjukkan bahwa defisit pangan, terutama beras, sangat tinggi dengan kebutuhan yang jauh melampaui ketersediaan lokal, membuat Kota Tanjungbalai sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain.

Alih fungsi lahan tidak hanya mengurangi luas lahan pertanian tetapi juga memperburuk kondisi lingkungan yang berdampak pada produktivitas pertanian. Tanah yang dialihfungsikan seringkali tidak memiliki kualitas yang baik untuk pertanian kembali, sehingga produksi pangan lokal sulit untuk ditingkatkan. Selain itu, tekanan urbanisasi dan industrialisasi meningkatkan permintaan lahan, yang semakin mengurangi area yang dapat digunakan untuk pertanian produktif. Dampak dari perubahan ini mengakibatkan peningkatan harga pangan lokal, yang berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap kenaikan harga.

Masalah lain yang memperburuk ketahanan pangan di Kota Tanjungbalai adalah banyaknya irigasi pertanian yang rusak dan langkanya

pupuk di kalangan petani. Kerusakan pada sistem irigasi menyebabkan distribusi air yang tidak merata dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pertanian, yang berdampak negatif pada hasil panen. Selain itu, kelangkaan pupuk memperburuk produktivitas pertanian karena tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh optimal.

Menurut laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP), tingkat inflasi harga pangan domestik tetap tinggi di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Hal ini semakin memperburuk situasi ketahanan pangan di Kota Tanjungbalai, di mana inflasi harga pangan jauh melebihi inflasi keseluruhan. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan global dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan iklim, konflik, dan gangguan rantai pasokan global. Kota Tanjungbalai, dengan kondisi geografis dan sosial ekonominya, sangat rentan terhadap dinamika ini, menambah tantangan dalam mencapai ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan.

**F. Kurangnya Ketersediaan Energi**

Ketahanan energi di Kota Tanjungbalai masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek ketersediaan dan keterjangkauan energi. Tanjungbalai mengalami peningkatan konsumsi energi yang cukup tinggi, baik oleh rumah tangga maupun sektor industri. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi energi guna mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan energi yang tersedia. Diversifikasi sumber energi juga menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang. Penggunaan energi terbarukan, seperti energi surya dan angin, dapat menjadi alternatif yang berpotensi besar dalam memenuhi kebutuhan energi kota secara lebih berkelanjutan.

Infrastruktur energi yang ada saat ini di Kota Tanjungbalai perlu ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas energi bagi seluruh penduduk kota. Ketersediaan energi yang tidak merata dan keterbatasan infrastruktur pendukung menyebabkan banyak rumah tangga dan fasilitas umum mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan

energi yang stabil. Perbaikan dan pengembangan jaringan distribusi energi menjadi krusial untuk menjamin bahwa energi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur energi yang modern dan efisien, serta memperkuat regulasi yang mendukung pengelolaan energi secara berkelanjutan.

Salah satu indikator yang menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur energi adalah masih kurangnya penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Kurangnya LPJU tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat tetapi juga berimplikasi pada keamanan dan kenyamanan di lingkungan perkotaan. Ketiadaan penerangan yang memadai di jalan-jalan kota dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kejahatan. Oleh karena itu, pengembangan dan perbaikan infrastruktur LPJU sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sudut kota mendapat penerangan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi warga kota.

## G. Ragam Permasalahan Terkait Demografi

**Pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang signifikan**, namun hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup yang memadai. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menciptakan tantangan besar dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, menunjukkan bahwa banyak penduduk yang belum mendapatkan akses yang layak terhadap layanan-layanan tersebut. Kekurangan dalam akses pendidikan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, yang berdampak negatif pada peluang kerja dan kemampuan ekonomi mereka. Layanan kesehatan yang terbatas juga meningkatkan kerentanan penduduk terhadap berbagai masalah kesehatan.

Masalah dalam penyediaan layanan dasar menjadi tantangan utama bagi Kota Tanjungbalai. **Keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan** menyebabkan banyak penduduk yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, mengakibatkan rendahnya tingkat keterampilan dan daya saing dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, layanan

kesehatan yang tidak mencukupi membuat banyak penduduk tidak mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan, yang pada akhirnya meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Kondisi perumahan yang tidak memadai juga memperburuk kualitas hidup penduduk, banyak di antaranya tinggal di tempat tinggal yang tidak layak dan tidak sehat.

**Rasio jenis kelamin yang tidak seimbang** dan ketimpangan sosial ekonomi merupakan permasalahan utama dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai. Ketidakseimbangan jenis kelamin mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi, terutama dalam konteks pasar tenaga kerja dan hubungan sosial. Ketimpangan sosial ekonomi yang signifikan menciptakan jurang besar antara kelompok masyarakat yang berbeda, menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penduduk dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan, yang memperburuk ketidaksetaraan dan menghambat mobilitas sosial..

Hasil FGD menunjukkan beberapa permasalahan spesifik terkait program keluarga berencana (KB) di Kota Tanjungbalai. **Pencapaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah**, yang mengindikasikan kurangnya kesadaran dan akses masyarakat terhadap metode KB yang efektif dan berkelanjutan. Partisipasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengoptimalkan kampung KB juga masih kurang, yang menyebabkan program KB tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kurangnya kader KB pria di masing-masing kelurahan menghambat upaya untuk mencapai keseimbangan dalam partisipasi program KB antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi demografi di Kota Tanjungbalai menunjukkan beberapa permasalahan yang signifikan terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Salah satu masalah utama adalah **tingginya rasio ketergantungan**, di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban ekonomi yang berat untuk mendukung penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Tingginya rasio ketergantungan ini mencerminkan bahwa proporsi penduduk non-produktif cukup besar, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan beban sosial.

Selain itu, perubahan demografis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19, telah memperparah situasi ini. Pandemi telah menyebabkan gangguan pada struktur demografis, dengan peningkatan angka kematian dan perubahan pola kelahiran, yang berdampak langsung pada peningkatan rasio ketergantungan. Kondisi ini menggarisbawahi kerentanan Kota Tanjungbalai terhadap krisis eksternal dan menunjukkan perlunya strategi yang lebih tangguh untuk mengatasi dampak jangka panjang dari perubahan demografis tersebut.

#### 2.3.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai Kota yang terus berkembang, Kota Tanjungbalai saat ini dihadapkan oleh beberapa permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari aspek ekonomi dan juga sosial budaya.

**Gambar 2.44**
**Ringkasan Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Tanjungbalai**
*Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai*

#### A. Kesejahteraan Ekonomi

Pada aspek kesejahteraan ekonomi, Kota Tanjungbalai dihadapkan pada dua masalah utama yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang relatif

rendah, angka kemiskinan yang relatif tinggi dan tingkat kemapanan yang masih rendah.

**1. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah.**

Sebagai sebuah kota, nilai pendapatan per kapita Kota Tanjungbalai berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2023 PDRB per kapita Tanjungbalai hanya 61,2 juta rupiah per bulan dibandingkan PDRB per kapita Sumatera Utara yang mencapai 68,30 juta rupiah. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan angka nasional yang sudah menyentuh angka 75 juta rupiah. Pendapatan per kapita yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa secara kesejahteraan ekonomi Kota Tanjungbalai belum cukup sejahtera.

**2. Angka kemiskinan yang relatif tinggi.**

Kota Tanjungbalai juga dihadapkan dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin Kota Tanjungbalai masih berada di angka 12,21 yang jauh lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara yang hanya berada pada angka sekitar 8%. Angka kemiskinan yang relatif tinggi ini menunjukkan masih banyak penduduk Kota Tanjungbalai yang berada di bawah standar hidup layak. Sebagai sebuah Kota tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius mengingat notabenenya sebuah Kota harusnya menjadi pusat pertumbuhan yang memberikan peluang lebih besar bagi masyarakatnya untuk tumbuh berkembang.

**3. Tingkat kemapanan yang masih rendah**

Selain dihadapkan dengan masalah tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, secara kesejahteraan ekonomi Kota Tanjungbalai juga dihadapkan dengan kondisi tingkat kemapanan yang masih rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dari pekerjaan masyarakat yang didominasi oleh pekerjaan sektor informal. Sektor informal sendiri juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kondisi yang tidak mudah yang membuat masyarakat susah keluar dari himpitan ekonomi. Dominasi masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terlalu progresif ini merepresentasikan level kesejahteraan

ekonomi masyarakat yang relatif masih cukup rendah. Kondisi ini sebenarnya selaras dengan isu secara nasional yang dihadapkan pada tantangan *middle income trap*.

**B. Kesejahteraan Sosial Budaya**

Kota Tanjungbalai juga memiliki beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial budaya yang mencakup perkembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta permasalahan terkait penyakit masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut:

**1. Peningkatan Kapasitas SDM yang Lambat**

Progresivitas indikator pembangunan mencerminkan kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Kota Tanjungbalai, meskipun memiliki potensi besar, belum mampu mengoptimalkan pencapaian indikator pembangunan yang diperlukan untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak dan berkualitas relatif masih rendah. Indikator pembangunan sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka kemiskinan menunjukkan bahwa Kota Tanjungbalai berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di pantai timur Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai relatif berada di kelompok posisi terbawah untuk indikator-indikator tersebut. Dilihat dari tren peningkatan indikator ini relatif bergerak cukup lambat dalam beberapa tahun terakhir.

**2. Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas yang belum optimal**

Salah satu cerminan nyata dari masalah kualitas SDM dan pembangunan sosial adalah rendahnya kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Masyarakat Kota Tanjungbalai masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan terbatasnya tenaga medis menjadi faktor utama yang menyebabkan beberapa warga tidak dapat memperoleh akses kesehatan yang layak. Hal ini tidak hanya

mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan umum masyarakat.

**3. Kesempatan masyarakat terhadap Pendidikan berkualitas yang tidak merata**

Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan di Kota Tanjungbalai masih menjadi isu sentral. Kurangnya fasilitas pendidikan, kekurangan sumber daya manusia berkualitas di bidang pendidikan, dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan berkualitas merupakan tantangan serius. Dalam jangka panjang, rendahnya kualitas pendidikan dapat menghasilkan generasi muda yang kurang siap menghadapi perubahan ekonomi dan sosial. Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu memastikan bahwa pendidikan mampu menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan transformasi ekonomi daerah ke depan.

**4. Literasi dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi yang masih rendah**

Meskipun teknologi dan digitalisasi dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup, literasi dan pemanfaatan teknologi di Kota Tanjungbalai dapat dikategorikan masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memiliki akses atau pengetahuan yang memadai tentang penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan teknologi dan digitalisasi untuk keperluan non-produktif secara ekonomi yang dapat dilihat dar belum munculnya inovasi-inovasi dari masyarakat dengan digitalisasi yang memiliki nilai tambah ekonomi. Rendahnya literasi digital yang produktif ini juga berdampak pada terbatasnya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui platform digital dan keterbatasan cakupan pasar yang hanya secara domestik. Salah satu indikasi yang menjustifikasi ini dapat dilihat dari gerak pemasaran dan pertumbuhan skala bisnis UMKM yang relatif stagnan.

**5. Masih berkembangnya penyakit, gaya hidup dan kebiasaan masyarakat yang berisiko**

Kota Tanjungbalai juga masih menghadapi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan penyakit, gaya hidup, dan kebiasaan berisiko. Penyakit menular dan tidak menular masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, gaya hidup yang kurang sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang buruk, dan kebiasaan merokok, hingga terjerat narkotika turut menyumbang pada tingginya angka penyakit kronis dan kesejahteraan hidup masyarakat. Upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini dan mendorong masyarakat menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan tidak mengorbankan masa depan mereka.

### 2.3.1.2.3 Aspek Daya Saing

### A. Daya Saing Ekonomi

Kota Tanjungbalai menghadapi beberapa permasalahan dalam aspek daya saing ekonomi yang menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Berikut adalah penjelasan detail terkait permasalahan-permasalahan tersebut:

**Gambar 2.45**
**Ringkasan Permasalahan Aspek Daya Saing Ekonomi**
**Kota Tanjungbalai**

Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai

**1. Kualitas dan Progresivitas Pembangunan Ekonomi yang rendah**

Kota Tanjungbalai memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dan telah menunjukkan pertumbuhan, namun masih tertinggal dibandingkan daerah lain dalam hal kualitas dan progresivitas pembangunan ekonomi. Indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tumbuh lambat dan tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang diharapkan belum tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas.

**2. Pemanfaatan sektor potensial daerah yang belum optimal**

Kota Tanjungbalai memiliki kekayaan alam, budaya, dan posisi geografis yang strategis, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, sektor perikanan dan kelautan yang memiliki potensi besar masih belum dikelola dengan baik sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah belum maksimal. Selain itu, potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan dan mendatangkan pendapatan tambahan juga belum tergarap secara optimal. Optimalisasi potensi ini memerlukan perencanaan yang matang, investasi, dan promosi yang efektif.

**3. Daya Ungkit Ekonomi yang Lemah**

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Tanjungbalai masih memiliki multiplier effect yang rendah. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor lain. Sektor unggulan yang seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang berlipat ganda belum terbentuk. Misalnya, sektor industri pengolahan yang dapat mengolah hasil tangkapan ikan menjadi produk bernilai tambah belum berkembang. Diperlukan identifikasi dan pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi daya ungkit ekonomi yang tinggi.

**4. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi untuk peningkatan nilai tambah ekonomi yang masih rendah**

Penggunaan teknologi dan digitalisasi di Kota Tanjungbalai masih belum optimal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan memperluas pasar. Namun, banyak pelaku usaha di Kota Tanjungbalai yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. Misalnya, penggunaan teknologi dalam budidaya perikanan atau pemasaran produk secara digital yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas masih sangat terbatas. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya seperti pelatihan, akses ke teknologi, dan dukungan kebijakan.

**5. Integrasi dan ekosistem ekonomi yang belum padu serta sarana prasarana pendukung yang masih minim**

Sektor ekonomi di Kota Tanjungbalai masih belum terintegrasi dengan baik, baik antar sektor maupun dengan ekonomi daerah lain. Misalnya, sektor perikanan belum terintegrasi dengan baik dengan sektor pengolahan dan pemasaran, sehingga nilai tambah yang dihasilkan masih rendah. Begitupun dengan sektor pariwisata yang biasanya sangat inklusif dan memiliki multiplier tinggi terhadap sektor lain belum dikelola secara optimal. Selain itu, integrasi dengan ekonomi daerah lain, baik di level provinsi, nasional, maupun global, juga masih kurang. Padahal, posisi strategis Tanjungbalai di semenanjung Selat Malaka seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan daerah lain baik antar daerah strategis lain di Sumatera Utara maupun daerah lain di Indonesia bahkan hinggal daerah lain di luar negeri. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti infrastruktur transportasi dan komunikasi yang masih minim juga menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi.

**6. Kualitas tenaga kerja yang kurang berdaya saing**

Kapasitas tenaga kerja di Kota Tanjungbalai masih terbatas, terutama pada sektor informal yang memiliki tingkat *competitive advantage* rendah. Banyak tenaga kerja yang masih bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah. Selain itu, keterbatasan keterampilan dan pendidikan

membuat tenaga kerja sulit bersaing di pasar kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan berdaya saing, produktivitas dan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

**7. Keterbatasan Modal dan pembiayaan Usaha**

Keterbatasan akses terhadap modal dan pembiayaan usaha menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di Kota Tanjungbalai. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini berdampak pada kemampuan bisnis untuk berekspansi dan naik kelas. Kurangnya akses terhadap pembiayaan membuat pelaku usaha sulit untuk meningkatkan kapasitas produksi, inovasi, dan daya saing. Untuk itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan usaha bagi pelaku ekonomi daerah melalui program-program pemerintah dan kerja sama dengan lembaga keuangan.

**8. Pengawasan dan Regulasi Pendukung yang masih minim**

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berdampak buruk masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan ekosistem yang masih kurang efektif serta masih terjadinya transaksi illegal ditengah laut. Selain itu, regulasi pendukung untuk menggerakkan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga masih minim. Misalnya, regulasi yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan atau yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Penguatan pengawasan dan regulasi menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merusak lingkungan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**B. Daya Saing SDM**

Kota Tanjungbalai menghadapi sejumlah permasalahan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang mencakup

aspek mindset, konflik sosial, kriminalitas, serta pemanfaatan bonus demografi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut:

**Gambar 2.46**
**Ringkasan Permasalahan Aspek Daya Saing SDM Kota Tanjungbalai**
Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai

### 1. Mindset untuk Berkembang yang masih kurang

Peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada distribusi ekonomi tetapi juga pada pola pikir yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan bersama. Saat ini, Kota Tanjungbalai menghadapi permasalahan terkait dengan isu kebersihan, rendahnya motivasi berusaha, serta akses dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang relatif rendah. Angka kriminalitas yang tinggi juga menjadi salah satu indikasi kurangnya perubahan mindset di masyarakat. Oleh karena itu, membangun pola pikir yang positif, inovatif, dan proaktif menjadi salah satu prioritas penting dalam upaya meningkatkan daya saing SDM.

### 2. Masih terjadinya Konflik Sosial, Tingkat Kriminalitas, dan Illegal Activities

Konflik sosial, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan kegiatan ilegal merupakan dampak nyata dari rendahnya kualitas pembangunan sosial di

Kota Tanjungbalai. Ketidaksetaraan dan ketidakpastian ekonomi seringkali menjadi pemicu utama terjadinya konflik, sementara tingginya tingkat kriminalitas menghambat iklim bisnis dan investasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas adalah kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan, menurunkan tingkat kriminalitas, dan meningkatkan stabilitas sosial di Kota Tanjungbalai.

### 3. Pemanfaatan Bonus Demografi yang belum optimal

Kota Tanjungbalai saat ini belum mampu memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Bonus demografi, yang merujuk pada kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, seharusnya menjadi peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan menghambat potensi pemanfaatan bonus demografi ini. Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas SDM, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.

## C. Daya Saing Infrastruktur

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep penting yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di Kota Tanjungbalai, hal ini berarti bahwa infrastruktur yang dibangun harus tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial saat ini, tetapi juga ramah lingkungan dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim serta tantangan lingkungan lainnya. Ketiadaan data yang memadai mengenai kualitas layanan infrastruktur menghambat kemampuan pemerintah untuk merancang kebijakan dan program yang efektif.

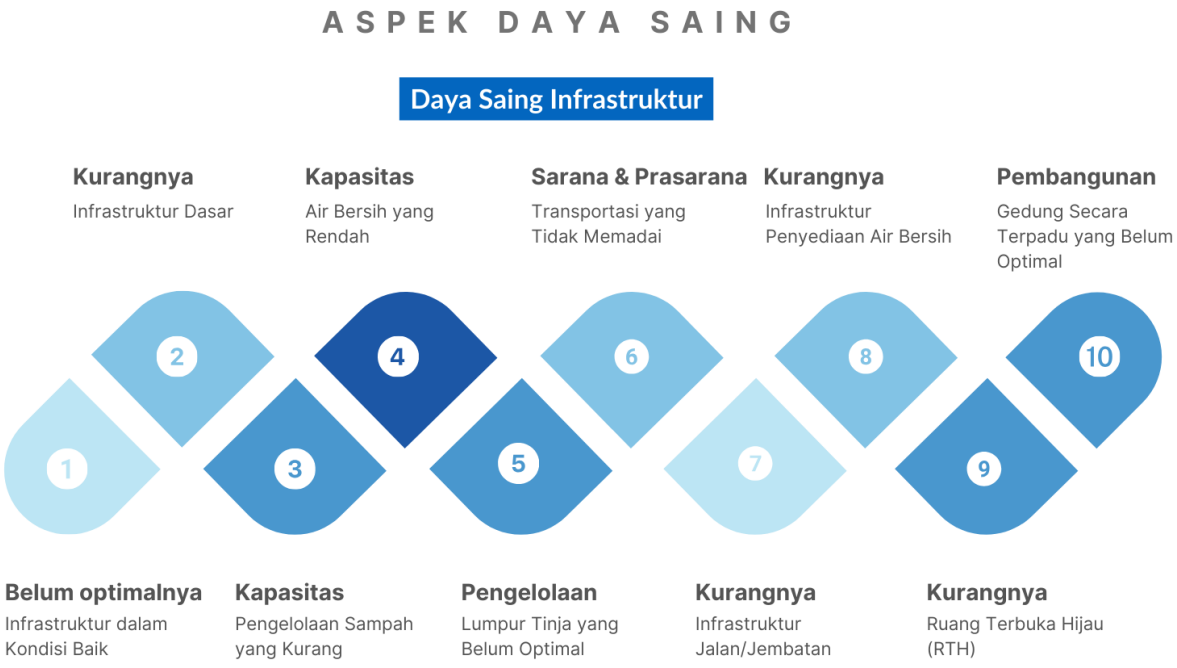


**Gambar 2.47**
**Ringkasan Permasalahan Daya Saing Infrastruktur Kota Tanjungbalai**
Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai

Permasalahan terkait daya saing infrastruktur di Kota Tanjungbalai diantaranya:

### 1. Belum Optimalnya Infrastruktur dalam Kondisi Baik

Kondisi infrastruktur di Kota Tanjungbalai masih belum optimal, terutama dalam hal kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Banyak infrastruktur yang ada saat ini berada dalam kondisi yang kurang baik, yang menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi kota.

### 2. Kurangnya Infrastruktur Dasar

Kurangnya infrastruktur dasar seperti drainase, gorong-gorong, jalan-jembatan, penyediaan air bersih, dan lampu penerangan jalan umum menjadi masalah yang signifikan. Kekurangan ini menyebabkan berbagai kesulitan bagi masyarakat, mulai dari masalah kesehatan akibat sanitasi yang buruk hingga peningkatan risiko kecelakaan karena jalan yang tidak memadai dan minimnya penerangan jalan.

**3. Kapasitas Pengelolaan Sampah yang Kurang**

Daya tampung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat kurang, sehingga menyebabkan banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan masalah estetika, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

**4. Kapasitas Air Bersih yang Rendah**

Kemampuan daya dukung dan daya tampung air bersih di Kota Tanjungbalai sangat rendah. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, yang berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan mereka.

**5. Pengelolaan Lumpur Tinja yang Belum Optimal**

Pengolahan lumpur tinja di Kota Tanjungbalai belum optimal, yang mengakibatkan masalah sanitasi yang serius. Kurangnya fasilitas dan teknologi untuk pengolahan lumpur tinja memperburuk situasi ini.

**6. Sarana dan Prasarana Transportasi yang Tidak Memadai**

Sarana dan prasarana transportasi di Kota Tanjungbalai masih kurang memadai. Banyak jalan dan jembatan yang rusak dan tidak memenuhi standar, yang menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

**7. Kekurangan Infrastruktur Jalan/Jembatan**

Kurangnya infrastruktur jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik merupakan masalah besar yang menghambat aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di kota. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi transportasi dan ekonomi lokal.

**8. Kekurangan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih**

Infrastruktur untuk penyediaan air bersih masih kurang, menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses air bersih yang layak. Kondisi ini berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan.

### 9. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tanjungbalai menjadi masalah yang perlu diatasi. RTH sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi kota dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk beraktivitas dan bersosialisasi.

## D. Daya Saing Iklim Investasi

Kota Tanjungbalai menghadapi sejumlah permasalahan dalam meningkatkan daya saing iklim investasinya. Permasalahan ini mencakup pemetaan proyek strategis, program strategis untuk menarik investor, regulasi pendukung, dan kualitas layanan perizinan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut:

**Gambar 2.48**
**Ringkasan Permasalahan Aspek Daya Saing Iklim Investasi Kota Tanjungbalai**
Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai

### 1. Proyek Strategis daerah yang belum terpetakan

Salah satu kendala utama dalam menarik investasi ke Kota Tanjungbalai adalah belum terpetakannya proyek strategis daerah. Tanpa pemetaan yang jelas, investor kesulitan untuk melihat peluang investasi yang tersedia. Pemetaan proyek strategis yang terencana dengan baik

akan memberikan gambaran yang jelas tentang sektor-sektor prioritas dan potensi investasi di Kota Tanjungbalai, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Proyek strategis ini dapat mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri. Dengan pemetaan yang komprehensif, pemerintah daerah dapat menunjukkan kepada investor potensi yang ada dan memfasilitasi proses investasi dengan lebih efektif.

**2. Belum adanya agenda dan program strategis daerah yang dirancang dengan baik dan siap untuk ditawarkan ke investor**

Kota Tanjungbalai belum memiliki agenda dan program strategis yang dirancang dengan baik untuk ditawarkan kepada investor. Program dan agenda yang jelas, terstruktur, dan siap ditawarkan akan memberikan kepercayaan kepada investor mengenai kesiapan dan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung investasi. Tanpa program yang matang, investor akan ragu untuk menanamkan modalnya karena ketidakpastian terkait dukungan dan keberlanjutan proyek investasi. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana investasi yang detail, termasuk analisis biaya-manfaat, studi kelayakan, dan rencana bisnis yang konkret. Selain itu, penting untuk mengadakan forum investasi, pameran, dan promosi aktif untuk menarik minat investor domestik maupun internasional.

**3. Regulasi pendukung investasi yang masih rendah**

Regulasi pendukung investasi di Kota Tanjungbalai masih perlu ditingkatkan. Regulasi yang mendukung investasi harus memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan insentif bagi investor. Saat ini, banyak regulasi yang dianggap masih belum menunjukkan keberpihakan (memiliki daya tarik) pada/bagi investor, sehingga belum mendorong masuknya investasi ke Kota Tanjungbalai. Peninjauan dan revisi regulasi yang ada, serta penyusunan regulasi baru yang lebih kondusif, menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing iklim investasi di daerah ini. Regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih akan memberikan kepastian hukum bagi investor, mengurangi risiko investasi, dan meningkatkan daya tarik Kota Tanjungbalai sebagai tujuan investasi.

Apalagi jika Kota Tanjungbalai memiliki agenda besar dalam transformasi ekonominya yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kolaborasi pembiayaan dengan sektor swasta sangat krusial dalam hal ini.

**4. Kualitas layanan perizinan yang belum prima**

Kualitas layanan perizinan di Kota Tanjungbalai masih perlu ditingkatkan. Proses perizinan yang lambat, birokrasi yang rumit, dan kurangnya transparansi dapat menjadi hambatan bagi investor. Layanan perizinan yang prima harus memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses pengurusan izin. Peningkatan kualitas layanan perizinan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara yang bertugas di bidang perizinan. Digitalisasi proses perizinan dengan sistem online dapat mempercepat waktu pengurusan izin, mengurangi kontak langsung yang berpotensi korupsi, dan meningkatkan kepuasan investor. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik juga menjadi langkah penting untuk memberikan layanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan investor. Dengan adanya keterlibatan antara beberapa wewenang antara Kota Tanjungbalai, Provinsi dan Pusat terkait dengan hal ini, Kota Tanjungbalai juga perlu lebih proaktif dalam hal ini.

**2.3.1.2.4 Aspek Pelayanan Umum**

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), aspek pelayanan umum memegang peranan kunci dan dapat diukur melalui berbagai indikator seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berikut ini adalah permasalahan yang diidentifikasi dalam aspek pelayanan umum di Kota Tanjungbalai berdasarkan data dan hasil FGD:

**Gambar 2.49**
**Ringkasan Permasalahan Aspek Pelayanan Umum Kota Tanjungbalai**
Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai

### A. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022, skor Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh Kota Tanjungbalai menunjukkan masih adanya ruang yang besar untuk perbaikan. Nilai yang rendah pada beberapa OPD, seperti DPM PTSP dan Dukcapil, mencerminkan kurangnya efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik juga terlihat dari hasil FGD, di mana masih banyak ASN yang memerlukan diklat khusus dan pendidikan wawasan kebangsaan serta revolusi mental untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

### B. Rendahnya Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Kota Tanjungbalai yang tercatat sebesar 39,72 menunjukkan posisi kota ini dalam konteks inovasi nasional yang masih berada di peringkat bawah. Skor tersebut mencerminkan bahwa inovasi belum sepenuhnya diadopsi dan diintegrasikan dalam berbagai aspek

pembangunan di Tanjungbalai. Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya budaya berinovasi di kota dan minimnya SDM yang memiliki pendidikan sesuai dengan tupoksi. Kurangnya tenaga ahli di bidang IT dan program pemberitaan serta perlunya penambahan pengetahuan atau peningkatan diklat menjadi hambatan utama dalam meningkatkan indeks inovasi daerah.

**C. Belum Maksimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Kota Tanjungbalai berhasil mendapatkan skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen berbasis teknologi informasi. Namun, sistem jaringan yang masih dikendalikan oleh pusat atau LKPP menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Audit TIK yang belum terakomodir dan rendahnya pemanfaatan E-Lapor adalah beberapa contoh masalah yang dihadapi dalam implementasi SPBE.

**D. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Rendahnya budaya inovasi dan minimnya SDM dengan pendidikan yang tidak sesuai dengan tupoksi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum di Kota Tanjungbalai. Perkembangan Sistem Manajemen Kinerja, ANJAB, dan ABK untuk penataan pegawai belum berjalan dengan baik, sehingga terdapat kekurangan personil pada instansi-instansi. Perlunya diklat khusus bagi ASN yang tidak akan dimutasi dalam beberapa tahun dan pendidikan wawasan kebangsaan serta revolusi mental juga menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas SDM di Kota Tanjungbalai.

**E. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana (SARPRAS)**

Belum maksimalnya pemanfaatan E-Lapor dan audit TIK yang belum terakomodir menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada masih belum optimal. Kebutuhan akan kantor yang lebih luas dan sistem jaringan yang lebih baik adalah beberapa masalah infrastruktur yang perlu diatasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan umum.

## 2.4 Isu Strategis Daerah

Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029, isu-isu strategis yang diidentifikasi mencakup tantangan demografis seperti tingginya rasio ketergantungan, ketimpangan sosial ekonomi yang signifikan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Oleh karena itu, perumusan RPJMD ini dirancang untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut secara holistik dan komprehensif guna memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.

### 2.4.1 Isu Global

Isu strategis global adalah permasalahan atau tantangan yang berskala internasional dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan suatu daerah. Isu-isu ini meliputi perubahan iklim, globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, dinamika politik internasional, serta krisis kesehatan global. Isu strategis global perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang luas dan dapat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

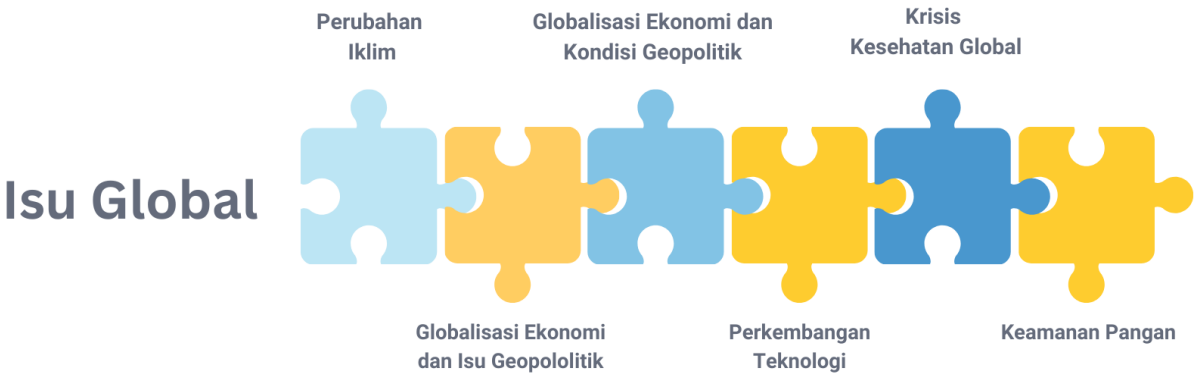


**Gambar 2.50**
**Ringkasan Isu Global**
Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai

Beberapa isu strategis global yang berkaitan langsung dengan Kota Tanjungbalai, diantarnya adalah sebagai berikut:

### 2.4.1.1 Perubahan Iklim

Perubahan iklim global menghadirkan tantangan signifikan bagi Kota Tanjungbalai, khususnya dalam hal dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan suhu rata-rata global dan perubahan pola curah hujan dapat menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Kota Tanjungbalai, yang terletak di wilayah pesisir, sangat rentan terhadap risiko ini, yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya sektor pertanian dan perikanan.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi adaptasi perubahan iklim yang komprehensif. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan penahan gelombang. Selain itu, upaya mitigasi juga harus dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas internasional, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, sangat penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Pemerintah

daerah perlu memperkuat kapasitas institusional dan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan iklim, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam tindakan adaptasi dan mitigasi. Dengan demikian, Kota Tanjungbalai dapat membangun ketahanan terhadap perubahan iklim dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

#### 2.4.1.2 Globalisasi Ekonomi dan Kondisi Geopolitik

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika perdagangan dan investasi di seluruh dunia, termasuk di Kota Tanjungbalai. Peningkatan arus perdagangan internasional dan investasi asing memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi lokal, namun juga menghadirkan tantangan dalam hal daya saing dan ketahanan ekonomi. Kota Tanjungbalai harus mampu memanfaatkan peluang ini dengan meningkatkan kualitas produk lokal dan menarik investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Kota Tanjungbalai perlu fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan investasi, seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas logistik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar global juga sangat penting. Pemerintah daerah harus memfasilitasi akses ke teknologi dan inovasi bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.

Kerja sama dengan pemerintah pusat, organisasi internasional, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan menarik bagi investasi. Regulasi yang mendukung, kemudahan berbisnis, serta perlindungan terhadap hak-hak investor harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi daerah. Dengan strategi yang tepat, Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan memanfaatkan globalisasi ekonomi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

### 2.4.1.3 Perkembangan Teknologi

Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan ekonomi di Kota Tanjungbalai. Teknologi digital menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, transparansi, dan pelayanan publik, serta membuka peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif dan inovatif. Namun, adopsi teknologi ini juga menghadirkan tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu mengembangkan strategi digitalisasi yang komprehensif untuk memanfaatkan teknologi TIK dalam meningkatkan layanan publik dan efisiensi pemerintahan. Implementasi sistem e-government dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengembangan infrastruktur TIK seperti jaringan internet berkecepatan tinggi harus menjadi prioritas untuk mendukung konektivitas dan akses informasi bagi seluruh masyarakat.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi juga sangat penting. Program pelatihan dan pendidikan berbasis teknologi harus diintensifkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan di era digital. Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas teknologi dapat mempercepat adopsi teknologi dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Dengan demikian, Kota Tanjungbalai dapat memanfaatkan perkembangan teknologi global untuk mencapai pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan.

### 2.4.1.4 Krisis Kesehatan Global

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan global. Kota Tanjungbalai perlu memperkuat sistem kesehatan untuk menghadapi ancaman kesehatan di masa depan, yang dapat berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Ketahanan sistem kesehatan mencakup kesiapan dalam menangani wabah penyakit menular, peningkatan kapasitas layanan kesehatan, serta akses yang merata ke fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Untuk meningkatkan ketahanan kesehatan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa infrastruktur kesehatan memadai dan mampu menangani lonjakan kasus saat terjadi krisis kesehatan. Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas perawatan yang memadai harus menjadi prioritas. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan dan penyediaan insentif yang memadai untuk mendorong kinerja mereka dalam kondisi darurat.

Kerja sama dengan pemerintah pusat, organisasi internasional, dan sektor swasta sangat penting dalam memperkuat sistem kesehatan daerah. Program vaksinasi, kampanye kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit harus terus dilakukan. Dengan sistem kesehatan yang kuat dan tangguh, Kota Tanjungbalai dapat lebih siap menghadapi krisis kesehatan global dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

#### 2.4.1.5 Keamanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu global yang juga relevan bagi Kota Tanjungbalai. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan dinamika pasar internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan akses pangan di daerah ini. Peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi sumber pangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan bagi seluruh penduduk.

Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan, termasuk program peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi pertanian modern, penyediaan bibit unggul, dan peningkatan akses petani ke sumber daya seperti air dan pupuk. Diversifikasi sumber pangan, seperti pengembangan perikanan dan peternakan, juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama dalam upaya mencapai ketahanan pangan. Perlindungan terhadap lahan pertanian dari alih fungsi lahan, rehabilitasi ekosistem yang rusak, serta penggunaan praktik pertanian ramah lingkungan dapat memastikan ketersediaan pangan dalam jangka panjang.

Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Kota Tanjungbalai dapat mencapai ketahanan pangan yang kuat dan memastikan kesejahteraan masyarakat terjamin.

### 2.4.2 Isu Nasional

Identifikasi isu strategis nasional merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif. Isu-isu ini mencakup berbagai aspek yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, seperti bonus demografi, ekonomi hijau, konektivitas dan infrastruktur dasar, perubahan iklim dan ketahanan bencana, desentralisasi dan otonomi daerah, serta stunting. Setiap isu strategis nasional ini memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang komprehensif agar Kota Tanjungbalai dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

#### 2.4.2.1 Bonus Demografi Indonesia

Bonus demografi yang dialami Indonesia merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi ini terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Kota Tanjungbalai harus memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

Kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi sangat penting dalam memaksimalkan manfaat bonus demografi. Investasi dalam sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah

besar, seperti manufaktur dan jasa, harus diprioritaskan. Dengan demikian, Kota Tanjungbalai dapat memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### 2.4.2.2 Ekonomi Biru

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan melalui (a) peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap dan akuakultur, pengelolaan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (ecofishing port), pengembangan kluster komoditas unggulan akuakultur, termasuk ikan hias, tuna cakalang tongkol, dan budidaya lobster, tilapia, dan udang; (b) penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan yang berfokus pada pengembangan produk pangan, energi, dan farmasi yang bernilai tambah dan berteknologi tinggi; (c) penguatan industri transportasi dan logistik maritim utamanya industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan; serta (d) pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang didukung penerapan standar, sumber daya manusia, investasi, dan.

Kerja sama dengan komunitas internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengimplementasikan ekonomi biru. Penerapan ekonomi biru dalam pengelolaan destinasi wisata pesisir dan laut secara berkelanjutan dapat menarik wisatawan domestik dan internasional, meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, dan mendukung perekonomian lokal. Dengan mengintegrasikan berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan berbasis laut, ekonomi biru membantu diversifikasi sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Selain itu Ekonomi biru berkontribusi pada ketahanan pangan dengan memastikan ketersediaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan regional, serta meningkatkan pendapatan dari sektor perikanan.

#### 2.4.2.3 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja.. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### 2.4.2.4 Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana

Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, serta peningkatan kejadian iklim ekstrem. Di wilayah pesisir, dampak perubahan ini sangat nyata dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan pesisir (coastal inundation). Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil, menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh perubahan iklim ini. Rendahnya resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana merupakan isu strategis nasional yang sangat relevan bagi pembangunan di Kota Tanjungbalai. Perubahan iklim berdampak pada peningkatan risiko bencana alam, seperti banjir dan kenaikan permukaan air laut, yang dapat mengancam kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam rencana pembangunan.

Langkah pertama adalah memperkuat sistem peringatan dini dan respons terhadap bencana untuk mengurangi dampak bencana alam. Infrastruktur yang tahan bencana, seperti tanggul dan drainase yang efektif, harus dibangun untuk melindungi daerah rawan banjir. Selain itu, program rehabilitasi dan konservasi ekosistem, seperti hutan mangrove dan kawasan pesisir, harus diintensifkan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, lembaga internasional, dan masyarakat lokal, sangat penting dalam mengimplementasikan strategi mitigasi dan adaptasi. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan aman bagi masyarakat.

#### 2.4.2.5 Kapasitas dan Keterbatasan Ruang Fiskal

Ruang fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas di tengah upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Hal tersebut tecermin dari indikator penerimaan perpajakan Indonesia yang terus menurun secara historis. Rasio perpajakan Indonesia pernah mencapai 20 persen produk domestik bruto pada tahun 1980-an. Namun hingga tahun 2024, rasio perpajakan Indonesia terus menurun menjadi sebesar 10,1 persen produk domestik bruto. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia justru menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Kebutuhan pendanaan RPJMN Tahun 2020–2024 dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Dalam periode RPJMN Tahun 2020–2024, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4–Rp35.455,6 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan badan usaha milik negara menyumbang masing-masing sebesar 8,4–10,1 persen dan 8,5–8,8 persen, sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Dengan keterbatasan ruang fiskal tersebut, agenda pemerintah untuk mengatasi isu lingkungan, perubahan iklim, dan upaya mewujudkan net-

zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat memerlukan dukungan pembiayaan inovatif yang melibatkan partisipasi serta kolaborasi lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat.

#### 2.4.2.6 Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/*Comtption Pereption Inder* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

### 2.4.3 Isu Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi yang berkembang pesat di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang juga mempengaruhi Kota Tanjungbalai. Isu-isu strategis di tingkat provinsi ini meliputi masalah infrastruktur, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Identifikasi dan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat, guna mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjungbalai serta Sumatera Utara secara keseluruhan.

### 2.4.3.1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta *responsiveness*/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia.. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

### 2.4.3.2 Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah.

### 2.4.3.3 Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kualitas ASN

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan *core value*.

### 2.4.3.4 Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan daya tarik wisata memerlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis *e-commerce* dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

### 2.4.3.5 Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum

maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan *green waste* dan ruang terbuka hijau.

### 2.4.4. Isu Strategis Kota Tanjungbalai

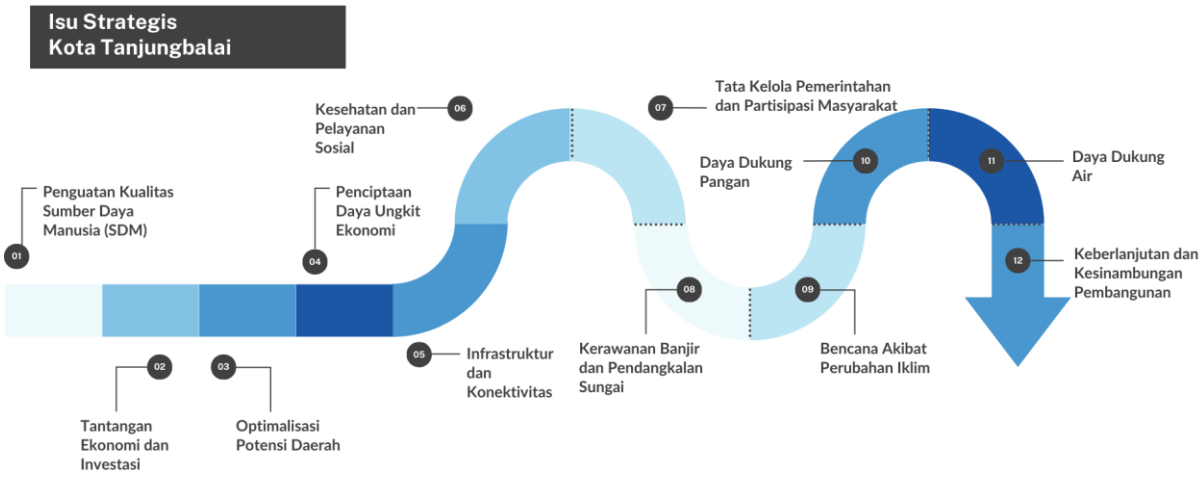


**Gambar 2.51**
**Ringkasan Isu Strategis Kota Tanjungbalai**
Sumber: Hasil analisis Bapperida kota Tanjungbalai

### 2.4.4.1 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM di Kota Tanjungbalai masih menjadi isu utama yang memerlukan perhatian khusus. Pencari kerja di kota ini sebagian besar masih minim memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Hal ini diperparah dengan ketiadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang representatif, yang seharusnya menjadi pusat pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja. Rendahnya kualitas SDM tidak hanya terbatas pada pencari kerja tetapi juga meluas ke pengelola koperasi dan UMKM, yang berdampak negatif pada pengelolaan dan pengembangan sektor-sektor tersebut.

Selain itu, kurangnya pelatihan bagi pelaku UMKM memperburuk situasi ini. Banyak UMKM yang belum mendapatkan bantuan yang memadai, dan sulitnya pemasaran produk UMKM menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi yang lebih sistematis dan terstruktur dalam hal pelatihan dan pendampingan. Pengembangan kualitas SDM di sektor perikanan juga memerlukan perhatian, karena rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil perikanan.

Tingkat pengangguran yang masih tinggi di Kota Tanjungbalai mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Pencari kerja yang telah dilatih masih minim mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha, yang menunjukkan bahwa program pelatihan yang ada belum efektif. Minimnya lapangan kerja formal yang tersedia juga menjadi hambatan besar dalam upaya mengurangi pengangguran.

Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan juga sangat penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan standar industri dan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan SDM yang berkualitas, Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### 2.4.4.2 Tantangan Ekonomi dan Investasi

Ekonomi Kota Tanjungbalai menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi komprehensif. Tingginya tingkat pengangguran dan minimnya lapangan kerja formal yang tersedia menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, banyak pencari kerja yang dilatih masih kesulitan mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas program pelatihan kerja. Minimnya jumlah lapangan kerja formal juga menunjukkan kurangnya investasi di sektor-sektor produktif yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kurangnya modal dan pelatihan bagi pelaku industri serta rendahnya kualitas SDM pengelola UMKM juga menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Kredit macet di UMKM dan sulitnya pemasaran produk UMKM menunjukkan bahwa pelaku usaha membutuhkan dukungan yang lebih besar, baik dari segi pendanaan maupun pelatihan. Selain itu, kurangnya investor yang tertarik berinvestasi di kota ini menambah tantangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam menarik investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan insentif kepada investor. Pengembangan infrastruktur yang memadai dan penyederhanaan perizinan juga penting untuk menarik investasi. Selain itu, penguatan kapasitas pengelolaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan dapat membantu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan diperlukan untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan ekonomi. Program-program yang mendukung kewirausahaan dan inovasi juga harus didorong untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan strategi yang tepat, Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan daya saing ekonominya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### 2.4.4.3 Optimalisasi Potensi Daerah

Kota Tanjungbalai menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya geografis, budaya, dan demografi yang dimilikinya. Potensi pesisir utara Sumatera sebagai area strategis masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Sektor-sektor kunci seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan untuk memastikan kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal. Selain itu, infrastruktur di wilayah pesisir harus ditingkatkan untuk mendukung konektivitas dan mobilitas ekonomi yang lebih baik.

Kekayaan budaya Kota Tanjungbalai juga belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan. Pelestarian budaya dan promosi pariwisata berbasis budaya harus ditingkatkan untuk menciptakan identitas kota yang kuat, menarik wisatawan, dan mendukung ekonomi kreatif lokal.

Demografi, khususnya bonus demografi, belum dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda sangat penting untuk menciptakan SDM yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Penerapan inovasi berkelanjutan, termasuk dukungan terhadap startup dan industri kreatif serta penggunaan teknologi ramah lingkungan, perlu diperkuat untuk menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan dan mendorong Kota Tanjungbalai menuju masa depan yang berkelanjutan.

### 2.4.4.4 Penciptaan Daya Ungkit Ekonomi

Kota Tanjungbalai menghadapi tantangan dalam menciptakan daya ungkit ekonomi yang kuat. Stagnasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang rendah menjadi isu kritis yang memerlukan solusi inovatif dan inklusif. Pengembangan sektor ekonomi baru dan diversifikasi mata pencaharian menjadi langkah penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Investasi dalam sektor industri kreatif, pariwisata terintegrasi, dan hilirisasi komoditi perikanan sangat diperlukan untuk merangsang ekonomi lokal. Namun, pendekatan inklusif harus menjadi prioritas, dengan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi

masyarakat yang kurang beruntung atau rentan. Hal ini akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan merata.

Pengembangan kawasan industri dan perdagangan yang efisien dan ramah lingkungan juga penting untuk menciptakan daya ungkit ekonomi. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses transformasi pembangunan Kota Tanjungbalai harus dipastikan, agar setiap langkah pembangunan dapat memberikan dampak positif yang luas dan berkelanjutan.

#### 2.4.4.5 Infrastruktur dan Konektivitas

Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur di Kota Tanjungbalai menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti irigasi pertanian yang rusak, sarana olahraga yang tidak memadai, dan kurangnya destinasi wisata menghambat potensi perkembangan daerah ini.

Banyak irigasi pertanian yang rusak dan minimnya tenaga penyuluh pertanian berdampak negatif pada produktivitas sektor pertanian. Selain itu, sulitnya penyaluran pupuk bersubsidi menambah beban petani, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil panen dan kesejahteraan petani. Berkurangnya lahan pertanian juga menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian di kota ini.

Di sektor pariwisata, kurangnya destinasi wisata dan sarana prasarana pendukung seperti sarana olahraga yang tidak memadai mengurangi daya tarik kota ini sebagai tujuan wisata. Pengembangan destinasi wisata yang menarik dan penyediaan infrastruktur yang memadai dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur di Kota Tanjungbalai. Investasi dalam infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Selain itu, perbaikan tata kelola pasar dan penyederhanaan proses perizinan juga penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan menarik lebih banyak investasi.

### 2.4.4.6 Kesehatan dan Pelayanan Sosial

Bidang kesehatan dan pelayanan sosial di Kota Tanjungbalai menghadapi berbagai masalah yang memerlukan perhatian serius. Kurangnya tenaga ahli dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terbatasnya fasilitas untuk penyandang disabilitas, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Rendahnya capaian imunisasi dan tingginya angka putus sekolah juga menjadi indikator perlunya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Peningkatan fasilitas kesehatan dan pendistribusian tenaga kesehatan yang merata menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Tanjungbalai. Alat kesehatan yang tidak memadai di Pustu dan Posyandu, serta sanitasi yang buruk, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat juga sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit.

Di bidang sosial, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kurangnya mitra dalam pengembangan usaha masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan anak, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, harus menjadi fokus utama.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemberdayaan sosial, Kota Tanjungbalai dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### 2.4.4.7 Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi isu strategis yang signifikan di Kota Tanjungbalai. Minimnya koordinasi antar OPD dan keterbatasan pembiayaan kegiatan memperlambat proses pembangunan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik. Selain itu, kurangnya penggunaan IT dan digitalisasi dalam pelayanan publik menunjukkan perlunya modernisasi dan peningkatan kapasitas teknologi dalam pemerintahan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama di tingkat kelurahan, menunjukkan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan. Masyarakat yang aktif dan terlibat dalam pembangunan akan lebih mampu memahami dan mendukung kebijakan pemerintah, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan harus ditingkatkan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan harus diperkuat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional juga penting untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Dengan tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif, Kota Tanjungbalai dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk pembangunan. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

### 2.4.4.8 Kerawanan Banjir dan Pendangkalan Sungai

Kota Tanjungbalai menghadapi kerawanan banjir yang cukup tinggi, terutama disebabkan oleh pendangkalan Sungai Silau dan Sungai Asahan. Banjir yang sering terjadi tidak hanya mengancam keselamatan

dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan merusak infrastruktur. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dan upaya penanggulangan yang efektif untuk mengurangi risiko banjir.

Pendangkalan sungai disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sedimentasi yang terjadi akibat erosi tanah di daerah hulu sungai dan kurangnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara ilegal dan pembangunan yang tidak terkendali di bantaran sungai memperparah kondisi ini. Akumulasi sedimentasi mengurangi kapasitas tampung sungai, sehingga sungai mudah meluap saat musim hujan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program normalisasi sungai yang meliputi pengerukan dasar sungai untuk menghilangkan sedimentasi dan memperdalam aliran sungai. Selain itu, perlu ada upaya reforestasi di daerah hulu untuk mengurangi erosi tanah dan memperbaiki fungsi ekologis DAS. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat merusak DAS.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk mengimplementasikan strategi ini. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti tanggul dan waduk penahan air, juga diperlukan untuk mengurangi risiko banjir. Dengan langkah-langkah ini, Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan ketahanan terhadap banjir dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan ekonomi lokal.

#### 2.4.4.9 Bencana Akibat Perubahan Iklim

Perubahan iklim global memberikan dampak signifikan pada kondisi lingkungan di Kota Tanjungbalai. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan permukaan air laut mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai. Kota Tanjungbalai, sebagai wilayah pesisir, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim ini.

Bencana akibat perubahan iklim mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pertanian, perikanan, dan infrastruktur. Peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, misalnya, dapat merusak lahan

pertanian dan mengurangi hasil panen, serta mengganggu aktivitas perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak penduduk. Selain itu, infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat rusak akibat bencana ini, yang mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, diperlukan strategi adaptasi yang komprehensif. Ini meliputi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, peningkatan kapasitas sistem peringatan dini, serta pengembangan dan implementasi program mitigasi perubahan iklim seperti pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga perlu mendorong praktik pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sektor-sektor tersebut terhadap perubahan iklim.

Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas internasional, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, sangat penting dalam mengimplementasikan strategi ini. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim dan langkah-langkah mitigasi juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

#### 2.4.4.10 Daya Dukung Pangan

Kota Tanjungbalai menghadapi masalah kurangnya daya dukung pangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk berkurangnya lahan pertanian dan rendahnya produktivitas pertanian. Berkurangnya lahan pertanian disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk pembangunan, serta kurangnya perhatian terhadap pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan pangan lokal yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Rendahnya produktivitas pertanian juga dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern dan minimnya dukungan penyuluhan pertanian. Banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional dan tidak memiliki akses terhadap bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian yang memadai. Hal ini menyebabkan hasil panen yang rendah dan tidak optimal, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan di kota ini.

Untuk meningkatkan daya dukung pangan, diperlukan upaya peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi pertanian modern dan penyediaan akses yang lebih baik terhadap input pertanian. Program pelatihan dan pendampingan bagi petani juga harus diperkuat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola lahan pertanian secara lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, perlu ada kebijakan yang melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penelitian, sektor swasta, dan komunitas petani, untuk mengembangkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Peningkatan akses pasar bagi hasil pertanian lokal juga penting untuk memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang wajar dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan langkah-langkah ini, Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan daya dukung pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat.

#### 2.4.4.11 Daya Dukung Air

Kota Tanjungbalai juga menghadapi masalah kurangnya daya dukung air yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pertanian, dan industri. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi kota ini. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan sumber air yang tidak aman, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit yang ditularkan melalui air.

Masalah ini diperparah oleh kondisi infrastruktur air yang tidak memadai, termasuk jaringan pipa yang rusak dan kurangnya fasilitas pengolahan air bersih. Selain itu, penggunaan air yang tidak efisien dan polusi sumber air akibat limbah domestik dan industri juga menurunkan kualitas dan ketersediaan air. Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan produktivitas sektor-sektor yang bergantung pada air.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Pemerintah perlu mengimplementasikan program-program yang meningkatkan akses terhadap air bersih, termasuk pembangunan sumur

bor, jaringan pipa air, dan fasilitas pengolahan air. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan penggunaan air yang efisien.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat lokal, sangat penting untuk mengimplementasikan solusi yang berkelanjutan. Program pengelolaan air terpadu juga harus dikembangkan untuk memastikan bahwa sumber daya air dikelola secara efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan daya dukung air dan memastikan ketersediaan air bersih yang cukup bagi seluruh masyarakat.

#### 2.4.4.12 Keberlanjutan dan Kesinambungan Pembangunan

Kota Tanjungbalai menghadapi tantangan penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di tengah laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Isu ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait, termasuk lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan dapat mengakibatkan degradasi lingkungan yang serius, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta penurunan kualitas tanah. Dampak ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak terencana dapat menghasilkan ketimpangan sosial yang signifikan. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keadilan sosial dapat memperparah kesenjangan antara kelompok masyarakat, menyebabkan marginalisasi dan eksklusi sosial. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang inklusif dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kelembagaan yang kuat dan transparan juga menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan pembangunan. Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memonitor program-program pembangunan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, perlu ada integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek perencanaan dan kebijakan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan pembangunan sangat penting. Program edukasi dan kampanye publik dapat membantu masyarakat memahami peran mereka dalam menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, sangat penting. Kemitraan yang efektif dapat menghasilkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan pembangunan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Kota Tanjungbalai dapat memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

**Tabel 2.104**
**Isu Strategis Kota Tanjungbalai**

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| **ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS** | | | | | | |
| | Meningkatnya alih fungsi lahan | Isu adanya kejadian bencana alam dan perubahan iklim dan dipengaruhi juga isu meningkatnya ancaman sumber air baku, penurunan kualitas udara, belum optimalnya pengelolaan limbah domestik dan industry pada isu paling strategis RTRW. Isu ini | | Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana | Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan | Kerawanan banjir dan pendangkalan sungai |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | | juga dipengaruhi oleh penurunan kuantitas dan mutu air permukaan dan pengelolaan persampahan, serta dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem Dimana tidak ada wilayah yang memiliki jasa pencegahan dan perlindungan dari ada wilayah yang memiliki jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana alam tinggi | | | | |
| | Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim | Belum disusun Dokumen Strategi Pengurangan risiko bencana (PRB) Tingkat Daerah | Perubahan iklim | Perubahan iklim dan ketahanan bencana | Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi | Bencana akibat perubahan iklim |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | Ketahanan pangan masih rendah | | Keamanan pangan | Masalah demografi menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan | Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan | Daya dukung pangan |
| | Belum optimalnya infrastruktur dalam kondisi baik | Ketidakteraturan lalu lintas dan rendahnya akses transportasi di Kota Tanjung balai pada skala lokal. Kesenjangan antara peningkatan kebutuhan transportasi dengan ketersediaan infrastruktur terefleksi dalam tidak keteraturannya lalu lintas jalan – jalan utama Dimana seluruh bercampur menjadi satu | | Infrastruktur dan literasi digital rendah | Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan | Infrastruktur dan konektivitas |
| | Kapasitas air bersih yang rendah | Belum optimal pengelolaan air minum yang layak | | | | Daya dukung air |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | Kurangnya ketersediaan energi | | | Ekonomi hijau dan biru | Belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan | Keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| | Pemanfaatan bonus demografi yang belum optimal | | | Bonus demografi | Bonus demografi | Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) |
| | Angka kemiskinan yang relatf tinggi | Penanggulangan kemiskinan belum optimal, mental masyarakat masih ketergantungan dengan bantuan pemerintah Rincian kegiatan dari Program/Kegiatan pengentasan kemiskinan belum relevan atau menyentuh kebutuhan langsung masyarakat miskin | Pengentasan Kemiskinan | Kesenjangan Jawa dan Pulau Jawa | Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial | Tantangan ekonomi dan investasi |
| | Pemanfaatan sektor potensial daerah belum optimal | | | Ekonomi Biru | Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan | Optimalisasi potensi daerah |
| | Daya ungkit ekonomi yang lemah | - Belum tercapainya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi<br>- Belum optimalnya kontribusi sektor-sektor produktif terhadap | | Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia | Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan | Penciptaan daya ungkit ekonomi |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | | perekonomian daerah | | | Pembentukan modal manusia | |
| | Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas belum optimal | - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat<br>- SDM tenaga Kesehatan masih rendah secara kuantitas dan kualiatas<br>- Sarana dan prasarana Kesehatan masih belum memadai | Krisis kesehatan global | | Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial | Kesehatan dan pelayanan sosial |
| | Rendahnya kualitas pelayanan publik | | Perkembangan teknologi | Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah | Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kualitas ASN | Tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat |

# BAB III

## VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

**PERATURAN DAERAH**
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**
**(RPJMD)**

**KOTA TANJUNGBALAI**
**TAHUN 2025-2029**

# BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk mengarahkan pembangunan daerah secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai wujud implementasi dari visi dan misi Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, sebagai kepala daerah terpilih untuk masa jabatan 2025–2030. Perumusan arah pembangunan daerah tidak hanya didasarkan pada janji politik kepala daerah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi objektif daerah, termasuk potensi unggulan, tantangan aktual, serta isu strategis yang dihadapi Kota Tanjungbalai saat ini dan ke depan.

RPJMD ini merupakan pelaksanaan Tahap I dari RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2045, yang menjadi fondasi awal dalam perjalanan dua dekade pembangunan menuju *Tanjungbalai Masyhur 2045*. Periode ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat dasar-dasar transformasi, sekaligus berperan sebagai fase krusial dalam menyiapkan seluruh prasyarat menuju tahap transformasi berikutnya. Pada tahap ini, harus dipastikan bahwa seluruh elemen pendukung pembangunan berkelanjutan telah tersedia dan berfungsi optimal—mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana fundamental, internalisasi visi pembangunan, hingga terbentuknya ekosistem sosial, ekonomi, dan birokrasi yang kondusif.

Bab ini menjelaskan kerangka dasar pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Di dalamnya tercakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan yang secara sinergis dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dan memperkuat kapasitas daerah. Seluruh unsur ini disusun dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis data, sehingga mampu menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran, responsif, dan akuntabel.

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas dalam dokumen RPJMD ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi kompas yang mengarahkan seluruh agenda pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat serta selaras dengan rencana pembangunan tingkat provinsi dan nasional. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan keadilan sosial, RPJMD Kota Tanjungbalai

2025–2029 diharapkan dapat mendorong percepatan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

## 3.1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Untuk memastikan agar arah pembangunan Kota Tanjungbalai berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, maka Pemerintah Kota menyusun rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Bagian ini memuat arah strategis yang menjadi pijakan dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun ke depan. Visi dan misi yang dirumuskan menggambarkan tekad pemerintah daerah dalam merespons berbagai tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengacu pada sinergi pembangunan lintas tingkat pemerintahan. Sementara itu, tujuan dan sasaran dikembangkan untuk memperjelas fokus capaian pembangunan serta menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas.

### 3.1.1. Visi Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Dalam rangka menjawab kebutuhan pembangunan yang kian dinamis dan menuntut solusi yang adaptif, Pemerintah Kota Tanjungbalai menegaskan pentingnya arah pembangunan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya mempertimbangkan keunggulan lokal dan tantangan yang dihadapi daerah, tetapi juga berangkat dari semangat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah diharapkan mampu menjadi sarana transformasi menuju kondisi kota yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan semangat tersebut, maka ditetapkanlah visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

**“Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)”**

Visi pembangunan Kota Tanjungbalai, mencerminkan arah kebijakan strategis pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, masyarakat yang berdaya, dan kota yang berkembang secara berkelanjutan. Setiap kata dalam visi ini memiliki makna penting: Elok menekankan estetika dan kualitas tata kelola, Maju berfokus pada pembangunan SDM, ekonomi, dan infrastruktur, Agamais mencerminkan kehidupan sosial yang religius, dan Sejahtera menunjukkan pemenuhan

kebutuhan dasar secara merata. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mewujudkan visi ini melalui kebijakan yang memperhatikan keadilan sosial, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas hidup, dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kota yang lebih baik, berdaya saing, dan layak huni.

1. **Elok**

   Elok menggambarkan Kota Tanjungbalai yang bersih, tertata, dan humanis, dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus memperkuat pelayanan publik yang mudah diakses dan nyaman, serta menata ruang kota dengan jalan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum yang ramah. Selain keindahan fisik, semangat untuk membangun birokrasi yang bersih, berprestasi, dan berorientasi pada pelayanan juga menjadi bagian dari menciptakan kota yang elok.

2. **Maju**

   Maju mencerminkan fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan infrastruktur. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama untuk menciptakan masyarakat cerdas dan sehat. Pemerintah terus meningkatkan layanan pendidikan, fasilitas, dan keterampilan, serta memperkuat layanan kesehatan dasar. Infrastruktur diperluas untuk membuka akses antarwilayah dan mendukung ekonomi, dengan fokus pada pengembangan jalan, drainase, dan transportasi, serta mitigasi banjir. Sektor jasa dan perdagangan, terutama UMKM, diberdayakan agar lebih produktif dan mandiri, dengan tujuan mencapai kemajuan yang tidak hanya fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat menuju kesejahteraan.

3. **Agamais**

   Agamais mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Tanjungbalai yang didasari nilai keimanan, toleransi, dan kearifan lokal. Pemerintah mendukung kegiatan keagamaan dan penataan tempat ibadah yang layak dan inklusif, menciptakan ruang aman bagi semua umat beragama. Penguatan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan juga diperkuat sebagai pilar pembinaan moral. Dengan pendekatan humanis, nilai-nilai keagamaan menjadi bagian dari identitas kota, membentuk masyarakat yang saling menghormati, menjunjung etika, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat.

**4. Sejahtera**

Sejahtera mencerminkan kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat—seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal—terpenuhi secara layak. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen meningkatkan taraf hidup warga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, terutama dalam menciptakan peluang kerja dan mendukung aktivitas ekonomi produktif. Penguatan ekonomi lokal berbasis jasa dan perdagangan menjadi salah satu jalan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap usaha kecil, pembinaan keterampilan, serta kemudahan akses terhadap modal dan pasar dilakukan agar warga dapat mandiri secara ekonomi. Dalam skala yang lebih luas, pembangunan dilakukan secara inklusif, dengan memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dan layanan kota. Dengan pemerataan dan kepedulian terhadap kelompok rentan, harapan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata di tengah masyarakat.

**Tabel 3. 1. Keterkaitan Visi dan Kata Kunci RPJMD Tanjungbalai dengan RPJPD Tanjungbalai dan RPJMD Sumatera Utara serta RPJMN Indonesia**

| KETERKAITAN VISI | | | |
|---|---|---|---|
| **RPJMD TANJUNGBALAI** | **RPJPD TANJUNGBALAI** | **RPJMD SUMATERA UTARA** | **RPJMN INDONESIA** |
| Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS) | Tanjungbalai Masyhur 2045: Kota Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan | Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan | Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 |
| **KETERKAITAN KATA KUNCI** | | | |
| | | Kolaborasi | Bersama |
| Agamais | Masyhur | Sumut Berkah | Indonesia Emas |
| Maju | Maju | Maju | Maju |
| Sejahtera | Sejahtera | Unggul | |
| Elok | Berkelanjutan | Berkelanjutan | |

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 yaitu "Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)", Pemerintah Kota Tanjungbalai menetapkan sejumlah indikator sasaran utama pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Visi ini tercermin dalam upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh target peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari 5,00-5,40% pada tahun 2025 menjadi 6,80-7,20% pada tahun 2029, serta

peningkatan PDRB per kapita dari Rp68,59 juta menjadi Rp103,38 juta dalam periode yang sama. Untuk memastikan kontribusi PDRB Tanjungbalai terhadap perekonomian provinsi, proporsi kontribusi PDRB Kota Tanjungbalai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara juga diarahkan untuk tetap terjaga dan meningkat, dari 1,06% pada tahun 2025 menjadi 1,08% pada tahun 2029.

Adapun pencapaian indikator sasaran utama pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029 ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 2. Pencapaian Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai**

| No | Indikator Sasaran Pembangunan | Satuan | Baseline 2024 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,91 | 5,00-5,40 | 5,45-5,85 | 5,90-6,30 | 6,35-6,75 | 6,80-7,20 | 7,25-7,65 |
| 2 | PDRB Per Kapita | Nilai (Rp. Juta) | 65,76 | 68,59 | 77,29 | 85,99 | 94,68 | 103,38 | 112,08 |
| 3 | Kontribusi PDRB Provinsi | Persen | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 11,97 | 11,50-11,00 | 10,75-10,25 | 10,00-9,50 | 9,25-8,75 | 8,50-8,00 | 7,75-7,25 |
| 5 | Gini Rasio | Angka | 0,236 | 0,236-0,234 | 0,234-0,229 | 0,231-0,229 | 0,229-0,227 | 0,226-0,224 | 0,224-0,222 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 75,95 | 78,90-78,50 | 80,15-79,75 | 81,40-81,00 | 82,65-82,25 | 83,90-83,50 | 85,15-84,75 |
| 7 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Ton/Co2 Eq | n/a | 80.892,84 | 94.247,80 | 107,602,76 | 120.957,71 | 134.312,67 | 147.667,63 |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Angka | 69,83 | 70,17 | 70,34 | 70,51 | 70,68 | 70,85 | 71,02 |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,08 | 3,69-4,02 | 3,55-3,92 | 3,41-3,83 | 3,26-3,73 | 3,12-3,63 | 2,98-3,53 |
| 10 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 68,75 | 69,75 | 70,75 | 72,00 | 73,25 | 74,50 | 75,75 |

Pembangunan manusia yang berkelanjutan menjadi pilar penting dalam visi ini, tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan mencapai 83,90-83,50 pada tahun 2029, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditingkatkan dari 70,17 menjadi 70,85. Penurunan ketimpangan sosial-ekonomi juga menjadi fokus utama, sebagaimana terlihat dari penurunan angka kemiskinan dari 11,50-11,00% menjadi 8,50-8,00%, penurunan Gini Rasio dari 0,236-0,234 menjadi 0,226-0,224, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 3,69-4,02% menjadi 3,12-3,63% pada tahun 2029.

Selanjutnya, sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan mengalami penurunan yang signifikan, dari 80.892,84 ton $CO_2$ eq pada tahun 2025 menjadi 134.312,67 ton $CO_2$ eq pada tahun 2029, mencerminkan strategi mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien diwujudkan

melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari 69,75 menjadi 74,50 pada tahun 2029. Dengan demikian, seluruh indikator sasaran utama tersebut saling terkait dan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi visi RPJMD Kota Binjai yang berorientasi pada kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 telah disusun secara terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 serta pembangunan daerah melalui RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Tanjungbalai berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan spesifik pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari kesesuaian indikator dan target pembangunan Kota Binjai dengan target pembangunan provinsi dan nasional, antara lain pada indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE), PDRB per kapita, kontribusi terhadap PDRB provinsi, tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia, penurunan emisi gas rumah kaca, indeks kualitas lingkungan hidup, serta tingkat pengangguran terbuka.

Dengan demikian, seluruh indikator sasaran pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 telah dirancang secara harmonis dan konsisten dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan "Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)" secara terarah, terukur, dan berdaya saing tinggi.

**Tabel 3. 3. Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara**

| No | RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran Per Provinsi) | | | RPJMD Sumatera Utara Tahun 2025-2029 | | | RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 | Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 | Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 5,3 | 7,6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 5,3 | 7,6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 5,00-5,40 | 6,80-7,20 |
| 2 | PDRB per Kapita (Rp Juta) | 78,4 | 115,3 | PDRB per Kapita (Rp Juta) | 78,4 | 115,3 | PDRB per Kapita (Rp Juta) | 68,59 | 103,38 |
| 3 | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 5,2 | 5,3 | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 5,2 | 5,3 | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 1,06 | 1,08 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,96-7,46 | 2,82-3,82 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,96-7,46 | 2,82-3,82 | Tingkat Kemiskinan (%) | 11,50-11,00 | 8,50-8,00 |
| 5 | Rasio Gini | 0,303-0,305 | 0,287-0,291 | Rasio Gini | 0,303-0,305 | 0,287-0,291 | Rasio Gini | 0,236-0,234 | 0,226-0,224 |
| 6 | Indeks Modal Manusia | 0,54 | 0,57 | Indeks Modal Manusia | 0,54 | 0,57 | Indeks Pembangunan Manusia | 78,90-78,50 | 83,90-83,50 |
| 7 | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 1 | 16,88 | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 1 | 16,88 | Penurunan Emisi GRK (ton CO2Eq) | 80.892,84 | 134.312,67 |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 77,2 | 77,87 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 77,2 | 77,87 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 70,17 | 70,85 |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,27-5,56 | 4,74-5,20 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,27-5,56 | 4,74-5,20 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,69-4,02 | 3,12-3,63 |

### 3.1.2. Misi Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Dalam upaya mengarahkan pembangunan Kota Tanjungbalai selama lima tahun ke depan secara lebih fokus, terarah, dan berkesinambungan, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah merumuskan empat misi utama sebagai penjabaran dari visi pembangunan daerah. Visi tersebut berbunyi *"Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)"* yang mencerminkan cita-cita besar pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang progresif, kehidupan sosial yang harmonis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Keempat misi yang ditetapkan menggambarkan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, dan kearifan lokal. Setiap misi disusun berdasarkan kebutuhan dan tantangan pembangunan aktual, serta menggambarkan prioritas strategis yang saling memperkuat demi mewujudkan kota yang berdaya saing, inklusif, dan humanis. Penjabaran berikut ini menguraikan cakupan dan substansi dari masing-masing misi yang menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kota Tanjungbalai selama periode RPJMD 2025–2029.

1. **Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis**
   Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman. Fokus utama adalah pada pemerintahan yang elok dengan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani, melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan penguatan sistem digitalisasi pelayanan publik. Peningkatan kinerja perangkat daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelatihan ASN. Di sisi lain, penataan kota difokuskan pada pengelolaan ruang kota yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk revitalisasi ruang terbuka publik, pengembangan jalur pedestrian, serta peningkatan infrastruktur dasar. Konsep pembangunan yang humanis juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga menciptakan kota yang nyaman, aman, dan layak huni.

2. **Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan**
   Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai bertujuan untuk menciptakan SDM unggul, meningkatkan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah

dan mitigasi bencana banjir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dengan memperluas akses pendidikan yang merata, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta memperkuat pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada perbaikan jalan, pengembangan jembatan, dan penguatan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir. Selain itu, pemerintah berupaya memacu pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta revitalisasi pasar tradisional, guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

3. **Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearifan Lokal, dan Toleransi antar Umat Beragama**

   Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial. Karakter religius dan penghargaan terhadap budaya lokal menjadi aset penting dalam menjaga harmoni sosial. Pemerintah mengutamakan nilai agama, budaya, dan toleransi sebagai pilar utama, dengan mendukung aktivitas keagamaan, pembinaan generasi muda berbasis nilai spiritual, serta pemeliharaan rumah ibadah. Pelestarian budaya lokal juga dijalankan melalui penguatan tradisi, bahasa, dan seni, serta mendorong kolaborasi antar komunitas budaya. Toleransi antarumat beragama dipelihara melalui dialog antaragama dan pendidikan kebhinekaan sejak dini. Dengan penanaman nilai keagamaan dan kearifan lokal, diharapkan tercipta masyarakat yang beretika, bertanggung jawab, dan peduli sosial, yang menjadi modal sosial untuk mendukung pembangunan kota.

4. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

   Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penurunan angka kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan perluasan kesempatan kerja. Fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, keterampilan tenaga kerja lokal, serta dukungan permodalan dan pemasaran bagi UMKM dan sektor informal. Perlindungan sosial untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin diperkuat dengan bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi produktif. Selain itu, penguatan ketahanan keluarga dan pembangunan permukiman layak huni juga diperhatikan. Pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan diharapkan menciptakan

lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif bagi warga untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik.

Keseluruhan misi pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berprestasi, menciptakan kota yang tertata dan humanis, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Di saat yang sama, nilai-nilai religius, budaya lokal, dan toleransi antarumat dijunjung tinggi sebagai kekuatan sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat menjadi benang merah dari seluruh upaya ini, di mana setiap kebijakan dan program diarahkan untuk menurunkan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan lingkungan sosial yang adil, inklusif, dan berdaya saing. Dengan sinergi seluruh misi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai meneguhkan tekad untuk menjadikan kota ini sebagai tempat yang layak huni, sejahtera, dan membanggakan bagi seluruh warganya.

Misi dalam RPJMD Tanjungbalai dirancang dengan merujuk pada RPJPD Tanjungbalai, RPJMD Sumatera Utara, dan RPJMN Indonesia. Misi-misi dalam RPJMD Tanjungbalai merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Tanjungbalai, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan daerah jangka panjang. RPJPD Tanjungbalai mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai dengan tujuan yang lebih besar dalam RPJMD Sumatera Utara, yang mencakup tujuan provinsi untuk meningkatkan kualitas hidup, pembangunan ekonomi, dan infrastruktur. Misi-misi dalam RPJMD Sumatera Utara sendiri adalah penjabaran lebih lanjut dari RPJMN Indonesia yang menekankan pada pembangunan nasional yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Tanjungbalai.

Dengan demikian, misi RPJMD Tanjungbalai tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk dan dibangun dalam konteks keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sinergi antara RPJPD Tanjungbalai, RPJMD Sumatera Utara, dan RPJMN Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah Tanjungbalai sejalan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang lebih besar.

**Tabel 3. 4. Keterkaitan Misi RPJMD Tanjungbalai dengan RPJPD Tanjungbalai, RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia**

| KETERKAITAN MISI | | | |
|---|---|---|---|
| **RPJMD TANJUNGBALAI** | **RPJPD TANJUNGBALAI** | **RPJMD SUMATERA UTARA** | **RPJMN INDONESIA** |
| **Misi 1.** Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis | **Misi 3.** Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Profesional, Efektif dan Inovatif | **Misi 3**. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | **Asta Cita 7**. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan |
| | **Misi 4.** Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum dan Birokrasi yang stabil, supportif dan mengayomi | | |
| **Misi 2.** Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, dan Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan | **Misi 1.** Transformasi Sosial menuju Masyarakat Madani, Modern, Bermartabat dan Berbudaya | **Misi 1**. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | **Asta Cita 4**. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genegarsi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas |
| | **Misi 7.** Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Tepat Sasaran dan Ramah Lingkungan | | |
| **Misi 3.** Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearifan Lokal, dan Toleransi antar Umat Beragama | **Misi 5.** Terciptanya dan Terjaganya Ketahanan, Sosial, Budaya dan Ekologi | **Misi 5**. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh | **Asta Cita 1**. Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) |
| | **Misi 6.** Pembangunan Tata Ruang dan Kewilayahan yang merata, terencana, terintegrasi dan melestarikan kebudayaan dan sejarah daerah | | **Asta Cita 8.** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur |

| KETERKAITAN MISI | | | |
|---|---|---|---|
| **RPJMD TANJUNGBALAI** | **RPJPD TANJUNGBALAI** | **RPJMD SUMATERA UTARA** | **RPJMN INDONESIA** |
| **Misi 4.** Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | **Misi 2.** Transformasi Ekonomi menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan, Inklusif dan Berkelanjutan | **Misi 2**. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah | **Asta Cita 2.** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru |
| | | | **Asta Cita 5.** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri |
| | | | **Asta Cita 6.** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan |
| | **Misi 8.** Kesinambungan Pembangunan yang mengoptimalkan Potensi Daerah dan sesuai Kebutuhan Zaman | **Misi 4**. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan | **Asta Cita 3**. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi |

### 3.1.3. Tujuan Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029, Pemerintah Kota telah merumuskan tujuh tujuan strategis yang menjadi arah pencapaian pembangunan dalam jangka menengah. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai jembatan antara misi pembangunan dengan implementasi program dan kegiatan secara lebih operasional. Setiap tujuan disusun untuk mempertegas prioritas pembangunan daerah yang ingin diwujudkan, baik dalam aspek peningkatan kapasitas pemerintahan, pengembangan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penguatan perekonomian lokal, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemajuan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya, hingga peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Penjelasan berikut memuat uraian mendalam mengenai masing-masing tujuan, sebagai acuan dalam pelaksanaan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai lima tahun ke depan.

1. **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

   Pemerintah Kota Tanjungbalai menyadari bahwa tata kelola pemerintahan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan kapabilitas aparatur menjadi perhatian utama, termasuk melalui reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi SDM aparatur, serta penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang terintegrasi. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk memperkuat pengaduan publik, forum konsultasi, dan partisipasi dalam musyawarah pembangunan. Komitmen ini diharapkan mampu membangun kepercayaan publik dan menciptakan birokrasi yang melayani, bukan dilayani.

2. **Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman**

   Kota Tanjungbalai mengusung konsep pembangunan wilayah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetis dan ramah lingkungan. Penataan kawasan permukiman, ruang terbuka hijau, tata jalan, serta area publik menjadi fokus utama untuk menciptakan wajah kota yang rapi dan nyaman ditinggali. Pemerintah kota akan meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar, seperti sistem sanitasi, pengelolaan sampah, serta penerangan jalan

umum. Di sisi lain, penataan kawasan kumuh dan pemukiman padat penduduk dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kawasan, didukung oleh kolaborasi antarsektor dan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada keindahan kota dengan memperkuat identitas visual kota melalui lanskap, ikon daerah, dan pengembangan ruang publik interaktif. Lingkungan yang bersih dan tertata akan memperkuat daya tarik kota, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra Tanjungbalai sebagai kota yang humanis dan ramah bagi semua kelompok usia.

3. **Menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul**
   Pembangunan SDM menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditawar dalam menjawab tantangan masa depan dan mendorong kemandirian masyarakat. Pemerintah Kota Tanjungbalai menargetkan peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui penguatan sarana-prasarana sekolah, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta pemberian bantuan pendidikan untuk kelompok masyarakat kurang mampu. Pendidikan karakter dan pelatihan keterampilan kerja juga diintegrasikan untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya berilmu, tetapi juga siap menghadapi dunia kerja. Di bidang kesehatan, penguatan pelayanan dasar difokuskan pada peningkatan kapasitas Puskesmas, ketersediaan tenaga medis, serta promosi gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Pemerintah juga akan meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Dengan pembangunan SDM yang holistik, masyarakat Tanjungbalai diharapkan menjadi cerdas, sehat, dan produktif.

4. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi risiko bencana banjir**
   Pembangunan infrastruktur merupakan katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai memberikan perhatian khusus pada pembangunan sarana dan prasarana dasar yang mampu meningkatkan konektivitas wilayah antar-kecamatan dan antar-kelurahan, memperlancar aktivitas logistik dan mobilitas penduduk, serta mendukung kelancaran pelayanan publik. Di samping itu, kondisi geografis kota yang rentan terhadap banjir menuntut adanya upaya mitigasi bencana yang sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah akan memperkuat sistem drainase, melakukan normalisasi sungai, dan memastikan keberfungsian saluran air secara optimal. Pembangunan infrastruktur juga mencakup penyediaan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, jembatan, pasar tradisional, fasilitas olahraga,

serta ruang publik lainnya untuk mendukung interaksi sosial dan aktivitas ekonomi warga. Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berwawasan risiko, infrastruktur tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan daya tahan kota terhadap bencana.

5. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi**
   Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor unggulan seperti jasa dan perdagangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dukungan terhadap pelaku UMKM dilakukan melalui pemberian akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi promosi, dan pengembangan jejaring pemasaran. Pemerintah juga mendorong transformasi digital UMKM agar lebih mampu bersaing dalam pasar modern. Selain itu, optimalisasi potensi pasar tradisional dan kawasan ekonomi strategis di kota akan terus dilakukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru. Keberpihakan pada ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya juga akan diperkuat. Dengan strategi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai dapat tumbuh secara berkelanjutan, mengurangi ketimpangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial**
   Pemerintah Kota Tanjungbalai menempatkan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal sebagai landasan dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Dalam kehidupan sosial yang beragam, penting untuk menjaga semangat toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antarumat beragama serta antarsuku. Berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan rohani, dan peningkatan peran rumah ibadah akan terus difasilitasi agar nilai spiritual tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta mencegah konflik horizontal. Di samping itu, pelestarian seni budaya lokal dan pembinaan generasi muda dalam semangat kebangsaan serta nilai moral akan terus ditingkatkan. Tujuan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk tidak hanya membangun dari sisi fisik, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang menjamin kehidupan masyarakat yang damai, toleran, dan berakhlak mulia.

7. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar**

   Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator utama dari keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Tanjungbalai memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Prioritas ini mencakup peningkatan akses terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau, penyediaan air bersih, layanan sanitasi yang layak, penurunan stunting, serta perumahan yang memadai bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan melalui berbagai skema perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan peluang kerja produktif. Pendekatan yang digunakan adalah sinergi antara intervensi langsung oleh pemerintah dan pelibatan aktif masyarakat serta sektor swasta. Melalui pembangunan yang berpusat pada manusia, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya terpenuhi secara material, tetapi juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari generasi ke generasi.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Tanjungbalai menetapkan tujuh tujuan utama yang saling mendukung dan terintegrasi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi landasan dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil. Penataan kota diarahkan agar lebih tertib, bersih, dan nyaman sebagai ruang hidup yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang. Di sisi lain, penguatan infrastruktur menjadi instrumen penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan mengurangi risiko bencana banjir yang kerap mengancam kota. Untuk mendongkrak kesejahteraan, penguatan sektor ekonomi lokal yang berbasis jasa dan perdagangan dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal juga dijaga agar kehidupan sosial tetap harmonis, toleran, dan berakhlak. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara berkeadilan demi tercapainya kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat.

**Tabel 3. 5. Keterkaitan Tujuan RPJMD Tanjungbalai dengan RPJPD Tanjungbalai, RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia**

| Keterkaitan Tujuan | | | |
|---|---|---|---|
| **RPJMD Tanjungbalai** | **RPJPD Tanjungbalai** | **RPJMD Sumatera Utara** | **RPJMN Indonesia** |
| 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 3. Transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang profesional, efektif dan inovatif | 5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas | 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan |
| | 4. Ekosistem sosial, ekonomi, hukum dan birokrasi yang stabil, suportif dan mengayomi | | |
| 2. Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman | 6. Pembangunan tata ruang dan kewilayahan yang merata, terencana, terintegrasi dan melestarikan kebudayaan dan sejarah daerah | 6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan | 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) |
| 3. Menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul | 1. Transformasi sosial menuju masyarakat madani, modern, bermartabat dan berbudaya | 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas |
| 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan | 7. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, tepat sasaran dan ramah lingkungan | 7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna | 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta |

| Keterkaitan Tujuan | | | |
|---|---|---|---|
| **RPJMD Tanjungbalai** | **RPJPD Tanjungbalai** | **RPJMD Sumatera Utara** | **RPJMN Indonesia** |
| mitigasi risiko bencana banjir | | Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat | mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | 2. Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan berkesinambungan, inklusif dan berkelanjutan | 3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan |
| | | 4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif | 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri |
| 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial | 5. Tercipta dan terjaganya ketahanan sosial, budaya dan ekologi | 8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga | 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur |
| 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar | 8. Kesinambungan pembangunan yang mengoptimalkan potensi daerah dan sesuai kebutuhan zaman | 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru |

### 3.1.4. Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2025–2029, diperlukan arah kebijakan dan program yang dijalankan secara sistematis, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap sasaran pembangunan dirumuskan sebagai jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi kota ini, sekaligus sebagai upaya strategis untuk mempercepat transformasi menuju tata kelola yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih dan sehat, infrastruktur yang merata, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran-sasaran ini bukan hanya menggambarkan capaian yang ingin diraih, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penjabaran sasaran berikut disusun secara naratif untuk memperjelas konteks, relevansi, serta arah solusinya dalam menjawab permasalahan nyata. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap sasaran pembangunan yang diturunkan dari tujuan strategis Kota Tanjungbalai:

1. **Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik**
   Tata kelola pemerintah yang baik adalah fondasi bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus memperkuat sistem birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam mewujudkan hal tersebut, kualitas aparatur sipil negara ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi, pembinaan karakter, serta sistem penghargaan dan sanksi yang adil. Langkah ini didukung oleh penyusunan regulasi yang adaptif dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra strategis dalam setiap proses kebijakan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi terus dikembangkan dalam rangka memperluas akses layanan dan mendorong efisiensi pelayanan publik. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi simbol transformasi menuju birokrasi yang modern, terbuka, dan akuntabel.

2. **Meningkatkan pengelolaan sampah, sanitasi, dan air bersih berkelanjutan**
   Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian tak terpisahkan dari kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Tanjungbalai memandang pengelolaan sampah, drainase, dan penyediaan air bersih sebagai aspek strategis dalam mewujudkan kota yang nyaman dan tangguh terhadap bencana. Upaya ini dijalankan dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis lingkungan dalam pengelolaan sampah, meningkatkan kualitas sanitasi, serta melakukan pembenahan sistem drainase kota guna

meminimalkan risiko banjir. Selain itu, pembangunan sarana penyediaan air bersih akan terus diperluas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga mendorong peran serta aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat melalui berbagai program edukatif dan partisipatif. Dengan demikian, perbaikan lingkungan hidup di Tanjungbalai diharapkan dapat menciptakan kawasan yang lebih sehat, aman, dan layak huni bagi seluruh warganya.

3. **Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan publik**
   Ketersediaan infrastruktur publik yang merata dan berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan dasar. Pemerintah Kota Tanjungbalai terus mendorong pembangunan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik dari sisi aksesibilitas maupun kenyamanan. Program pembenahan dan penataan kota diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang ramah, inklusif, dan mendukung aktivitas sosial masyarakat. Penataan jalan lingkungan, revitalisasi pasar tradisional, peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana umum lainnya menjadi prioritas untuk memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

4. **Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM**
   Sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah kunci bagi kemajuan daerah di tengah persaingan global dan dinamika pasar kerja yang semakin kompleks. Kota Tanjungbalai menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Masih terbatasnya akses terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi hambatan serius. Sasaran ini bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, memberikan dukungan beasiswa, dan memperkuat kapasitas lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dengan demikian, SDM Tanjungbalai akan memiliki kompetensi yang kompetitif dan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah.

5. **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**
   Kesehatan masyarakat merupakan aspek fundamental dalam mendukung pembangunan daerah. Kota Tanjungbalai menghadapi tantangan berupa masih adanya kesenjangan pelayanan kesehatan, keterbatasan tenaga medis, serta fasilitas kesehatan yang belum optimal di beberapa kawasan. Untuk itu, pemerintah daerah menaruh perhatian serius pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk pembenahan sarana dan prasarana rumah sakit serta puskesmas, penguatan kapasitas SDM medis, dan

penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat. Upaya ini diiringi dengan peningkatan edukasi dan promotif kesehatan, guna menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya hidup sehat sejak dini, sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan generasi yang lebih produktif dan tangguh.

6. **Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah**
   Konektivitas antarwilayah di Tanjungbalai masih menghadapi kendala akibat jalan yang rusak, terbatasnya infrastruktur penghubung, dan kurangnya fasilitas transportasi yang terintegrasi. Hal ini berdampak pada kelancaran arus barang dan jasa, mobilitas penduduk, serta keterpaduan antar kawasan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Sasaran ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi publik yang dapat meningkatkan konektivitas antar kecamatan, kelurahan, serta kawasan ekonomi strategis. Aksesibilitas yang membaik akan memudahkan distribusi logistik, memperluas pasar usaha lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan.

7. **Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir**
   Kondisi geografis Kota Tanjungbalai yang dikelilingi oleh Sungai Asahan dan Sungai Silau menjadikan wilayah ini sangat rawan terhadap banjir, terutama saat curah hujan tinggi dan pasang air laut. Penanganan aliran Sungai Bandar Jaksa, Sungai Bandar Jepang, dan Sungai Bandar Sipoyong yang menuju Sungai Asahan perlu dilakukan intervensi untuk memperlancar alirannya. Ketidakseimbangan antara pembangunan kawasan permukiman dan kapasitas sistem drainase menyebabkan genangan air sering terjadi di sejumlah titik kota. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat sistem drainase melalui pembangunan saluran yang terhubung dengan baik, pemeliharaan berkala, serta pengendalian tata ruang yang memperhatikan aspek resapan air. Dengan demikian, risiko bencana banjir dapat ditekan secara signifikan, dan kota menjadi lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

8. **Meningkatnya pendapatan masyarakat**
   Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh bantuan sosial atau subsidi pemerintah, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan yang layak. Namun, banyak warga Tanjungbalai yang masih bergantung pada sektor informal dengan produktivitas rendah. Sasaran ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja, dukungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta penciptaan iklim investasi yang ramah dan inklusif. Dengan strategi ini, masyarakat

akan terdorong untuk mandiri secara ekonomi dan dapat meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

9. **Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya**

   Sebagai kota pesisir dengan pelabuhan internasional, Tanjungbalai memiliki potensi besar di sektor perdagangan, perikanan, dan jasa. Namun demikian, daya saing sektor-sektor ini masih rendah akibat kurangnya infrastruktur pendukung, keterbatasan promosi produk lokal, serta belum terintegrasinya pelaku usaha dalam rantai pasok regional maupun global. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat sektor jasa dan perdagangan, memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, serta mengembangkan klaster sektor produktif yang berbasis potensi lokal. Transformasi ekonomi ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif.

10. **Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama**

    Tanjungbalai merupakan kota multikultural yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku dan agama. Namun, dinamika sosial yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memicu konflik horizontal. Untuk itu, sasaran ini difokuskan pada upaya membangun ruang-ruang dialog antarumat beragama, memberikan fasilitas kegiatan keagamaan secara adil, dan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial. Lingkungan sosial yang damai dan inklusif akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

11. **Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal**

    Identitas budaya lokal merupakan aset berharga yang membentuk karakter dan jati diri masyarakat. Namun, seiring berkembangnya globalisasi dan modernisasi, banyak nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang mulai terpinggirkan. Sasaran ini diarahkan untuk melestarikan warisan budaya daerah melalui pengembangan seni, adat istiadat, dan kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat. Pemerintah akan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi budaya serta mendukung komunitas budaya agar tetap aktif dan produktif. Penguatan ekonomi kreatif yang memanfaatkan pemajuan kebudayaan diharapkan dapat mendorong kekayaan budaya di Tanjungbalai menjadi lebih bernilai tambah ekonomi. Dengan upaya ini, kebudayaan lokal tidak hanya terjaga, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi kreatif daerah.

**12. Meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat**

Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Di beberapa wilayah Tanjungbalai, masih terdapat ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan ini, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Sasaran ini ditujukan untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan dasar, termasuk program penanggulangan kemiskinan, penyediaan rumah layak huni, serta penguatan ketahanan pangan lokal. Upaya ini akan memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan, sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata.

Kedua belas sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Tanjungbalai 2025–2029 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan nyata yang dihadapi masyarakat. Setiap sasaran dirancang untuk saling terintegrasi, membentuk kerangka pembangunan yang komprehensif, mulai dari peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan sektor layanan dasar, hingga akselerasi pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai sosial budaya. Dengan arah pembangunan yang bertumpu pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dijalankan mampu memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Tanjungbalai sebagai kota yang elok, maju, agamais, dan sejahtera.

**Tabel 3. 6. Keterkaitan Sasaran RPJMD Tanjungbalai dengan RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN**

| Keterkaitan Sasaran | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RPJMD Kota Tanjungbalai** | | **RPJMD Sumatera Utara** | | **RPJMN** | |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik | 8 | Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas | IE 9 | Penguatan kapabilitas tata kelola berintegritas dan regulasi adaptif |
| | | 9 | Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah | | |
| 2 | Meningkatkan pengelolaan sampah, sanitasi, dan air bersih berkelanjutan | 10 | Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | IE15 | Lingkungan hidup yang berkualitas |
| 3 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan publik dan stabilitas harga pangan | 6 | Terciptanya Stabilitas Harga | IE11 | Stabilitas Ekonomi Makro |
| 4 | Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM | 2 | Meratanya Pendidikan Berkualitas | IE2 | Pendidikan unggul dan merata |
| | | 3 | Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif | IE4 | IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi |
| 5 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | IE3 | Perlindungan sosial yang adaptif |
| | | 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Inklusif | IE1 | Kesehatan untuk semua |
| 6 | Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah | 7 | Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi | IE7 | Integrasi Ekonomi Domestik dan global |
| 7 | Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir | 11 | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan | IE17 | Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim |

| Keterkaitan Sasaran | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RPJMD Kota Tanjungbalai** | | **RPJMD Sumatera Utara** | | **RPJMN** | |
| 8 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | 4 | Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah | IE6 | Investasi unggul bernilai tinggi yang didukung oleh transformasi digital |
| | | | | IE5 | Penerapan ekonomi hijau melalui industri hijau |
| 9 | Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya | 5 | Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan | IE8 | Pertumbuhan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat ekonomi |
| 10 | Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama | 13 | Menguatnya Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial | IE14 | Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif |
| | | | | IE10 | Masyarakat demokratis dan penciptaan lingkungan aman |
| 11 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal | 14 | Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah | IE13 | Beragama maslahat dan berkebudayan maju |
| | | | | IE12 | Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan |
| 12 | Meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat | 12 | Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan | IE16 | Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan |

## Tabel 3.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

| VISI | MISI | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ELOK | Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public | | Indeks Reformasi dan Birokrasi | Kategori | 68,75 | 69,75 | 70,75 | 72,00 | 73,25 | 74,50 | 75,75 |
| | | 1.1 | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | AKIP | Kategori | B | B | B | B | BB | BB | BB |
| | | Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 69,83 | 70,17 | 70,34 | 70,51 | 70,65 | 70,68 | 71,02 |
| | | 1.2 | Meningkatkan pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih berkelanjutan | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak | Persen | 96,82 | 97,00 | 97,60 | 98,20 | 98,80 | 99,40 | 100 |
| | | | | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | Persen | 75,00 (2023) | 75,00 | 76,25 | 77,50 | 78,75 | 80,00 | 81,25 |
| | | | | Kapasitas produksi air bersih | Liter/detik | 446,00 (2022) | 473,75 | 475,05 | 476,34 | 477,64 | 478,93 | 480,23 |
| | | 1.3 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan public | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik | Persen | 87,75 | 87,80 | 88,24 | 88,68 | 89,12 | 89,56 | 90,00 |

| VISI | MISI | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| MAJU | Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan | Menciptakan SDM unggul | | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 75,95 | 78,90-78,50 | 80,15-79,75 | 81,40-81,00 | 82,65-82,25 | 83,90-83,50 | 85,15-84,75 |
| | | 2.1 | Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,15 | 13,74 | 14,02 | 14,17 | 14,56 | 14,67 | 14,860 |
| | | | | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 9,69 | 9,75 | 9,90 | 10,05 | 10,20 | 10,35 | 10,50 |
| | | 2.2 | Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.22 | 74.50 | 74.78 | 75.05 | 75.33 | 75.60 | 75.88 |
| | | | | Persentase penurunan angka stunting pada anak | Persen | 5,60 | 5,50 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,10 | 5,00 |
| | | Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir | | Indeks Daya Saing Daerah | Poin | 3,44 | 3,45 | 3,49 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | 3,65 |
| | | 2.3 | Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah | Tingkat Kemantapan Jalan | Persen | 60,98 | 61,50 | 62,50 | 63,50 | 64,50 | 65,50 | 66,50 |
| | | | | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) | Poin | 44,33 | 44,50 | 44,80 | 45,10 | 45,50 | 46,00 | 46,50 |
| | | 2.4 | Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk | Persentase Drainase dalam kondisi Baik | Persen | 59,95 | 60,00 | 60,20 | 60,40 | 60,60 | 60,80 | 61,00 |

| VISI | MISI | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | mengurangi resiko banjir | | | | | | | | | |
| | | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | | Pertumbuhan ekonomi | Persentase | 4,91 | 5,00-5,40 | 5,45-5,85 | 5,90-6,30 | 6,35-6,75 | 6,80-7,20 | 7,25-7,65 |
| | | 2.5 | Meningkatnya pendapatan Masyarakat | PDRB per kapita | Rp (Juta) | 65,76 | 68,59 | 77,29 | 85,99 | 94,68 | 103,38 | 112,08 |
| | | | | Kontribusi PDRB Kota | Persen | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 |
| | | 2.6 | Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya | Kontribusi PDRB Industri pengolahan | Persen | 20,97 | 21,00 | 21,54 | 21,86 | 22,30 | 22,74 | 23,00 |
| | | | | Kontribusi PDRB Sektor Jasa dan Perdagangan | Persen | 47,53 | 47,80 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | 49,50 | 49,78 |
| | | | | Kontribusi Sektor perikanan | Persen | (13,83/2023) | 14,00 | 14,38 | 14,75 | 15,13 | 15,50 | 15,50-16,00 |
| AGAMAIS | Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearian Lokal dan Toleransi antar Umat Beragama | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia | | Jumlah konflik sosial yang berkaitan dengan isu keagamaan | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama | Jumlah kejahatan/pelangggaran yang terjadi | Kasus | 345 | 342 | 338 | 335 | 331 | 328 | 324 |

| VISI | MISI | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 3.2 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal. | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Persen | 0 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| | | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Poin | n/a | 54,44 | 54,6 | 54,96 | 55,04 | 55,2 | 55,55 |
| SEJAHTERA | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan sosial | | Tingkat Kemiskinan | Persen | 11,97 | 11,50-11,00 | 10,75-10,25 | 10,00-9,50 | 9,25-8,75 | 8,50-8,00 | 7,75-7,25 |
| | | 4.1 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan Masyarakat | Indeks Ketahanan Pangan Daerah | Poin | 74,59 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 |
| | | | | Rasio gini | Poin | 0,236 | 0,236-0,234 | 0,234-0,229 | 0,231-0,229 | 0,229-0,227 | 0,226-0,224 | 0,224-0,222 |
| | | | | Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga) | Poin | n/a | 72.71 | 73.07 | 73.44 | 73.80 | 74.17 | 74.53 |
| | | | | Indeks Ketimpangan Gender | Poin | 0,343 | 0.342 | 0.341 | 0.340 | 0.399 | 0.398 | 0.397 |

## 3.2. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subbab ini menjabarkan kerangka besar arah pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai periode 2025–2029 yang terdiri atas strategi pembangunan, arah kebijakan, serta program prioritas yang akan dijalankan secara bertahap dan terarah. Penyusunan strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran, serta memperhatikan isu strategis, potensi daerah, tantangan eksternal, dan dinamika pembangunan nasional. Subbab ini menjadi panduan utama dalam mengarahkan program-program pembangunan yang selaras dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Bagian pertama dari subbab ini, yaitu Strategi Pembangunan, menguraikan secara sistematis keterkaitan antara misi pembangunan dengan tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang. Empat misi pembangunan dijabarkan secara rinci ke dalam strategi pembangunan yang mencerminkan pendekatan makro terhadap permasalahan utama di Kota Tanjungbalai, seperti tata kelola pemerintahan, penguatan infrastruktur, penguatan SDM, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penjabaran ini disusun agar setiap langkah pembangunan memiliki landasan strategi yang kuat dan relevan dengan kondisi aktual daerah.

Selanjutnya, pada bagian Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai, dijelaskan secara tematik arah kebijakan dari setiap strategi, termasuk pentahapan implementasinya dari tahun 2025 hingga 2030. Arah kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa setiap strategi pembangunan dapat dijalankan secara bertahap, dengan fokus yang disesuaikan pada konteks dan kebutuhan pembangunan tahunan. Tahapan ini mencakup fase perintisan, penguatan, perluasan, hingga konsolidasi dampak kebijakan, sehingga menghasilkan perubahan yang terukur dan berkelanjutan di berbagai sektor pembangunan daerah.

Keseluruhan strategi dan arah kebijakan ini diakhiri dengan rumusan Program Prioritas, yaitu daftar program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC) yang diturunkan langsung dari arah kebijakan dan menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan RPJMD. Program-program prioritas ini disusun dengan pendekatan tematik dan integratif untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan.

### 3.2.1. Strategi Pembangunan

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2025–2029 didasarkan pada misi pembangunan kota serta memperhatikan berbagai permasalahan daerah dan isu strategis yang berkembang. Penyusunan strategi ini melalui proses kajian mendalam, analisis komprehensif, dan evaluasi atas capaian pembangunan periode sebelumnya. Dalam menetapkan strategi pembangunan jangka menengah, sejumlah tahapan dilakukan, antara lain:

1. Menganalisis capaian pembangunan periode sebelumnya serta merumuskan proyeksi pembangunan lima tahun ke depan berdasarkan evaluasi kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.
2. Mengidentifikasi kondisi umum daerah dengan menelaah capaian pembangunan hingga awal periode perencanaan serta menganalisis permasalahan utama dan isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
4. Menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) serta menyusun kerangka kebijakan pembangunan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi pembangunan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya serta dinamika eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
6. Menetapkan strategi pembangunan yang paling optimal guna mencapai sasaran jangka menengah, dengan memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan serta keselarasan dengan arah pembangunan nasional dan daerah.

Strategi pembangunan dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sekaligus menjawab berbagai permasalahan pembangunan daerah. Pelaksanaan strategi ini akan menjadi penentu arah, fokus, dan tema pembangunan yang lebih terarah dan terukur. Oleh karena itu, strategi pembangunan disusun secara terstruktur guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai secara maksimal. Adapun ragam strategi pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

### 3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai

Bagian ini memuat penjabaran lebih lanjut dari strategi pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan ini dirancang sebagai panduan operasional yang lebih spesifik dan aplikatif, guna memastikan strategi pembangunan dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata dan terukur di lapangan. Setiap arah kebijakan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta dirumuskan berdasarkan pertimbangan kondisi eksisting, potensi sumber daya daerah, serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Arah kebijakan juga disusun untuk mengakomodasi prinsip kesinambungan dan tahapan pembangunan tahunan dari tahun 2025 hingga 2030. Setiap tahapan menggambarkan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan urgensi permasalahan, kapasitas fiskal daerah, serta kesiapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Dengan pendekatan bertahap ini, kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan saat ini, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi tantangan masa depan.

Melalui arah kebijakan ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai berupaya memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Harapannya, pelaksanaan arah kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat menciptakan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, kualitas lingkungan, serta daya saing kota selama tahun 2025 hingga 2030.

## Tabel 3.8. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Visi: Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera** | | | | | | | |
| **Misi 1: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis** | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik | 1 | Peningkatan kualitas kinerja ASN dengan berbasis pembangunan karakter | 1 | Membangun sistem pembinaan ASN yang berfokus pada etika, karakter, dan kompetensi kerja |
| | | | | | | 2 | Memperkuat sistem pengawasan internal dan menerapkan transparansi dan akuntabilitas |
| | | | | 2 | Membangun jejaring sinergis antar sektor melalui forum komunikasi pembangunan | 1 | Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan melalui forum konsultasi publik |
| | | | | | | 2 | Menciptakan kordinasi yang baik diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | 3 | Meningkatkan pelayanan publik yang ramah dan mudah diakses masyarakat | 1 | Mengembangkan sistem layanan digital terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas |
| | | | | | | 2 | Peningkatan inovasi pada pelayanan publik |
| | | | | | | 3 | Peningkatan sarana prasarana perkantoran pemerintahan |
| | | | | 4 | Penigkatan kapasitas dan kemandirian fiskal | 1 | Pengoptimalan potensi pendapatan asli daerah (PAD) |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 | Pengembangan sistem informasi keuangan daerah |
| 2 | Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman | 1 | Meningkatnya pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih berkelanjutan | 1 | Melakukan pembenahan dan penataan kota | 1 | Penataan kota yang bersih dan nyaman berbasis pengelolaan lingkungan |
| | | | | 2 | Pengelolaan lingkungan permukiman berbasis partisipatif | 1 | Meningkatkan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis kewilayahan |
| | | | | | | 2 | Meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah melalui pengurangan, daur ulang, dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan masyarakat |
| | | | | 3 | Meningkatkan distribusi dan kualitas air bersih | 1 | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air bersih untuk kesejahteraan Masyarakat |
| | | 2 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan public | 1 | Meningkatkan kualitas fasilitas umum berbasis kebutuhan dan mendukung keteraturan dan kenyamanan | 1 | Menata ruang publik agar fungsional, aman dan ramah lingkungan |
| | | | | | | 2 | Peningkatan kualitas sarana layanan publik melalui revitalisasi dan pembangunan baru |
| **Misi 2: Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan** | | | | | | | |
| 3 | Menciptakan SDM unggul | 1 | Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM | 1 | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dari dasar hingga menengah | 1 | Meningkatkan sumber daya siswa dengan memberikan beasiswa berbasis Ketidak mampuan secara ekonomi dan prestasi pada tingkatan PAUD, SD dan SMP |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 | Meningkatkan kualitas dan daya saing siswa melalui pemberian makan bergizi gratis |
| | | | | | | 3 | Meningkatkan literasi dan numerasi siswa |
| | | | | | | 4 | Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dan/atau sekolah inklusi serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik |
| | | | | 2 | Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis potensi daerah | 2 | Memfasilitasi Siswa SMA / Sederajat untuk memperoleh beasiswa pada salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang bertaraf Internasional |
| | | 2 | Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat | 1 | Meningkatkan akses dan kualitas cakupan layanan Kesehatan | 1 | Penurunan Gizi Buruk dan Prevalensi Stunting |
| | | | | | | 2 | Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak |
| | | | | | | 3 | Pengendalian Penyakit dan Menular dan Tidak Menular |
| | | | | | | 4 | Penangananan ODGJ |
| | | | | 2 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan Kesehatan | 1 | Meningkatkan kelas Rumah Sakit Daerah yang dapat memberikan pelayanan medik |
| | | | | | | 2 | Membenahi sarana dan prasarana kesehatan serta memenuhi kebutuhan SDM tenaga medis |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | Meningkatkan promosi pola hidup sehat | 3 | Pencegahan penyakit dan bahaya narkoba melalui promosi kesehatan dan peran keluarga |
| 4 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir | 1 | Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah | 1 | Meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana publik | 1 | Membenahi Infrastruktur akses jalan masyarakat dan membenahi sarana umum masyarakat seperti pembenahan pasar tradisional, sarana publik, dan peninggalan sejarah |
| | | | | 2 | Meningkatkan fasilitas Pelabuhan | 2 | Meningkatkan fasilistas penunjang pelabuhan penumpang internasional dan pelabuhan pengangkut regional maupun internasional |
| | | | | 3 | Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi | 3 | Mengembangkan dan memperluas jaringan transportasi publik yang terhubung antarwilayah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat |
| | | 2 | Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir | 1 | Mengelola sampah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan | 1 | Pengelolaan Sampah Berbasis lingkungan |
| | | | | 2 | Meningkatkan sistem drainase untuk mencegah banjir dan memperbaiki pengelolaan air | 2 | Penataan drainase sebagai solusi mencegah banjir |
| 5 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | 1 | Meningkatnya pendapatan Masyarakat | 1 | Meningkatkan daya saing pelaku usaha | 1 | Menyiapkan fasilitas kemudahan, rasa aman dan nyaman kepada para pelaku usaha yang berinvestasi |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 | Peningkatan dan Pengembangan Koperasi Mandiri |
| | | | | | | 3 | Mendorong pengembangan UMKM dengan melakukan pelatihan, pemodalan berbasis usaha, dan pemasaran |
| | | | | 2 | Mendorong kolaborasi antar pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan terintegrasi | 1 | Membangun Ekosistem Bisnis yang Terintegrasi dan Inovatif |
| | | 2 | Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya | 1 | Memperkuat sektor perdagangan dan industri produktif lainnya | 1 | Meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri produktif melalui penguatan kapasitas dan inovasi |
| | | | | | | 2 | Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja untuk Menunjang Industri |
| | | | | 2 | Pengembangan sektor pariwisata | 1 | Peningkatan Infrastruktur dan fasilitasi pengembangan Pariwisata |
| | | | | | | 2 | Pengembangan pariwisata kuliner |
| | | | | 3 | Pengembangan sektor perikanan | 1 | Peningkatan produktifitas perikanan dan nilai tambah perikanan |
| | | | | | | 2 | Peningkatan infrastruktur yang mendukung hilirisasi perikanan |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **Misi 3: Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearian Lokal dan Toleransi antar Umat Beragama** | | | | | | | |
| 6 | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial. | 1 | Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama. | 1 | Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, inklusif, dan menjunjung tinggi toleransi | 1 | Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pemeluk agama dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam beribadah |
| | | | | 2 | Mendukung keberagaman melalui fasilitasi kegiatan keagamaan | 2 | Memfasilitasi perayaan serta kegiatan agama dan kepercayaan yang ada |
| | | | | 3 | Mendorong kebiasaan mengaji sebagai bagian dari budaya masyarakat | 3 | Gerakan Maghrib Mengaji |
| | | | | 4 | Memberikan dukungan finansial untuk guru ngaji di masjid melalui fasilitas honor yang layak | 4 | Memfasilitasi honor guru ngaji pada Masjid yang membutuhkan |
| | | | | 5 | Mendorong pengembangan keilmuan keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan | 5 | Memfasilitasi Pengembangan Keilmuan Keagamaan |
| | | | | 1 | Mendorong pelestarian seni budaya tradisional | 1 | Revitalisasi seni dan budaya lokal sebagai identitas daerah |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal. | 2 | Meningkatkan event budaya daerah | 2 | Pengembangan kalender budaya berbasis kearifan lokal |
| **Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | |
| **7** | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan sosial | 1 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan Masyarakat | 1 | Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat | 1 | Menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang |
| | | | | | | 2 | Meningkatkan cakupan UHC |
| | | | | | | 3 | Melakukan Program bedah rumah masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu |
| | | | | | | 4 | Penguatan Program Bantuan Sosial |
| | | | | 2 | Meningkatkan kualitas pembangunan manusia | 1 | Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan bagi Perempuan |
| | | | | | | 2 | Peningkatan perlindungan perempuan dan anak |
| | | | | | | 3 | Penguatan Peran Pengarusutamaan Gender |
| | | | | | | 4 | Pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembangunan kependudukan |

Strategi yang dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan berperan penting dalam mempermudah proses perencanaan serta penentuan tahapan pembangunan secara terstruktur. Penyusunan tahapan ini dilakukan sebagai bentuk respons adaptif terhadap keterbatasan sumber daya, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, proses pencapaian tujuan yang membutuhkan langkah-langkah bertahap sebelum menghasilkan dampak yang signifikan menjadi landasan utama dalam merancang tahapan pembangunan.

Pada **Tahap I (2026)**, fokus utama pembangunan diarahkan pada penguatan pondasi awal yang kokoh sebagai dasar bagi keberlanjutan pembangunan lima tahunan. Upaya pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas, disertai pemulihan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Di tahap ini, dilakukan penyusunan regulasi pendukung, penguatan kapasitas kelembagaan, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase kota, penyediaan air bersih, serta sarana pendidikan dan layanan kesehatan. Di samping itu, ketahanan sosial mulai diperkuat dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan membangun kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai fondasi awal yang solid.

Memasuki **Tahap II (2027)**, pembangunan bergerak ke arah konsolidasi dan percepatan ekonomi daerah yang berorientasi pada potensi lokal. Sektor perdagangan, UMKM, dan perikanan menjadi tumpuan pertumbuhan, disertai dorongan terhadap inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Penguatan ekonomi ini dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, peningkatan mutu pendidikan, dan perluasan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif. Pada fase ini, hasil pembangunan mulai menunjukkan dampak yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada **Tahap III (2028)**, fokus diarahkan pada integrasi antar sektor pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Peningkatan konektivitas antarwilayah, pemerataan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar, serta penguatan kualitas lingkungan hidup menjadi pusat perhatian. Pemerintah kota memperkuat pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Nilai-nilai religiusitas, toleransi, dan harmoni sosial dijaga dan ditumbuhkembangkan sebagai karakter khas kehidupan masyarakat Kota Tanjungbalai.

**Tahap IV (2029)** menjadi fase penguatan daya saing kota dan konsolidasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Evaluasi dan penyempurnaan berbagai program serta kebijakan dilakukan guna memastikan keberlanjutan manfaatnya dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi didorong menuju efisiensi dan peningkatan produktivitas, sementara karakter masyarakat diperkuat melalui intervensi pendidikan, pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan. Kualitas infrastruktur dan layanan publik dijaga melalui sistem pemeliharaan yang baik, dan berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan terus dikembangkan demi memperkuat pelaya nan kepada masyarakat.

Kemudian, pada tahap **Tahap V (2030)**, seluruh upaya yang telah dilakukan sepanjang periode RPJMD mencapai titik kulminasinya dalam mewujudkan **Tanjungbalai yang Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera**. Pada fase ini, visi pembangunan kota terefleksi dari kehidupan masyarakat yang harmonis, ekonomi daerah yang tumbuh inklusif dan berdaya saing, pelayanan publik yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas tinggi. Kota Tanjungbalai menjadi rumah yang nyaman dan membanggakan bagi seluruh warganya.

**Tabel 3.9. Pentahapan Pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai**

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029 | TAHAP V (2030 |
|---|---|---|---|---|
| Penguatan fondasi pembangunan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas layanan dasar, dan pembangunan utilitas pendukung | Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas SDM berbasis potensi lokal dan inklusivitas | Pemerataan pembangunan antarwilayah dan integrasi program pembangunan lintas sektor secara berkelanjutan | Penguatan daya saing daerah melalui inovasi, kolaborasi, dan konsolidasi hasil pembangunan | **Mewujudkan Tanjungbalai yang Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera** |

### 3.2.3. Strategi dan Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Tanjungbalai

Bagian ini merupakan penjabaran teknokratis dari strategi pembangunan yang telah disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Setiap arah kebijakan dibentuk melalui proses identifikasi keterkaitan antar komponen perencanaan: mulai dari misi sebagai arah umum pembangunan, tujuan sebagai target capaian jangka menengah, hingga sasaran sebagai wujud konkret perubahan yang ingin dicapai. Strategi pembangunan menjadi penghubung antara sasaran dan arah kebijakan, dengan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk menjawab persoalan nyata di daerah.

Arah kebijakan tahunan disusun secara bertahap dalam beberapa fase pembangunan dari tahun 2025 hingga 2030. Setiap fase mencerminkan proses akumulatif dalam membangun daya saing dan kesejahteraan Kota Tanjungbalai secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, arah kebijakan dirancang agar responsif terhadap dinamika pembangunan tahunan, sekaligus menjaga kesinambungan pencapaian visi pembangunan jangka menengah. Setiap tahun memiliki progress yang berbeda dan saling melengkapi, dimulai dari pembenahan fondasi, konsolidasi ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, hingga penguatan daya saing dan pemantapan keberlanjutan.

Dengan pendekatan ini, arah kebijakan pembangunan tahunan bukan hanya merupakan instrumen teknis pelaksanaan program, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan senantiasa selaras dengan arah transformasi yang diharapkan. Melalui keterpaduan antara misi pembangunan dan arah kebijakan tahunan, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang adaptif, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah kebijakan pembangunan tahunan yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

## Tabel 3.10. Strategi dan Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Visi: Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera** | | | | | | | | | | | |
| **Misi 1: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik | 1 | Peningkatan kualitas kinerja ASN dengan berbasis pembangunan karakter | Memulai pembangunan sistem pembinaan ASN berbasis karakter, memperkuat pengawasan internal dengan audit menyeluruh, mengembangkan pedoman reward dan punishment, memperkuat forum konsultasi publik, membentuk koordinasi awal lintas sektor, serta merancang sistem layanan digital terpadu. Memulai pemungutan PAD secara non tunai melalui QRIS | Menerapkan program pembinaan ASN di instansi prioritas, menerapkan sistem reward–punishment awal berbasis SOP, mengaktifkan forum konsultasi publik tematik, mendorong sinergi lintas sektor melalui forum pembangunan, meluncurkan layanan digital dasar untuk pelayanan publik esensial, menerapkan pemungutan PAD secara non tunai melalui QRIS | Memperluas cakupan pembinaan ASN ke seluruh OPD, meningkatkan akuntabilitas pengawasan internal, menyelenggarakan forum konsultasi publik hingga tingkat kelurahan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta mengembangkan jenis layanan publik dalam sistem digital terintegrasi, dan memperluas pemungutan PAD secara non tunai melalui QRIS | Meningkatkan kualitas pembinaan ASN melalui pelatihan kompetensi, memperkuat sistem evaluasi kinerja berbasis penghargaan dan sanksi, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, mengembangkan forum lintas sektor berkelanjutan, serta mengembangkan fitur interaktif dalam layanan digital publik | Mengoptimalkan budaya kerja ASN berbasis integritas, menyempurnakan sistem pengawasan berbasis teknologi, memperluas partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan, memperkuat ekosistem kolaboratif lintas sektor, serta mengintegrasikan layanan digital. | Memantapkan sistem pembinaan ASN sebagai standar kerja daerah, mengintegrasikan pengawasan dan pelaporan dalam sistem digital, menjadikan forum publik sebagai sarana utama aspirasi dan perencanaan, memperluas kolaborasi hingga tingkat nasional, serta mewujudkan layanan publik digital yang inklusif dan peningkatan PAD berkelanjutan. |
| | | | | 2 | Membangun jejaring sinergis antar sektor melalui forum komunikasi pembangunan | | | | | | |
| | | | | 3 | Meningkatkan pelayanan publik yang ramah dan mudah diakses masyarakat | | | | | | |
| | | | | 4 | Penigkatan kapasitas dan kemaandirian fiskal | | | | | | |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman | 1 | Meningkatnya pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih berkelanjutan | 1 | Melakukan pembenahan dan penataan kota | Memulai penataan kawasan kota, membentuk kelompok masyarakat peduli lingkungan, memperkenalkan sistem pemilahan sampah rumah tangga secara bertahap, menata ulang ruang terbuka publik prioritas, dan mengidentifikasi fasilitas layanan publik yang perlu revitalisasi. | Memperluas penataan kawasan permukiman dan fasilitas umum, mengaktifkan partisipasi masyarakat melalui program lingkungan berbasis wilayah, membangun fasilitas daur ulang sederhana di kawasan padat penduduk, mengembangkan ruang publik fungsional di pusat aktivitas warga, dan memulai revitalisasi fasilitas layanan dasar. | Mengintegrasikan pendekatan ekologi dalam penataan ruang kota, memperkuat kolaborasi dalam program kebersihan lingkungan, memperluas edukasi dan insentif pemilahan sampah, menata pedestrian dan taman kota secara inklusif, serta membangun fasilitas layanan publik baru di wilayah yang belum terjangkau. | Meningkatkan kualitas estetika kota melalui konsep taman tematik dan jalur hijau, menjadikan kelompok masyarakat sebagai mitra aktif dalam pemeliharaan lingkungan, membangun bank sampah di tiap kecamatan, menyempurnakan ruang publik agar inklusif dan multifungsi, serta mempercepat penyelesaian revitalisasi sarana pelayanan publik strategis. | Mewujudkan kota yang bersih berbasis pengelolaan lingkungan terintegrasi, memperluas inovasi komunitas dalam pengelolaan sampah dan lingkungan, mendorong pemanfaatan limbah sebagai sumber ekonomi lokal, mengembangkan ruang terbuka hijau dengan pendekatan adaptif, dan meningkatkan standar layanan fasilitas publik. | Memantapkan identitas kota yang tertata, bersih, dan nyaman secara menyeluruh, menjadikan peran masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan lingkungan berkelanjutan, mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi, memperluas ruang publik tematik yang inklusif, serta memastikan seluruh layanan publik berada dalam kondisi layak dan representatif. |
| | | | | 2 | Pengelolaan lingkungan permukiman berbasis partisipatif | | | | | | |
| | | | | 3 | Meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan | | | | | | |
| | | 2 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan publik | 1 | Penyediaan sarana dan prasarana kota yang mendukung keteraturan dan kenyamanan | | | | | | |
| | | | | 2 | Meningkatkan kualitas fasilitas umum berbasis kebutuhan Masyarakat | | | | | | |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Misi 2: Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Menciptakan SDM unggul | 1 | Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM | 1 | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dari dasar hingga menengah | Memulai program beasiswa dari keluarga tidak mampu dan berprestasi, memperkuat penyediaan makanan bergizi bagi siswa melalui kolaborasi dengan sekolah dan posyandu, menjalin kemitraan awal dengan perguruan tinggi unggulan, Memulai intervensi gizi untuk balita dan ibu hamil di wilayah rentan stunting, memetakan kondisi sarana dan prasarana layanan kesehatan dasar, menambah tenaga medis di fasilitas | Meningkatkan jumlah penerima beasiswa dan memperluas cakupan wilayah, Melanjutkan program peningkatan gizi anak melalui distribusi makanan tambahan bergizi di sekolah dan posyandu, mulai mengirim siswa berprestasi ke perguruan tinggi ternama, melakukan rehabilitasi sarana kesehatan prioritas, memperkuat distribusi tenaga medis secara merata, melakukan edukasi dan sosialisasi untuk | Meningkatkan kualitas seleksi dan pendampingan siswa penerima beasiswa, memperkuat program gizi anak sekolah melalui kerja sama lintas sektor, menjalin kerjasama pendanaan beasiswa lanjutan, memperbarui alat kesehatan di beberapa puskesmas, menyusun skema insentif tenaga medis di wilayah terpencil, peningkatan layanan rujukan ODGJ, serta memulai pendekatan | Menstandarkan pemberian beasiswa berbasis prestasi dan ekonomi secara digital dan transparan, memperluas cakupan makanan bergizi gratis di sekolah, memperluas akses beasiswa kuliah ke PTN berkualitas, menuntaskan pembenahan fasilitas kesehatan rujukan, memperkuat pelatihan rutin tenaga medis, penguatan kebijakan penanganan ODGJ dan menyinergikan peran sekolah dan keluarga dalam | Mendorong alumni penerima beasiswa untuk menjadi inspirasi dan mentor bagi adik tingkatnya, membentuk jejaring alumni Tanjungbalai di perguruan tinggi unggulan, memelihara dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang telah dibenahi, memperluas rekrutmen tenaga medis sesuai kebutuhan spesifik wilayah, serta memperluas cakupan edukasi gizi dan pola hidup sehat pada keluarga muda. | Menetapkan skema beasiswa sebagai program unggulan dan berkelanjutan daerah, memantapkan program gizi sekolah, memastikan seluruh sarana kesehatan dalam kondisi baik dan tenaga medis tercukupi, serta membudayakan pola hidup sehat di tingkat keluarga sebagai fondasi pembangunan SDM unggul. |
| | | | | 2 | Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis potensi daerah | | | | | | |
| | | 2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 | Meningkatkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas | | | | | | |
| | | | | 2 | Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan rujukan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan medik yang memadai | | | | | | |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | 3 | Meningkatkan promosi pola hidup sehat | yang kekurangan, khususnya penanganan ODGJ, dan menggalakkan kampanye promosi hidup sehat bebas narkoba melalui peran keluarga dan sekolah. | penanganan ODGJ serta mengembangkan, melakukan tes narkoba untuk ASN serta modul promosi kesehatan berbasis komunitas dan keluarga. | preventif berbasis keluarga. | promosi kesehatan preventif | | |
| 4 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir | 1 | Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah | 1 | Meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana publik | Memulai pembangunan infrastruktur jalan dan sarana publik, meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas pelabuhan, merancang dan memulai pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi, menerapkan | Melanjutkan pembangunan jalan dan sarana publik di wilayah-wilayah yang membutuhkan, mempercepat pembangunan fasilitas pelabuhan, melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi, | Menyelesaikan pengembangan jalan dan sarana publik untuk konektivitas wilayah, mempercepat peningkatan kapasitas pelabuhan, memperluas jaringan transportasi publik yang terintegrasi, | Mengoptimalkan infrastruktur jalan dan sarana publik dalam menghubungkan area-area vital perekonomian, menyelesaikan pembangunan fasilitas pelabuhan, menyelesaikan pembangunan jaringan transportasi publik | Melakukan perbaikan dan penyempurnaan jalan-jalan utama yang menghubungkan antar kawasan, melakukan evaluasi dan optimalisasi fasilitas pelabuhan, memperluas sistem | Menyelesaikan pembangunan jalan dan sarana publik yang menghubungkan seluruh wilayah, memastikan fasilitas pelabuhan berfungsi maksimal dalam mendukung perdagangan, mengintegrasikan |
| | | | | 2 | Meningkatkan fasilitas Pelabuhan | | | | | | |
| | | | | 3 | Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi | | | | | | |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 2 | Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir | 1 | Mengelola sampah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan | pengelolaan sampah berbasis lingkungan, dan melakukan evaluasi awal terhadap sistem drainase. | meningkatkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, serta memulai pembangunan saluran drainase tambahan untuk mengatasi potensi banjir di beberapa wilayah kritis. | menerapkan program daur ulang sampah yang lebih efektif, dan memperluas sistem drainase untuk mencegah banjir di titik-titik rawan dengan pemeliharaan rutin. | yang lebih luas dan terintegrasi, mengembangkan teknologi dalam pengelolaan sampah, serta melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi dampak banjir dan memastikan pengelolaan air yang efisien. | transportasi publik yang terintegrasi dengan infrastruktur lain, memperkuat sistem pengelolaan sampah dengan pendekatan ramah lingkungan yang lebih menyeluruh, serta memperbaiki dan memperluas jaringan drainase untuk mengatasi risiko banjir di wilayah yang rentan. | sistem transportasi publik secara penuh dengan wilayah-wilayah sekitar, memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan ramah lingkungan, serta memastikan seluruh wilayah telah memiliki sistem drainase yang efektif dalam mencegah banjir. |
| | | | | 2 | Meningkatkan sistem drainase untuk mencegah banjir dan memperbaiki pengelolaan air | | | | | | |
| 5 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | 1 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | 1 | Menyediakan kemudahan dan rasa aman bagi pelaku usaha | Memulai program kemudahan perizinan dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha, menyusun dan | Melanjutkan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dengan fokus pada sektor-sektor | Mengembangkan kemudahan akses perizinan dan fasilitas untuk pelaku usaha baru dan yang sudah | Mengoptimalkan sistem perizinan dan fasilitas kemudahan berusaha, memperluas | Menjamin keberlanjutan kemudahan perizinan dan sistem fasilitas bagi pelaku | Memastikan kemudahan perizinan dan dukungan penuh bagi pelaku usaha melalui |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | 2 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan yang relevan | melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, memperkenalkan program kolaborasi antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat, memulai program peningkatan kapasitas UMKM, serta mengidentifikasi sektor-sektor perdagangan dan industri yang memiliki potensi besar untuk diperkuat. | strategis, memperluas pelatihan keterampilan berbasis teknologi untuk sumber daya manusia, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, mengembangkan program pendampingan dan akses pasar untuk UMKM, serta memperkuat sektor pariwisata, perdagangan, dan industri produktif perikanan dengan mendorong investasi di sektor-sektor potensial. | berkembang, mengembangkan program sertifikasi keterampilan, memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mendukung inovasi dalam bisnis, memperkenalkan model pengembangan UMKM berbasis teknologi untuk produktivitas, dan mendorong pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan industri perikanan yang berkelanjutan serta berbasis | pelatihan keterampilan berbasis industri yang relevan, memperkuat ekosistem bisnis melalui riset dan pengembangan produk baru, meningkatkan kapasitas UMKM, serta memperkuat sektor pariwisata, perdagangan dan industri perikanan melalui peningkatan kualitas produk dan akses ke pasar internasional. | usaha, mengembangkan pelatihan lanjutan bagi tenaga kerja, melanjutkan penguatan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis, memperluas program pengembangan kapasitas UMKM, serta mengoptimalkan sektor pariwisata, perdagangan dan industri perikanan dengan memperkenalkan teknologi baru dan membuka peluang ekspor. | kebijakan yang ramah investasi, mengembangkan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar yang lebih luas, memastikan kolaborasi yang lebih kuat antar pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan inovasi berkelanjutan, menjadikan UMKM sebagai sektor utama dalam ekonomi digital dengan pembiayaan dan dukungan yang lebih mudah, serta |
| | | | | 3 | Mendorong kolaborasi antar pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan terintegrasi | | | | | | |
| | | 2 | Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya | 1 | Memperkuat sektor perdagangan dan industri produktif lainnya | | | | | | |
| | | | | 2 | Pengembangan sektor pariwisata | | | | | | |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | 3 | Pengembangan sektor perikanan | | | pada prinsip ekonomi hijau. | | | memperkuat sektor pariwisata, perdagangan dan industri perikanan produktif melalui pengembangan kapasitas dan perluasan pasar global. |
| **Misi 3: Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearian Lokal dan Toleransi antar Umat Beragama** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia | 1 | Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama. | 1 | Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, inklusif, dan menjunjung tinggi toleransi | Memulai fasilitasi kegiatan keagamaan lintas umat beragama, mendukung rutinitas pengajian masyarakat melalui penyediaan ruang ibadah yang layak, mulai menyalurkan honor insentif bagi guru ngaji di masjid, menyelenggarakan pelatihan dasar keagamaan untuk | Memperluas program fasilitasi kegiatan keagamaan untuk berbagai komunitas dengan prinsip inklusivitas, memperkuat budaya mengaji, meningkatkan jumlah guru ngaji penerima honor secara bertahap, menyelenggarakan pelatihan lanjutan keilmuan keagamaan bagi | Meningkatkan kualitas layanan antarumat beragama, mendorong pembudayaan mengaji sejak usia dini melalui kemitraan dengan sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dengan mekanisme insentif berbasis kinerja, memperluas | Memperkuat sistem koordinasi antar tokoh lintas agama, menjadikan kegiatan mengaji sebagai bagian dari program komunitas berbasis keluarga dan lingkungan, memperluas dukungan insentif untuk guru ngaji di daerah terpencil, menyelenggarakan pelatihan metodologi pengajaran agama | Meneguhkan toleransi beragama, menjadikan program mengaji sebagai bagian dari penguatan karakter masyarakat, meningkatkan penghargaan dan insentif bagi guru ngaji yang berdedikasi tinggi, mendorong kajian keagamaan | Memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang religius dan toleran melalui forum dialog antaragama, mengintegrasikan program mengaji dalam gerakan keluarga berbasis nilai, menstabilkan dukungan finansial dan jaminan sosial |
| | | | | 2 | Mendukung keberagaman melalui fasilitasi kegiatan keagamaan | | | | | | |
| | | | | 3 | Mendorong kebiasaan mengaji sebagai bagian dari budaya masyarakat | | | | | | |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | 4 | Memberikan dukungan finansial untuk guru ngaji di masjid melalui fasilitas honor yang layak | kalangan remaja, serta menggelar event seni budaya tradisional tingkat kota sebagai langkah awal pelestarian warisan lokal. | pemuda dan pengajar, serta mulai melibatkan komunitas budaya dalam penyelenggaraan event budaya tahunan untuk memperkuat identitas lokal. | cakupan pendidikan keagamaan berbasis komunitas, dan mengembangkan event budaya daerah yang menampilkan kekayaan seni tradisional Tanjungbalai secara lebih inklusif. | yang kontekstual, serta menambah ruang kreatif seni dan budaya tradisional sebagai bagian dari revitalisasi identitas lokal. | tematik yang sesuai dengan isu sosial masyarakat, serta menyelenggarakan festival budaya lokal secara berkala dengan melibatkan generasi muda. | bagi guru ngaji, memperkuat jejaring pendidikan keagamaan dan pelatihan spiritual berbasis komunitas, serta mengokohkan agenda budaya daerah sebagai agenda utama pembangunan karakter berbasis tradisi dan harmoni sosial. |
| | | | | 5 | Mendorong pengembangan keilmuan keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan | | | | | | |
| | | 2 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal. | 1 | Mendorong pelestarian seni budaya tradisional | | | | | | |
| | | | | 2 | Meningkatkan event budaya daerah | | | | | | |
| **Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan sosial | 1 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan Masyarakat | 1 | Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat | Menyusun peta kebutuhan dasar masyarakat miskin, mendata dan memulai rehabilitasi rumah tidak layak huni | Mulai mengintegrasikan pendekatan ekonomi inklusif dalam program pemberdayaan keluarga miskin, | Mengintensifkan kampanye kesadaran gizi keluarga berbasis kader kesehatan, mendorong pengembangan | Memperluas cakupan program pemantauan status gizi anak melalui sistem digital, menghubungkan pertumbuhan | Memperkuat intervensi ekonomi berbasis pemenuhan nutrisi dan hunian layak, mempercepat | Menjamin keberlanjutan layanan gizi dan kesehatan anak, memperkuat peran pelaku ekonomi lokal |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | 2 | Meningkatkan kualitas pembangunan manusia | bagi keluarga kurang mampu,, meningkatkan layanan kesehatan dasar, memperluas akses air bersih melalui pembangunan sarana air minum di wilayah rawan. | mempercepat pembangunan rumah layak huni berbasis komunitas, memperluas program gizi seimbang, memperkuat sistem rujukan kesehatan bagi kelompok rentan, menambah cakupan jaringan distribusi air bersih ke permukiman padat dan pesisir serta penguatan kebijakan PUG | ekonomi lokal berbasis kebutuhan dasar, meningkatkan kuantitas dan kualitas hunian yang dibangun, memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, memperbaiki kualitas air bersih dengan penyediaan sistem filtrasi dan jaringan perpipaan yang efisien, peningkatan kapasitas SDM PUG | ekonomi lokal dengan pengembangan pasar kebutuhan dasar, meningkatkan akses rumah layak huni, memperkuat layanan kesehatan primer di daerah pesisir dan terpencil, memperluas penyediaan air bersih dengan pendekatan pengelolaan partisipatif masyarakat serta penerapan data terpilah PUG | penyaluran bantuan pembangunan rumah, memperkuat kampanye gizi seimbang, menambah tenaga medis di fasilitas layanan daerah terpencil, serta memperluas cakupan air bersih dengan fokus pada daerah yang masih menggunakan sumber tidak layak serta pengoptimalan data terpilah PUG | dalam distribusi kebutuhan dasar, memastikan terpenuhinya hunian layak bagi keluarga miskin dengan pendekatan terpadu, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dan memperkuat pengelolaan air bersih berbasis komunitas untuk keberlanjutan pasokan dan kualitas layanan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG |

### 3.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kota Tanjungbalai

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan bertujuan untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah, dengan fokus pada pemanfaatan potensi lokal, peningkatan konektivitas, dan pemerataan pelayanan dasar. Kebijakan ini juga menekankan pada peningkatan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### 3.2.4.1 Sistem Penyediaan Air Minum

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih, PDAM membangun jaringan air bersih yang diarahkan terutama memenuhi kebutuhan di tengah kota. Pertimbangan yang dilakukan yakni banyaknya jumlah permukiman yang perlu dilayani di tengah kota.

Sumber pengolahan penyediaan air minum Kota Tanjungbalai hingga saat ini berasal dari WTP yang berada di Jl. M.p Abbas Ujung, Beting Semelur (N $2^0$57'58.1" E $99^0$47'42.8") dari aliran anak sungai Bandar Jepang ke sungai Silau, maka untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap ketersediaan air bersih, direncanakan pengembangan jaringan instalasi pengelolaan air minum (IPA) 7 di Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur dengan kapasitas debit air 50 liter/detik, melayani Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Selat Tanjung Medan, dan Kelurahan Semula Jadi.

#### 3.2.4.2 Sistem Jaringan Persampahan

Konsep dasar pengembangan sistem persampahan diarahkan kepada Mengembangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem *open dumping* menjadi sistem *sanitary landfill*. Kebijakan pemerintah pusat mendorong penggunaan metode *Sanitary Landfill* (TPA yang dikelola secara sanitasi) untuk pengelolaan sampah bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan dan memaksimalkan nilai ekonomis sampah.

Pola penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan mulai dari TPS hingga TPA, melalui *incinerator, sanitary landfill* maupun metode komposting. Untuk menampung sampah di Kota Tanjungbalai, telah direncanakan pemindahan lokasi TPA di SPPK 1 seluas 4 Ha dan berada di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar yang lokasinya tidak jauh dari TPA saat ini. Untuk melayani persampahan maka di Kota Tanjungbalai maka pada tahun 2026 mulai dicanangkan pembangunan TPST 1 di Kelurahan Sungai Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso. TPST ini akan dioperasikan berdasarkan permintaan dan rencana sampai pada tahun 2030, wilayah pengangkutan sampah meliputi:

1. Wilayah 1, meliputi Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kelurahan Karya, Kelurahan Perwira, Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Pantai Burung, Kelurahan Mata Halasan, Kelurahan Kuala Silo Bestari, dan Kelurahan Sejahtera;
2. Wilayah 2, meliputi Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Sirantau, dan Kelurahan Pantai Johor;
3. Wilayah 3, meliputi Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Selat Lancang, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Semula Jadi, dan Kelurahan Pulau Simardan;
4. Wilayah 4, meliputi Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Keramat Kubah, Kelurahan Sumber Sari, Kelurahan Muara Sentosa, dan Kelurahan Sei Raja; dan
5. Wilayah 5, meliputi Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Pematang Pasir dan Kelurahan Perjuangan.

### 3.2.4.2 Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Salah satu potensi yang dimiliki Kota Tanjungbalai adalah pada sektor perikanan karena dapat menghasilkan 200 ton per hari dari hasil tangkapan ikan. Untuk mendukung para nelayan dan peningkatan PAD maka diperlukan penyediaan sarana dan prasarana perikanan, salah satunya Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan merupakan sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh kegiatan perikanan, mulai dari tempat kapal bersandar, berlabuh, bongkar muat hasil tangkapan, hingga aktivitas pasca-penangkapan seperti pelelangan ikan (mewadahi transaksi antara nelayan dan pengusaha/pembeli ikan) dan distribusi, serta pelayanan bagi nelayan dan industri perikanan secara keseluruhan. Melalui Pelabuhan Perikanan, dinas teknis dapat mengontrol kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan sumber daya ikan, pengawasan operasional kapal perikanan, serta fasilitasi proses produksi dan pemasaran hasil perikanan. Dinas juga dapat mengawasi kebersihan, keamanan, dan keselamatan kerja di lingkungan

pelabuhan, serta pengelolaan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan perikanan.

Pada saat ini hanya ada TPI yang tersedia adalah Pusat Pelelangan Ikan Terpadu yang terletak di Kabupaten Asahan. Dalam waktu lima tahun ke depan Kota Tanjungbalai direncanakan akan membangun Pelabuhan Perikanan di wilayah Kota Tanjungbalai. Rencana lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan berada di Kecamatan Teluk Nibung, tepatnya berada di Kelurahan Beting Kuala Kapias yang berada di pinggir sungai Asahan sebagai penghubung ke Selat Malaka. Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan direncanakan berada pada lahan ex PT. Timur Jaya. Proses pembangunan Pelabuhan Perikanan tersebut akan dimulai dengan pembelian lahan dari PT. Timur Jaya. Hal ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Alternatif lain lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan adalah berada pada Pulau Buaya yang memiliki luas ± 30 ha. Pulau ini berada di tengah Sei Asahan yang berada pada wilayah kota Tanjungbalai.

Keunggulan lokasi rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan tersebut adalah berada dipinggir sungai Asahan yang terhubung dengan laut Selat Malaka. Akses jalan utama sangat baik, sehingga masyarakat nelayan yang akan menuju Pelabuhan Perikanan dapat dengan mudah. Juga berada pada lokasi permukiman yang memiliki fasilitas umum seperti Mesjid dan Musholla, Puskesmas Pembantu serta adanya lapangan olah raga di sekitar lokasi rencana Pelabuhan Perikanan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang direncanakan, dapat dilihat peta dan gambar-gambar berikut ini.

**Gambar 3.1**
**Rencana Pelabuhan Perikanan**

### 3.2.5. Program Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai

RPJMD Kota Tanjungbalai 2025–2029 dirancang untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai program prioritas yang berfokus pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi. Setiap program tersebut disusun dengan tujuan untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi kota ini, serta meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Misi utama RPJMD ini melibatkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, memajukan bidang pendidikan dan kesehatan, memperkuat perekonomian berbasis jasa dan perdagangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Keempat misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungbalai menjadi pedoman bagi semua program yang akan dijalankan. Misi pertama berfokus pada tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berprestasi, serta kota yang humanis, sementara misi kedua mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian. Misi ketiga mengedepankan nilai-nilai agama, budaya lokal, serta toleransi antar umat beragama, sedangkan misi keempat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan dasar yang layak. Program-program yang ada berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan-tujuan ini, dengan fokus pada perbaikan kualitas hidup warga kota.

**Tabel 3.11. Program Prioritas RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029**

| Tujuan | | Sasaran | | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Visi: Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera** | | | | | | |
| **Misi 1: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis** | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Indeks Reformasi dan Birokrasi | | | | |
| | | 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik | Meningkatnya kualitas kinerja ASN | Indeks Reformasi Hukum | ASN Berkualitas dan Berintegritas |
| | | | | | AKIP | |
| | | | | Meningkatnya efektivitas tata Kelola | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Regulasi Adaptif dan Partisipatif |

| Tujuan | | Sasaran | | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Opini BPK | |
| 2 | Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | |
| | | 1 | Meningkatnya pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih berkelanjutan | Meningkatnya kapasitas air bersih | Kapasitas produksi air bersih (ltr/detik) | Penyediaan air bersih |
| | | | | Meningkatnya akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang aman dan layak | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak | Sanitasi yang layak |
| | | | | Meningkatnya ketersediaan air bersih yang merata | Kapasitas produksi air bersih | Penyediaan Akses Air Bersih untuk Seluruh Masyarakat (AIR SEHAT) |
| | | | | Terkendalinya sampah | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | Sampah perkotaan |
| | | 2 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan publik | Meningkatnya rasa aman dan nyaman warga | Rasa aman berjalan sendirian di malam hari | Penataan Kota yang Nyaman dan Inklusif |
| | | | | Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan public | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik | Pemenuhan sarana dan prasarana serta digitalisasi dan Pelayanan Publik |
| | | | | Meningkatnya mutu layanan kesehatan di rumah sakit | kepuasan pasien terhadap layanan dan fasilitas rumah sakit | Revitalisasi Rumah Sakit |

| Tujuan | | Sasaran | | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meningkatnya pemanfaatan sarana olahraga oleh masyarakat dan atlet | kepuasan pengguna atas fasilitas gedung olahraga | Reviltalisasi Gedung Olahraga |
| | | | | Meningkatnya kualitas dan kapasitas sarana prasarana terminal | Tingkat kepuasan pengguna terhadap fasilitas dan layanan terminal | Revitaliasi Terminal Terpadu KM 7 Sijambi |
| | | | | Meningkatnya mutu layanan kesehatan dasar Masyarakat | cakupan pelayanan imunisasi, serta ibu dan anak | Peningkatan fasilitas puskesmas |
| **Misi 2: Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan** | | | | | | |
| 3 | Menciptakan SDM unggul | Indeks Pembangunan Manusia | | | | |
| | | 1 | Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas | Persentase Lulusan pendidikan menengah tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR) |
| | | | | Meningkatnya efektivitas proses belajar-mengajar | Harapan Lama Sekolah | Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP |
| | | | | Meningkatnya kualitas gizi masyarakat | Persentase penurunan angka stunting pada anak | Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil |
| | | | | Meningkatnya akses dan keterjangkauan pendidikan dasar dan menengah | Rata-rata Lama Sekolah | Pendidikan gratis 12 +1 tahun |

| Tujuan | | Sasaran | | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh | Usia Harapan Hidup (UHH) | Kesehatan Prima dan Merata |
| | | | | Meningkatnya deteksi dini penyakit, serta menurunnya kasus TBC dan penyakit menular lainnya | Cakupan penemuan dan pengobatan pada tuberkulosis (%) | Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC |
| | | | | | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) | |
| | | | | Meningkatkny a gizi ibu dan bayi serta | Prevalensi stunting | Generasi Sehat dan Bebas Stunting |
| | | | | Meningkatnya ketersediaan tenaga medis di fasilitas Kesehatan | Rasio tenaga medis per 1000 penduduk | Ketersediaan tenaga medis yang cukup |
| 4 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir | Indeks Daya Saing Daerah | | | | |
| | | 1 | Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah | Menurunnya biaya logistik dan transportasi | Ekspor barang dan jasa (% PDRB) | Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing |
| | | | | Menguatnya aksesibilitas, kualitas sanitasi dan menurunnya risiko banjir | Indeks infrastruktur | Melanjutkan penyediaan infrastruktur jalan, sanitasi dan drainase |
| | | | | Meningkatnya kualitas jalan | Tingkat Kemantapan Jalan | Perbaikan infrastruktur jalan |
| | | 2 | Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir | Meningkatnya kebersihan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Indeks risiko bencana (IRB) | Kota Bersih dan Tangguh Bencana |
| | | | | Menurunnya titik rawan banjir | Persentase Drainase dalam kondisi Baik | Perbaikan drainase titik rawan banjir |

| Tujuan | | Sasaran | | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meningkatnya efektivitas pengelolaan sampah | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | Sampah perkotaan |
| 5 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan ekonomi | | | | |
| | | 1 | Meningkatnya pendapatan Masyarakat | Meningkatnya omset UMKM | Kontribusi PDRB Kota | Ekonomi Mandiri dan UMKM Naik Kelas (EKOMAS) |
| | | | | Meningkatnya produktivitas serta daya beli nelayan dan UMKM | Pengeluaran per kapita | Melanjutkan Program Bantuan Nelayan dan UMKM untuk menghilangkan kemiskinan absolut |
| | | 2 | Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya | Meningkatnya pendapatan nelayan | Kontribusi Sektor perikanan | Meningkatkan kesejahteraan nelayan |
| | | | | Meningkatnya pendapatan UMKM dan industri kecil | Kontribusi PDB Industri Pengolahan | Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil |
| | | | | | Kontribusi PDRB Sektor Jasa dan Perdagangan | |
| **Misi 3: Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearian Lokal dan Toleransi antar Umat Beragama** | | | | | | |
| 6 | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial | Jumlah konflik sosial yang berkaitan dengan isu keagamaan | | | | |
| | | 1 | Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama | Menguatnya integritas warga | Jumlah kejahatan/pelangggaran yang terjadi | Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman |
| | | | | Meningkatnya kualitas moral dan etika individu | Indeks Demoktrasi Indonesia | Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan dan Sosial |
| | | | | | Indeks pembangunan kualitas keluarga (IKUB) | |
| | | 2 | Meningkatnya pelestarian | Terciptanya masyarakat | Kota peduli HAM | |

| Tujuan | | Sasaran | | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan pengembangan budaya serta tradisi lokal. | yang saling menghargai dan menguatnya nilai tambah budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya |
| **Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | |
| 7 | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan sosial | Tingkat Kemiskinan | | | | |
| | | 1 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan Masyarakat | Menguatnya ketahanan pangan | Indeks Ketahanan Pangan Daerah | Menjamin ketersediaan Pangan |
| | | | | Meningkatnya pendapatan diikuti pemerataannya | Rasio gini | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat |
| | | | | | PDRB per kapita | |
| | | | | Meningkatnya kualitas rumah masyarakat kurang mampu | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah |

Berikut adalah penjabaran rinci dari program prioritas dan keterkaitannya dengan pencapaian misi Kota Tanjungbalai 2025-2029:

**1. ASN Berkualitas dan Berintegritas**

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tanjungbalai memiliki tingkat profesionalitas dan integritas yang kuat dalam menjalankan tugas mereka. Keterkaitannya dengan misi pertama yaitu untuk membangun tata kelola pemerintahan yang elok, transparan, dan akuntabel. ASN yang profesional dan jujur akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang efektif serta efisien. Keberhasilan program ini akan membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

**2. Regulasi Adaptif dan Partisipatif**

Program ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman, adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam menyuarakan pendapat serta dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini

terkait erat dengan misi pertama yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan inklusif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi, program ini tidak hanya menciptakan kebijakan yang lebih relevan, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Regulasi yang adaptif dan partisipatif akan memudahkan perbaikan sistem birokrasi dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih transparan dan progresif.

3. **Digitalisasi Pelayanan Publik**
   Digitalisasi Pelayanan Publik bertujuan untuk mengembangkan sistem digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program ini sangat terkait dengan misi pertama mengenai tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Dengan menggunakan teknologi digital, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mengurangi potensi korupsi. Inovasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga membuka peluang untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelayanan.
4. **Penataan Kota yang Nyaman dan Inklusif**
   Program penataan kota yang nyaman dan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh semua warga, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Program ini sangat berkaitan dengan misi pertama yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang humanis. Dengan memperhatikan elemen-elemen seperti ruang terbuka hijau, fasilitas publik yang ramah difabel, dan perencanaan kota yang berkelanjutan, program ini akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat. Penataan kota yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis, serta mendorong kegiatan ekonomi yang lebih dinamis.

5. **Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)**
   Program Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR) bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala oleh lokasi atau latar belakang ekonomi. Dengan menciptakan sistem pendidikan yang merata dan unggul, program ini mendukung misi kedua yang berfokus pada kemajuan di bidang pendidikan dan pembangunan. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui program ini, diharapkan anak-anak di semua lapisan masyarakat dapat berkembang dengan baik, membuka peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

6. **Kesehatan Prima dan Merata**
   Program Kesehatan Prima dan Merata bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa

memandang status sosial atau lokasi geografis. Program ini terhubung langsung dengan misi kedua, yakni memajukan bidang kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan yang merata akan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dengan pemerataan layanan kesehatan, program ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan kesehatan antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**7. Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing**

Program Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang dapat mendukung perekonomian berbasis jasa dan perdagangan. Terhubung dengan misi kedua, program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kokoh dan aman, tetapi juga ramah lingkungan dan dapat bersaing di tingkat global. Infrastruktur yang berkualitas akan membuka aksesibilitas yang lebih baik, tanggap bencana, serta meningkatkan efisiensi transportasi dan distribusi barang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing daerah di pasar nasional maupun internasional.

**8. Ekonomi Mandiri dan UMKM Naik Kelas (EKOMAS)**

Program Ekonomi Mandiri dan UMKM Naik Kelas bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan menyediakan fasilitas, pelatihan, dan dukungan finansial yang tepat. Ini sejalan dengan misi kedua, yang menekankan pada pengembangan perekonomian berbasis jasa dan perdagangan. UMKM yang berkembang akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan menguatkan sektor UMKM, program ini berkontribusi langsung pada pemerataan ekonomi dan kemandirian ekonomi daerah.

**9. Kota Bersih dan Tangguh Bencana**

Program ini bertujuan untuk menciptakan kota yang bersih, sehat, dan siap menghadapi risiko bencana. Keterkaitannya dengan misi kedua yaitu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan kesiapan dalam menghadapi bencana, program ini akan mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari bencana alam, serta meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim.

**10. Harmoni Dalam Keberagaman**

Program Harmoni Dalam Keberagaman bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan toleransi antar umat beragama serta memperkuat nilai-nilai budaya lokal. Terhubung dengan misi ketiga yang berfokus pada masyarakat yang agamais dan harmonis, program ini berperan dalam menciptakan masyarakat yang saling menghargai perbedaan dan bekerja sama demi kemajuan bersama. Dalam

masyarakat yang plural, memperkuat nilai keberagaman menjadi langkah penting untuk menjaga kedamaian dan mencegah konflik.

**11. Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman**

Program ini bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya terdidik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan kedalaman spiritual. Keterkaitannya dengan misi ketiga adalah untuk menciptakan masyarakat yang berbudi luhur, memiliki etika yang tinggi, dan menjunjung tinggi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Generasi yang berilmu, berakhlak, dan beriman akan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berperadaban tinggi.

**12. Generasi Sehat dan Bebas Stunting**

Program ini berfokus pada upaya pencegahan stunting dan peningkatan gizi anak-anak, dengan tujuan untuk memastikan setiap generasi tumbuh sehat dan produktif. Terkait dengan misi keempat yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, program ini akan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada tahap awal kehidupan yang sangat menentukan masa depan mereka. Generasi yang sehat dan bebas stunting akan menjadi tenaga kerja yang lebih produktif dan berkualitas.

**13. Penyediaan Akses Air Bersih untuk Seluruh Masyarakat (AIR SEHAT)**

Penyediaan akses air bersih adalah program yang vital untuk menciptakan kehidupan yang sehat bagi seluruh masyarakat. Terhubung dengan misi keempat, program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap air bersih yang cukup dan berkualitas, yang merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk kesehatan. Air bersih yang terjamin akan mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

**14. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai inisiatif yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan. Keterkaitannya dengan misi keempat sangat jelas, yaitu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Program ini akan mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

**15. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Program ini bertujuan untuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memastikan bahwa mereka dapat hidup di lingkungan yang sehat dan aman. Terhubung dengan misi keempat, program ini mendukung

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam aspek tempat tinggal. Penyediaan rumah yang layak akan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan rasa aman bagi keluarga, serta membantu mencegah masalah sosial seperti pemukiman kumuh, pengungsian maupun kemiskinan ekstrem.

Setiap program prioritas saling terhubung untuk pencapaian misi Kota Tanjungbalai, dalam membangun kota yang elok, maju, agamais, dan sejahtera. Secara keseluruhan, program-program tersebut dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berprestasi, sembari memastikan pemerataan pembangunan di seluruh sektor kehidupan. Dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, serta kesejahteraan sosial, setiap program memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi Kota. Penerapan program-program ini tidak hanya akan memperkuat tata kelola pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga memajukan kota ini menuju kemajuan yang berkelanjutan, di mana keberagaman, kesejahteraan, dan ketahanan sosial menjadi fondasi utama dalam pembangunan yang holistik.

Fokus prioritas misi yang telah diuraikan di atas selanjutnya dijabarkan dalam penahapan pelaksanaan sebagaimana terlihat pada tabel 3.7. Perlu diketahui pula bahwa tidak seluruh program prioritas visi misi kepala daerah akan dibiayai oleh APBD. Beberapa program prioritas yang akan didanai dari sumber-sumber Non-APBD. Penahapan tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.12. Tahapan Pelaksanaan Program Prioritas Kota Tanjungbalai**

| PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN | PRIORITAS / RINCIAN | OPD PELAKSANA / TERKAIT | PENAHAPAN PRIORITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **MISI 1: MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ELOK (TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERPRESTASI) DAN MENATA KOTA YANG HUMANIS** | | | | | | | |
| **Program Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tatalaksana dan RB** | Pengadaan aplikasi Smart SAKIP untuk membantu dalam pengumpulan data perencanaan kinerja, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta pelaporan hasil kinerja | Bagian Organisasi Setdakot | | | | | |
| **Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum** | Pengadaan dan Instalasi Sambungan Air Bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan | Dinas Pekerjaan | | | | | |

| PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN | PRIORITAS / RINCIAN | OPD PELAKSANA / TERKAIT | PENAHAPAN PRIORITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | Perpipaan di Wilayah Perkotaan | Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana PDAM Tirta Kualo | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| **Program Kawasan Permukiman** | Pembangunan Septictank Individu + Kloset | Dinas Perumahan dan Permukiman | | | | | |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota** | Pengadaan Alat Berat Dozer | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Pengadaan Armroll Truck | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Satu Bank Sampah Satu Lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Pengaktian TPS3R | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Peningkatan TPA menjadi TPA Controlled Landill | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Pengadaan Becak Bermotor Sampah | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| **MISI 2: MEMAJUKAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PEREKONOMIAN BERBASIS JASA DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | |
| **Program Pengelolaan Pendidikan** | Program Bantuan Kejar Paket B dan C untuk Masyarakat Putus Sekolah (Bea Siswa) | Dinas Pendidikan | | | | | |
| | Pembangunan Fasilitas Cuci Tangan di Satuan Pendidikan | Dinas Pendidikan | | | | | |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah | Dinas Pendidikan | | | | | |
| | Bantuan perlengkapan peserta didik (SPM) siswa PAUD, SD dan SMP | Dinas Pendidikan | | | | | |
| | Peningkatan Kompetensi SDM Pendidik | Dinas Pendidikan | | | | | |

| PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN | PRIORITAS / RINCIAN | OPD PELAKSANA / TERKAIT | PENAHAPAN PRIORITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Program pemenuhan Usaha kesehatan perorangan dan kesehatan Masyarakat** | Integrasi dengan BPJS Kesehatan PBI | Dinas Kesehatan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Mobil Layanan Kesehatan Keliling | Dinas Kesehatan | | ■ | ■ | ■ | |
| | Pemenuhan Standarisasi KRIS (Kamar Rawat Inap Sesuai Standar) | Dinas Kesehatan/ RSUD | ■ | ■ | | | |
| | Pemenuhan alat Kesehatan yang diperuntukkan pada ruang ICU, NICU/PICU | Dinas Kesehatan/ RSUD | ■ | ■ | | | |
| | Pengoptimalan penggunaan SIMRS dengan penambahan jumlah komputer | Dinas Kesehatan/ RSUD | ■ | | | | |
| | Revitalisasi RSUD dr. T. Mansyur | Dinas Kesehatan/ RSUD | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | Pemenuhan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Kesehatan/ RSUD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Pembangunan Puskesmas | Dinas Kesehatan | | ■ | | ■ | |
| | Pemenuhan Alat Kesehatan untuk Puskesmas | Dinas Kesehatan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Promosi dan aksi pencegahan bahaya narkoba | Dinas Kesehatan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Program Peningkatan kapasitas SDM kesehatan** | Pelatihan Kompetensi SDM Kesehatan | Dinas Kesehatan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Program Penyelenggaraan Jalan** | Peningkatan Jalan Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** | Pemasangan sheet pile Sungai Bandar Jaksa | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ■ | ■ | ■ | | |
| | Pembangunan tembok penahan tanah Sungai Bandar Jepang | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Pembangunan tembok penahan tanah Sungai Bandar Sipoyong | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Pembangunan pintu air | Dinas Pekerjaan | ■ | ■ | | | |

| PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN | PRIORITAS / RINCIAN | OPD PELAKSANA / TERKAIT | PENAHAPAN PRIORITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen DED Pengendalian Banjir | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota** | Pengadaan Alat Berat (Mobil Crane) | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | Normalisasi/Pemeliharaan Sungai | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| | Pemeliharaan Drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | Bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada nelayan | Dinas Pangan dan Pertanian /Dinas Perikanan (Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan) | | | | | |
| | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan dermaga | Dinas Pangan dan Pertanian /Dinas Perikanan (Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan) | | | | | |
| | Pelatihan diversifikasi produk perikanan | Dinas Pangan dan Pertanian /Dinas Perikanan (Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan) | | | | | |
| | Subsidi premi asuransi nelayan (pekerja rentan) | Dinas Pangan dan Pertanian /Dinas Perikanan (Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan) | | | | | |
| **Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan** | Pembangunan pusat pengolahan ikan skala kecil (Hilirisasi Industri Pengolahan Ikan) | Dinas Pangan dan Pertanian /Dinas Perikanan | | | | | |

| PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN | PRIORITAS / RINCIAN | OPD PELAKSANA / TERKAIT | PENAHAPAN PRIORITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | (Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan) | | | | | |
| **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro** | Program Kemitraan dan Distribusi Produk UMKM | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) | | | | | |
| **Program Pengembangan UMKM** | Digitalisasi dan E-Commerce untuk UMKM | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) | | | | | |
| | Program Inkubasi Usaha dan Startup Lokal | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) | | | | | |
| **Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan** | Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional dan Sarana Usaha Mikro | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | | | | | |
| **MISI 3: MENGAMALKAN SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAINILAI AGAMA, BUDAYA KEARIFAN LOKAL DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA** | | | | | | | |
| **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | Belanja Bantuan Sosial uang untuk Kelompok Masyarakat sbb : | Bagian Kesejahteraan Sosial | | | | | |
| | - Memfasilitasi honor guru ngaji (Gerakan Maghrib Mengaji) | | | | | | |
| | - Memfasilitasi honor bilal mayit | | | | | | |

| PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN | PRIORITAS / RINCIAN | OPD PELAKSANA / TERKAIT | PENAHAPAN PRIORITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | - Memfasilitasi honor penggali kubur | | | | | | |
| | - Memfasilitasi honor guru MDA | | | | | | |
| | - Memfasilitasi honor guru RA | | | | | | |
| | - Memfasilitasi honor guru Sekolah Minggu | | | | | | |
| | Memfasilitasi Pengembangan Keilmuan Keagamaan | | | | | | |
| **MISI 4: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | |
| **Program Kawasan Permukiman** | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di kawasan yang masuk dalam SK Kumuh Kota | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | |
| **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di kawasan yang tidak masuk SK Kumuh Kota | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | |

### 3.2.6. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kota Tanjungbalai

Selain program prioritas yang memberikan dampak jangka panjang, RPJMD ini juga menyertakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini dirancang untuk memberikan dampak positif secara langsung dan cepat bagi masyarakat. Program-program dalam PHTC difokuskan pada sektor-sektor yang dapat segera memperbaiki kondisi kehidupan warga, seperti peningkatan sarana pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui PHTC, diharapkan hasil yang nyata dan bermanfaat dapat segera dirasakan oleh masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat pencapaian RPJMD secara keseluruhan.

**Tabel 3.13. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kota Tanjungbalai**

| PHTC | Misi | Program Prioritas |
|---|---|---|
| | Misi 1: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis | 1. ASN Berkualitas dan Berintegritas |
| | | 2. Regulasi Adaptif dan Partisipatif |
| | | 3. Penataan Kota yang Nyaman dan Inklusif |
| | | 4. Digitalisasi Pelayanan Publik |

| PHTC | Misi | Program Prioritas |
|---|---|---|
| 1. Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP | Misi 2: Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan | 5. Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR) |
| 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC | | 6. Kesehatan Prima dan Merata |
| 3. Melanjutkan penyediaan infrastruktur jalan, sanitasi dan drainase | | 7. Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing |
| 4. Melanjutkan Program Bantuan Nelayan dan UMKM untuk menghilangkan kemiskinan absolut | | 8. Kota Bersih dan Tangguh Bencana |
| | | 9. Ekonomi Mandiri dan UMKM Naik Kelas (EKOMAS) |
| | Misi 3: Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearian Lokal dan Toleransi antar Umat Beragama | 10. Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman |
| | | 11. Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya |
| 5. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil | Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 12. Generasi Sehat dan Bebas Stunting |
| | | 13. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat |
| | | 14. Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah |
| | | 15 Penyediaan Akses Air Bersih untuk Seluruh Masyarakat (AIR SEHAT) |

Selain serangkaian Program Prioritas, Kota Tanjungbalai juga memiliki Porgram Hasil Cepat Terbaik (PHTC). Berikut adalah penjabaran rinci dari PHCT dan keterkaitannya dengan pencapaian misi Kota Tanjungbalai 2025-2029:

1. **Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP**
   Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan memperbaiki fasilitas sekolah yang menjadi tempat berkembangnya anak-anak. Dengan memastikan sarana dan prasarana sekolah yang layak dan memadai, diharapkan anak didik dapat belajar dengan nyaman dan optimal, yang akan meningkatkan kemampuannya baik dari sisi literasi, numerasi, serta karakter. Program ini juga berkontribusi pada misi kedua untuk memajukan bidang pendidikan, sehingga kualitas pendidikan di Kota Tanjungbalai dapat meningkat dan merata di seluruh wilayah.

2. **Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Menuntaskan Kasus TBC**

Program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Selain itu, dengan menuntaskan kasus TBC, program ini berkontribusi pada pengurangan angka penyakit menular yang dapat membebani sistem kesehatan kota. Program ini mendukung misi kedua untuk memajukan bidang kesehatan dan misi keempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3. **Melanjutkan Penyediaan Infrastruktur Jalan, Sanitasi dan Drainase**
   Infrastruktur yang memadai adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan kota. Program ini bertujuan untuk melanjutkan pembangunan jalan, sanitasi, dan drainase yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempermudah aksesibilitas, dan mengurangi potensi banjir. Peningkatan infrastruktur ini akan mendukung misi kedua yang berfokus pada pembangunan infrastruktur berkualitas, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi warga kota.

4. **Melanjutkan Program Bantuan Nelayan dan UMKM untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut**
   Program ini bertujuan untuk memberdayakan nelayan dan UMKM dengan memberikan bantuan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan mengurangi kemiskinan absolut, program ini akan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Program ini mendukung misi kedua, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. **Memberi Makanan Bergizi Sehat di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil**
   Kesehatan yang baik dimulai dari asupan gizi yang cukup dan sehat, terutama bagi anak-anak, balita, dan ibu hamil. Program ini akan memastikan bahwa mereka mendapatkan makanan yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Program ini tidak hanya berkontribusi pada misi kedua dalam meningkatkan kesehatan, tetapi juga mendukung misi keempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memastikan bahwa generasi muda tumbuh sehat dan kuat.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kota Tanjungbalai mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk memberikan dampak langsung dan signifikan dalam waktu singkat. Program-program ini berfokus pada bidang yang paling mendesak dan memiliki potensi untuk mempercepat perbaikan kualitas hidup masyarakat. Di antaranya, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di SD dan SMP untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis serta penuntasan kasus TBC untuk memperbaiki kesehatan

masyarakat secara cepat, dan melanjutkan penyediaan infrastruktur jalan, sanitasi, serta drainase yang sangat penting bagi kenyamanan dan keselamatan warga. Selain itu, program bantuan untuk nelayan dan UMKM bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program ini dirancang untuk langsung menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, mendukung percepatan pencapaian misi RPJMD, serta memastikan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kota secara efektif dan efisien.

### 3.2.7. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Sasaran Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Pada subbab diatas sudah dijelaskan terdapat 20 (Dua Puluh) Program Prioritas dan 5 (lima) Program Hasil Terbaik Cepat RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 yang mendukung dan diselaraskan dengan Program Prioritas pada RPJMN Tahun 2025-2029.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa program pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan untuk menjawab visi dan misi Kepala daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diuraikan kedalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Uraian program pembangunan daerah yang mendukung capaian sasaran daerah sebagaimana tertera pada tabel berikut :

# Tabel 3.14. Program Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| VISI : MEWUJUDKAN TANJUNGBALAI ELOK, MAJU, AGAMAIS DAN SEJAHTERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MISI KESATU | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ELOK (TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERPRESTASI) DAN MENATA KOTA YANG HUMANIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIC | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.778.206.600 | 100% | 4.778.206.600 | 100% | 4.998.850.005 | 100% | 4.994.790.000 | 100% | 4.998.850.005 | 100% | 5.121.617.819 | Bapperida |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 100% | 100% | 215.701.000 | 100% | 215.701.000 | 100% | 228.000.000 | 100% | 235.000.000 | 100% | 228.000.000 | 100% | 243.000.000 | Bapperida |
| | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100% | 100% | 211.242.000 | 100% | 211.242.000 | 100% | 233.500.000 | 100% | 286.500.000 | 100% | 234.500.000 | 100% | 210.300.000 | Bapperida |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Daerah yang Dijadikan Kebijakan Pembangunan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan | 0 | 100% | 73.851.000 | 100% | 73.851.000 | 100% | 81.500.000 | 100% | 81.500.000 | 100% | 81.500.000 | 100% | 89.000.000 | Bapperida |
| | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |
| PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |
| | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah | 0 | 100% | 56.155.000 | 100% | 56.155.000 | 100% | 60.500.000 | 100% | 60.500.000 | 100% | 60.500.000 | 100% | 61.000.000 | Bapperida |
| | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah | 0 | 100% | | | | | | | | | | | | Bapperida |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 88,27% | 100% | 31.615.443.135 | 100% | 26.435.802.820 | 100% | 27.294.876.905 | 100% | 27.365.021.289 | 100% | 27.365.021.289 | 100% | 27.433.459.455 | BPKPD |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD | 30,60% | 30% | 7.999.607.821 | 30% | 4.450.000.000 | 30% | 4.517.500.000 | 30% | 4.606.417.500 | 30% | 4.606.417.500 | 30% | 4.617.909.000 | BPKPD |
| | Realisasi Anggaran Belanja | 89% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | BPKPD |
| | Kualitas Laporan Keuangan Konsolidasi (Kelengkapan, Ketepatan Waktu, dan Akurasi) | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | BPKPD |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | 12,67% | 13% | 904.856.700 | 13,50% | 600.000.000 | 14% | 618.000.000 | 14,50% | 621.090.000 | 15% | 621.090.000 | 15,50% | 622.642.000 | BPKPD |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 12,05% | 12,50% | 1.049.585.600 | 12,50% | 1.250.000.000 | 12,50% | 1.287.500.000 | 13% | 1.293.937.500 | 13,50% | 1.293.937.500 | 14% | 1.297.172.000 | BPKPD |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERRAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 8.864.296.570 | 100% | 8.915.699.268 | 100% | 9.179.662.119 | 100% | 9.219.543.960 | 100% | 9.219.543.960 | 100% | 9.230.572.224 | Inspektorat |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 83% | 85% | 1.720.047.900 | 87% | 2.256.087.000 | 89% | 2.345.087.000 | 91% | 2.424.087.000 | 93% | 2.424.087.000 | 95% | 2.461.087.000 | Inspektorat |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 2 (Berkembang) | Level 3 ( terdefinisi) | 102.316.200 | Level 3 ( terdefinisi) | 259.160.000 | Level 3 ( terdefinisi) | 363.435.000 | Level 3 ( terdefinisi) | 363.435.000 | Level 3 ( terdefinisi) | 363.435.000 | Level 3 ( terdefinisi) | 363.435.000 | Inspektorat |
| | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 3 ( Integrated) | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.612.619.153 | 100% | 4.265.250.143 | 100% | 4.325.250.145 | 100% | 4.325.250.000 | 100% | 4.420.500.000 | 100% | 4.420.500.000 | BKPSDM |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai Dengan Formasi | 85% | 85% | 908.757.000 | 86% | 210.309.000 | 87% | 300.086.955 | 87% | 340.080.471 | 88% | 275.830.471 | 88% | 300.054.784 | BKPSDM |
| | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | 80% | 80% | | 81% | | 82% | | 83% | | 84% | | 85% | | |
| | Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya | 90% | 90% | | 91% | | 91% | | 92% | | 93% | | 94% | | |
| | Persentase Pegawai Dengan SKP Bernilai Baik | 90% | 90% | | 91% | | 92% | | 93% | | 94% | | 95% | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional | - | - | - | - | - | 75% | 74.000.000 | 76% | 81.000.000 | 77% | 50.000.000 | 78% | 59.000.000 | BKPSDM |
| | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan | - | - | | - | | 80% | | 81% | | 82% | | 83% | | BKPSDM |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompettensi | - | - | | - | | 85% | | 86% | | 87% | | 88% | | BKPSDM |
| | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis | - | - | | - | | 75% | | 76% | | 77% | | 78% | | BKPSDM |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 28.442.355.681 | 100% | 24.581.220.273 | 100% | 25.268.130.210 | 100% | 25.298.861.137 | 100% | 25.358.155.872 | 100% | 25.410.191.957 | SEKRETARIAT DAERAH |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Cakupan Capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | 9.552.712.200 | 100% | 6.660.947.061 | 100% | 6.660.947.061 | 100% | 6.922.318.181 | 100% | 6.922.318.181 | 100% | 6.943.526.734 | SEKRETARIAT DAERAH |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Cakupan Pelaksanaan kegiatan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | 100% | 100% | 1.074.143.700 | 100% | 902.623.494 | 100% | 959.800.222 | 100% | 944.206.171 | 100% | 944.206.171 | 100% | 1.004.148.233 | SEKRETARIAT DAERAH |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 97% | 100% | 21.862.350.734 | 100% | 20.346.579.725 | 100% | 20.363.420.650 | 100% | 20.373.420.650 | 100% | 20.383.505.604 | 100% | 20.593.420.650 | SEKRETARIAT DPRD |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Ketepatan Penetapan Peraturan daerah APBD dan Persentase Penetapan Ranperda | 95% | 100% | 15.786.291.200 | 100% | 10.372.595.888 | 100% | 11.584.521.988 | 100% | 11.734.281.701 | 100% | 11.724.177.287 | 100% | 11.594.530.907 | SEKRETARIAT DPRD |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 6.124.122.678 | 100% | 5.541.808.457 | 100% | 5.636.624.401 | 100% | 5.643.200.317 | 100% | 5.643.200.317 | 100% | 5.650.429.929 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 92% | 13.535.200 | 93% | 13.535.200 | 94% | 49.075.671 | 95% | 55.651.587 | 97% | 55.651.587 | 97% | 62.881.199 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Penertbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dicatatkan | - | - | 52.033.000 | - | 41.533.000 | 96% | 83.723.691 | 97% | 90.299.607 | 98% | 90.299.607 | 98% | 97.529.219 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil yang di tingkatkan | - | - | | - | | 96,50% | | 97% | | 98% | | 98% | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Cakupan Pelayanan secara aktif terkait Pencatatan Sipil | - | - | | - | | 97% | | 98% | | 99% | | 99% | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Cakupan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | - | 94% | | 95% | | 95,50% | | 96% | | 98% | | 98% | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Lembaga/ OPD yang melakukan Kerja Sama dan memanfaatkan Data Kependudukan | - | - | 1.960.000 | - | 1.960.000 | 92% | 38.657.991 | 93% | 54.233.907 | 95% | 54.233.907 | 95% | 61.463.519 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Cakupan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | 92% | | 93% | | 94% | | 95% | | 96% | | 96% | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Cakupan penyediaan Data Kependudukan Kota | - | - | 153.135.000 | - | 153.853.000 | 96% | 174.715.491 | 96,50% | 181.291.407 | 98% | 181.291.407 | 98% | 188.521.019 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase profil Data perkembangan dan proyeksi Kependudukan | - | 95% | | 95,50% | | 96% | | 96,50% | | 98% | | 98% | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.138.929.060 | 100% | 3.741.284.413 | 100% | 3.997.070.534 | 100% | 4.012.944.613 | 100% | 4.017.919.613 | 100% | 4.017.834.613 | Dinas PMPTSP |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100,00% | 100% | 3.752.214.962 | 100% | 3.413.613.212 | 100% | 3.413.613.212 | 100% | 3.413.613.212 | 100% | 3.413.613.212 | 100% | 3.413.613.212 | Dinas Kominfo |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah | 70,00% | 75% | 2.001.240.600 | 80% | 1.012.063.506 | 85% | 1.012.063.506 | 90% | 1.218.888.175 | 95% | 1.218.888.175 | 100% | 1.272.662.588 | Dinas Kominfo |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah | 30,00% | 50% | 783.899.900 | 60% | 607.132.000 | 70% | 607.132.000 | 80% | 607.132.000 | 90% | 607.132.000 | 100% | 607.132.000 | Dinas Kominfo |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral | 15 | 45 | 76.000.000 | 50 | 32.858.000 | 55 | 32.858.000 | 60 | 32.858.000 | 65 | 32.858.000 | 70 | 32.858.000 | Dinas Kominfo |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | 20% | 30% | 157.479.950 | 35% | 104.950.000 | 40% | 104.950.000 | 45% | 104.950.000 | 50% | 104.950.000 | 55% | 104.950.000 | Dinas Kominfo |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase tingkat ketersediaan arsip | 100,00% | 100,00% | 175.000.000 | 100,00% | 124.980.000 | 100,00% | 125.000.000 | 100,00% | 140.000.000 | 100,00% | 140.000.000 | 100,00% | 150.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 30.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 100,00% | 50.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 25.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 100,00% | 50.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 5.374.357.964 | 100% | 5.461.000.000 | 100% | 5.461.000.000 | 100% | 5.561.000.000 | 100% | 5.561.000.000 | 100% | 5.591.879.769 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Rasio wirausaha pemuda | 3% | 3% | 271.637.750 | 5% | 145.000.000 | 10% | 250.000.000 | 15% | 250.000.000 | 20% | 250.000.000 | 25% | 250.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM OENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Atlet yang masuk Pelatnas | 20% | 20% | 2.130.994.350 | 30% | 1.243.526.119 | 40% | 1.537.507.163 | 50% | 1.637.507.163 | 55% | 1.637.507.163 | 60% | 1.637.507.163 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan | 5% | 5% | - | 10% | 50.000.000 | 15% | 50.000.000 | 20% | 50.000.000 | 25% | 50.000.000 | 30% | 50.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 110.370.389.258 | 100% | 113.693.272.298 | 100% | 118.058.267.990 | 100% | 120.785.093.218 | 100% | 120.785.093.218 | 100% | 124.465.810.566 | Dinas Pendidikan |
| | Nilai Evaluasi AKIP | B | A | | A | | A | | A | | A | | A | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100,00% | 100,00% | 24.885.445.381 | 100,00% | 23.983.592.578 | 100,00% | 24.435.788.017 | 100,00% | 25.440.456.671 | 100,00% | 25.206.514.241 | 100,00% | 24.964.587.464 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 9.200.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | 100% | 13.429.657.321 | 100% | 12.874.211.196 | 100% | 12.363.583.592 | 100% | 13.333.026.812 | 100% | 12.869.693.842 | 100% | 12.567.643.031 | Satpol PP |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi | 98,17% | 100% | 4.391.037.763 | 100% | 4.410.482.525 | 100% | 4.481.101.826 | 100% | 4.466.274.080 | 100% | 4.480.731.080 | 100% | 4.632.931.080 | BPBD |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.702.942.366 | 100% | 4.023.169.412 | 100% | 4.224.327.883 | 100% | 4.226.078.242 | 100% | 4.226.078.242 | 100% | 4.251.434.712 | Dinas Sosial |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 2.851.848.409 | 100% | 2.851.848.409 | 100% | 2.990.322.345 | 100% | 3.007.128.792 | 100% | 3.007.128.792 | 100% | 3.007.642.852 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | - | 100% | 2.740.562.587 | 100% | 2.659.258.625 | 100% | 2.662.835.090 | 100% | 2.677.338.852 | 100% | 2.677.338.852 | 100% | 2.683.936.695 | Dinas P3A dan PM |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 5.221.736.727 | 100% | 5.463.451.206 | 100% | 5.702.636.415 | 100% | 5.763.784.569 | 100% | 5.763.784.569 | 100% | 5.800.840.350 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 19.308.087.091 | 100% | 23.196.459.211 | 100% | 23.792.636.089 | 100% | 23.502.473.784 | 100% | 23.502.473.784 | 100% | 23.570.554.969 | Dinas LH |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 3.802.519.221 | 100% | 3.723.604.299 | 100% | 3.809.090.299 | 100% | 3.658.348.199 | 100% | 3.703.718.199 | 100% | 3.761.218.199 | Dinas PPKB |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 6.329.060.714 | 100% | 5.955.526.692 | 100% | 6.113.875.612 | 100% | 6.023.875.612 | 100% | 6.023.875.612 | 100% | 6.069.607.128 | Dinas Perhubungan |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 67 | 67 | 2.537.320.185 | 68 | 2.539.761.185 | 68 | 2.683.846.078 | 70 | 2.721.308.151 | 70 | 2.721.308.151 | 70 | 2.751.577.505 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 | 100 | 4.070.725.691 | 100 | 4.085.655.534 | 100 | 4.280.639.811 | 100 | 4.275.116.509 | 100 | 4.215.696.509 | 100 | 4.374.470.092 | Dinas Perikanan |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 94% | 95% | 5.434.107.547 | 96% | 5.010.849.962 | 97% | 4.930.673.185 | 98% | 4.911.533.463 | 99% | 4.908.533.463 | 100% | 4.927.336.273 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 94% | 95% | 6.583.731.738 | 96% | 6.181.605.408 | 97% | 6.332.003.904 | 98% | 6.373.108.095 | 98% | 6.373.108.095 | 98% | 6.376.646.403 | Kecamatan Datuk Bandar |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 75% | 78% | 755.433.000 | 80% | 744.658.000 | 83% | 745.240.000 | 85% | 746.500.000 | 88% | 746.500.000 | 88% | 768.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan | 80% | 83% | 422.006.400 | 85% | 177.529.000 | 86% | 311.115.000 | 87% | 315.385.000 | 90% | 315.385.000 | 90% | 316.415.000 | Kecamatan Datuk Bandar |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan | 88% | 90% | 9.940.000 | 95% | 8.900.000 | 95% | 9.000.000 | 95% | 9.000.000 | 95% | 9.000.000 | 95% | 9.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 86% | 87% | 6.418.788.012 | 88% | 5.408.446.370 | 90% | 5.557.786.129 | 92% | 5.574.644.242 | 94% | 5.574.644.242 | 95% | 5.576.607.739 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 85% | 85,50% | 869.541.000 | 86% | 868.230.000 | 87% | 871.230.000 | 88% | 871.230.000 | 89% | 871.230.000 | 90% | 871.230.000 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan | 80% | 80.5% | 343.574.000 | 81% | 157.977.600 | 82% | 250.000.000 | 83% | 280.000.000 | 84% | 280.000.000 | 85% | 300.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terlaksananya kooordinasi di kecamatan dan kelurahan | 86% | 86,50% | 8.300.000 | 87% | 8.420.000 | 87,50% | 10.000.000 | 88% | 10.000.000 | 89% | 10.000.000 | 90% | 12.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 95% | 95% | 6.389.431.932 | 96% | 6.311.685.831 | 97% | 6.426.891.144 | 98% | 6.476.751.502 | 99% | 6.476.751.502 | 99% | 6.498.663.893 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 76% | 76% | 577.388.800 | 80% | 571.243.000 | 85% | 608.040.000 | 88% | 608.140.000 | 90% | 608.140.000 | 90% | 608.240.000 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan | 72% | 74% | 315.585.900 | 75% | 253.156.088 | 80% | 351.734.900 | 82% | 351.734.900 | 85% | 351.734.900 | 85% | 352.734.900 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentse terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan | 95% | 95% | 20.296.000 | 95% | 12.568.000 | 96% | 40.528.000 | 97% | 40.628.000 | 99% | 40.628.000 | 99% | 40.828.000 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 95% | 95% | 5.844.669.076 | 95% | 5.143.821.637 | 95% | 5.374.689.943 | 95% | 5.421.167.862 | 95% | 5.421.167.862 | 95% | 5.447.390.705 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 76% | 78% | 534.490.000 | 80% | 534.490.000 | 85% | 534.490.000 | 88% | 534.490.000 | 90% | 534.490.000 | 90% | 534.490.000 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan | 72% | 74% | 293.396.000 | 75% | 268.396.000 | 80% | 273.396.000 | 83% | 273.396.000 | 85% | 273.396.000 | 85% | 273.396.000 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentse terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan | 95% | 95% | 14.700.000 | 95% | 12.000.000 | 96% | 12.000.000 | 97% | 12.000.000 | 99% | 12.000.000 | 99% | 12.000.000 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 95% | 95% | 6.772.550.224 | 96% | 5.584.961.107 | 97% | 5.674.293.277 | 98% | 5.718.521.908 | 99% | 5.717.021.908 | 99% | 5.742.410.898 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Permeuntahan dan Pelayanan Publik | 76% | 76% | 619.800.000 | 80% | 619.800.000 | 85% | 619.800.000 | 88% | 619.800.000 | 90% | 619.800.000 | 90% | 619.800.000 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan | 72% | 74% | 427.920.950 | 75% | 197.379.900 | 80% | 364.698.450 | 82% | 366.698.450 | 85% | 367.698.450 | 85% | 368.698.450 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentse terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan | 95% | 95% | 7.000.000 | 95% | 11.400.000 | 96% | 11.500.000 | 97% | 12.000.000 | 99% | 12.500.000 | 99% | 13.000.000 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 95% | 95% | 6.135.668.753 | 95% | 5.169.691.359 | 95% | 5.384.186.013 | 95% | 5.430.497.471 | 95% | 5.430.497.471 | 95% | 5.454.626.395 | Kecamatan Teluk Nibung |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 76% | 80% | 636.072.000 | 81% | 633.090.000 | 82% | 633.090.000 | 82% | 633.090.000 | 83% | 633.090.000 | 83% | 633.090.000 | Kecamatan Teluk Nibung |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan | 74% | 75% | 331.828.200 | 76% | 121.985.000 | 77% | 141.985.000 | 78% | 141.985.000 | 80% | 141.985.000 | 80% | 143.985.000 | Kecamatan Teluk Nibung |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentse terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan | 95% | 95% | 9.270.000 | 95% | 12.600.000 | 96% | 12.600.000 | 97% | 12.600.000 | 99% | 12.600.000 | 99% | 12.600.000 | Kecamatan Teluk Nibung |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 | 100 | 4.402.586.090 | 100 | 3.604.913.182 | 100 | 3.644.706.255 | 100 | 3.753.892.798 | 100 | 3.658.528.798 | 100 | 3.622.428.798 | Badan Kesbangpol |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 108.032.333.620 | 100% | 109.787.239.740 | 100% | 114.900.250.120 | 100% | 115.555.570.306 | 100% | 115.555.570.306 | 100% | 116.040.468.113 | Dinas Kesehatan |
| **TUJUAN 2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENCIPTAKAN KOTA YANG TERTATA, BERSIH, DAN NYAMAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SASARAN 2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH, SANITASI DAN AIR BERSIH BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional | 100% | 100% | 949.289.036 | 100% | 775.000.000 | 100% | 775.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 1. Indeks kualitas air | 70.34 | 70.74 | 270.960.100 | 70.79 | 160.000.000 | 71.14 | 200.000.000 | 71.34 | 160.000.000 | 71.54 | 160.000.000 | 71.74 | 160.000.000 | Dinas LH |
| | 2. indeks kualitas udara | 81.19 | 81.59 | | 81.79 | | 81.99 | | 82.19 | | 83.39 | | 82.59 | | Dinas LH |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Ruang terbuka Hijau (RTH) | 2.03 | 2.03 | 47.275.000 | 2.03 | 50.000.000 | 2.03 | 90.000.000 | 2.03 | 120.000.000 | 2.03 | 120.000.000 | 2.03 | 120.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase limbah B3 yang terkelola | 100% | 100% | - | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH | 100% | 100% | - | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | Dinas LH |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN<br>PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,<br>PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN<br>HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya | 100% | 100% | - | 100% | 80.060.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 120.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 100% | 100% | - | 100% | 57.910.000 | 100% | 280.000.000 | 100% | 280.000.000 | 100% | 280.000.000 | 100% | 280.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN<br>LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup | 100% | 100% | - | 100% | 50.000.000 | 100% | 110.060.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Indeks kinerja pengelolaan sampah | 25.00 | 30.00 | 566.541.000 | 32.50 | 385.367.751 | 35.00 | 449.292.751 | 37.50 | 600.000.000 | 40.00 | 600.000.000 | 42.50 | 600.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | 53,10% | 53,50% | 579.042.861 | 54,00% | 3.000.000.000 | 54,50% | 3.200.000.000 | 55,00% | 3.300.000.000 | 56,00% | 3.600.000.000 | 56,50% | 3.600.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati Hunia dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | 61,21% | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 75% | 78% | 33.850.000 | 80% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | Kecamatan Datuk Bandar |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 75% | 78% | 14.648.500 | 80% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Kecamatan Datuk Bandar Timur |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 76% | 77% | 20.132.000 | 80% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 74% | 75% | 21.848.000 | 80% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 76% | 77% | 128.073.600 | 80% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | - | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 76% | 77% | 20.817.000 | 80% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | | 0% | - | Kecamatan Teluk Nibung |
| **SASARAN 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA PENYEDIAAN INRASTRUKTUR LAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun/dipelihara | 5 | 6 | 5.032.327.553 | 7 | 2.398.109.000 | 8 | 1.800.000.000 | 9 | 1.900.000.000 | 10 | 1.900.000.000 | 10 | 1.900.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kota | 1 | 1 | 1.522.870.535 | 1 | 989.546.500 | 1 | 800.000.000 | 1 | 900.000.000 | 1 | 950.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota | 75,43% | 76,00% | 15.258.227.809 | 77,00% | 22.448.822.000 | 78,00% | 27.500.000.000 | 79,00% | 27.000.000.000 | 80,00% | 26.200.000.000 | 81,00% | 26.400.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi | 125 | 125 | 500.668.000 | 125 | 565.000.000 | 125 | 565.000.000 | 125 | 567.560.000 | 125 | 574.560.000 | 125 | 584.560.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Ketaatan pelaksanaan penataan ruang | 100% | 100% | 1.701.414.770 | 100,00% | 1.293.199.000 | 100,00% | 900.000.000 | 100,00% | 1.030.000.000 | 100,00% | 810.000.000 | 100,00% | 810.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan | 77,20% | 80,20% | 2.400.000.000 | 83,20% | 3.000.000.000 | 86,20% | 3.000.000.000 | 89,20% | 3.000.000.000 | 92,20% | 3.000.000.000 | 92,20% | 3.000.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | 74,42% | 74,50% | 2.127.223.108 | 74,80% | 9.488.820.000 | 75,00% | 10.900.000.000 | 75,20% | 11.050.000.000 | 75,40% | 11.350.000.000 | 75,50% | 11.550.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik , secara fisik, kelayakan, dan kepatutan | 100% | 100% | 35.853.000 | 100% | 35.151.000 | 100% | 36.908.550 | 100% | 37.277.635 | 100% | 37.277.635 | 100% | 37.501.300 | Dinas Sosial |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase RTH | 20,33% | 20,33% | 581.763.500 | 20,33% | 609.014.500 | 20,33% | 600.000.000 | 20,33% | 600.000.000 | 20,33% | 600.000.000 | 20,33% | 600.000.000 | Dinas PUTR |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 41,54% | 44,10% | 1.500.000.000 | 46,66% | 1.500.000.000 | 49,22% | 1.500.000.000 | 51,78% | 1.500.000.000 | 54,36% | 1.500.000.000 | 54,36% | 1.500.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni | 60% | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani | 17,20% | 1,70% | 1.500.000.000 | 1,70% | 1.500.000.000 | 1,70% | 1.900.000.000 | 1,70% | 1.900.000.000 | 1,70% | 1.900.000.000 | 1,70% | 1.900.000.000 | Dinas PKP |
| **MISI KEDUA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MEMAJUKAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PEREKONOMIAN BERBASIS JASA DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TUJUAN 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SASARAN 4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SDM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APK PAUD | 62,57 | 64,78 | 36.771.898.903 | 66,98 | 42.992.346.650 | 69,19 | 43.530.258.625 | 71,4 | 41.926.059.524 | 73,61 | 41.926.059.524 | 73,61 | 39.221.967.550 | Dinas Pendidikan |
| | APK SD/MI | 101,02 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan |
| | APK SD/MI | 92,55 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan |
| | APM SD/MI | 94,96 | 95,97 | | 96,98 | | 97,98 | | 98,99 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan |
| | APM SMP/MTs | 81,82 | 85,45 | | 89,08 | | 92,72 | | 96,36 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan |
| | APS Usia 5-6 Tahun | 65,03 | 72,03 | | 79,03 | | 86,03 | | 93,03 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan |
| | APS Usia 7 - 15 Tahun | 98,85 | 99,08 | | 99,31 | | 99,54 | | 99,77 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan |
| | APS Usia 7 - 18 Tahun | 15,68 | 22,53 | | 29,37 | | 36,22 | | 43,07 | | 49,92 | | 49,92 | | Dinas Pendidikan |
| | Angka Kelulusan SD/MI | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Dinas Pendidikan |
| | Angka Kelulusan SMP/MTs | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Dinas Pendidikan |
| | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Dinas Pendidikan |
| | Angka Melanjutkan SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Dinas Pendidikan |
| | Angka Putus Sekolah SD/MI | 1,26% | 1,04% | | 0,82% | | 0,60% | | 0,38% | | 1,16% | | 1,16% | | Dinas Pendidikan |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 3,73% | 3,03% | | 2,33% | | 1,63% | | 0,93% | | 0,23% | | 0,23% | | Dinas Pendidikan |
| | SD/MI kondisi Bangunan Baik | 96,00% | 96,80% | | 97,60% | | 98,40% | | 99,20% | | 100,00% | | 100,00% | | Dinas Pendidikan |
| | SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik | 96,00% | 96,80% | | 97,60% | | 98,40% | | 99,20% | | 100,00% | | 100,00% | | Dinas Pendidikan |
| | Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar | 0,002 | 0,002 | | 0,002 | | 0,002 | | 0,002 | | 0,002 | | 0,002 | | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Guru TK/KB Berkualifikasi S1/D.IV | 58,75% | 65% | 61.400.000 | 70% | 514.585.450 | 75% | 540.314.723 | 80% | 560.500.000 | 85% | 560.500.000 | 85% | 360.500.000 | Dinas Pendidikan |
| | Guru SD Berkualifikasi S1/D.IV | 96,36% | 97,13% | | 97,68% | | 98,34% | | 99,00% | | 99,66% | | 99,66% | | Dinas Pendidikan |
| | Guru SMP Berkualifikasi S1/D.IV | 98,78% | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Guru TK/KB bersertifikasi | 9,73% | 11,67% | | 13,61% | | 15,56% | | 17,50% | | 19,45% | | 19,45% | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Guru SD bersertifikasi | 50,71% | 55,64% | | 60,41% | | 65,27% | | 70,12% | | 74,97% | | 74,97% | | Dinas Pendidikan |
| | Persentase Guru SMP bersertifikasi | 68,08% | 71,28% | | 74,18% | | 77,23% | | 80,28% | | 82,31% | | 82,31% | | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | 77,68% | 50.000.000 | 80,35% | 52.500.000 | 85,20% | 52.500.000 | 85,40% | 55.000.000 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan/Diperbaharui | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 20.000.000 | 100,00% | 21.000.000 | 100,00% | 21.000.000 | 100,00% | 22.025.000 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | Pesentase Pengembangan Bahasa dan Satra | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | 76,45% | 50.000.000 | 82,35% | 52.500.000 | 84,50% | 52.500.000 | 86,25% | 53.550.000 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.224.619.933 | 100% | 3.846.935.139 | 100% | 3.877.076.545 | 100% | 3.866.507.310 | 100% | 3.866.507.310 | 100% | 3.842.212.861 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | 84.92 | 88 | 275.693.000 | 90 | 204.120.000 | 93 | 206.000.000 | 95 | 210.000.000 | 98 | 210.000.000 | 100 | 225.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | 0 | 10 | - | 15 | - | 20 | 80.000.000 | 25 | 90.000.000 | 30 | 90.000.000 | 35 | 100.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **SASARAN 5** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian ibu | 151 | 100 | 40.192.621.340 | 90 | 39.838.391.555 | 80 | 40.970.250.152 | 70 | 41.350.140.000 | 60 | 41.350.140.000 | 60 | 41.350.140.000 | Dinas Kesehatan |
| | Angka kematian neonatal | 9 | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | Dinas Kesehatan |
| | Angka kematian bayi | 9 | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | Dinas Kesehatan |
| | Angka kematian balita | 9 | 8 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | Dinas Kesehatan |
| | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan | 95,91% | 98% | | 98% | | 99% | | 99% | | 99% | | 99% | | Dinas Kesehatan |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Persentase imunisasi dasar lengkap | 61,88% | 80% | | 83% | | 85% | | 87% | | 90% | | 90% | | Dinas Kesehatan |
| | Bad occupancy rate (BOR) | 63% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% | | Dinas Kesehatan |
| | Average length of star (ALOS) | 3 hari | 7 hari | | 6 hari | | 5 hari | | 4 hari | | 3 hari | | 3 hari | | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | 70% | 75% | 4.352.778.500 | 80% | 4.762.815.207 | 80% | 4.367.401.376 | 85% | 4.456.592.046 | 90% | 4.456.592.046 | 95% | 4.456.592.046 | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | 100% | 100% | 123.189.000 | 100% | 120.170.000 | 100% | 130.250.000 | 100% | 135.150.000 | 100% | 135.150.000 | 100% | 135.150.000 | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 75% | 80% | 375.158.616 | 80% | 360.150.618 | 85% | 380.210.136 | 85% | 135.150.000 | 85% | 135.150.000 | 85% | 135.150.000 | Dinas Kesehatan |
| **TUJUAN 4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG KONEKTIVITAS WILAYAH DAN MITIGASI RESIKO BENCANA BANJIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SASARAN 6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS WILAYAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Konektivitas Darat | 60 Km | 70 Km | 504.292.000 | 70 Km | 496.237.000 | 70 Km | 496.237.000 | 70 Km | 496.237.000 | 80 Km | 496.237.000 | 80 Km | 546.237.000 | Dinas Perhubungan |
| | Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal | 14% | 20% | 37.890.000 | 25% | 184.285.000 | 30% | 243.858.027 | 35% | 453.517.734 | 40% | 453.517.734 | 40% | 400.000.000 | Dinas Perhubungan |
| PENGELOLAAN PELAYARAN | Konektivitas Laut | 4 unit | 5 unit | - | 6 unit | 62.000.000 | 6 unit | 112.000.000 | 6 unit | 62.000.000 | 7 unit | 62.000.000 | 7 unit | 62.000.000 | Dinas Perhubungan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota | 75,43% | 76,00% | 15.258.227.809 | 77,00% | 22.448.822.000 | 78,00% | 27.500.000.000 | 79,00% | 27.000.000.000 | 80,00% | 26.200.000.000 | 81,00% | 26.400.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan | 77,20% | 80,20% | 2.400.000.000 | 83,20% | 3.000.000.000 | 86,20% | 3.000.000.000 | 89,20% | 3.000.000.000 | 92,20% | 3.000.000.000 | 92,20% | 3.000.000.000 | Dinas PKP |
| **SASARAN 7** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE UNTUK MENGURANGI RESIKO BANJIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | 69,05% | 70,00% | 1.666.344.505 | 71,00% | 1.313.725.000 | 72,00% | 1.200.000.000 | 73,00% | 1.200.000.000 | 74,00% | 1.500.000.000 | 75,00% | 1.500.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 41,54% | 44,10% | 1.500.000.000 | 46,66% | 1.500.000.000 | 49,22% | 1.500.000.000 | 51,78% | 1.500.000.000 | 54,36% | 1.500.000.000 | 54,36% | 1.500.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Indeks Risiko Bencana | 107,26 | 105,5 | 44.589.000 | 103,5 | 80.000.000 | 101,5 | 189.000.000 | 101,5 | 250.528.764 | 98,5 | 236.071.764 | 96,5 | 112.172.582 | BPBD |
| | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 66,86% | 69,21% | | 72,67% | | 76,30% | | 80,12% | | 84,13% | | 88,33% | | |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 0,03% | 20,00% | | 25,00% | | 28,00% | | 31,00% | | 33,00% | | 36,00% | | |
| | Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 66,33% | 69,65% | | 73,13% | | 76,79% | | 80,62% | | 84,66% | | 88,89% | | |
| | Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani | 66,50% | 73,15% | | 76,48% | | 79,80% | | 83,13% | | 86,45% | | 89,78% | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | 74,42% | 74,50% | 2.127.223.108 | 74,80% | 9.488.820.000 | 75,00% | 10.900.000.000 | 75,20% | 11.050.000.000 | 75,40% | 11.350.000.000 | 75,50% | 11.550.000.000 | Dinas PUTR |
| **TUJUAN 5** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SASARAN 8** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Realisasi Total Terhadap Target Investasi | 2,00% | 2,00% | - | 2,50% | 61.240.000 | 3,00% | 77.240.000 | 3,50% | 77.240.000 | 4,00% | 77.240.000 | 4,50% | 77.240.000 | Dinas PMPTSP |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | 1,50% | 1,50% | 12.850.000 | 2% | 15.000.000 | 2,50% | 49.030.000 | 3% | 49.030.000 | 3,50% | 49.030.000 | 4% | 49.030.000 | Dinas PMPTSP |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan | 1,50% | 1,50% | - | 2% | 30.000.000 | 2,50% | 115.577.935 | 3% | 115.577.935 | 3,50% | 115.577.935 | 4% | 115.577.935 | Dinas PMPTSP |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | 1% | 1% | - | 1,50% | 35.407.639 | 2% | 94.432.986 | 2,50% | 93.128.691 | 3% | 88.153.691 | 3,50% | 120.535.021 | Dinas PMPTSP |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal | 10% | 10% | - | 15% | 2.000.000 | 20% | 2.000.000 | 25% | 2.000.000 | 30% | 2.000.000 | 35% | 2.000.000 | Dinas PMPTSP |
| 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | 0 | 10 | 15.000.000 | 10.5 | 15.000.000 | 11 | 15.000.000 | 11.5 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12.5 | 15.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | 46.56 | 46.56 | - | 46.56 | - | 46.56 | | 46.56 | | 46.56 | | 46.56 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 40.98 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | 40.98 | 40.99 | 18.898.900 | 50 | 18.898.900 | 51 | 18.898.900 | 52 | 18.898.900 | 53 | 18.898.900 | 54 | 18.898.900 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1. Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari Informal ke Formal | 25 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| | 2. Pertumbuhan Wirausaha | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | 40.98 | 50.08 | 1.460.936.740 | 59.18 | 602.071.849 | 68.28 | 602.071.849 | 77.38 | 602.071.849 | 86.48 | 602.071.849 | 95.58 | 602.071.849 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja | Ada | Ada | 10.000.000 | Ada | 10.000.000 | Ada | 20.000.000 | Ada | 20.000.000 | Ada | 20.000.000 | Ada | 25.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Berbasis Kompetensi | 38% | 43% | 150.000.000 | 48% | 150.000.000 | 53% | 160.000.000 | 58% | 160.000.000 | 63% | 160.000.000 | 68% | 160.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan | 25% | 30% | 100.000.000 | 35% | 100.000.000 | 40% | 110.000.000 | 45% | 110.000.000 | 50% | 110.000.000 | 50% | 120.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 150% | 100% | 100.000.000 | 83% | 100.000.000 | 80% | 110.000.000 | 75% | 110.000.000 | 67% | 110.000.000 | 50% | 121.742.970 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 33% | 40% | - | 45% | - | 50% | - | 55% | - | 60% | - | 65% | - | |
| | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | 85,80% | 87% | - | 88% | - | 89% | - | 90% | - | 91% | - | 91% | - | |
| | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | Nihil | Nihil | - | Nihil | - | Nihil | - | Nihil | - | Nihil | - | Nihil | - | |
| **SASARAN 9** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA PEREKONOMIAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAINNYA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi | 100% | 100% | 5.249.000 | 100% | 23.460.000 | 100% | 38.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 38.000.000 | 100% | 40.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | 50% | 100% | 154.805.000 | 100% | 141.956.877 | 100% | 150.000.000 | 100% | 208.437.953 | 100% | 208.437.953 | 100% | 190.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM STABIILISASI HARGA BARANG DAN KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Koefisien harga antar waktu | 6,53% | 6,45% | 69.943.300 | 6,39% | 35.175.000 | 6,20% | 106.150.000 | 6,10% | 99.000.000 | 6,02% | 99.000.000 | 6,00% | 100.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | 35.831 Ton | 35.899 Ton | 157.780.000 | 36.000 Ton | 205.489.300 | 36,050 Ton | 230.000.000 | 36.155 Ton | 235.000.000 | 36.550 Ton | 235.000.000 | 36.669 Ton | 250.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 57,67% | 60% | 22.997.000 | 61% | 16.380.000 | 61,51% | 100.000.000,00 | 62% | 100.000.000 | 62,59% | 100.000.000 | 62,88% | 120.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan | NA | 40% | - | 45% | - | 50% | - | 50% | - | 50% | - | 50% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | NA | 18% | 146.988.000 | 20% | 90.000.000 | 22% | 210.000.000 | 24% | 204.000.000 | 25% | 209.000.000 | 25% | 200.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KEBUPATEN/KOTA | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | NA | 100% | | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase data perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industry di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industry di kab/kota | 100% | 100% | 29.305.000 | 100% | 42.865.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan | 10% | 10% | | 15% | 313.116.714 | 20% | 100.000.000 | 25% | 76.435.072 | 30% | 76.435.072 | 35% | 40.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata | 5% | 5% | 68.175.000 | 6% | 136.883.286 | 8% | 145.000.000 | 10% | 145.000.000 | 12% | 145.000.000 | 15% | 105.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | 1% | 1% | - | 2% | | 2% | 50.000.000 | 3% | | 4% | 25.000.000 | 5% | 46.435.072 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | 5% | 5% | - | 10% | | 10% | 50.000.000 | 15% | | 15% | 20.000.000 | 20% | 30.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 12030,51 | 12.050 ton/th | 54.455.000 | 12.100 ton/th | 1.201.600.000 | 12.150 ton/th | 1.201.670.000 | 12.200 ton/th | 952.490.000 | 12.250 ton/th | 952.370.000 | 12.300 ton/th | 946.340.000 | Dinas Perikanan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 120 ton/th | 121 ton/th | 255.364.500 | 122 ton/th | 108.330.000 | 123 ton/th | 309.850.000 | 124 ton/th | 425.560.000 | 125 ton/th | 505.400.000 | 126 ton/th | 485.000.000 | Dinas Perikanan |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Angka Konsumsi Ikan | 57,18 kg/kapita/th | 57,20 kg/kapita/th | 39.420.000 | 57,25 kg/kapita/th | 704.100.000 | 57,30 kg/kapita/th | 612.510.000 | 57,35 kg/kapita/th | 815.550.000 | 57,40 kg/kapita/th | 795.250.000 | 57,45 kg/kapita/th | 695.250.000 | Dinas Perikanan |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 60% | 60% | - | 60% | 30.500.000 | 60% | 30.500.000 | 60% | 30.500.000 | 60% | 30.500.000 | 60% | 30.500.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan menular Strategis (PMHS) | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 161.240.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Penangan Bencana Pertanian | 20% | 20% | - | 20% | 25.011.000 | 20% | 25.011.000 | 20% | 25.011.000 | 20% | 25.011.000 | 20% | 25.011.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase SDM penyuluh Pertanian yang ditingkatkan | 30% | 30% | 72.813.050 | 30% | 113.880.000 | 30% | 113.880.000 | 30% | 113.880.000 | 30% | 113.880.000 | 30% | 113.880.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **MISI KETIGA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENGAMALKAN SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA KEARIAN LOKAL DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TUJUAN 6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, TOLERAN, DAN BERAKHLAK MULIA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SASARAN 10** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA HARMONI SOSIAL DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Presentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | 81% | 82% | 563.176.000 | 83% | 706.920.000 | 83% | 894.050.000 | 84% | 894.050.000 | 84% | 1.357.382.970 | 85% | 824.050.000 | Satpol PP |
| | Presentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan | 81% | 82% | | 83% | | 83% | | 84% | | 84% | | 85% | | |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100% | 100% | 541.568.500 | 100% | 709.701.000 | 100% | 1.604.831.892 | 100% | 709.701.000 | 100% | 709.701.000 | 100% | 1.604.831.892 | Satpol PP |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Jumlah Kasus SARA | 0 | 0 | 940.183.000 | 0 | 421.678.108 | 0 | 421.678.108 | 0 | 421.678.108 | 0 | 472.578.100 | 0 | 421.678.108 | Badan Kesbangpol |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu | 75,56% | 0 | 977.880.974 | 0 | 44.053.000 | 0 | 44.053.000 | 0 | 82.553.000 | 0 | 6.077.366.457 | 76% | 9.357.720.045 | Badan Kesbangpol |
| | persentase parpol tertib administrasi | 90% | 75% | | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | 95% | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Jumlah Ormas Terdaftar | 199 | 130 | 683.395.000 | 133 | 38.781.000 | 136 | 105.781.000 | 139 | 38.781.000 | 1240 | 38.781.000 | 145 | 105.781.000 | Badan Kesbangpol |
| | Persentase Ormas aktif / Melaporkan Kegiatan | 50% | 60% | | 60% | | 60% | | 60% | | 60% | | 60% | | |
| | Indeks Kinerja Ormas | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kebebasan Sipil (TPB) | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Jumlah Kasus SARA | 0 | 0 | 994.697.000 | 0 | 71.400.000 | 0 | 177.400.000 | 0 | 141.400.000 | 0 | 141.400.000 | 0 | 141.400.000 | Badan Kesbangpol |
| | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | persentase penurunan jumlah kasus hukum<br><br>penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Generasi Muda | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Angka Kriminal Tertangani >= 70% | 70,59% | 70% | 299.928.000 | 70% | 75.036.000 | 70% | 75.036.000 | 70% | 75.036.000 | 70% | 80.000.000 | 70% | 90.000.000 | Badan Kesbangpol |
| | jumlah unjuk rasa & yang berakhir ricuh = 60 / 0 | 43 / 0 | 65 | | 65 | | 64 | | 63 | | | | 60 | | |
| | jumlah konflik Sosial <10 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya(TPB) = 70% | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum dikecamatan | 76% | 77% | 4.550.000 | 77% | 4.095.000 | 78% | 4.095.000 | 80% | 4.095.000 | 83% | 4.095.000 | 83% | 4.095.000 | Kecamatan Datuk Bandar |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 80% | 81% | 3.480.000 | 82% | 3.480.000 | 83% | 5.000.000 | 84% | 5.000.000 | 86% | 5.000.000 | 88% | 8.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 84% | 85% | - | 83% | 2.495.200 | 84% | 10.000.000 | 86% | 12.000.000 | 90% | 12.000.000 | 90% | 15.000.000 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 84% | 85% | - | 85% | - | 85% | 2.480.000 | 85% | 2.480.000 | 86% | 2.480.000 | 86% | 2.480.000 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 84% | 85% | 5.227.000 | 83% | 5.227.000 | 84% | 5.227.000 | 86% | 5.227.000 | 90% | 5.227.000 | 90% | 5.227.000 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 83% | 85% | 2.480.000 | 85% | - | 86% | 3.000.000 | 86% | 3.000.000 | 87% | 3.000.000 | 87% | 3.000.000 | Kecamatan Teluk Nibung |
| **SASARAN 11** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA SERTA TRADISI LOKAL.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | 100,00% | 75,00% | 460.498.400 | 80,00% | 1.500.352.300 | 85,00% | 1.040.998.853 | 90,00% | 840.700.000 | 95,00% | 840.700.000 | 95,00% | 758.968.376 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 121.937.000 | 30,00% | 128.033.850 | 40,00% | 65.000.000 | 50,00% | 65.000.000 | 55,00% | 66.300.000 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | 70,00% | 150.000.000 | 75,00% | 157.500.000 | 80,00% | 157.500.000 | 85,00% | 160.650.000 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan | 100,00% | 30,00% | 123.568.000 | 30,00% | 964.723.400 | 40,00% | 1.012.959.570 | 40,00% | 1.025.175.454 | 60,00% | 1.025.175.454 | 60,00% | 800.500.000 | Dinas Pendidikan |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **MISI KEEMPAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TUJUAN 7** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan sosial** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SASARAN 12** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan | 88.6 | 88.6 | - | 88.7 | 176.600.000 | 88.8 | 176.600.000 | 88.9 | 176.600.000 | 88.9 | 176.600.000 | 89.5 | 176.600.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 30% | 30% | - | 30% | 11.000.000 | 30% | 11.000.000 | 35% | 11.000.000 | 35% | 11.000.000 | 35% | 11.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan | 25,80% | 33.05% | 57.600.000 | 33,54% | 448.200.000 | 33,00% | 470.610.000 | 33,00% | 517.041.100 | 33,00% | 517.041.100 | 33,00% | 519.611.150 | Dinas Sosial |
| | Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan | 72,72% | 75,00% | | 70,00% | | 70,00% | | 70,00% | | 70,00% | | 70,00% | | |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal | 100% | 100% | 10.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.500.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | Dinas Sosial |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar | 96,04% | 93,47% | 1.293.713.224 | 91,79% | 41.988.000 | 87,20% | 44.087.400 | 88,00% | 44.528.274 | 88,00% | 44.528.274 | 88,00% | 44.695.444 | Dinas Sosial |
| | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar | 97,39% | 80,66% | | 88,17% | | 83,70% | | 83,70% | | 84,00% | | 84,00% | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk | 97,52% | 97,64% | 388.726.500 | 95,97% | 190.800.000 | 86,25% | 200.090.000 | 86,25% | 200.413.820 | 86,50% | 200.413.820 | 91,00% | 202.284.499 | Dinas Sosial |
| | Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar | 0,73% | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | |
| | Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial | 24,08% | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial | 59,90% | 48% | | 48% | | 48% | | 48% | | 48% | | 48% | | Dinas Sosial |
| | Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial | 47,82% | 95,24% | | 95,24% | | 89,47% | | 89,47% | | 89,47% | | 89,50% | | |
| | Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial | 0% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 100% | 100% | 245.624.400 | 100% | 138.350.000 | 100% | 145.267.500 | 100% | 146.720.175 | 100% | 146.720.175 | 100% | 147.600.496 | Dinas Sosial |
| | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | Persentase korban bencana yang ditangani | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan | - | 100% | 239.033.000 | 100% | 215.935.000 | 100% | 215.935.000 | 100% | 235.935.000 | 100% | 235.935.000 | 100% | 235.935.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| | Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan | - | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | - | 100% | 444.315.000 | 100% | 316.268.000 | 100% | 316.268.000 | 100% | 316.268.000 | 100% | 316.268.000 | 100% | 326.268.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase anggaran responsif gender (ARG) | - | 7% | 87.159.250 | 7,50% | 11.400.000 | 8% | 50.000.000 | 8% | 50.000.000 | 8% | 50.000.000 | 8% | 50.000.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga mewujudkan kualitas keluarga | - | 100% | 23.983.400 | 100% | 10.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase lembaga/OPD yang melaksanakan data terpilah | - | 100% | 28.080.000 | 100% | 8.400.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 40.000.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pembinaan forum anak | - | 100% | 164.661.250 | 100% | 10.500.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 90.000.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| | Persentase Jumlah sarana dan prasarana ramah anak | - | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan | - | 60% | 474.992.560 | 70% | 350.150.000 | 80% | 350.150.000 | 90% | 360.150.000 | 100% | 360.150.000 | 100% | 360.150.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Pengendalian angka kelahiran (TFR) | 2,24 | 2,24 | 420.198.000 | 2,22 | 2.016.399.016 | 2,2 | 2.041.399.016 | 2,18 | 2.077.104.016 | 2,16 | 2.031.399.016 | 2,14 | 2.052.104.016 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| | Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun | 16,8 | 16,8 | | 16,5 | | 16,2 | | 16 | | 15,7 | | 15,5 | | |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 3,43 | 3,43 | 2.342.229.266 | 2,91 | 342.930.850 | 2,62 | 386.530.850 | 2,48 | 414.680.850 | 2,32 | 366.530.850 | 2,27 | 371.530.850 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | 0,207 | 0,207 | | 0,174 | | 0,154 | | 0,143 | | 0,136 | | 0,13 | | |

| MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/INFACT/OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TAHUN 2027 | | TAHUN 2028 | | TAHUN 2029 | | TAHUN 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA | Persentasi peran keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga | 45% | 45% | 280.935.000 | 50% | 8.200.000 | 55% | 158.670.986 | 60% | 309.514.997 | 65% | 357.999.997 | 70% | 313.552.886 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |

# BAB IV

## PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## PERATURAN DAERAH
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
## (RPJMD)

## KOTA TANJUNGBALAI
## TAHUN 2025-2029

# BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menjelaskan secara rinci program-program yang dirancang oleh perangkat daerah beserta ukuran kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tanjung Balai untuk periode 2025–2029. Penyusunan program dilakukan secara sistematis dan terukur guna mendukung pencapaian kinerja pembangunan, lengkap dengan indikator, target, serta pagu indikatif. Selain itu, bab ini juga memaparkan kinerja pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan RPJMD Kota Tanjung Balai Tahun 2025–2029.

Meskipun periode RPJMD Kota Tanjung Balai tercatat dari tahun 2025 hingga 2029, pelaksanaan program-program yang tercantum dalam dokumen ini akan terus berlanjut hingga tahun 2030. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, sehingga tidak ada gangguan dalam pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan demikian, pelaksanaan program pada tahun 2030 menjadi bagian integral dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan, serta menjadi pijakan penting dalam penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah pada periode berikutnya.

## 4.1 Program Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, diperlukan perumusan program prioritas daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah daerah. Penyusunan program ini mempertimbangkan potensi, permasalahan, serta kebutuhan riil di wilayah setempat, dan diselaraskan dengan kebijakan nasional. Subbab ini menjelaskan daftar program prioritas dari masing-masing perangkat daerah, lengkap dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu indikatif sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

### 4.1.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

**1. Urusan Pendidikan**

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi pendidikan.
b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program ini diarahkan pada perluasan mutu serta akses pemerataan layanan pendidikan.
c. Program Pengembangan Kurikulum. Program ini diarahkan untuk peningkatan kualitas kurikulum pendidikan.
d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas serta distribusi institusi pendidikan.
e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra. Program ini diarahkan pada pelestarian bahasa dan sastra daerah.

Pelaksanaan urusan pendidikan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Pendidikan | Meningkatnya partisipasi usia anak sekolah | APK PAUD |
| | | | APK SD/MI |
| | | | APK SMP/MTs |
| | | | APM SD/MI |
| | | | APM SMP/MTs |
| | | | APS Usia 5-6 Tahun |
| | | | APS Usia 7-15 Tahun |
| | | | APS Usia 16-18 Tahun |
| | | | Angka Kelulusan SD/MI |
| | | | Angka Kelulusan SMP/MTs |
| | | | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs |
| | | | Angka Melanjutkan SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA |
| | | | Angka Putus Sekolah SD/MI |
| | | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs |
| | | | SD/MI kondisi Bangunan Baik |
| | | | SMP/MTs kondisi Bangunan Baik |
| | | | Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar |
| 2 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | Guru TK/KB Berkualifikasi S1/D.IV |
| | | | Guru SD Berkualifikasi S1/D.IV |
| | | | Guru SMP Berkualifikasi S1/D.IV |
| | | | Persentase Guru TK/KB bersertifikasi |
| | | | Persentase Guru SD bersertifikasi |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | | Persentase Guru SMP bersertifikasi |
| 3 | Pengembangan Kurikulum | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum |
| 4 | Pengendalian Perizinan Pendidikan | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui |
| 5 | Pengembangan Bahasa dan Sastra | Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | Pesentase pengembangan bahasa dan satra |

**2. Urusan Kesehatan**

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan penyediaan layanan kesehatan rujukan, serta pengelolaan pelayanan kesehatan puskesmas.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan, serta peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan.
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program ini diarahkan pada peningkatan mutu, distribusi, serta persediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Program ini diarahkan pada peningkatan mutu pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan serta kemitraan yang terjalin dalam bidang kesehatan.

Pelaksanaan urusan kesehatan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan MAsyarakat | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) |
| | | | Angka Kematian Neonatal |
| | | | Angka Kematian Bayi |
| | | | Angka Kematian Balita |
| | | | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | | Persentase Imunisasi Dasar Lengkap |
| | | | *Bed Occupancy Rate* (BOR) |
| | | | *Average Length of Star* (ALOS) |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan |
| 3 | Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan |

**3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir.
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pembangunan jaringan sistem perpipaan air minum (SPAM) di kawasan perkotaan.
c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan, revitalisasi saluran drainase kawasan perkotaan, penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
d. Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas bangunan gedung sesuai dengan fungsi bangunan.
e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya. Program ini diarahkan pada peningkatan bangunan dan lingkungan yang tertata.
f. Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman, seperti kegiatan penyelenggaraan jalan meliputi peningkatan jalan mantap pada kota, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan dan jembatan serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana, termasuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga konstruksi dalam bentuk pelatihan tenaga terampil konstruksi, fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi.
h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
i. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Program ini diarahkan untuk peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditujukan untuk pelaksanaan kinerja :

1. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana banjir.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak dan aman.
2. Meningkatnya pengelolaan serta kualitas sistem drainase perkotaan.
3. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
5. Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
6. Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi.
7. Meningkatnya konektivitas wilayah.
8. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal.
9. Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir |
| 2 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 3 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik |
| 4 | Penataan Bangunan Gedung | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang dibangun/dipelihara |
| 5 | Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan kota |
| 6 | Penyelenggaraan Jalan | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota |
| | | | Tingkat kemantapan jalan |
| 7 | Pengembangan Jasa Konstruksi | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi |
| 8 | Penyelenggaraan Penataan Ruang | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Ketaatan pelaksanaan penataan ruang |
| 9 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase RTH |
| 10 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) |

**4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan. Program ini diarahkan pada pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di perkotaan.
b. Program Kawasan Permukiman. Program ini diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman menjadi kawasan yang layak huni melalui penanganan kawasan permukiman kumuh.
c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Program ini diarahkan pada pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di permukiman.

Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk pelaksanaan kinerja :

1. Terlaksananya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman melalui penanganan kawasan kumuh.
3. Terlaksananya pemeliharaan PSU di kawasan permukiman.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Perumahan | Meningkatnya pengembangan perumahan | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni |
| 2 | Kawasan Permukiman | Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman | Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani |
| 3 | Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utiltas Umum (PSU) | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) |

**5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program ini diarahkan pada peningkatan pencegahan, penanganan dan penindakan ganggunan ketentraman dan ketertiban umum.
b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
c. Program Penanggulangan Bencana. Program ini diarahkan pada peningkatan layanan terhadap informasi rawan bencana, pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB), pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; Penghitungan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).

Pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditujukan untuk pelaksanaan kinerja :

1. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
3. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat.
5. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas |
| | | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan |
| 2 | Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran |
| 3 | Penanggulangan Bencana | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Indeks Risiko Bencana |
| | | | Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
| | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana |
| | | | Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
| | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani |

**6. Urusan Sosial**

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial, Program ini diarahkan pada pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kemampuan tenaga kesejahteraan sosial, dan penguatan kapasitas lembaga kesejahteraan keluarga.
b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Program ini diarahkan pada upaya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
c. Program Rehabilitasi Sosial. Program ini diarahkan pada penyediaan permakanan, sandang dan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi, pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan

dasar, dan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan jaminan sosial kepada keluarga miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, fakir miskin, dan anak-anak terlantar. Program ini juga diarahkan untuk pendataan fakir miskin yang berkualitas dan teridentifikasi dengan data kependudukan.
e. Program Penanganan Bencana. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial serta dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Program ini diarahkan untuk peningkatan tata kelola Taman Makam Pahlawan.

Pelaksanaan urusan sosial ditujukan selain untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga untuk pelaksanaan kinerja :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
3. Meningkatnya rehabilitasi sosial.
4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial.
5. Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana.
6. Meningkatnya tata kelola Taman Makan Pahlawan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberdayaan Sosial | Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial | Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan |
| | | | Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan |
| 2 | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | Persentase Warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal |
| 3 | Rehabilitasi Sosial | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar |
| 4 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk |
| | | | Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar |
| | | | Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial |
| | | | Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial |
| | | | Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial |
| | | | Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial |
| 5 | Penanganan Bencana | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap |
| | | | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat |
| | | | Persentase korban bencana yang ditangani |
| 6 | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik secara fisik, kelayakan, dan kepatutan |

### 4.1.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

**1. Urusan Tenaga Kerja**

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja baik secara makro maupun mikro.
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi, penyediaan sarana pelatihan kerja, dan pembinaan lembaga pelatihan kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Program ini diarahkan pada peningkatan penempatan tenaga kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, peningkatan pelayanan disabilitas ketenagakerjaan dan peningkatan pelatihan bagi wirausaha baru, Job Fair/Bursa Kerja dan peningkatan pelayanan informasi Pasar Kerja.
d. Program Hubungan Industrial. Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan hak-hak tenaga kerja, upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Pelaksanaan urusan tenaga kerja ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:
1. Terkelolanya informasi tenaga kerja.
2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta berbasis kompetensi.
3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja.
4. Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Tenaga Kerja | Terkelolanya informasi tenaga kerja | Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja |
| 2 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat berbasis kompetensi |
| 3 | Penempatan Tenaga Kerja | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan |
| 4 | Hubungan Industrial | Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun |
| | | | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) |
| | | | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek |
| | | | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah |

**2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kegiatan pengarustamaan gender (PUG), peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada

organisasi kemasyarakatan, dan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

b. Program Perlindungan Perempuan. Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penguatan /pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Program ini juga diarahkan untuk penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Program ini diarahkan pada pemanfaatan data gender dan anak dalam suatu kelembagaan data.
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Program ini diarahkan pada terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif melalui peningkatan jejaring kemitraan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
f. Program Perlindungan Khusus Anak. Program ini diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ekspolitasi, penelantaran, perlakuan salah terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam pembangunan.
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak.
5. Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif.
6. Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ekspolitasi penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase anggaran responsif gender (ARG) |
| 2 | Perlindungan Perempuan | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan |
| | | | Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan |
| 3 | Peningkatan Kualitas Keluarga | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Persentase penyedia layanan bagi keluarga mewujudkan kualitas keluarga |
| 4 | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | Persentase lembaga/OPD yang melaksanakan data terpilah |
| 5 | Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Persentase pembinaan forum anak |
| | | | Persentase jumlah sarana dan prasarana ramah anak |
| 6 | Perlindungan Khusus Anak | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif |

**3. Urusan Pangan**

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program ini diarahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan melalui penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan. Selain itu program ini juga diarahkan untuk pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

b. Program Kerawanan Pangan. Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan melalui ketersediaan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan.

Pelaksanaan urusan pangan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
2. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan |
| 2 | Penanganan Kerawanan Pangan | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan |

**4. Urusan Lingkungan Hidup**

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kajian perencanaan lingkungan untuk memitigasi dampak KRP.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini diarahkan pada upaya penurunan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, pengeleloaan Ruang Terbuka Hijau, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragamaan hayati, serta pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan B3 dan Limbah B3 dalam bentuk fasilitasi administrasi/ perizinan utnuk pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan terhadap

usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan SDM dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Program ini diarahkan pada pemberian apresiasi masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Program ini diarahkan pada peningkatan penyelesaian sengketa/ kasus/ pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPPLH).
i. Program Pengelolaan Persampahan. Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola persampahan, pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengaturan kebijakan pengelolaan persampahan, serta penyediaan sarpras pengelolaan persampahan TPA.

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya kualitas kajian perencanaan lingkungan.
2. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati.
4. Meningkatnya penanganan Limbah B3.
5. Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.
6. Meningkatnya kapasitaa SDM bidang lingkungan hidup.
7. Meningkatnya kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Meningkatnya penyelesaian kasus/ sengketa di bidang lingkungan hidup.
9. Meningkatnya tata kelola persampahan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Lingkungan Hidup | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti |
| 2 | Pengendalian Pencemaran dan/ atau | Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air |
| | | | Indeks Kualitas Udara |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| | Kerusakan Lingkungan Hidup | | |
| 3 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase Ruang terbuka Hijau (RTH) |
| 4 | Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase limbah B3 yang terkelola |
| 5 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Meningkatnya kepatuhana usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH |
| 6 | Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya |
| 7 | Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
| 8 | Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus di bidang lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup |
| 9 | Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya tata kelola persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah |

**5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk.
b. Program Pencatatan Sipil. Program ini diarahkan pada peningkatan layanan pencatatan sipil.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan, pengumpulan Data kependudukan, serta pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas profil kependudukan.

Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk.
2. Meningkatnya layanan pencatatan sipil.
3. Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan.
4. Meningkatnya kualitas profil kependudukan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran Penduduk | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | Cakupan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk |
| 2 | Pencatatan Sipil | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Penertbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dicatatkan |
| | | | Cakupan pelayanan pencatatan sipil yang di tingkatkan |
| | | | Cakupan pelayanan secara aktif terkait pencatatan sipil |
| | | | Cakupan sosialisasi terkait pencatatan sipil |
| 3 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Persentase lembaga/ OPD yang melakukan kerja sama dan memanfaatkan data kependudukan |
| | | | Cakupan fasilitasi terkait pengelolaan Informasi administrasi kependudukan |
| 4 | Pengelolaan Profil Kependudukan | Meningkatnya kualitas profil kependudukan | Cakupan penyediaan data kependudukan kota |
| | | | Persentase profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan |

**6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. dalam pembangunan

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan |

**7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rencana program prioritas urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk. Program ini diarahkan pada pengendalian pertambahan jumlah penduduk melalui sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk.
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB melalui penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, informal yang melakukan pendidikan kependudukan, serta fasilitasi tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS).

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk.
2. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB.
3. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengendalian Penduduk | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | Pengendalian angka kelahiran (TFR) |
| | | | Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun |
| 2 | | Meningkatnya pemberdayaan dan | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| | Pembinaan Keluarga Bencana (KB) | peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) |
| 3 | Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentasi peran keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga |

**8. Urusan Perhubungan**

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada peningkatan layanan transportasi darat melalui penyediaan perlengkapan jalan, peningkatan pengelolaan terminal penumpang tipe C, peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyedian angkutan umum orang dan/atau barang, dan peningkatan pengelolaan penyelenggaraan fasilitas parkir.
b. Program Pengelolaan Pelayaran. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi laut.

Pelaksanaan urusan Perhubungan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja;

1. Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat.
2. Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Konektivitas Darat |
| | | | Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal |
| 2 | Pengelolaan Pelayaran | Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut | Konektivitas Laut |

**9. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini diarahkan pada peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi

publik, peningkatan pelayanan informasi publik, dan peningkatan tata kelola informasi publik pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penunjang pelayanan publik dan pemerintahan.

Pelaksanaan urusan komunikasi dan inormatika ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi dan informasi publik pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika di lingkungan pemerintah daerah.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasaan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah |
| 2 | Pengelolaan Aplikasi Informatika | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah |

**10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. Program ini diarahkan pada peningkatan fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi.
b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Program ini diarahkan pada peningkatan kepatuhan koperasi pada peraturan perundang-undangan.
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi.
d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro.
e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar,

akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manjemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan usaha, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran serta para pemangku kepentingan.
g. Program Pengembangan UMKM. Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditujukan untuk pelaksanaan kinerja :

1. Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam.
2. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi.
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi.
4. Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian.
5. Meningkatnya produktivitas koperasi.
6. Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri.
7. Meningkatnya daya saing UMKM.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan volume usaha koperasi (persentase) |
| 2 | Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi |
| 3 | Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif |
| 4 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan |
| 5 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Koperasi yang berkualitas |
| 6 | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari Informal ke Formal |
| | | | Pertumbuhan Wirausaha |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 7 | Pengembangan UMKM | Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor |

**11. Urusan Penanaman Modal**

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi melalui pemberian fasilitas/ intensif dan kemudahan dalam perizinan berinvesasi dan penyediaan data informasi potensi peluang investasi di Kota Tanjung Balai.
b. Program Promosi Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan promosi investasi baik melalui media cetak maupun elektronik.
c. Program Pelayanan Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada peningkatan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai ketentuan.
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada terkendalilnya pelaksanaan penanaman modal melalui penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.
e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan data dan informasi penanaman modal.
f. Program Kerja Sama Penanaman Modal. Program ini diarahkan untuk peningkatan efektivitas kerja sama penanaman modal.

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal ditujukan untuk pelaksanaan kinerja :

1. Meningkatnya kemudahan berinvestasi.
2. Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal.
3. Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko.
4. Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal.
5. Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal.
6. Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Realisasi total terhadap target investasi |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 2 | Promosi Penanaman Modal | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase peningkatan investor yang berinvestasi |
| 3 | Pelayanan Penanaman Modal | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan |
| 4 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha |
| 5 | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal |

**12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumberdaya kepemudaan yang berdaya saing, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan. Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan olahraga dan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, pengembangan olahraga berprestasi dan olahraga rekreasi, serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualiats serta pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya daya saing kepemudaan.
2. Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga.
3. Meningkatnya kualitas kepramukaan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Rasio wirausaha pemuda |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 2 | Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga | Persentase atlet yang masuk Pelatnas |
| 3 | Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Meningkatnya kualitas kepramukaan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan |

**13. Urusan Statistik**

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini diarahkan pada peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi terhadap sistem statistik nasional serta penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pelaksanaan urusan statistik ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral |

**14. Urusan Persandian**

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Program ini diarahkan pada peningkatan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik.

Pelaksanaan urusan persandian ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintahan Daerah | Tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Daerah |

**15. Urusan Kebudayaan**

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan budaya dalam bentuk festival seni dan budaya.
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Program ini diarahkan pada pelestarian dan pengembangan kesenian/kebudayaan.
c. Program Pembinaan Sejarah. Program ini diarahkan pada pengelolaan/ pelestarian sejarah lokal.
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Program ini diarahkan pada peningkatan pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

Pelaksanaan urusan kebudayaan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah.
4. Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Kebudayaan | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Persentase tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan |
| 2 | Pengembangan Kesenian Tradisional | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 3 | Pembinaan Sejarah | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Persentase tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal |
| 4 | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase warisan budaya yang dilestarikan |

**16. Urusan Perpustakaan**

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini diarahkan pada peningkatan layanan perpustakaan sesuai standar nasional melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, pemenuhan koleksi perpustakaan, serta pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dan Gerakan Budaya Gemar Membaca.
b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno. Program ini diarahkan pada peningkatan pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan koleksi budaya.

Pelaksanaan urusan kebudayaan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
2. Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembinaan Perpustakaan | Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat |
| 2 | Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki |

**17. Urusan Kearsipan**

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis.
b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelematan arsip sesuai NSPK dan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap penggunaan arisp yang bersifat tertutup.

Pelaksanaan urusan kearsipan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis.
2. Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Arsip | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Persentase tingkat ketersediaan arsip |
| 2 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip |
| 3 | Perizinan Penggunaan Arsip | Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup |

### 4.1.3 Urusan Pilihan

**1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pemberdayaan nelayan kecil, penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, serta penerbitan izin usaha perikanan tangkap.
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya melalui pemberdayaan pembudi daya ikan tawar dan peningkatan prasarana pembudidaya ikan.
c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan, pembinaan terhadap usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala mikro dan kecil, serta penyediaan sarana dan prasarana pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan.

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap.
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya.
3. Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Perikanan Tangkap | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap |
| 2 | Pengelolaan Perikanan Budidaya | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Jumlah produksi perikanan budidaya |
| 3 | Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka konsumsi ikan |

**2. Urusan Pariwisata**

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata.
b. Program Pemasaran Pariwisata. Program in diarahkan pada peningkatan jangkauan promosi pariwisata melalui media cetak dan media elektronik maupun media lainnya, serta fasilitasi kegiatan pemasaran pariwsata.
c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Program ini diarahkan untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dalam bentuk standarisasi usaha bagi pelaku ekonomi kreatif serta pemberian sertifikasi profesi terhadap pelaku ekonomi kreatif.
d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini diarahkan pada pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Pelaksanaan urusan pariwisata ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya daya tarik destinasi wisata.
2. Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata.
3. Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif.
4. Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Meningkatnya daya tarik distinasi pariwisata | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan |
| 2 | Pemasaran Pariwisata | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata |
| 3 | Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual |
| 4 | Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi |

**3. Urusan Pertanian**

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian dalam bentuk pengawasan penggunaan sarana pertanian, peningkatan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil, serta penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
b. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam bentuk penjaminan kesehatan hewan, penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular, termasuk peningkatan kapasitas SDM petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan.
c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Program ini diarahkan untuk peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam bentuk pengendalian terhadap lahan pertanian dari organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura, dan pertanian.
d. Program Penyuluhan Pertanian. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian.

Pelaksanaan urusan pertanian ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian.
2. Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
3. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
4. Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan produksi tanaman pangan |
| 2 | Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) |
| 3 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase penanganan bencana pertanian |
| 4 | Penyuluhan Pertanian | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan |

**4. Urusan Perdagangan**

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pengurusan izin dan pendaftaran berusaha, seperti izin pengelolaan, penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Wiralaba (STPW).
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan peningkatan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang perdagangan.
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Program ini diarahkan pada peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga kebutuhan dalam bentuk penjaminan ketersediaan barang, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus.

d. Program Pengembangan Ekspor. Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor melalui promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.
e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Program ini diarahkan pada peningkatan tertib niaga dan mutu produk dalam bentuk pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.
f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Program ini diarahkan pada peningkatan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri.

Pelaksanaan urusan perdagangan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha.
2. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang perdagangan secara merata dan terintegrasi.
3. Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting.
4. Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor.
5. Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk.
6. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi |
| 2 | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang perdagangan secara merata dan terintegrasi | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya |
| 3 | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase koefisien harga antar waktu |
| 4 | Pengembangan Ekspor | Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor | Pertumbuhan nilai ekspor non migas |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 5 | Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku |
| 6 | Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan |

**5. Urusan Perindustrian**

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Program ini diarahkan pada pembangunan sumberdaya industri, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan industri.
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI.
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan informasi industri melalui penyediaan data dan informasi industri.

Pelaksanaan urusan Perindustrian ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya pembangunan industri.
2. Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian.
3. Meningkatnya pemanfaatan informasi industri.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan dan Pembangunan Industri | Meningkatnya pembangunan industri | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK |
| 2 | Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait |
| 3 | Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Persentase data perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industry di kab/kota yang masuk dalam SII Nas |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | | terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industry di kab/kota |

### 4.1.4 Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

**1. Sekretariat Daerah**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Program ini diarahkan pada Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan; Peningkatan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan; Peningkatan komunikasi dan publikasi kegiatan KDH; dan penigkatan kerjasama daerah dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pembangunan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah; 2) Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan; 3) Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Tanjung Balai dan Kepala Daerah; 4) Indeks Pelayanan Publik.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daeah dan BLUD; Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat.
2. Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat | Cakupan capaian kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 2 | Perekonomian dan Pembangunan | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Cakupan pelaksanaan kegiatan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan |

**2. Sekretariat DPRD**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas persidangan dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, pembahasan kebijakan anggaran dan pembahasan APBD, serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan unsur sekretariat DPRD ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah APBD dan Persentase Penetapan Ranperda |

### 4.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

**1. Urusan Perencanaan**

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan peningkatan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Pelaksanaan unsur perencanaan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD |
| | | | Persentase keselarasan RPJMD dengan renstra perangkat daerah |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA |

**2. Urusan Keuangan**

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatasusahaan keuangan daerah / perbendaharaan dalam pelaksanaan APBD, dan peningkatan kualitas pelaporan

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta pengelolaan data SIPD.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan aset daerah.
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program ini diarahkan pada optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah.

Meningkatnya tata kelola akuntansi Pelaksanaan unsur keuangan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya tata kelola anggaran.
2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan.
3. dan pelaporan.
4. Meningkatnya tata kelola aset daerah.
5. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya tata kelola anggaran | Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD |
| | | Meningkatnya tata kelola perbendaharaan | Realisasi anggaran belanja |
| | | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | Kualitas laporan keuangan konsolidasi (Kelengkapan, Ketepatan Waktu, dan Akurasi) |
| 2 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Meningkatnya tata kelola aset daerah | Persentase penambahan nilai aset tetap |
| 3 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah |

**3. Urusan Kepegawaian**

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Kepegawaian Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, pengembangan kompetensi ASN, peningkatan tata kelola pengembangan karir ASN, serta peningkatan kualitas dalam penilaian kinerja ASN.

Pelaksanaan unsur kepegawaian ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian.

2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN.
3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN.
4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepegawaian Daerah | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi |
| | | Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya |
| | | Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya |
| | | Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik |

**4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program ini diarahkan pada peningkatan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerian dan fungsional ASN, peningkatan kualitas diklat, peningkatan layanan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi, dan peningkatan layanan pengembangan kompetensi teknis.

Pelaksanaan unsur pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi, dasar, kader, manajerial dan fungsional.
2. Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi.
3. Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi.
4. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi, dasar, kader, manajerial dan fungsional | Persentase ASN yang mengikuti pengembangan komptensi dasar, manajerial dan fungsional |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi | Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan |
| | | Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi | Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi |
| | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | Persentase ASN pengembangan kompetensi teknis |

**5. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
b. Program Riset dan Inovasi Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan inovasi daerah yang dihasilkan dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan unsur penelitian dan pengembangan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan.
2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah.
3. Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan |
| | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam | Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | penyelesaian permasalahan daerah | |
| 2 | Riset dan Inovasi Daerah | Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan | Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan |

**6. Urusan Inspektorat Daerah**

Rencana program prioritas unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan. Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan internal dan peningkatan penyelesaian kasus-kasus penyelewengan atau penyimpangan pada tingkat internal pemerintah.
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.

Pelaksanaan unsur inspektorat ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses.
2. Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pengawasan | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses. | Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 |
| 2 | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
| | | | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |

### 4.1.6 Unsur Kewilayahan

**1. Urusan Kecamatan**

Rencana program prioritas unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini diarahkan pada Peningkatan efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi.
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Lembaga mayarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
e. Program Pengelolaan Persampahan. Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola persampahan, pelayanan pengangkutan sampah dari TPS, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pelaksanaan unsur kecamatan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Lembaga mayarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
5. Meningkatnya tata kelola persampahan pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Lembaga mayarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan | Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan |
| 3 | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan | Cakupan penyelenggaraan trantibum di kecamatan |
| 4 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan |
| 5 | Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya tata kelola persampahan pada tingkat kecamatan dan kelurahan | Persentase sampah yang tertangani |

### 4.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

**1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Rencana program prioritas unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Program ini diarahkan pada peningkatan etika dan budaya politik melalui pendidikan politik.
c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan kewasdaan dini,

kesejasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, dan penanganan konflik di daerah.

Pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
2. Meningkatnya etika dan budaya politik.
3. Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan.
4. Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
5. Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Jumlah Kasus SARA |
| 2 | Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu |
| | | | persentase parpol tertib administrasi |
| 3 | Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Jumlah Ormas Terdaftar |
| | | | Persentase Ormas aktif / Melaporkan Kegiatan |
| | | | Indeks Kinerja Ormas |
| | | | Indeks Kebebasan Sipil (TPB) |
| 4 | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | Jumlah Kasus SARA |
| | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) |
| | | | persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Generasi Muda |
| 5 | Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Angka Kriminal Tertangani >= 70% |
| | | | Jumlah unjuk rasa & yang berakhir ricuh = 60 / 0 |

| No | Program | Kinerja | Indikator |
|---|---|---|---|
| | Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | Jumlah konflik Sosial <10 |
| | | | Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya(TPB) = 70% |

Pemerintah Kota Tanjungbalai menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumatera Utara dengan merumuskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai. Berbagai upaya strategis dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dari pemerintah kota adalah memperbaiki infrastruktur dasar, memberikan dukungan pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan ekonomi lokal melalui berbagai bantuan kepada nelayan dan pelaku UMKM. Semua program tersebut berlandaskan pada tujuan untuk menciptakan pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

**Tabel 4. 1. Dukungan Program Hasil Terbaik Cepat Kota Tanjungbalai terhadap PHTC Sumatera Utara**

| PHTC Kota Tanjungbalai | PHTC Provinsi Sumatera Utara |
|---|---|
| Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP | Penyediaan SDM Unggul yang siap bekerja |
| Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC | Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan usia harapan hidup |
| Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil | |
| Melanjutkan Program Bantuan Nelayan dan UMKM untuk menghilangkan kemiskinan absolut | Peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani |
| | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang responsif, lincah dan memahami kebutuhan |
| Melanjutkan penyediaan infrastruktur jalan, sanitasi dan drainase | Melanjutkan pembangunan infrastruktur merata, terhubung dan ramah lingkungan |

| PHTC Kota Tanjungbalai | PHTC Provinsi Sumatera Utara |
|---|---|
| | Meningkatkan peran desa dan keterlibatan masyarakat untuk menghasilkan kemajuan daerah |

Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen penuh untuk mendukung dan mensukseskan 17 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Utara. Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan 15 program prioritas Kota Tanjungbalai yang telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai. Melalui sinergi yang erat antara program provinsi dan daerah, pemerintah kota berupaya untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi, pemerintah kota bertekad untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mendukung visi dan misi pembangunan provinsi.

**Tabel 4. 2. Dukungan Program Prioritas Kota Tanjungbalai terhadap Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara**

| Program Prioritas Kota Tanjungbalai | Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara |
|---|---|
| 5. Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR) | 1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal. |
| | 2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi |
| 6. Kesehatan Prima dan Merata | 3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu. |
| 12. Generasi Sehat dan Bebas Stunting | |
| | 4. Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah. |
| 15 Penyediaan Akses Air Bersih untuk Seluruh Masyarakat (AIR SEHAT) | 5. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru. |
| | 6. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal. |
| | 7. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan |

| Program Prioritas Kota Tanjungbalai | Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara |
|---|---|
| | Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal). |
| 9. Ekonomi Mandiri dan UMKM Naik Kelas (EKOMAS) | 8. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi. |
| 14. Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 9. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran. |
| 1. ASN Berkualitas dan Berintegritas | 10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. |
| 2. Regulasi Adaptif dan Partisipatif | |
| 4. Digitalisasi Pelayanan Publik | 11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat. |
| 7. Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing | 12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal. |
| | 13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing. |
| 8. Kota Bersih dan Tangguh Bencana | 14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana. |
| 13. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa. |
| 11. Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya | 16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun. |
| 10. Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman | 17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib. |

Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan penyelarasan yang cermat antara indikator emas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah berjalan seiring dengan arah kebijakan provinsi. Penyelarasan ini mencakup penetapan indikator yang relevan dan terukur, yang tidak hanya mendukung pencapaian visi dan misi kota, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan provinsi. Melalui langkah-langkah terintegrasi, pemerintah Kota Tanjungbalai memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD dapat memberikan dampak positif yang selaras dengan prioritas pembangunan

provinsi, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun infrastruktur. Penyelarasan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk mencapai pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## Tabel 4. 3. Penyelarasan Indikator Emas (IE) RPJMN dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **MISI 1** | **TRANSFORMASI SOSIAL** | | | | **TRANSFORMASI SOSIAL** | | | | **TRANSFORMASI SOSIAL** | | | | | | | |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 1** | **Kesehatan untuk Semua** | | | | **Kesehatan untuk Semua** | | | | **Kesehatan untuk Semua** | | | | | | | |
| 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 72,13 (2023) | 74.43 | 75.4 | Usia Harapan Hidup (tahun) | 73.9 | 74.1 | 74.72 | Usia Harapan Hidup (tahun) | 74.22 | 74.50 | 74.78 | 75.05 | 75.33 | 75.60 | 75.88 |
| 2.a | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 189 (2020) | 122 | 77 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 52.22 | 65.78 | 49.21 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | | | | | | | |
| 2.b | Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 21,50 (2023) | 18.8 | 14.2 | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 22 | 20 | 14 | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| 3.a | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 387 (2023) | 329 | 190 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 71.8 | 90 | 90 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | | | | | | | |
| 3.b | - | | | | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment | 85 | 90 | 90 | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment | | | | | | | |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | | success rate) (%) | | | | success rate) (%) | | | | | | | |
| 4 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | 98.42 | 98.6 | 99 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | 93 | 98.6 | 99 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | | 98.30 | 98.39 | 98.47 | 98.56 | 98.64 | 98.73 |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 2** | **Pendidikan Berkualitas yang Merata** | | | | **Pendidikan Berkualitas yang Merata** | | | | **Pendidikan Berkualitas yang Merata** | | | | | | | |
| 5.a.1 | Rata-rata Nilai PISA | | | | a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional | | | | | | | |
| | a-I Membaca | 359 (2022) | 396 | 409 | i. Literasi Membaca | N/A | 6,06-12,12 | 27,27-30,30 | Literasi SD | 55,62 | 58,12 | 60,62 | 63,12 | 65,62 | 68,12 | 70,62 |
| | a-ii Matematika | 366 (2022) | 404 | 416 | ii. Numerasi | N/A | 0,00-3,03 | 6,06-9,09 | Numerasi SD | 51,37 | 54,37 | 57,17 | 60,07 | 62,97 | 65,87 | 68,77 |
| | a-iii Sains | 383 (2022) | 416 | 426 | | | | | | | | | | | | |
| 5.b | Rata-rata nilai asesmen nasional | | | | b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum | | | | b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum | | | | | | | |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | | pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | | | | |
| | b-i Literasi Membaca | 60,89 (2023) | 62.89 | 66.89 | i. Literasi Membaca | N/A | 35,99-38,49 | 41,53-44,03 | i. Literasi SMP | 65,69 | 66,79 | 67,89 | 68,99 | 70,09 | 71,19 | 72,29 |
| | b-ii Numerasi | 51,36 (2023) | 54.36 | 59.86 | ii. Numerasi | N/A | 33,70-36,20 | 37,70-40,20 | ii. Numerasi SMP | 59,34 | 60,84 | 62,34 | 63,84 | 65,34 | 66,64 | 68,34 |
| 5.c | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9.22 | 9.33 | 9.82 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9.93 | 10,3 - 10,33 | 10,83 - 10,84 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,69 | 9,75 | 9,90 | 10,05 | 10,20 | 10,35 | 10,50 |
| 5.d | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13.21 | 13.32 | 13.58 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13.49 | 13,61 - 13,63 | 13,86 - 13,87 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,15 | 13,74 | 14,02 | 14,17 | 14,56 | 14,67 | 14,86 |
| 6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) | 31,45 (2023) | 33.94 | 38.04 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | N/A | 11.12 | 11,12-11,40 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | n/a | 6,5 | 7,33 | 8,17 | 9,00 | 9,84 | 10,67 |
| 7 | Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 66,30 (2023) | 66.78 | 67.66 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian | N/A | 71.1 | 76.59 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian | n/a | | | | | | |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | | Menengah Tinggi (%) | | | | Menengah Tinggi (%) | | | | | | | |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 3** | **Perlindungan Sosial yang Adaptif** | | | | **Perlindungan Sosial yang Adaptif** | | | | **Perlindungan Sosial yang Adaptif** | | | | | | | |
| 8 | Tingkat Kemiskinan (%) | 9.03 | 7,0-8,0 | 4,5-5,0 | Tingkat Kemiskinan (%) | 7.19 | 6,96-7,16 | 2,82-3,82 | Tingkat Kemiskinan (%) | 11,97 | 11,50 - 11,00 | 10,75-10,25 | 10,00-9,50 | 9,25-8,75 | 8,50-8,00 | 7,75-7,25 |
| 9 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 29,77 (semester I) | 32.15 | 43.92 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | N/A | 29.27 | 40.61 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | n/a | 55.00 | 56.04 | 57.08 | 58.12 | 59.16 | 60.20 |
| 10 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 9,07 (2023) | 10 | 12 | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) | N/A | 27 | 27.8 | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) | | | | | | | |
| **MISI 2** | **TRANSFORMASI EKONOMI** | | | | **TRANSFORMASI EKONOMI** | | | | **TRANSFORMASI EKONOMI** | | | | | | | |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 4** | **Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi** | | | | **Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi** | | | | **Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi** | | | | | | | |
| 11.a | Rasio PDB Industri Pengolahan (%) | 18,67 (2023) | 20.8 | 21.9 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 18.36 | 18.66 | 19.86 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 20,97 | 21,00 | 21,54 | 21,86 | 22,30 | 22,74 | 23,00 |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 11.b | Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | 1,30 (2023) | 2.2 | 3.46 | | | | | | | | | | | | |
| 12.a | Rasio PDB Pariwisata (%) | 3,6 (2022) | 4,50-4,60 | 4,90-5,00 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 2.21 | 2.42 | 2.73 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,1 | 2,11 | 2,12 |
| 12.b | Devisa Pariwisata (miliar USD) | 14,0 (2023) | 19-22,1 | 32,0-39,4 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) | 142.71 | 330 | 421.14 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) | 996 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 |
| 13 | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) | 6,77 (2023) | 7,3-7,9 | 8,0-8,4 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) | N/A | 5.45 | 5.43 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) | n/a | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| 14.a | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) | 3.06 | 3.1 | 3.3 | a.i. Proporsi jumlah UKM non pertanian pada Level Provinsi (%) | N/A | 10,66-10,81 | 10,70-10,85 | a.i. Proporsi jumlah UKM non pertanian pada Level Provinsi (%) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| | | | | | a.ii. Proporsi jumlah industri kecil menengah pada level provinsi (%) | N/A | 5.04 | 5,50-6,50 | a.ii. Proporsi jumlah industri kecil menengah (%) | | | | | | | |
| 14.b | Rasio kewirausahaan (%) | 3.08 | 3.1 | 3.6 | Rasio Kewirausahaan | 3.6 | 3.63 | 4.25 | Rasio Kewirausahaan | 3.24 | 3.47 | 3.70 | 3.92 | 4.15 | 4.37 | 4.60 |
| 14.c | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%) | 1,07 (2021) | 1.1 | 1.2 | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%) | N/A | 0.79 | 0.81 | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%) | | | | | | | |
| 14.d | Return on Aset (ROA) BUMN (%) | 3,14 (2023) | 3.21 | 3.42 | ROA BUMD | N/A | 1.24 | 1.97 | ROA BUMD | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 15.a | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4.91 | 4,50-5,00 | 4,00-4,71 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5.6 | 5,27-5,56 | 4,74-5,20 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,08 | 3,69-4,02 | 3,55-3,92 | 3,41-3,83 | 3,26-3,73 | 3,12-3,63 | 2,98-3,53 |
| 15.b | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 23.96 | 35 | 46 | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | N/A | 43 | 50.4 | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | n/a | | | | | | |
| 16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 56.42 | 56,30-58,80 | 56,70-60,89 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 58.54 | 59,29-61,67 | 59,48-63,87 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | n/a | 50 | 50,23 | 50,55 | 50,77 | 51,2 | 51,33 |
| 17.a | Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB) | 0,28 (2020) | 0.3 | 0.45 | - | | | | - | | | | | | | |
| 17.b | Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat) | 54 | 53 | 49 | Indeks Inovasi Daerah | 59.93 | 57,50-60,01 | 62,26-63,01 (Sangat Inovatif) | Indeks Inovasi Daerah | 34,28 | 35,33 | 36,65 | 37,45 | 38,72 | 39,12 | 39,88 |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 5** | **Penerapan Ekonomi Hijau** | | | | **Penerapan Ekonomi Hijau** | | | | **Penerapan Ekonomi Hijau** | | | | | | | |
| 18.a | Indeks Ekonomi Hijau | 60,08 (2023) | 68.34 | 77.2 | Indeks Ekonomi Hijau | N/A | 51.12 | 51.18 | Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | n/a | | | | | | |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 18.b | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 13,2 (2023) | 20 | 23 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 47.73 | 53.21 | 82.76 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan | 13,71 | 13,72 | 13,73 | 13,74 | 13,75 | 13,76 | 13,77 |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 6** | **Transformasi Digital** | | | | **Transformasi Digital** | | | | **Transformasi Digital** | | | | | | | |
| 19 | Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) | 45 (2023) | 43 | 40 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | N/A | 6 | 6.9 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | n/a | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 7** | **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global** | | | | **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global** | | | | **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global** | | | | | | | |
| 20 | Biaya Logistik (% PDB) | 14,29 (2022) | 13.52 | 12.5 | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi | N/A | 10.1 | 9.5 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok | | | | | | | |
| 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) | 29,3 (2023) | 29.4 | 29.9 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 28.65 | 29.7 | 29.9 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | | 29.50 | 29.18 | 28.85 | 28.53 | 28.20 | 27.88 |
| 22 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) | 21,7 (2023) | 21.7 | 22.6 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 12.56 | 16,45-16,54 | 17,13-17,41 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | | | | | | | |
| | | | | | a) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap | 72.75 | 73.48 | 90.64 | | | | | | | | |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 8** | **Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi** | | | | **Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi** | | | | **Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi** | | | | | | | |
| 23.a | Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) | 44,13 (2023) | 44.35 | 45.6 | Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) | N/A | 2.26 | 2.33 | | | | | | | | |
| 23.b | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 65.25 | 67 | 74 | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 73.47 | 74.36 | 80.87 | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | | | | | | | |
| 23.c | Persentase Desa Mandiri (%) | 22.85 | 23.29 | 25.79 | Persentase Desa Mandiri (%) | 3.1 | 8.44 | 8.93 | Persentase Desa Mandiri (%) | | | | | | | |
| **MISI 3** | **TRANSFORMASI TATA KELOLA** | | | | **TRANSFORMASI TATA KELOLA** | | | | **TRANSFORMASI TATA KELOLA** | | | | | | | |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 9** | **Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif** | | | | **Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif** | | | | **Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif** | | | | | | | |
| 24 | Indeks Materi Hukum | 0,60 (2023) | 0.51 | 0.55 | Indeks Reformasi Hukum | 85.9 | 87.5 | 89.5 | Indeks Reformasi Hukum | B | B | B | B | B | B | B |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 25 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,79 (2023) | 3 | 2,00 (b) | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | N/A | 3.45 | 3.71 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,24 | 3,36 | 3,55 | 3,68 | 3,77 | 3,89 | 3,96 |
| 26 | Indeks Pelayanan Publik | 3,78 (2023) | 3,68 (a) | 3.8 | Indeks Pelayanan Publik | N/A | 3.92 | 3.96 | Indeks Pelayanan Publik | 3,14 | 3,33 | 3,78 | 3,8 | 3,97 | 4,1 | 4,36 |
| 27.a | Indeks Integritas Nasional | 70,97 (2023) | 74.52 | 77.57 | Indeks Integritas Nasional | N/A | 66.78 | 69.51 | Indeks Integritas Daerah | | 66.78 | 67.45 | 68.11 | 68.78 | 69.44 | 70.11 |
| 27.b | Indeks Persepsi Korupsi | 34 (2023) | 38 | 43.7 | | | | | Indeks Persepsi Korupsi | | | | | | | |
| **MISI 4** | **SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA** | | | | **SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA** | | | | **SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA** | | | | | | | |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 10** | **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial** | | | | **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial** | | | | **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial** | | | | | | | |
| 28 | Indeks Pembangunan Hukum | 0,68 (2023) | 0.69 | 0.73 | a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah | N/A | 70 | 75.7 | Indeks Pembangunan Hukum | | | | | | | |
| | | | | | b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | 86.2 | 86.5 | 87.7 | | | | | | | | |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 29 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 62,8 (2020) | 67.5 | 68.5 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | N/A | 58.5 | 62 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | | | | | | | |
| 30 | Indeks Demokrasi Indonesia | 79,51 (2023) | 81,69-85,23 | 83,42-86,96 | Indeks Demokrasi Indonesia | 80,34 (2023) | 80.5 | 82.5 | Indeks Demokrasi | | | | | | | |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 11** | **Stabilitas Ekonomi Makro** | | | | **Stabilitas Ekonomi Makro** | | | | **Stabilitas Ekonomi Makro** | | | | | | | |
| 31 | Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%) | 10.07 | 10.24 | 11,52-15,00 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | N/A | 2.58 | 3.04 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 |
| 32 | Tingkat Inflasi (%) | 1.57 | 2,5 ± 1,0 | 2,5 ± 1,0 | Tingkat Inflasi (%) | 2.12 | 2,5±1 | 2±1 | Tingkat Inflasi (%) | 2,86 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.41 |
| 33.a | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) | 40,5 (2023) | 43 | 50.9 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB | N/A | 28.77 | 33.92 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB | | | | | | | |
| 33.b | Aset Dana Pensiun/PDB (%) | 7,3 (2023) | 8 | 11.2 | Aset Dana Pensiun/PDB (%) | N/A | 0.13 | 0.14 | Aset Dana Pensiun/PDB (%) | | | | | | | |
| 33.c | Aset Asuransi/PDB (%) | 9,0 (2023) | 9.1 | 10.5 | - | | | | - | | | | | | | |
| 33.d | Nilai Transaksi Saham/PDB (%) | 16,0 (2023) | 19.8 | 23.9 | Nilai Transaksi Saham Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan | N/A | 8,103,064.03 | 10,402,072.39 | Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten/Kota Berupa Nilai Rata-rata Tahunan | n/a | | | | | | |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 33.e | Total Kredit/PDB (%) | 33,9 (2023) | 37.8 | 46.8 | Total Kredit/PDRB (%) | N/A | 25.7 | 31.49 | Total Kredit/PDRB (%) | | | | | | | |
| 34 | Inklusi Keuangan (%) | 88,7 (2023) | 91 | 93 | Inklusi Keuangan (%) | N/A | 97.52 | 97.88 | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) | | | | | | | |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 12** | **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan** | | | | **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan** | | | | **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan** | | | | | | | |
| 35 | Asia Power Index (*Diplomatic Influence*) | 15.7 | 16 | 20 | Jumlah Kerja Sama Provinsi Kembar/Bersaudara (Sister Province) | N/A | 20 | 22 | Jumlah Kerja Sama | | | | | | | |
| 36 | Asia Power Index (*Military Capability*) | 65.6 | 65.7 | 66.1 | Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah | N/A | 82 | 90 | Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah | | | | | | | |
| **MISI 5** | **KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI** | | | | **KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI** | | | | **KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI** | | | | | | | |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 13** | **Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju** | | | | **Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju** | | | | **Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju** | | | | | | | |
| 37 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 57,13 (2023) | 58.39 | 60.7 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | N/A | 55,44 - 55,48 | 57,56 - 57,67 | Indeks Pembangunan | n/a | 54,44 | 54,60 | 54,96 | 55,04 | 55,20 | 55,55 |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | | | | | | Kebudayaan (IPK) | | | | | | | |
| 38 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 76.47 | 76.77 | 78.25 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 80.88 | 81.17 | 82.62 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | n/a | 76,47 | 76,95 | 77,2 | 77,86 | 78,34 | 78,88 |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 14** | **Keluarga Bekualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif** | | | | **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif** | | | | **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif** | | | | | | | |
| 39 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 69,51 (2023) | 72.89 | 75.55 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga /Ibangga | 69.79 | 71.04 | 73.67 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga /Ibangga | | 72.71 | 73.07 | 73.44 | 73.80 | 74.17 | 74.53 |
| 40.a | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,447 (2023) | 0.43 | 0.394 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0.399 | 0.41 | 0.37 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 15** | **Lingkungan Hidup Berkualitas** | | | | **Lingkungan Hidup Berkualitas** | | | | **Lingkungan Hidup Berkualitas** | | | | | | | |
| 41 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | 0,35 (2020) | 0.44 | 0.55 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | N/A | 0.562 | 0.581 | Indeks Tutupan Lahan | 47,92 | 48.06 | 48.13 | 48.20 | 48.27 | 48.34 | 48.41 |
| 42.a.i. | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 88,67 (2023)c | 78.53 | 79.49 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 73.96 | 77.2 | 77.87 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 69,83 | 70,17 | 70,34 | 70,51 | 70,65 | 70,68 | 71,02 |
| 42.a.ii. | Indeks Kualitas Air (IKA) | 54,59 (2023) | 72.02 | 72.77 | | | | | | | | | | | | |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 42.a.iii. | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 61.79 | 77.97 | 78.19 | | | | | | | | | | | | |
| 42.a.iv. | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | 78.84 | 81.02 | 81.22 | | | | | | | | | | | | |
| 42.b | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 10,21 (2023) | 12.5 | 30 | RT dengan Akses Sanitasi Aman | 85.73 | 10 | 15 | RT dengan Akses Sanitasi Aman | 96,82 | 97 | 97,6 | 98,2 | 98,8 | 99,4 | 100 |
| 42.c.1 | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 15 (13 terdaur ulang) (2022) | 24 (16 terdaur ulang) | 38 (20 terdaur ulang) | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | N/A | 16 | 28 | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 0,5 | 2 | 5 | 16 | 27 | 38 | 40 |
| 42.c.2 | - | | | | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | N/A | 33 | 100 | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 75.00 | 75.00 | 76.25 | 77.50 | 78.75 | 80.00 | 81.25 |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 16** | **Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan** | | | | **Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan** | | | | **Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan** | | | | | | | |
| 43.i.1 | Indeks Ketahanan Energi | 6.64 | 6.77 | 6.95 | Konsumsi listrik per kapita | 843.25 | 914.9 | 1047.16 | Konsumsi listrik per kapita | | 585.5 | 669.63 | 753.75 | 837.88 | 922.00 | 1.066,13 |
| 43.i.2 | - | | | | Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar) | N/A | 170.57 | 141.175 | | | | | | | | |

| MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN | RPJM NASIONAL | BASELINE | TARGET | | RPJMD PROVINSI | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | RPJMD KOTA | BASELINE | TARGET 2025-2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2029 | TAHUN 2025-2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 43.ii. | Prevalensi ketidakcukupan pangan (%) / Indeks Ketahanan Pangan | 71,2 (a) | 73.2 | 82 | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | 7.54 | 7.2 | 5.98 | Indeks Ketahanan Pangan | 74,59 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 43.iii.1 | Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) | 59.59 | 59.31 | 63.54 | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | N/A | 0.64 | 0.75 | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | | | | | | | |
| 43.iii.2 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 24 (2020) | 39.2 | 51.36 | Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan | N/A | 40.95 | 53 | Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan | 62,05 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | | | | | Indeks Kinerja Sistem Irigasi | N/A | 57.47 | 67.47 | | | | | | | | |
| **TUJUAN PEMBANGUNAN 17** | **Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim** | | | | **Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim** | | | | **Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim** | | | | | | | |
| 44 | Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) | 0,140 (2022) | 0.137 | 0.135 | Indeks Risiko Bencana (IRBI) | 139.84 | 139.74 | 139.34 | Indeks Risiko Bencana (IRBI) | | 91,2 | 90,68 | 90,16 | 89,63 | 89,11 | 88,59 |
| 45.a | Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%) | 17,2 (2023) | 18.37 | 21.12 | Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) | N/A | 10.06 | 12.92 | Indeks Kualitas Udara | 81,19 | 81.59 | 81.79 | 81.99 | 82.19 | 82.39 | 82.59 |
| 45.b | Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%) | 23,48 (2023) | 26.67 | 30.11 | Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) | N/A | 19.04 | 25.38 | | | | | | | | |

## 4.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dan ditetapkan berdasarkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD 2025-2029, dengan mempertimbangkan RPJPD Kota Tanjung Balai 2025-2045 serta memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis di daerah. Rangkaian visi, misi, tujuan, dan sasaran dirancang sebagai bagian dari capaian strategis yang mencerminkan tingkat tertinggi dalam kinerja pembangunan, yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan periode 2025-2029 diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Tanjung Balai 2025-2029**

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Indeks Reformasi dan Birokrasi | Kategori | 68,75 | 69,75 | 70,75 | 72,00 | 73,25 | 74,50 | 75,75 |
| 2 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 3 | AKIP | kategori | B | B | B | B | B | B | BB |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 69,83 | 70,17 | 70,34 | 70,51 | 70,68 | 70,65 | 71,02 |
| 5 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak | persen | 96,82 | 97,00 | 97,60 | 98,20 | 98,80 | 99,40 | 100,00 |
| 6 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | persen | 75,00 (2023) | 75.00 | 76.25 | 77.50 | 78.75 | 80.00 | 81.25 |
| 7 | Kapasitas produksi air bersih | liter/detik | 446,00 (2022) | 473.75 | 475.05 | 476.34 | 477.64 | 478.93 | 480.23 |
| 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik | persen | 87,75 | 87.80 | 88.24 | 88.68 | 89.12 | 89.56 | 90.00 |
| 9 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Ton/Co2 Eq | n/a | 80.892,84 | 94.247,80 | 107,602,76 | 120.957,71 | 134.312,67 | 147.667,63 |
| 10 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 75,95 | 78,90-78,50 | 80,15-79,75 | 81,40-81,00 | 82,65-82,25 | 83,90-83,50 | 85,15-84,75 |
| 11 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,15 | 13,74 | 14,02 | 14,17 | 14,56 | 14,67 | 14,86 |
| 12 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 9,69 | 9,75 | 9,90 | 10,05 | 10,20 | 10,35 | 10,50 |
| 13 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.22 | 74.50 | 74.78 | 75.05 | 75.33 | 75.60 | 75.88 |
| 14 | Indeks Daya Saing Daerah | Poin | 3,44 | 3.45 | 3.49 | 3.53 | 3.57 | 3.61 | 3.65 |
| 15 | Tingkat Kemantapan Jalan | Persen | 60,98 | 61,50 | 62,50 | 63,50 | 64,50 | 65,50 | 66,50 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 16 | Persentase Drainase dalam kondisi Baik | Persen | 59,95 | 60,00 | 60,20 | 60,40 | 60,60 | 60,80 | 61,00 |
| 17 | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 4,91 | 5,00-5,40 | 5,45-5,85 | 5,90-6,30 | 6,35-6,75 | 6,80-7,20 | 7,25-7,65 |
| 18 | PDRB per kapita | Rp (juta) | 65,76 | 68,59 | 77,29 | 85,99 | 94,68 | 103,38 | 112,08 |
| 19 | Kontribusi PDRB Kota | Persen | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 |
| 20 | Kontribusi PDB Industri Pengolahan | Persen | 20,97 | 21,00 | 21,54 | 21,86 | 22,30 | 22,74 | 23,00 |
| 21 | Kontribusi PDRB Sektor Jasa dan Perdagangan | Persen | 47,53 | 47,80 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | 49,50 | 49,78 |
| 22 | Kontribusi Sektor perikanan | Persen | 13,83 (2023) | 14,00 | 14,38 | 14,75 | 15,13 | 15,50 | 15,50-16,00 |
| 23 | Jumlah konflik sosial yang berkaitan dengan isu keagamaan | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jumlah kejahatan/pelangggaran yang terjadi | Kasus | 345 | 342 | 338 | 335 | 331 | 328 | 324 |
| 25 | Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga) | Poin | n/a | 72.71 | 73.07 | 73.44 | 73.80 | 74.17 | 74.53 |
| 26 | Indeks Ketimpangan Gender | Poin | 0,343 | 0.342 | 0.341 | 0.340 | 0.399 | 0.398 | 0.397 |
| 27 | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 0 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 28 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Poin | n/a | 54,44 | 54,6 | 54,96 | 55,04 | 55,2 | 55,55 |
| 29 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 11,97 | 11,50-11,00 | 10,75-10,25 | 10,00-9,50 | 9,25-8,75 | 8,50-8,00 | 7,75-7,25 |
| 30 | Indeks Ketahanan Pangan Daerah | Skor | 74,59 | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 |
| 31 | Persentase penurunan angka stunting pada anak | Persen | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 32 | Rasio gini | Poin | 0,236 | 0,236-0,234 | 0,234-0,229 | 0,231-0,229 | 0,229-0,227 | 0,226-0,224 | 0,224-0,222 |
| 33 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,08 | 3,69-4,02 | 3,55-3,92 | 3,41-3,83 | 3,26-3,73 | 3,12-3,63 | 2,98-3,53 |
| 34 | Indeks Keuangan Daerah | Poin | 4,97 | 5,00 | 5,01 | 5,02 | 5,03 | 5,04 | 5,04 |

## 4.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada Inmendagri nomor 2 tahun 2025. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Aspek kesejahteraan Masyarakat; 2. Aspek pelayanan umum; 3. Aspek daya saing daerah; dan 4. Aspek Pelayanan Umum serta 5. Indikator Kinerja Kunci. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

## Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Tanjung Balai 2025-2029

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **I** | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Titik Banjir/Genangan | Titik Banjir | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 69,83 | 70,17 | 70,34 | 70,51 | 70,65 | 70,68 | 71,02 |
| 3 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Poin | 27,78 | 29,3 | 31,2 | 32,33 | 34,52 | 35,67 | 37,8 |
| 4 | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Poin | - | 91,2 | 90,68 | 90,16 | 89,63 | 89,11 | 88,59 |
| 5 | Indeks Ketahanan Pangan | Poin | 74,59 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4.91 | 5,30 | 5,50-6,00 | 6,00-6,50 | 6,50-7,00 | 7,00-7,50 | 7,50-8,00 |
| 2 | Gini Rasio | Poin | 0,236 | 0,235 | 0,234 | 0,233 | 0,232 | 0,231 | 0,230 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 11,97 | 11,50-11,00 | 10,75-10,25 | 10,00-9,50 | 9,25-8,75 | 8,50-8,00 | 7,75-7,25 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,08 | 3,69-4,02 | 3,55-3,92 | 3,41-3,83 | 3,26-3,73 | 3,12-3,63 | 2,98-3,53 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 75,95 | 76,5 | 77,53 | 78,57 | 80,64 | 81,67 | 83,14 |
| 6 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 74.22 | 74.50 | 74.78 | 75.05 | 75.33 | 75.60 | 75.88 |
| 7 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 9,69 | 9,71 | 9,72 | 9,74 | 9,75 | 9,76 | 9,77 |
| 8 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 91,67 | 92,25 | 92,75 | 93,13 | 93,65 | 94,02 | 94,63 |
| 9 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Poin | 0,343 | 0.342 | 0.341 | 0.340 | 0.399 | 0.398 | 0.397 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 10 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Poin | - | 72.71 | 73.07 | 73.44 | 73.80 | 74.17 | 74.53 |
| 11 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Poin | - | 57,80 | 58,00 | 58,25 | 58,50 | 59,00 | 60,00 |
| 12 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Poin | - | 54,44 | 54,6 | 54,96 | 55,04 | 55,2 | 55,55 |
| 13 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai | Persen | - | 55.00 | 56.04 | 57.08 | 58.12 | 59.16 | 60.20 |
| 14 | Cakupan UHC | Persen | - | 98.30 | 98.39 | 98.47 | 98.56 | 98.64 | 98.73 |
| 15 | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial | Persen | 80,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **III** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Daya Saing Daerah | Poin | 3,44 | 3,45 | 3,49 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | 3,65 |
| 2 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Persen | 2,06 | 2.05 | 2.11 | 2.17 | 2.23 | 2.28 | 2.34 |
| 3 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | Persen | - | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| 4 | Laju Inflasi | Persen | 2,86 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.41 |
| 5 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Poin | 74,18 | 77,00 | 80,00 | 84,00 | 86,00 | 90,00 | 100,00 |
| 6 | Rasio Kewirausahaan Daerah | Persen | 3.24 | 3.47 | 3.70 | 3.92 | 4.15 | 4.37 | 4.60 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 7 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | 69,57 | 70,57 | 71,57 | 72,57 | 73,57 | 74,57 | 75,57 |
| 8 | Proporsi Industri Kecil Menengah | Persen | 20,97 | 21,22 | 24,58 | 29,3 | 32,55 | 35,78 | 38,96 |
| 9 | Jumlah usaha mikro | Unit | - | 11.383 | 11.645 | 11909 | 12.173 | 12.436 | 12.700 |
| 10 | Produk Unggulan Daerah yang Ditetapkan | Unit | - | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| 11 | Jumlah Sentra UMKM yang dibina | Unit | 5 | 8 | 15 | 20 | 24 | 30 | 45 |
| 12 | Nilai Investasi | Miliar Rp. | 57.942.872.889 | 50.148.327.000 | 51.148.327.000 | 52.148.327.000 | 53.148.327.000 | 54.148.327.000 | 55.148.327.000 |
| 13 | Persentase lampu jalan terang | Poin | 68 | 68,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 |
| 14 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | Poin | - | 50 | 60 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| 15 | Persentase panjang jalan yang terlayani transportasi public | Persen | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Angka Kriminalitas | Persen | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 |
| 17 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Poin | - | 76,47 | 76,95 | 77,2 | 77,86 | 78,34 | 78,88 |
| 18 | Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi | Persen | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 19 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang) (Hotel Berbintang) | Orang | - | 7.681 | 7.870 | 8.060 | 8.250 | 8.440 | 8.630 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 20 | Persentase kegiatan seni dan budaya yang melibatkan berbagai kelompok Masyarakat | Persen | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 21 | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman* | Persen | 96,82 | 97 | 97,6 | 98,2 | 98,8 | 99,4 | 100 |
| 22 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan aman | Persen | 91,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Kota | Poin | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Indeks Akses Keuangan Daerah | Poin | 4,97 | 5,00 | 5,01 | 5,02 | 5,03 | 5,04 | 5,04 |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks SPBE | Poin | - | 2.90 | 3.01 | 3.11 | 3.22 | 3.32 | 3.43 |
| 2 | Indeks Satu Data Indonesia | Poin | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Indeks Pelayanan Publik | Poin | - | 3.55 | 3.62 | 3.69 | 3.77 | 3.84 | 3.91 |
| 4 | Nilai SAKIP | Kategori | B | B | B | B | B | B | BB |
| 5 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 6 | Indeks Inovasi Daerah | Poin | 34,28 | 35,33 | 36,65 | 37,45 | 38,72 | 39,12 | 39,88 |
| 7 | Proporsi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap PAD | Persen | 68,00 | 68,18 | 68,53 | 68,88 | 69,23 | 69,58 | 69,93 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8 | Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan | Persen | - | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 9 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | Poin | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.22 | 74.50 | 74.78 | 75.05 | 75.33 | 75.60 | 75.88 |
| | a. Angka Kematian Ibu (per100.000 kelahiran hidup) (Proxy: Jumlah Kematian Ibu) | Angka | 152 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 |
| | b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Persen | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| 11 | Penangnanan Tuberkulosis: | | | | | | | | |
| | a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%) Case Detection Rate (CDR) TB | Persen | - | 70,00 | 71,60 | 73,20 | 74,80 | 76,40 | 78,00 |
| | b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%) | Persen | - | 92,00 | 92,40 | 92,80 | 93,20 | 93,60 | 94,00 |
| 12 | Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang | Persen | - | 56,54 | 57,26 | 57,97 | 58,69 | 59,40 | 60,12 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | keahlian menengah tinggi (%) | | | | | | | | |
| 13 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | Persen | - | 21,00 | 22,88 | 24,75 | 26,63 | 28,50 | 30,38 |
| 14 | Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) | Persen | 20,97 | 21 | 21,54 | 21,86 | 22,3 | 22,74 | 23 |
| 15 | Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | |
| | a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | Persen | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,1 | 2,11 | 2,12 |
| | b. Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar) (Proxy: Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara) | Persen | 996 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 |
| 17 | Produktivitas UMKM. Koperasi. BUMD | | | | | | | | |
| | a. Jumlah usaha mikro | Poin | 11.271 | 11.300 | 11.310 | 11.320 | 11.330 | 11.350 | 11.383 |
| | b. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | Persen | - | 0,90 | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,20 |
| 18 | Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%) | Persen | - | 50 | 50,23 | 50,55 | 50,77 | 51,2 | 51,33 |
| 19 | Jumlah Tenaga Kerja pada lapangan usaha sektor pertanian. | Orang | - | 15651 | 15773 | 15895 | 16016 | 16138 | 16260 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | kehutanan dan perikanan (orang) | | | | | | | | |
| 22 | Import Barang dan jasa (% PDRB) | Persen | 26,02 | 26 | 25,88 | 25,52 | 24,97 | 24,64 | 24 |
| 23 | Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB) | Persen | 30,24 | 30,86 | 31,15 | 31,54 | 31,88 | 32,2 | 32,46 |
| 24 | Ekspor barang dan jasa (% PDRB) | Persen | - | 0,48 | 0,69 | 0,91 | 1,12 | 1,34 | 1,55 |
| 25 | Kota maju. inklusif. dan berkelanjutan | | | | | | | | |
| | a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) | Persen | - | 0,065 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| | b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | Persen | | 64,30 | 66,09 | 67,87 | 69,66 | 71.44 | 73,23 |
| 26 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Poin | 3,24 | 3,36 | 3,55 | 3,68 | 3,77 | 3,89 | 3,96 |
| 27 | Indeks Pelayanan Publik | Poin | 3,14 | 3,33 | 3,78 | 3,8 | 3,97 | 4,1 | 4,36 |
| 28 | Kota Peduli HAM | Poin | Kota Peduli HAM | Kota Peduli HAM | Kota Peduli HAM | Kota Peduli HAM | Kota Peduli HAM | Kota Peduli HAM | Kota Peduli HAM |
| 29 | Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan | Persen | - | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 69,00 | 72,00 | 75,00 |
| 30 | Persentase Ormas yang Dibina | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 31 | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | | | | | | | | |
| | a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | Persen | - | 68,18 | 68,53 | 68,88 | 69,23 | 69,58 | 69,93 |
| | b. Total Kredit/PDRB (%) | Persen | - | 26,51 | 27,66 | 28,81 | 29,96 | 31,11 | 32,26 |
| 32 | Rasio PDRB sektor jasa keuangan | Persen | - | 1,80 | 1,81 | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 1,85 |
| 33 | Persentase Kerjasama yang dilaksanakan | Persen | - | 70,00 | 71,55 | 733,10 | 74,65 | 76,20 | 77,75 |
| 34 | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Persen | 0 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| 35 | Jumlah Konflik SARA) | Poin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ketahanan energi. air. dan pangan | | | | | | | | |
| | *a. Ketahanan Energi* | Poin | - | - | - | - | - | - | - |
| | b. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* | KWh | - | 424,00 | 540,43 | 656,85 | 773,38 | 889,70 | 1.006,13 |
| | *d. Ketahanan Air* | Poin | - | 473,75 | 475,05 | 476,334 | 477,64 | 478,93 | 480,23 |
| | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | |
| | **Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | |
| **A** | **Pendidikan** | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 65,03 | 68,21 | 71,40 | 74,43 | 77,47 | 80,51 | 83,84 |
| 2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 99,02 | 99,16 | 99,30 | 99,44 | 99,58 | 99,72 | 99,86 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 98,40 | 98,63 | 98,86 | 99,09 | 99,32 | 99,54 | 99,77 |
| 4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 15,68 | 14,46 | 13,68 | 12,46 | 11,68 | 10,76 | 9,58 |
| 5 | Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SD | Persen | 55,62 | 58,12 | 60,62 | 63,12 | 65,62 | 68,12 | 70,62 |
| 6 | Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SMP | Persen | 65,69 | 66,79 | 67,89 | 68,99 | 70,09 | 71,19 | 72,29 |
| 7 | Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SD | Persen | 51,37 | 54,37 | 57,17 | 60,07 | 62,97 | 65,87 | 68,77 |
| 8 | Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SMP | Persen | 59,34 | 60,84 | 62,34 | 63,84 | 65,34 | 66,64 | 68,34 |
| 9 | Persentase SD yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional | Persen | 65,94 | 69,83 | 73,94 | 77,83 | 79,94 | 80,83 | 82,94 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 10 | Persentase SMP yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional | Persen | 64,64 | 68,86 | 72,64 | 76,86 | 78,64 | 81,86 | 82,86 |
| 11 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,15 | 13,74 | 14,02 | 14,17 | 14,56 | 14,67 | 14,86 |
| 12 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun | Tahun | 9,69 | 9,75 | 9,90 | 10,05 | 10,20 | 10,35 | 10,50 |
| 13 | Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi | Persen | - | 6,5 | 7,33 | 8,17 | 9,00 | 9,84 | 10,67 |
| 14 | Persentase lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi atau menjadi wirausaha | Persen | - | 56,54 | 57,26 | 57,97 | 58,69 | 59,40 | 60,12 |
| 15 | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal | Persen | - | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 80 |
| 16 | Indeks pemerataan guru | Poin | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 49,51 | 49,85 | 50,19 | 50,53 | 50,87 | 51,21 | 51,55 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 18 | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Persentase pengembangan Bahasa dan sastra | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **B** | **Kesehatan** | | | | | | | | |
| 1 | Rasio daya tamping Rumah Sakit (RS) Rujukan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 85.84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 85.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 81.26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang | Persen | 65.47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | | | | | |
| 8 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 28.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 66.29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 53,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 99,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 83,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan | Persen | 62,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | | | | | | | | |
| 15 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 74.22 | 74.50 | 74.78 | 75.05 | 75.33 | 75.60 | 75.88 |
| 16 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Per 100.000 kelahiran hidup | - | 100 | 94.00 | 88.00 | 82.00 | 76.00 | 70,00 |
| 17 | Prevalensi stunting pada balita | Persen | 5,60 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 5.20 | 5.10 | 5.00 |
| 18 | Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage) | Persen | - | 70,00 | 71.60 | 73.20 | 74.80 | 76.40 | 78,00 |
| 19 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) | Persen | | 92 | 92.40 | 92.80 | 93.20 | 93.60 | 94 |
| 20 | Insidensi HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi | Persen | 4,30 | 4,97 | 5,63 | 6,30 | 6,97 | 7,63 | 8,30 |
| 21 | Angka Kematian Bayi | Per 1.000 kelahiran hidup | 6,11 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| 22 | Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan | Persen | 90 | 90 | 92 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 23 | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | Persen | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 24 | Persentase masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan | Persen | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 25 | Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **C** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota | Persen | 62,05 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 2 | Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic | Persen | | | | | | | |
| 3 | Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Tingkat kemantapan jalan kab/kota | Persen | 75,43 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 |
| 5 | Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | 46,30 | 48,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 6 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Kapasitas Produksi Air Bersih | Liter/detik | 446 | 473,75 | 475,05 | 476,34 | 477,64 | 478,93 | 480,23 |
| 8 | Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar | Poin | - | - | - | - | - | - | - |
| **D** | **Perumahan Rakyat** | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota | Unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kab/Kota | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani | Persen | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| 4 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Persen | 9,83 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Persen | 41,54 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 6 | Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | Persen | - | 64.30 | 66.09 | 67.87 | 69.66 | 71.44 | 73.23 |
| 7 | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan | Persen | 53,10 | 55,00 | 56,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 |
| **E** | **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 2 | Persentase penegakan Perda | Persen | 81,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| 3 | Persentase cakupan penyebaran indormasi dan edukasi rawan bencana | Persen | 66,86 | 69,21 | 72,67 | 76,3 | 80,12 | 84,13 | 88,33 |
| 4 | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persen | - | 20,00 | 25,00 | 28,00 | 31,00 | 33,00 | 36,00 |
| 5 | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | Persen | 66,33 | 69,65 | 73,13 | 76,79 | 80,62 | 84,66 | 88,89 |
| 6 | Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 7 | Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran | Menit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **F** | **Sosial** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | Persen | 34,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal | Persen | - | 20,00 | 22.08 | 24.15 | 26.23 | 28.30 | 30.38 |
| 4 | Persentase PPKS yang terlayani | Persen | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 97,33 | 97,33 | 97,33 |
| 5 | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS | Persen | 25,80 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 |
| | **Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | |
| **A** | **Tenaga Kerja** | | | | | | | | |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | - | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| 3 | Jumlah tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | Jiwa | - | 15.651 | 15.772 | 15.894 | 16.016 | 16.138 | 16.260 |
| 4 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp juta / tenaga kerja | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Persen | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 | 22,00 | 24,00 |
| 6 | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab/Kota | Persen | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 37,00 | 40,00 |
| 7 | Jumlah LPK yang terakreditasi | LPK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8 | Jumlah kasus PHK yang terselesaikan | kasus | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | Persen | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 30,00 |
| **B** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kab/Kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Persen | - | 59.59 | 60.34 | 61.08 | 61.82 | 62.56 | 63.30 |
| 5 | Rasio kekerasan terhadap anak | Per 10.000 anak | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO | Per 100.000 penduduk perempuan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Indeks Perlindungan Anak | Indeks | - | - | - | - | - | - | - |
| **C** | **Pangan** | | | | | | | | |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Persentase cadangan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | Persentase neraca pangan 12 komoditi | persen | 5 komoditas 100% (Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, Minyak Goreng dan Cabe Merah) sedangkan dan 7 komoditas perlu diimport (daging sapi 39% gula putih 41%, bawang putih 92% bawang merah 80%, kedelai 86%, tepung terigu 35% dan Jagung 7%) | 5 komoditas 100% (Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, Minyak Goreng dan Cabe Merah) sedangkan dan 7 komoditas perlu diimport (daging sapi 45% gula putih 46%, bawang putih 93% bawang merah 83%, kedelai 87%, tepung terigu 40% dan Jagung 10%) | 5 komoditas 100% (Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, Minyak Goreng dan Cabe Merah) sedangkan dan 6 komoditas perlu diimport (daging sapi 50% gula putih 52%, bawang putih 94% bawang merah 86%, kedelai 88%, tepung terigu 45% dan Jagung 13%) | 5 komoditas 100% (Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, Minyak Goreng dan Cabe Merah) sedangkan dan 6 komoditas perlu diimport (daging sapi 55% gula putih 56%, bawang putih 95% bawang merah 89%, kedelai 89% dan Jagung 15%) | 5 komoditas 100% (Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, Minyak Goreng dan Cabe Merah) sedangkan dan 6 komoditas perlu diimport (daging sapi 60% gula putih 60%, bawang putih 96% bawang merah 92%, kedelai 90% dan Jagung 17%) | 5 komoditas 100% (Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, Minyak Goreng dan Cabe Merah) sedangkan dan 6 komoditas perlu diimport (daging sapi 65% gula putih 63%, bawang putih 97% bawang merah 95%, kedelai 91% dan Jagung 20%) | 5 komoditas 100% (Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, Minyak Goreng dan Cabe Merah) sedangkan dan 6 komoditas perlu diimport (daging sapi 70% gula putih 65%, bawang putih 98% bawang merah 98%, kedelai 92% dan Jagung 23%) |
| 3 | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevelence of undernourishment) | Persen | 6,30 | 6,384 | 6,454- | 6,524 | 6,594 | 8,664 | 6,734 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 | Rata-rata pengeluaran untuk makan | Rupiah | 15.869.436 | 17.456.379,60 | 19.202.017,56 | 22.867.857,31 | 25.154.642,31 | 27.670.106 | 30.437.116 |
| 5 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Nilai | 88.6 | 88.6 | 88.7 | 88.8 | 88.9 | 88.9 | 89.5 |
| **D** | **Pertanahan** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Persen | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum | Persen | - | 18,70 | 18,70 | 18,80 | 18,9- | 19,00 | 19,10 |
| 3 | Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal | Lokasi | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Lokasi | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tersedianya tanah untuk masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 6 | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **E** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | indeks | 69,83 | 70.17 | 70.34 | 70.51 | 70.68 | 70.85 | 71.02 |
| 2 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota | persen | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 4 | Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Rasio PDRB Sektor Pertanian. kehutanan dan Perikanan) | Persen | - | 15,00 | 15,30 | 15,60 | 15,90 | 16,20 | 16,50 |
| 5 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Indeks Kualitas Lahan | Indeks | 47,92 | 48.06 | 48.13 | 48.20 | 48.27 | 48.34 | 48.41 |
| 7 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 81,19 | 81.59 | 81.79 | 81.99 | 82.19 | 82.39 | 82.59 |
| 8 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 70,34 | 70,74 | 70,94 | 71,14 | 71,34 | 71,54 | 71,74 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 9 | Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | Persen | 0,50 | 2,00 | 5,00 | 16,00 | 27,00 | 38,00 | 40,00 |
| 10 | Layanan penuh pengumpulan sampah | Persen | 75.00 | 75.00 | 76.25 | 77.50 | 78.75 | 80.00 | 81.25 |
| 11 | Persentase penurunan emisi GRK | Persen | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| **F** | **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil** | | | | | | | | |
| 1 | Perekaman KTP Elektronik | Persen | 98,80 | 99,54 | 99,60 | 99,62 | 99,65 | 99,68 | 99,70 |
| 2 | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Persen | 56,22 | 60,00 | 61,00 | 65,00 | 67,00 | 68,00 | 70,00 |
| 3 | Kepemilikan akta kelahiran | Persen | 99,72 | 97,00 | 97,50 | 98,00 | 98,50 | 99,00 | 99,50 |
| 4 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Persen | 11,76 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| **G** | **Pemberdayaan Masyarakat** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| **H** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | |
| 1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | Poin | 2,25 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,2 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) | Persen | 4,19 | 3,43 | 2,91 | 2,62 | 2,48 | 2,32 | 2,27 |
| 3 | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 0,255 | 0,207 | 0,174 | 0,154 | 0,143 | 0,136 | 0,13 |
| 4 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Indeks | - | 72,71 | 73,07 | 73,44 | 73,80 | 74,17 | 74,53 |
| **I** | **Perhubungan** | | | | | | | | |
| 1 | Rasio konektivitas Kab/Kota | Poin | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2 | V/C Ratio di Jalan Kab/Kota | Poin | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| **J** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 |
| 2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 100 |
| 3 | Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui | Persen | 90 | 90 | 95 | 95 | 97 | 98 | 90 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | |
| 4 | Tingkat Penguasaan IPTEK | | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 5 | Indeks Masyarakat Digital Indonesia | Persen | - | 53.78 | 54.61 | 55.44 | 56.26 | 57.09 | 57.92 |
| 6 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Persen | - | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 7 | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persen | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 |
| **K** | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 46,56 | 46,96 | 47,56 | 50,46 | 51,52 | 53,26 | 54,55 |
| 2 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| 3 | Proporsi UKM non pertanian | Persen | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| 4 | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB | Persen | 0.97 | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 |
| 5 | Return on Aset (ROA) BUMD | Persen | - | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
| **L** | **Penanaman Modal** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di Kab /Kota | Persen | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Nilai Investasi PMDN | Rp miliar | 57.942.872. 889 | 50.148.327. 000 | 51.148.327. 000 | 52.148.327. 000 | 53.148.327. 000 | 54.148.327. 000 | 55.148.327. 000 |
| 3 | Nilai Investasi PMA | Rp miliar | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jumlah proyek investasi PMDN | Unit | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | Jumlah proyek investasi PMA | Unit | - | - | - | - | - | - | - |
| **M** | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemu daan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 3 | Peningkatan Prestasi Olahraga | Medali | 11 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 4 | Indeks Pembangunan Pemuda | Poin | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| **N** | **Statistik** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase OPD yang menggunakan data | Persen | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | | | | | | | | |
| **O** | **Persandian** | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | - | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| **P** | **Kebudayaan** | | | | | | | | |
| 1 | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | - | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
| **Q** | **Perpustakaan** | | | | | | | | |
| 1 | Nilai tingkat kegemaran mambaca Masyarakat | Persen | 84,92 | 88,00 | 90,00 | 93,00 | 95,00 | 98,00 | 100 |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Persen | 74,18 | 77,00 | 80,00 | 84,00 | 86,00 | 90,00 | 100 |
| **R** | **Kearsipan** | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban | Persen | - | - | - | - | - | - | - |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | | | | | | | | |
| | **Urusan Pilihan** | | | | | | | | |
| **A** | **Kelautan Perikanan** | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | Ton | 12.430,32 | 12.710,12 | 12.989,92 | 13.269,72 | 13.549,52 | 13.829,32 | 14.109,12 |
| 2 | Rasio PDRB sektor Perikanan | Persen | - | 14.00 | 14.30 | 14.60 | 14.90 | 15.20 | 15.50 |
| 3 | Nilai Tukar Nelayan | Pon | 105 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 |
| **B** | **Pariwisata** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Persen | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 2 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota | Persen | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 3 | Tingkat hunian akomodasi | Persen | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (PDRB-ADHB) | Persen | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 5 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD | Persen | - | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 6 | Jumlah tamu wisatawan domestik | Ribu orang | 12.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| **C** | **Pertanian** | | | | | | | | |
| 1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun) | Ton / Ha | 8,77 | 8,78 | 8,79 | 8,80 | 8,81 | 8,82 | 8,83 |
| 2 | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Kasus Rabies) | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rasio PDRB sektor Pertanian, Kehutanan | Persen | 13,71 | 13,72 | 13,73 | 13,74 | 13,75 | 13,76 | 13,77 |
| **D** | **Energi Sumber Daya Mineral** | | | | | | | | |
| 1 | Konsumsi listrik per kapita | KWh Per Kapita | | 585.5 | 669.63 | 753.75 | 837.88 | 922.00 | 1.066,13 |
| 2 | Intensitas Energi Primer | SBM/Rp Milyar | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota | Volume | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air | Ha | - | - | - | - | - | - | - |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota | | | | | | | | |
| 5 | Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah | Ha | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR | Jumlah | - | - | - | - | - | - | - |
| **E** | **Perdagangan** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | 64.27 | 68,88 | 79,45 | 83,19 | 88,88 | 96,45 | 98,58 |
| 3 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 0,058 | 5 | 9 | 15 | 35% | 45% | 68% |
| 4 | Coevisien Variasi (CV) komoditi beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam | | - | 6,22 | 6,00 | 5,88 | 5,22 | 4,56 | 4,00 |
| 5 | Coevisien Variasi (CV) komoditi jagung, kedelai, cabe, baeang, gula dan minyak | | - | 5,77 | 5,45 | 5,20% | 5,05 | 4,88 | 4,20 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 6 | Ekspor barang dan jasa | Persen | - | 0.48 | 0.69 | 0.91 | 1.12 | 1.34 | 1.55 |
| 7 | Impor barang dan jasa | Persen | - | 34.67 | 34.32 | 33.97 | 33.63 | 33.28 | 32.93 |
| 8 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Persen | - | 29.50 | 29.18 | 28.85 | 28.53 | 28.20 | 27.88 |
| 9 | Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **F** | **Perindustrian** | | | | | | | | |
| 1 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota | Persen | 215 | 245 | 265 | 285 | 295 | 298 | 300 |
| 2 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | Persen | 0 | 20 | 25 | 35 | 45 | 48 | 50 |
| 3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 0 | 12 | 25 | 35,65 | 45,88 | 48,75 | 50 |
| 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan | Persen | 0 | 35 | 45 | 65 | 78,22 | 80,88 | 50 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | | | | | | | | |
| 5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/Kota | Persen | 0 | 20 | 25 | 35 | 45 | 48 | 50 |
| 6 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Persen | 3,71 | 4,64 | 5,88 | 6,33 | 7,56 | 8,12 | 9,99 |
| 7 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | Persen | - | 20,00 | 20.20 | 20.40 | 20.60 | 20.80 | 21,00 |
| | **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | |
| **A** | **Perencanaan dan Keuangan** | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan | Persen | 30,60 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | Rasio PAD (Rp miliar) | Persen | 11,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 11,10 | 11,50 | 12,00 |
| 3 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Kategori | Level 2 (skor: 2,910) | Level 3 (Skor:3,00) | Level 3 (Skor:3,05) | Level 3 (Skor:3,10) | Level 3 (Skor:3,15) | Level 3 (Skor:3,20) | Level 3 (Skor:3,25) |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Kategori | Level 3 (Skor: 3,00) | Level 3 (Skor:3,10) | Level 3 (Skor:3,15) | Level 3 (Skor:3,20) | Level 3 (Skor:3,25) | Level 3 (Skor:3,30) | Level 3 (Skor:3,35) |
| 5 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Persen | 84,51 | 82,82 | 81,13 | 79,44 | 77,75 | 76,06 | 74,37 |
| 6 | Opini Laporan Keuangan | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 7 | Indeks Reformasi Hukum | Kategori | B | B | B | B | B | B | BB |
| 8 | AKIP | Kategori | B | B | B | B | B | B | BB |
| 9 | Indeks Demokrasi Indonesia (Persentase ormas yang dibina) | Poin | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Indeks Pembangunan Hukum (Kota Peduli HAM) | Poin | - | 90,00 | 90,50 | 91,00 | 91,50 | 92,00 | 92,50 |
| 11 | Rasio PAD | Persen | 11,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 11,10 | 11,50 | 12,00 |
| 12 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB | Persen | | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 |
| 13 | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah sebagai dasar perumusan kebijakan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **B** | **Pengadaan** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | dibawa ke tahun berikut nya yang ditandatangani pada kuartal pertama | | | | | | | | |
| 2 | Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif | Persen | 39.74 | 29.15 | 44.74 | 49.25 | 54.34 | 64.62 | 70.59 |
| 3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Persen | 50.28 | 49.18 | 55.12 | 61.23 | 66.34 | 72.17 | 76.41 |
| 4 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C** | **Kepegawaian** | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 71,83 | 71,85 | 71,90 | 72,00 | 72,50 | 72,80 | 73,00 |
| 2 | Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS | Persen | 18,25 | 18,30 | 18,30 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 20,00 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | | | | | | | | |
| 3 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | Persen | 22,60 | 22,75 | 22,75 | 22,80 | 22,80 | 22,90 | 23,00 |
| 4 | Indeks Integritas | Persen | - | 66.78 | 67.45 | 68.11 | 68.78 | 69.44 | 70.11 |
| 5 | Persentase kerjasama yang dilaksanakan | Persen | - | 70,00 | 71.50 | 73,00 | 74.50 | 76,00 | 77.50 |
| 6 | Jumlah kerjasama internasional yang dilaksanakan | Jumlah | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah | Indeks | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sistem Merit | Poin | - | 250-324(baik) | 250-324(baik) | 250-324(baik) | 250-324(baik) | 250-324(baik) | 250-324(baik) |
| 9 | Indeks Profesionalisem ASN | Persen | 81,67 | 70-80 (sedang) | 70-80 (sedang) | 70-80 (sedang) | 70-80 (sedang) | 70-80 (sedang) | 70-80 (sedang) |
| **D** | **Manajemen Keuangan** | | | | | | | | |
| 1 | Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Persen | -9,83 | -8,85 | -7,87 | -6,89 | -5,91 | -4,93 | -3,95 |
| 2 | Revenue Mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Persen | -22,78 | -20,50 | -18,22 | -15,95 | -13,67 | -11,39 | -9,11 |
| 3 | Assets Management | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 | Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya | | 0,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5 | Proporsi kontribusi PDRB Kota Tanjung Balai terhadap PDRB Provinsi | Persen | 0 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 6 | Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) | Persen | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 6 | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ADHB | Persen | 0 | 68.18 | 68.53 | 68.88 | 69.23 | 69.58 | 69.93 |
| 7 | Total Kredit/PDRB ADHB | Persen | 0 | 28.51 | 29.26 | 30.01 | 30.76 | 31.51 | 32.26 |
| 8 | Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan dan Asuransi | Persen | 0 | 1.80 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.85 |
| **E** | **Transparansi dan Partisipasi Publik** | | | | | | | | |
| 1 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Persen | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 2 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## Tabel 4. 6. Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Kota Tanjung Balai 2025-2029

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| **1.01. BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 110.370.389.258 | 100% | 113.693.272.298 | 100% | 118.058.267.990 | 100% | 120.785.093.218 | 100% | 120.785.093.218 | 100% | 124.465.810.566 | Dinas Pendidikan |
| | Nilai Evaluasi AKIP | B | A | | A | | A | | A | | A | | A | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APK PAUD | 62,57 | 64,78 | 36.771.898.903 | 66,98 | 42.992.346.650 | 69,19 | 43.530.258.625 | 71,40 | 41.926.059.524 | 73,61 | 41.926.059.524 | 73,61 | 39.221.967.550 | Dinas Pendidikan |
| | APK SD/MI | 101,02 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | APK SD/MI | 92,55 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | APM SD/MI | 94,96 | 95,97 | | 96,98 | | 97,98 | | 98,99 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | APM SMP/MTs | 81,82 | 85,45 | | 89,08 | | 92,72 | | 96,36 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | APS Usia 5-6 Tahun | 65,03 | 72,03 | | 79,03 | | 86,03 | | 93,03 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | APS Usia 7 - 15 Tahun | 98,85 | 99,08 | | 99,31 | | 99,54 | | 99,77 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | APS Usia 7 - 18 Tahun | 15,68 | 22,53 | | 29,37 | | 36,22 | | 43,07 | | 49,92 | | 49,92 | | |
| | Angka Kelulusan SD/MI | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | Angka Kelulusan SMP/MTs | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | Angka Melanjutkan SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | Angka Putus Sekolah SD/MI | 1,26% | 1,04% | | 0,82% | | 0,60% | | 0,38% | | 1,16% | | 1,16% | | |
| | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 3,73% | 3,03% | | 2,33% | | 1,63% | | 0,93% | | 0,23% | | 0,23% | | |
| | SD/MI kondisi Bangunan Baik | 96,00% | 96,80% | | 97,60% | | 98,40% | | 99,20% | | 100,00% | | 100,00% | | |
| | SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik | 96,00% | 96,80% | | 97,60% | | 98,40% | | 99,20% | | 100,00% | | 100,00% | | |
| | Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar | 0,002 | 0,002 | | 0,002 | | 0,002 | | 0,002 | | 0,002 | | 0,002 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Guru TK/KB Berkualifikasi S1/D.IV | 58,75% | 65% | 61.400.000 | 70% | 514.585.450 | 75% | 540.314.723 | 80% | 560.500.000 | 85% | 560.500.000 | 85% | 360.500.000 | Dinas Pendidikan |
| | Guru SD Berkualifikasi S1/D.IV | 96,36% | 97,13% | | 97,68% | | 98,34% | | 99,00% | | 99,66% | | 99,66% | | |
| | Guru SMP Berkualifikasi S1/D.IV | 98,78% | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Guru TK/KB bersertifikasi | 9,73% | 11,67% | | 13,61% | | 15,56% | | 17,50% | | 19,45% | | 19,45% | | |
| | Persentase Guru SD bersertifikasi | 50,71% | 55,64% | | 60,41% | | 65,27% | | 70,12% | | 74,97% | | 74,97% | | |
| | Persentase Guru SMP bersertifikasi | 68,08% | 71,28% | | 74,18% | | 77,23% | | 80,28% | | 82,31% | | 82,31% | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | | 77,68% | 50.000.000 | 80,35% | 52.500.000 | 85,20% | 52.500.000 | 85,40% | 55.000.000 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan/Diperbaharui | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | 20.000.000 | 100,00% | 21.000.000 | 100,00% | 21.000.000 | 100,00% | 22.025.000 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | Pesentase Pengembangan Bahasa dan Satra | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | | 76,45% | 50.000.000 | 82,35% | 52.500.000 | 84,50% | 52.500.000 | 86,25% | 53.550.000 | Dinas Pendidikan |
| **1.02. BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 108.032.333.620 | 100% | 109.787.239.740 | 100% | 114.900.250.120 | 100% | 115.555.570.306 | 100% | 115.555.570.306 | 100% | 116.040.468.113 | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian ibu | 151 | 100 | 40.192.621.340 | 90 | 39.838.391.555 | 80 | 40.970.250.152 | 70 | 41.350.140.000 | 60 | 41.350.140.000 | 60 | 41.350.140.000 | Dinas Kesehatan |
| | Angka kematian neonatal | 9 | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | |
| | Angka kematian bayi | 9 | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | |
| | Angka kematian balita | 9 | 8 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | |
| | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan | 95,91% | 98% | | 98% | | 99% | | 99% | | 99% | | 99% | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | Persentase imunisasi dasar lengkap | 61,88% | 80% | | 83% | | 85% | | 87% | | 90% | | 90% | | Dinas Kesehatan |
| | Bad occupancy rate (BOR) | 63% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% | | |
| | Average length of star (ALOS) | 3 hari | 7 hari | | 6 hari | | 5 hari | | 4 hari | | 3 hari | | 3 hari | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | 70% | 75% | 4.352.778.500 | 80% | 4.762.815.207 | 80% | 4.367.401.376 | 85% | 4.456.592.046 | 90% | 4.456.592.046 | 95% | 4.456.592.046 | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | 100% | 100% | 123.189.000 | 100% | 120.170.000 | 100% | 130.250.000 | 100% | 135.150.000 | 100% | 135.150.000 | 100% | 135.150.000 | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 75% | 80% | 375.158.616 | 80% | 360.150.618 | 85% | 380.210.136 | 85% | 135.150.000 | 85% | 135.150.000 | 85% | 135.150.000 | Dinas Kesehatan |
| **1.03. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100,00% | 100,00% | 24.885.445.381 | 100,00% | 23.983.592.578 | 100,00% | 24.435.788.017 | 100,00% | 25.440.456.671 | 100,00% | 25.206.514.241 | 100,00% | 24.964.587.464 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | 74,42% | 74,50% | 2.127.223.108 | 74,80% | 9.488.820.000 | 75,00% | 10.900.000.000 | 75,20% | 11.050.000.000 | 75,40% | 11.350.000.000 | 75,50% | 11.550.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan | 53,10% | 53,50% | 579.042.861 | 54,00% | 3.000.000.000 | 54,50% | 3.200.000.000 | 55,00% | 3.300.000.000 | 56,00% | 3.600.000.000 | 56,50% | 3.600.000.000 | Dinas PUTR |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | 69,05% | 70,00% | 1.666.344.505 | 71,00% | 1.313.725.000 | 72,00% | 1.200.000.000 | 73,00% | 1.200.000.000 | 74,00% | 1.500.000.000 | 75,00% | 1.500.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun/dipeliharaa | 5 | 6 | 5.032.327.553 | 7 | 2.398.109.000 | 8 | 1.800.000.000 | 9 | 1.900.000.000 | 10 | 1.900.000.000 | 10 | 1.900.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kota | 1 | 1 | 1.522.870.535 | 1 | 989.546.500 | 1 | 800.000.000 | 1 | 900.000.000 | 1 | 950.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota | 75,43% | 76,00% | 15.258.227.809 | 77,00% | 22.448.822.000 | 78,00% | 27.500.000.000 | 79,00% | 27.000.000.000 | 80,00% | 26.200.000.000 | 81,00% | 26.400.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi | 125 | 125 | 500.668.000 | 125 | 565.000.000 | 125 | 565.000.000 | 125 | 567.560.000 | 125 | 574.560.000 | 125 | 584.560.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Ketaatan pelaksanaan penataan ruang | 100% | 100% | 1.701.414.770 | 100,00% | 1.293.199.000 | 100,00% | 900.000.000 | 100,00% | 1.030.000.000 | 100,00% | 810.000.000 | 100,00% | 810.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase RTH | 20,33% | 20,33% | 581.763.500 | 20,33% | 609.014.500 | 20,33% | 600.000.000 | 20,33% | 600.000.000 | 20,33% | 600.000.000 | 20,33% | 600.000.000 | Dinas PUTR |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati Hunia dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | 61,21% | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | 0,58% | 1.500.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | 70,00% | 72,00% | 700.000.000 | 74,00% | 1.700.000.000 | 76,00% | 1.700.000.000 | 78,00% | 1.700.000.000 | 80% | 1.700.000.000 | 80% | 1.700.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan | 77,20% | 80,20% | 2.400.000.000 | 83,20% | 3.000.000.000 | 86,20% | 3.000.000.000 | 89,20% | 3.000.000.000 | 92,20% | 3.000.000.000 | 92,20% | 3.000.000.000 | Dinas PKP |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| **1.04. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 9.200.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | 100% | 9.500.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni | 60% | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | 2,00% | 700.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani | 17,20% | 1,70% | 1.500.000.000 | 1,70% | 1.500.000.000 | 1,70% | 1.900.000.000 | 1,70% | 1.900.000.000 | 1,70% | 1.900.000.000 | 1,70% | 1.900.000.000 | Dinas PKP |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,SARANA DANUTILITAS UMUM (PSU) | Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 41,54% | 44,10% | 1.500.000.000 | 46,66% | 1.500.000.000 | 49,22% | 1.500.000.000 | 51,78% | 1.500.000.000 | 54,36% | 1.500.000.000 | 54,36% | 1.500.000.000 | Dinas PKP |
| **1.05. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | 100% | 13.429.657.321 | 100% | 12.874.211.196 | 100% | 12.363.583.592 | 100% | 13.333.026.812 | 100% | 12.869.693.842 | 100% | 12.567.643.031 | Satpol PP |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Presentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | 81% | 82% | 563.176.000 | 83% | 706.920.000 | 83% | 894.050.000 | 84% | 894.050.000 | 84% | 1.357.382.970 | 85% | 824.050.000 | Satpol PP |
| | Presentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan | 81% | 82% | | 83% | | 83% | | 84% | | 84% | | 85% | | |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100% | 100% | 541.568.500 | 100% | 709.701.000 | 100% | 1.604.831.892 | 100% | 709.701.000 | 100% | 709.701.000 | 100% | 1.604.831.892 | Satpol PP |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN / KOTA | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi | 98,17% | 100% | 4.391.037.763 | 100% | 4.410.482.525 | 100% | 4.481.101.826 | 100% | 4.466.274.080 | 100% | 4.480.731.080 | 100% | 4.632.931.080 | BPBD |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Indeks Risiko Bencana | 107,26 | 105,50 | 44.589.000 | 103,50 | 80.000.000 | 101,50 | 189.000.000 | 101,50 | 250.528.764 | 98,50 | 236.071.764 | 96,50 | 112.172.582 | BPBD |
| | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 66,86% | 69,21% | | 72,67% | | 76,30% | | 80,12% | | 84,13% | | 88,33% | | |
| | Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 0,03% | 20,00% | | 25,00% | | 28,00% | | 31,00% | | 33,00% | | 36,00% | | |
| | Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 66,33% | 69,65% | | 73,13% | | 76,79% | | 80,62% | | 84,66% | | 88,89% | | |
| | Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani | 66,50% | 73,15% | | 76,48% | | 79,80% | | 83,13% | | 86,45% | | 89,78% | | |
| **1.06. BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.702.942.366 | 100% | 4.023.169.412 | 100% | 4.224.327.883 | 100% | 4.226.078.242 | 100% | 4.226.078.242 | 100% | 4.251.434.712 | Dinas Sosial |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan | 25,80% | 33.05% | 57.600.000 | 33,54% | 448.200.000 | 33,00% | 470.610.000 | 33,00% | 517.041.100 | 33,00% | 517.041.100 | 33,00% | 519.611.150 | Dinas Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan | 72,72% | 75,00% | | 70,00% | | 70,00% | | 70,00% | | 70,00% | | 70,00% | | Dinas Sosial |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal | 100% | 100% | 10.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.500.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | Dinas Sosial |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar | 96,04% | 93,47% | 1.293.713.224 | 91,79% | 41.988.000 | 87,20% | 44.087.400 | 88,00% | 44.528.274 | 88,00% | 44.528.274 | 88,00% | 44.695.444 | Dinas Sosial |
| | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar | 97,39% | 80,66% | | 88,17% | | 83,70% | | 83,70% | | 84,00% | | 84,00% | | Dinas Sosial |
| PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk | 97,52% | 97,64% | 388.726.500 | 95,97% | 190.800.000 | 86,25% | 200.090.000 | 86,25% | 200.413.820 | 86,50% | 200.413.820 | 91,00% | 202.284.499 | Dinas Sosial |
| | Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar | 0,73% | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | Dinas Sosial |
| | Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial | 24,08% | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | Dinas Sosial |
| | Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial | 59,90% | 48% | | 48% | | 48% | | 48% | | 48% | | 48% | | Dinas Sosial |
| | Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial | 47,82% | 95,24% | | 95,24% | | 89,47% | | 89,47% | | 89,47% | | 89,50% | | Dinas Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial | 0% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Dinas Sosial |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 100% | 100% | 245.624.400 | 100% | 138.350.000 | 100% | 145.267.500 | 100% | 146.720.175 | 100% | 146.720.175 | 100% | 147.600.496 | Dinas Sosial |
| | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Dinas Sosial |
| | Persentase korban bencana yang ditangani | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Dinas Sosial |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik , secara fisik, kelayakan, dan kepatutan | 100% | 100% | 35.853.000 | 100% | 35.151.000 | 100% | 36.908.550 | 100% | 37.277.635 | 100% | 37.277.635 | 100% | 37.501.300 | Dinas Sosial |
| **2.07. BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 2.851.848.409 | 100% | 2.851.848.409 | 100% | 2.990.322.345 | 100% | 3.007.128.792 | 100% | 3.007.128.792 | 100% | 3.007.642.852 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja | Ada | Ada | 10.000.000 | Ada | 10.000.000 | Ada | 20.000.000 | Ada | 20.000.000 | Ada | 20.000.000 | Ada | 25.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Berbasis Kompetensi | 38% | 43% | 150.000.000 | 48% | 150.000.000 | 53% | 160.000.000 | 58% | 160.000.000 | 63% | 160.000.000 | 68% | 160.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan | 25% | 30% | 100.000.000 | 35% | 100.000.000 | 40% | 110.000.000 | 45% | 110.000.000 | 50% | 110.000.000 | 50% | 120.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 150% | 100% | 100.000.000 | 83% | 100.000.000 | 80% | 110.000.000 | 75% | 110.000.000 | 67% | 110.000.000 | 50% | 121.742.970 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 33% | 40% | | 45% | | 50% | | 55% | | 60% | | 65% | | |
| | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | 85,80% | 87% | | 88% | | 89% | | 90% | | 91% | | 91% | | |
| | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | Nihil | Nihil | | Nihil | | Nihil | | Nihil | | Nihil | | Nihil | | |
| **2.08. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Cakupan Pemenuhan | - | 100% | 2.740.562.587 | 100% | 2.659.258.625 | 100% | 2.662.835.090 | 100% | 2.677.338.852 | 100% | 2.677.338.852 | 100% | 2.683.936.695 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Layanan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase anggaran responsif gender (ARG) | - | 7% | 87.159.250 | 7,5% | 11.400.000 | 8% | 50.000.000 | 8% | 50.000.000 | 8% | 50.000.000 | 8% | 50.000.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan | - | 100% | 239.033.000 | 100% | 215.935.000 | 100% | 215.935.000 | 100% | 235.935.000 | 100% | 235.935.000 | 100% | 235.935.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| | Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan | - | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga mewujudkan kualitas keluarga | - | 100% | 23.983.400 | 100% | 10.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PENGELOLAAN | Persentase lembaga/OPD | - | 100% | 28.080.000 | 100% | 8.400.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 40.000.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | yang melaksanakan data terpilah | | | | | | | | | | | | | | KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pembinaan forum anak | - | 100% | 164.661.250 | 100% | 10.500.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 90.000.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| | Persentase Jumlah sarana dan prasarana ramah anak | - | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | - | 100% | 444.315.000 | 100% | 316.268.000 | 100% | 316.268.000 | 100% | 316.268.000 | 100% | 316.268.000 | 100% | 326.268.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| **2.09. BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 5.221.736.727 | 100% | 5.463.451.206 | 100% | 5.702.636.415 | 100% | 5.763.784.569 | 100% | 5.763.784.569 | 100% | 5.800.840.350 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN | Skor Pola Pangan Harapan | 88.6 | 88.6 | - | 88.7 | 176.600.000 | 88.8 | 176.600.000 | 88.9 | 176.600.000 | 88.9 | 176.600.000 | 89.5 | 176.600.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 30% | 30% | - | 30% | 11.000.000,00 | 30% | 11.000.000,00 | 35% | 11.000.000,00 | 35% | 11.000.000,00 | 35% | 11.000.000,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2.11. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 19.308.087.091 | 100% | 23.196.459.211 | 100% | 23.792.636.089 | 100% | 23.502.473.784 | 100% | 23.502.473.784 | 100% | 23.570.554.969 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional | 100% | 100% | 949.289.036 | 100% | 775.000.000 | 100% | 775.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 1. Indeks kualitas air | 70.34 | 70.74 | 270.960.100 | 70.79 | 160.000.000 | 71.14 | 200.000.000 | 71.34 | 160.000.000 | 71.54 | 160.000.000 | 71.74 | 160.000.000 | Dinas LH |
| | 2. indeks kualitas udara | 81.19 | 81.59 | | 81.79 | | 81.99 | | 82.19 | | 83.39 | | 82.59 | | Dinas LH |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Ruang terbuka Hijau (RTH) | 2.03 | 2.03 | 47.275.000 | 2.03 | 50.000.000 | 2.03 | 90.000.000 | 2.03 | 120.000.000 | 2.03 | 120.000.000 | 2.03 | 120.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase limbah B3 yang terkelola | 100% | 100% | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau | 100% | 100% | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | Dinas LH |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya | 100% | 100% | 0 | 100% | 80.060.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 120.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 100% | 100% | 0 | 100% | 57.910.000 | 100% | 280.000.000 | 100% | 280.000.000 | 100% | 280.000.000 | 100% | 280.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup | 100% | 100% | 0 | 100% | 50.000.000 | 100% | 110.060.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | Dinas LH |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Indeks kinerja pengelolaan sampah | 25.00 | 30.00 | 566.541.000 | 32.50 | 385.367.751 | 35.00 | 449.292.751 | 37.50 | 600.000.000 | 40.00 | 600.000.000 | 42.50 | 600.000.000 | Dinas LH |
| **2.12. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 6.124.122.678 | 100% | 5.541.808.457 | 100% | 5.636.624.401 | 100% | 5.643.200.317 | 100% | 5.643.200.317 | 100% | 5.650.429.929 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 92% | 13.535.200 | 93% | 13.535.200 | 94% | 49.075.671 | 95% | 55.651.587 | 97% | 55.651.587 | 97% | 62.881.199 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Penertbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dicatatkan | - | - | - | - | - | 96% | 3.723.691 | 97% | 3.599.607 | 98% | 3.599.607 | 98% | 3.700.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil yang di tingkatkan | - | - | - | - | - | 96,50% | 17.000.000 | 97% | 18.000.000 | 98% | 18.000.000 | 98% | 19.500.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Cakupan Pelayanan secara aktif terkait Pencatatan Sipil | - | - | - | - | - | 97% | 3.000.000 | 98% | 3.700.000 | 99% | 3.700.000 | 99% | 4.329.219 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Cakupan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | - | 94% | 52.033.000 | 95% | 41.533.000 | 95,50% | 60.000.000 | 96% | 65.000.000 | 98% | 65.000.000 | 98% | 70.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Lembaga/ OPD yang melakukan Kerja Sama dan memanfaatkan Data Kependudukan | - | - | - | - | - | 92% | 13.657.991 | 93% | 19.233.907 | 95% | 19.233.907 | 95% | 21.463.519 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Cakupan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | 92% | 1.960.000 | 93% | 1.960.000 | 94% | 25.000.000 | 95% | 35.000.000 | 96% | 35.000.000 | 96% | 40.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Cakupan penyediaan Data Kependudukan Kota | - | - | - | - | - | 96% | 4.715.491 | 96,50% | 6.291.407 | 98% | 6.291.407 | 98% | 8.521.019 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase profil Data perkembangan dan proyeksi Kependudukan | - | 95% | 153.135.000 | 95,50% | 153.853.000 | 96% | 170.000.000 | 96,50% | 175.000.000 | 98% | 175.000.000 | 98% | 180.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2.13. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN | Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan | - | 60% | 474.992.560 | 70% | 350.150.000 | 80% | 350.150.000 | 90% | 360.150.000 | 100% | 360.150.000 | 100% | 360.150.000 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | | | | | | | | | | Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| **2.14. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 3.802.519.221 | 100% | 3.723.604.299 | 100% | 3.809.090.299 | 100% | 3.658.348.199 | 100% | 3.703.718.199 | 100% | 3.761.218.199 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Pengendalian angka kelahiran (TFR) | 2,24 | 2,24 | 420.198.000 | 2,22 | 2.016.399.016 | 2,2 | 2.041.399.016 | 2,18 | 2.077.104.016 | 2,16 | 2.031.399.016 | 2,14 | 2.052.104.016 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| | Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun | 16,80 | 16,80 | | 16,50 | | 16,20 | | 16,00 | | 15,70 | | 15,50 | | |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 3,43 | 3,43 | 2.342.229.266 | 2,91 | 342.930.850 | 2,62 | 386.530.850 | 2,48 | 414.680.850 | 2,32 | 366.530.850 | 2,27 | 371.530.850 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan |
| | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | 0,207 | 0,207 | | 0,174 | | 0,154 | | 0,143 | | 0,136 | | 0,13 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Keluarga Berencana) |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA | Persentasi peran keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga | 45% | 45% | 280.935.000 | 50% | 8.200.000 | 55% | 158.670.986 | 60% | 309.514.997 | 65% | 357.999.997 | 70% | 313.552.886 | Dinas P3A dan PM dan Dinas PP dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan dan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
| **2.15. BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 6.329.060.714 | 100% | 5.955.526.692 | 100% | 6.113.875.612 | 100% | 6.023.875.612 | 100% | 6.023.875.612 | 100% | 6.069.607.128 | Dinas Perhubungan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Konektivitas Darat | 60 Km | 70 Km | 504.292.000 | 70 Km | 496.237.000 | 70 Km | 496.237.000 | 70 Km | 496.237.000 | 80 Km | 496.237.000 | 80 Km | 546.237.000 | Dinas Perhubungan |
| | Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal | 14% | 20% | 37.890.000 | 25% | 184.285.000 | 30% | 243.858.027 | 35% | 453.517.734 | 40% | 453.517.734 | 40% | 400.000.000 | Dinas Perhubungan |
| PENGELOLAAN PELAYARAN | Konektivitas Laut | 4 unit | 5 unit | - | 6 unit | 62.000.000 | 6 unit | 112.000.000 | 6 unit | 62.000.000 | 7 unit | 62.000.000 | 7 unit | 62.000.000 | Dinas Perhubungan |
| **2.16. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100,00% | 100% | 3.752.214.962 | 100% | 3.413.613.212 | 100% | 3.413.613.212 | 100% | 3.413.613.212 | 100% | 3.413.613.212 | 100% | 3.413.613.212 | Dinas Kominfo |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas | 70,00% | 75% | 2.001.240.600 | 80% | 1.012.063.506 | 85% | 1.012.063.506 | 90% | 1.820.960.024 | 95% | 1.820.960.024 | 100% | 1.874.734.437 | Dinas Kominfo |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | informasi publik pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah | 30,00% | 50% | 783.899.900 | 60% | 607.132.000 | 70% | 607.132.000 | 80% | 607.132.000 | 90% | 607.132.000 | 100% | 607.132.000 | Dinas Kominfo |
| **2.17. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 67 | 67 | 2.537.320.185 | 68 | 2.539.761.185 | 68 | 2.683.846.078 | 70 | 2.721.308.151 | 70 | 2.721.308.151 | 70 | 2.751.577.505 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | 0 | 10 | 15.000.000 | 10.5 | 15.000.000 | 11 | 15.000.000 | 11.5 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12.5 | 15.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | 46.56 | 46.56 | - | 46.56 | - | 46.56 | | 46.56 | | 46.56 | | 46.56 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 40.98 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | 40.98 | 17.017.500 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | 40.98 | 40.99 | 18.898.900 | 50 | 18.898.900 | 51 | 18.898.900 | 52 | 18.898.900 | 53 | 18.898.900 | 54 | 18.898.900 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1. Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari Informal ke Formal | 25 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | 25 | 409.372.900 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| | 2. Pertumbuhan Wirausaha | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | 40.98 | 50.08 | 1.460.936.740 | 59.18 | 602.071.849 | 68.28 | 602.071.849 | 77.38 | 602.071.849 | 86.48 | 602.071.849 | 95.58 | 602.071.849 | Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) |
| **2.18. BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.138.929.060 | 100% | 3.741.284.413 | 100% | 3.997.070.534 | 100% | 4.012.944.613 | 100% | 4.017.919.613 | 100% | 4.017.834.613 | Dinas PMPTSP |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Realisasi Total Terhadap Target Investasi | 2,0% | 2,0% | - | 2,5% | 61.240.000 | 3,0% | 77.240.000 | 3,5% | 77.240.000 | 4,0% | 77.240.000 | 4,5% | 77.240.000 | Dinas PMPTSP |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | 1,5% | 1,5% | 12.850.000 | 2% | 15.000.000 | 2,5% | 49.030.000 | 3% | 49.030.000 | 3,5% | 49.030.000 | 4% | 49.030.000 | Dinas PMPTSP |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan | 1,5% | 1,5% | - | 2% | 30.000.000 | 2,5% | 115.577.935 | 3% | 115.577.935 | 3,5% | 115.577.935 | 4% | 115.577.935 | Dinas PMPTSP |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | 1% | 1% | - | 1,5% | 35.407.639 | 2% | 94.432.986 | 2,5% | 93.128.691 | 3% | 88.153.691 | 3,5% | 120.535.021 | Dinas PMPTSP |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal | 10% | 10% | - | 15% | 2.000.000 | 20% | 2.000.000 | 25% | 2.000.000 | 30% | 2.000.000 | 35% | 2.000.000 | Dinas PMPTSP |
| **2.19. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 5.374.357.964 | 100% | 5.461.000.000 | 100% | 5.461.000.000 | 100% | 5.561.000.000 | 100% | 5.561.000.000 | 100% | 5.591.879.769 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Rasio wirausaha pemuda | 3% | 3% | 271.637.750 | 5% | 145.000.000 | 10% | 250.000.000 | 15% | 250.000.000 | 20% | 250.000.000 | 25% | 250.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM OENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Atlet yang masuk Pelatnas | 20% | 20% | 2.130.994.350 | 30% | 1.243.526.119 | 40% | 1.537.507.163 | 50% | 1.637.507.163 | 55% | 1.637.507.163 | 60% | 1.637.507.163 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan | 5% | 5% | - | 10% | 50.000.000 | 15% | 50.000.000 | 20% | 50.000.000 | 25% | 50.000.000 | 30% | 50.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| **2.20. BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Perangkat Daerah yang | 15,00 | 45,00 | 76.000.000 | 50,00 | 32.858.000 | 55,00 | 32.858.000 | 60,00 | 32.858.000 | 65,00 | 32.858.000 | 70,00 | 32.858.000 | Dinas Kominfo |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | menggunakan Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.21. BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | 20% | 30% | 157.479.950 | 35% | 104.950.000 | 40% | 104.950.000 | 45% | 104.950.000 | 50% | 104.950.000 | 55% | 104.950.000 | Dinas Kominfo |
| **2.22. BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | 100,00% | 75,00% | 460.498.400 | 80,00% | 1.500.352.300 | 85,00% | 1.040.998.853 | 90,00% | 840.700.000 | 95,00% | 840.700.000 | 95,00% | 758.968.376 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 121.937.000 | 30,00% | 128.033.850 | 40,00% | 65.000.000 | 50,00% | 65.000.000 | 55,00% | 66.300.000 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | 70,00% | 150.000.000 | 75,00% | 157.500.000 | 80,00% | 157.500.000 | 85,00% | 160.650.000 | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan | 100,00% | 30,00% | 123.568.000 | 30,00% | 964.723.400 | 40,00% | 1.012.959.570 | 40,00% | 1.025.175.454 | 60,00% | 1.025.175.454 | 60,00% | 800.500.000 | Dinas Pendidikan |
| **2.23. BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.224.619.933 | 100% | 3.846.935.139 | 100% | 3.877.076.545 | 100% | 3.866.507.310 | 100% | 3.866.507.310 | 100% | 3.842.212.861 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | 84.92 | 88 | 275.693.000 | 90 | 204.120.000 | 93 | 206.000.000 | 95 | 210.000.000 | 98 | 210.000.000 | 100 | 225.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| PROGRAM PELESTARIAN | Persentase Koleksi Nasional dan | 0 | 10 | - | 15 | - | 20 | 80.000.000 | 25 | 90.000.000 | 30 | 90.000.000 | 35 | 100.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Naskah Kuno yang Dimiliki | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.24. BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase tingkat ketersediaan arsip | 100,00% | 100,00% | 175.000.000 | 100,00% | 124.980.000 | 100,00% | 125.000.000 | 100,00% | 140.000.000 | 100,00% | 140.000.000 | 100,00% | 150.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 30.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 100,00% | 50.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 25.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 100,00% | 50.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **3.25. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 | 100 | 4.070.725.691 | 100 | 4.085.655.534 | 100 | 4.280.639.811 | 100 | 4.275.116.509 | 100 | 4.215.696.509 | 100 | 4.374.470.092 | Dinas Perikanan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 12030,51 | 12.050 ton/th | 54.455.000 | 12.100 ton/th | 1.201.600.000 | 12.150 ton/th | 1.201.670.000 | 12.200 ton/th | 952.490.000 | 12.250 ton/th | 952.370.000 | 12.300 ton/th | 946.340.000 | Dinas Perikanan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 120 ton/th | 121 ton/th | 255.364.500 | 122 ton/th | 108.330.000 | 123 ton/th | 309.850.000 | 124 ton/th | 425.560.000 | 125 ton/th | 505.400.000 | 126 ton/th | 485.000.000 | Dinas Perikanan |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Angka Konsumsi Ikan | 57,18 kg/kapita/th | 57,20 kg/kapita/th | 39.420.000 | 57,25 kg/kapita/th | 704.100.000 | 57,30 kg/kapita/th | 612.510.000 | 57,35 kg/kapita/th | 815.550.000 | 57,40 kg/kapita/th | 795.250.000 | 57,45 kg/kapita/th | 695.250.000 | Dinas Perikanan |
| **3.26. BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan | 10% | 10% | | 15% | 313.116.714 | 20% | 100.000.000 | 25% | 76.435.072 | 30% | 76.435.072 | 35% | 40.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata | 5% | 5% | 68.175.000 | 6% | 136.883.286 | 8% | 145.000.000 | 10% | 145.000.000 | 12% | 145.000.000 | 15% | 105.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | 1% | 1% | - | 2% | | 2% | 50.000.000 | 3% | | 4% | 25.000.000 | 5% | 46.435.072 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | 5% | 5% | - | 10% | | 10% | 50.000.000 | 15% | | 15% | 20.000.000 | 20% | 30.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3.27. BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 60% | 60% | - | 60% | 30.500.000 | 60% | 30.500.000 | 60% | 30.500.000 | 60% | 30.500.000 | 60% | 30.500.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan menular Strategis (PMHS) | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 161.240.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | 12 Dokumen | 55.188.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Penangan Bencana Pertanian | 20% | 20% | - | 20% | 25.011.000 | 20% | 25.011.000 | 20% | 25.011.000 | 20% | 25.011.000 | 20% | 25.011.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase SDM penyuluh Pertanian yang ditingkatkan | 30% | 30% | 72.813.050 | 30% | 113.880.000 | 30% | 113.880.000 | 30% | 113.880.000 | 30% | 113.880.000 | 30% | 113.880.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3.30. BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 94% | 95% | 5.434.107.547 | 96% | 5.010.849.962 | 97% | 4.930.673.185 | 98% | 4.911.533.463 | 99% | 4.908.533.463 | 100% | 4.927.336.273 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi | 100% | 100% | 5.249.000 | 100% | 23.460.000 | 100% | 38.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 38.000.000 | 100% | 40.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | 50% | 100% | 154.805.000 | 100% | 141.956.877 | 100% | 150.000.000 | 100% | 208.437.953 | 1 | 208.437.953 | 100% | 190.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM STABIILISASI HARGA BARANG DAN KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Koefisien harga antar waktu | 6,53% | 6,45% | 69.943.300 | 6,39% | 35.175.000 | 6,20% | 106.150.000 | 6,10% | 99.000.000 | 6,02% | 99.000.000 | 6,00% | 100.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | 35.831 Ton | 35.899 Ton | 157.780.000 | 36.000 Ton | 205.489.300 | 36,050 Ton | 230.000.000 | 36.155 Ton | 235.000.000 | 36.550 Ton | 235.000.000 | 36.669 Ton | 250.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 57,67% | 60% | 22.997.000 | 61% | 16.380.000 | 61,51% | 100.000.000,00 | 62% | 100.000.000 | 62,59% | 100.000.000 | 62,88% | 120.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan | NA | 40% | - | 45% | - | 50% | - | 50% | - | 50% | - | 50% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| **3.31. BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | NA | 18% | 146.988.000 | 20% | 90.000.000 | 22% | 210.000.000 | 24% | 204.000.000 | 25% | 209.000.000 | 25% | 200.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan | NA | 100% | - | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| USAHA INDUSTRI KEBUPATEN/KOTA | dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase data perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industry di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industry di kab/kota | 100% | 100% | 29.305.000 | 100% | 42.865.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| **4.01. SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 28.442.355.681 | 100% | 24.581.220.273 | 100% | 25.268.130.210 | 100% | 25.298.861.137 | 100% | 25.358.155.872 | 100% | 25.410.191.957 | Sekretariat Daerah |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Cakupan Capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | 9.552.712.200 | 100% | 6.660.947.061 | 100% | 6.660.947.061 | 100% | 6.922.318.181 | 100% | 6.922.318.181 | 100% | 6.943.526.734 | Sekretariat Daerah |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Cakupan Pelaksanaan kegiatan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | 100% | 100% | 1.074.143.700 | 100% | 902.623.494 | 100% | 959.800.222 | 100% | 944.206.171 | 100% | 944.206.171 | 100% | 1.004.148.233 | Sekretariat Daerah |
| **4.02. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG | Cakupan Pemenuhan | 97% | 100% | 21.862.350.734 | 100% | 20.346.579.725 | 100% | 20.363.420.650 | 100% | 20.373.420.650 | 100% | 20.383.505.604 | 100% | 20.593.420.650 | SEKRETARIAT DPRD |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Layanan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Ketepatan Penetapan Peraturan daerah APBD dan Persentase Penetapan Ranperda | 95% | 100% | 15.786.291.200 | 100% | 10.372.595.888 | 100% | 11.584.521.988 | 100% | 11.734.281.701 | 100% | 11.724.177.287 | 100% | 11.594.530.907 | SEKRETARIAT DPRD |
| **5.01. PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.778.206.600 | 100% | 4.778.206.600 | 100% | 4.998.850.005 | 100% | 4.994.790.000 | 100% | 4.998.850.005 | 100% | 5.121.617.819 | Bapperida |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 100% | 100% | 215.701.000 | 100% | 215.701.000 | 100% | 228.000.000 | 100% | 235.000.000 | 100% | 228.000.000 | 100% | 243.000.000 | Bapperida |
| | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100% | 100% | 211.242.000 | 100% | 211.242.000 | 100% | 233.500.000 | 100% | 286.500.000 | 100% | 234.500.000 | 100% | 210.300.000 | Bapperida |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| **5.02. KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 88,27% | 100% | 31.615.443.135 | 100% | 26.435.802.820 | 100% | 27.294.876.905 | 100% | 27.365.021.289 | 100% | 27.365.021.289 | 100% | 27.433.459.455 | BPKPD |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD | 30,6% | 30% | 7.999.607.821 | 30% | 4.450.000.000 | 30% | 4.517.500.000 | 30% | 4.606.417.500 | 30% | 4.606.417.500 | 30% | 4.617.909.000 | BPKPD |
| | Realisasi Anggaran Belanja | 89% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | BPKPD |
| | Kualitas Laporan Keuangan Konsolidasi (Kelengkapan, Ketepatan Waktu, dan Akurasi) | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | BPKPD |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | 12,67% | 13% | 904.856.700 | 13,5% | 600.000.000 | 14% | 618.000.000 | 14,5% | 621.090.000 | 15% | 621.090.000 | 15,5% | 622.642.000 | BPKPD |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 12,05% | 12,5% | 1.049.585.600 | 12,5% | 1.250.000.000 | 12,5% | 1.287.500.000 | 13% | 1.293.937.500 | 13,5% | 1.293.937.500 | 14% | 1.297.172.000 | BPKPD |
| **5.03. KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 4.612.619.153 | 100% | 4.265.250.143 | 100% | 4.325.250.145 | 100% | 4.325.250.000 | 100% | 4.420.500.000 | 100% | 4.420.500.000 | BKPSDM |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai Dengan Formasi | 85% | 85% | 908.757.000 | 86% | 210.309.000 | 87% | 300.086.955 | 87% | 340.080.471 | 88% | 275.830.471 | 88% | 300.054.784 | BKPSDM |
| | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | 80% | 80% | | 81% | | 82% | | 83% | | 84% | | 85% | | |
| | Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya | 90% | 90% | | 91% | | 91% | | 92% | | 93% | | 94% | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | Persentase Pegawai Dengan SKP Bernilai Baik | 90% | 90% | | 91% | | 92% | | 93% | | 94% | | 95% | | |
| **5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional | - | - | | - | | 75% | | 76% | | 77% | | 78% | | BKPSDM |
| | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan | - | - | | - | | 80% | 74.000.000 | 81% | 81.000.000 | 82% | 50.000.000 | 83% | 59.000.000 | BKPSDM |
| | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompettensi | - | - | | - | | 85% | | 86% | | 87% | | 88% | | BKPSDM |
| | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis | - | - | | - | | 75% | | 76% | | 77% | | 78% | | BKPSDM |
| **5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan | 0 | 100% | 73.851.000 | 100% | 73.851.000 | 100% | 81.500.000 | 100% | 81.500.000 | 100% | 81.500.000 | 100% | 89.000.000 | Bapperida |
| | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bapperida |
| | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah | 0 | 100% | 56.155.000 | 100% | 56.155.000 | 100% | 60.500.000 | 100% | 60.500.000 | 100% | 60.500.000 | 100% | 61.000.000 | Bapperida |
| **6.01. INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERRAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100% | 100% | 8.864.296.570 | 100% | 8.915.699.268 | 100% | 9.179.662.119 | 100% | 9.219.543.960 | 100% | 9.219.543.960 | 100% | 9.230.572.224 | Inspektorat |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 83% | 85% | 1.720.047.900 | 87% | 2.256.087.000 | 89% | 2.345.087.000 | 91% | 2.424.087.000 | 93% | 2.424.087.000 | 95% | 2.461.087.000 | Inspektorat |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 2 (Berkembang) | Level 3 ( terdefinisi) | 102.316.200 | Level 3 ( terdefinisi) | 259.160.000 | Level 3 ( terdefinisi) | 363.435.000 | Level 3 ( terdefinisi) | 363.435.000 | Level 3 ( terdefinisi) | 363.435.000 | Level 3 ( terdefinisi) | 363.435.000 | Inspektorat |
| | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 3 ( Integrated) | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | Level 3 ( Integrated) | | |
| **7.01. KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 94% | 95% | 6.583.731.738 | 96% | 6.181.605.408 | 97% | 6.332.003.904 | 98% | 6.373.108.095 | 98% | 6.373.108.095 | 98% | 6.376.646.403 | Kecamatan Datuk Bandar |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 75% | 78% | 755.433.000 | 80% | 744.658.000 | 83% | 745.240.000 | 85% | 746.500.000 | 88% | 746.500.000 | 88% | 768.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, | 80% | 83% | 422.006.400 | 85% | 177.529.000 | 86% | 311.115.000 | 87% | 315.385.000 | 90% | 315.385.000 | 90% | 316.415.000 | Kecamatan Datuk Bandar |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | sosial ekonomi dan pemberdayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum dikecamatan | 76% | 77% | 4.550.000 | 77% | 4.095.000 | 78% | 4.095.000 | 80% | 4.095.000 | 83% | 4.095.000 | 83% | 4.095.000 | Kecamatan Datuk Bandar |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan | 88% | 90% | 9.940.000 | 95% | 8.900.000 | 95% | 9.000.000 | 95% | 9.000.000 | 95% | 9.000.000 | 95% | 9.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 75% | 78% | 33.850.000 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | Kecamatan Datuk Bandar |
| **7.01. KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 86% | 87% | 6.418.788.012 | 88% | 5.408.446.370 | 90% | 5.557.786.129 | 92% | 5.574.644.242 | 94% | 5.574.644.242 | 95% | 5.576.607.739 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 85% | 85,5% | 869.541.000 | 86% | 868.230.000 | 87% | 871.230.000 | 88% | 871.230.000 | 89% | 871.230.000 | 90% | 871.230.000 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan | 80% | 80.5% | 343.574.000 | 81% | 157.977.600 | 82% | 250.000.000 | 83% | 280.000.000 | 84% | 280.000.000 | 85% | 300.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 80% | 81% | 3.480.000 | 82% | 3.480.000 | 83% | 5.000.000 | 84% | 5.000.000 | 86% | 5.000.000 | 88% | 8.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terlaksananya kooordinasi di kecamatan dan kelurahan | 86% | 86,5% | 8.300.000 | 87% | 8.420.000 | 87,5% | 10.000.000 | 88% | 10.000.000 | 89% | 10.000.000 | 90% | 12.000.000 | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 75% | 78% | 14.648.500 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Kecamatan Datuk Bandar Timur |
| **7.01. KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 95% | 95% | 6.389.431.932 | 96% | 6.311.685.831 | 97% | 6.426.891.144 | 98% | 6.476.751.502 | 99% | 6.476.751.502 | 99% | 6.498.663.893 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 76% | 76% | 577.388.800 | 80% | 571.243.000 | 85% | 608.040.000 | 88% | 608.140.000 | 90% | 608.140.000 | 90% | 608.240.000 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan | 72% | 74% | 315.585.900 | 75% | 253.156.088 | 80% | 351.734.900 | 82% | 351.734.900 | 85% | 351.734.900 | 85% | 352.734.900 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 84% | 85% | - | 83% | 2.495.200 | 84% | 10.000.000 | 86% | 12.000.000 | 90% | 12.000.000 | 90% | 15.000.000 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentse terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan | 95% | 95% | 20.296.000 | 95% | 12.568.000 | 96% | 40.528.000 | 97% | 40.628.000 | 99% | 40.628.000 | 99% | 40.828.000 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 76% | 77% | 20.132.000 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | Kecamatan Tanjungbalai Selatan |
| **7.01. KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 95% | 95% | 5.844.669.076 | 95% | 5.143.821.637 | 95% | 5.374.689.943 | 95% | 5.421.167.862 | 95% | 5.421.167.862 | 95% | 5.447.390.705 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 76% | 78% | 534.490.000 | 80% | 534.490.000 | 85% | 534.490.000 | 88% | 534.490.000 | 90% | 534.490.000 | 90% | 534.490.000 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, | 72% | 74% | 293.396.000 | 75% | 268.396.000 | 80% | 273.396.000 | 83% | 273.396.000 | 85% | 273.396.000 | 85% | 273.396.000 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 84% | 85% | - | 85% | - | 85% | 2.480.000 | 85% | 2.480.000 | 86% | 2.480.000 | 86% | 2.480.000 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentse terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan | 95% | 95% | 14.700.000 | 95% | 12.000.000 | 96% | 12.000.000 | 97% | 12.000.000 | 99% | 12.000.000 | 99% | 12.000.000 | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 74% | 75% | 21.848.000 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 82% | - | Kecamatan Tanjungbalai Utara |
| **7.01. KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 95% | 95% | 6.772.550.224 | 96% | 5.584.961.107 | 97% | 5.674.293.277 | 98% | 5.718.521.908 | 99% | 5.717.021.908 | 99% | 5.742.410.898 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Permeuntahan dan Pelayanan Publik | 76% | 76% | 619.800.000 | 80% | 619.800.000 | 85% | 619.800.000 | 88% | 619.800.000 | 90% | 619.800.000 | 90% | 619.800.000 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan | 72% | 74% | 427.920.950 | 75% | 197.379.900 | 80% | 364.698.450 | 82% | 366.698.450 | 85% | 367.698.450 | 85% | 368.698.450 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 84% | 85% | 5.227.000 | 83% | 5.227.000 | 84% | 5.227.000 | 86% | 5.227.000 | 90% | 5.227.000 | 90% | 5.227.000 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentse terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan | 95% | 95% | 7.000.000 | 95% | 11.400.000 | 96% | 11.500.000 | 97% | 12.000.000 | 99% | 12.500.000 | 99% | 13.000.000 | Kecamatan Sei Tualang Raso |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 76% | 77% | 128.073.600 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| **7.01. KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 95% | 95% | 6.135.668.753 | 95% | 5.169.691.359 | 95% | 5.384.186.013 | 95% | 5.430.497.471 | 95% | 5.430.497.471 | 95% | 5.454.626.395 | Kecamatan Teluk Nibung |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 76% | 80% | 636.072.000 | 81% | 633.090.000 | 82% | 633.090.000 | 82% | 633.090.000 | 83% | 633.090.000 | 83% | 633.090.000 | Kecamatan Teluk Nibung |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan | 74% | 75% | 331.828.200 | 76% | 121.985.000 | 77% | 141.985.000 | 78% | 141.985.000 | 80% | 141.985.000 | 80% | 143.985.000 | Kecamatan Teluk Nibung |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan | 83% | 85% | 2.480.000 | 85% | - | 86% | 3.000.000 | 86% | 3.000.000 | 87% | 3.000.000 | 87% | 3.000.000 | Kecamatan Teluk Nibung |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentse terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan | 95% | 95% | 9.270.000 | 95% | 12.600.000 | 96% | 12.600.000 | 97% | 12.600.000 | 99% | 12.600.000 | 99% | 12.600.000 | Kecamatan Teluk Nibung |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang tertangani | 76% | 77% | 20.817.000 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | Kecamatan Teluk Nibung |
| **8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 | 100 | 4.402.586.090 | 100 | 3.604.913.182 | 100 | 3.644.706.255 | 100 | 3.753.892.798 | 100 | 3.658.528.798 | 100 | 3.622.428.798 | Badan Kesbangpol |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI | Jumlah Kasus SARA | 0 | 0 | 940.183.000 | 0 | 421.678.108 | 0 | 421.678.108 | 0 | 421.678.108 | 0 | 472.578.100 | 0 | 421.678.108 | Badan Kesbangpol |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu | 75,56% | 0 | 977.880.974 | 0 | 44.053.000 | 0 | 44.053.000 | 0 | 82.553.000 | 0 | 6.077.366.457 | 76% | 9.357.720.045 | Badan Kesbangpol |
| | persentase parpol tertib administrasi | 90% | 75% | | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | 95% | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Jumlah Ormas Terdaftar | 199 | 130 | 683.395.000 | 133 | 38.781.000 | 136 | 105.781.000 | 139 | 38.781.000 | 1240 | 38.781.000 | 145 | 105.781.000 | Badan Kesbangpol |
| | Persentase Ormas aktif / Melaporkan Kegiatan | 50% | 60% | | 60% | | 60% | | 60% | | 60% | | 60% | | |
| | Indeks Kinerja Ormas | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kebebasan Sipil (TPB) | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Jumlah Kasus SARA | 0 | 0 | 994.697.000 | 0 | 71.400.000 | 0 | 177.400.000 | 0 | 141.400.000 | 0 | 141.400.000 | 0 | 141.400.000 | Badan Kesbangpol |
| | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |
| | persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Generasi Muda | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Angka Kriminal Tertangani >= 70% | 70,59% | 70% | 299.928.000 | 70% | 75.036.000 | 70% | 75.036.000 | 70% | 75.036.000 | 70% | 80.000.000 | 70% | 90.000.000 | Badan Kesbangpol |
| | jumlah unjuk rasa & yang berakhir ricuh = 60 / 0 | 43 / 0 | 65 | | 65 | | 64 | | 63 | | | | 60 | | |
| | jumlah konflik Sosial <10 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | tempat tinggalnya(TPB) = 70% | | | | | | | | | | | | | | |

# BAB V

## PENUTUP

## PERATURAN DAERAH
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
## (RPJMD)

## KOTA TANJUNGBALAI
## TAHUN 2025-2029

# BAB V PENUTUP

## 5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari masyarakat umum, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah daerah, hingga kalangan akademisi. Dokumen ini juga merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Tanjungbalai tahun 2025–2045, yang disusun untuk menjawab tantangan pada Tahap I RPJPD yang mengoptimalkan potensi daerah secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kota Tanjungbalai menuntut adanya sinergi yang erat, keselarasan visi, dan sinkronisasi yang konsisten antara seluruh pelaku pembangunan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Untuk itu, RPJMD ini perlu didukung oleh penjabaran yang terperinci mengenai strategi manajemen risiko dan sumber pendanaan yang transparan serta terukur agar rencana pembangunan dapat direalisasikan secara efektif. Di samping itu, keberadaan kerangka regulasi yang kokoh dan kaidah pelaksanaan yang tertata rapi menjadi elemen kunci dalam menjamin bahwa seluruh program pembangunan berjalan dalam satu kesatuan perencanaan yang menyeluruh dan saling terintegrasi.

Dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 disusun dengan merujuk pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan kewenangan, karakteristik daerah, potensi inovasi, dan arah pengembangan Kota Tanjungbalai. Penyusunannya juga telah diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025–2029.

RPJMD ini menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai, yang kemudian akan melahirkan berbagai program dan kegiatan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung pencapaian visi dan misi kota. Seluruh program dan kegiatan

tersebut tentunya memerlukan dukungan pembiayaan, baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD, dengan alokasi yang disesuaikan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan di setiap tahapan pelaksanaan. Prioritas pembangunan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak guna mempercepat realisasi visi dan misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penganggaran tahunan dalam Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tanjungbalai harus selaras dan sejalan dengan semangat serta arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD. Untuk memastikan akuntabilitas, pelaporan capaian kinerja perangkat daerah dapat dilakukan secara triwulanan, kuartalan, atau tahunan, dan terintegrasi dalam sistem pengawasan kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai. Adapun keterkaitan antara RPJMD Kota Tanjungbalai dan dokumen perencanaan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. RPJMD Kota Tanjungbalai memiliki keterpaduan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kota Tanjungbalai, RTRW, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta RPJMD dari wilayah sekitar.
b. RPJMD Tahun 2025–2029 mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan mempertimbangkan karakteristik, tantangan, kebutuhan, dan kondisi spesifik Kota Tanjungbalai.
c. RPJMD ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renstra seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
d. Dokumen ini memuat arah pembangunan yang komprehensif, termasuk tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program lintas perangkat daerah disertai kerangka pendanaan indikatif selama lima tahun.
e. RPJMD Kota Tanjungbalai juga menjadi acuan operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, sehingga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dapat terjaga secara konsisten.

## 5.2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dan komprehensif, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan harus dijaga untuk memastikan keselarasan dan kesinambungan dalam pembangunan daerah.

2. Lembaga eksekutif dan legislatif Kota Tanjungbalai dengan didukung oleh instansi vertikal dan masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan di dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
3. Wali Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
4. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD.
5. Penerapan Kerangka Logis Kinerja (Cascading) diperlukan untuk menghubungkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan outcome yang menghasilkan program prioritas, tahapan per tahun, dan fokus kewilayahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang merupakan penjabaran dari RPJPD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan.
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tanjungbalai berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
8. Bapperida Kota Tanjungbalai bertugas membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang muatan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan, serta mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai.
9. Pengendalian dan Evaluasi antar Dokumen (RKPD dan RPJMD) harus dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan implementasi yang efektif.
10. Insentif, baik dalam bentuk dukungan regulasi maupun dukungan lainnya, perlu diberikan untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan.
11. Mekanisme Perubahan harus diatur dengan jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menanggapi perubahan kondisi atau kebijakan.

12. Komunikasi Publik harus ditingkatkan melalui keterlibatan pemangku kepentingan lainnya, khususnya masyarakat, untuk memastikan partisipasi yang luas dalam pembangunan daerah.
13. Pembiayaan Pembangunan (Non Pemerintah) perlu ditingkatkan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mendukung program-program pembangunan.

Untuk memastikan optimalisasi pelaksanan RPJMD Kota Tanjungbalai, maka perlu diperhatikan kerangka regulasi yang terstruktur yang mencakup pada:

a. Regulasi Daerah yang akan diatur harus disusun untuk mendukung implementasi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
b. Regulasi Daerah yang akan diubah perlu disesuaikan agar sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, perlu melaksanakan penerapan manajemen resiko. Manajemen Risiko menjadi salah satu dari unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kerangka pengendalian RPJMD Kota Tanjungbalai ditunjukkan pada gambar berikut.

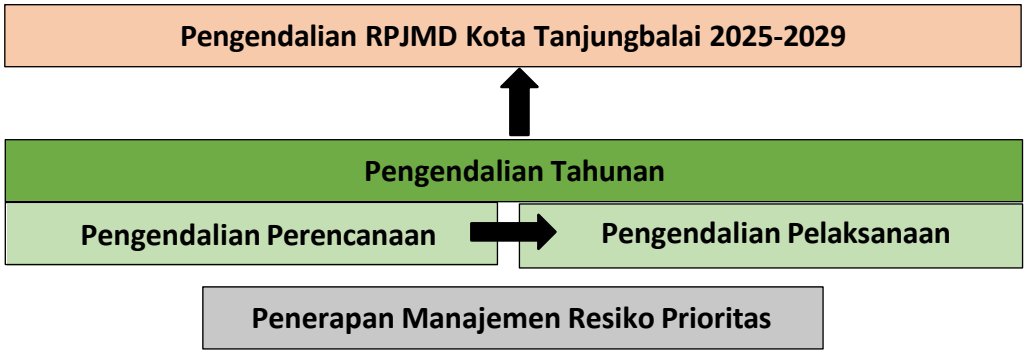


**Gambar 5.1 Kerangka Pengendalian RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029**

Pengendalian RPJMD Kota Tanjungbalai dilaksanakan melalui pengendalian pendek, kemudian dilaporkan kepada Walikota dan Sekretaris Daerah. Berdasarkan tahap pelaksanaan, ruang lingkup pengendalian pembangunan Kota Tanjungbalai terbagi menjadi dua bagian.

## 1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain sasaran program pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi jangka pendek (tahunan). Pengendalian yang dimaksud mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dalam RKPD, Penjabaran perencanaan RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah; (ii) penetapan indikator kinerja, (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran, (iv) identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasi.

## 2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi dimaksud mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran pembangunan, dan (iv) evaluasi pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).
Pemantauan dan evaluasi dimaksud mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran pembangunan, dan (iv) evaluasi pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah.

Rincian evaluasi tahunan dan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Proses Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kota Tanjungbalai**

| Jadwal Evaluasi | Pelaksana | Metode Evaluasi | Output Evaluasi |
|---|---|---|---|
| **Tahunan** | | | |
| 3 bulan sekali | Bapperida (bersama | 1. Laporan dari seluruh OPD | Rekomendasi atas hasil evaluasi dan |

| Jadwal Evaluasi | Pelaksana | Metode Evaluasi | Output Evaluasi |
|---|---|---|---|
| | akademisi) untuk seluruh proses evaluasi | 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD<br><br>3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD. | dibahas pada Rapat Koordinasi antar OPD. Hasil Evaluasi ditindaklanjuti pada RKPD tahun berjalan dan RKPD berikutnya. |
| Setiap tahun dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan | Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Kota Tanjungbalai | Dengar Pendapat | Rekomendasi dari DPRD dan tindak lanjut oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai |
| **5 Tahunan** | | | |
| 5 tahun sekali | Bapperida (bersama akademisi) untuk seluruh proses evaluasi | 1. Laporan 5 tahunan oleh seluruh OPD.<br><br>2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD, yang dikaitkan dengan RPJPD Kota Tanjungbalai.<br><br>3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik Berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD. | 1. Rekomendasi atas hasil evaluasi dan dibahas pada Rapat Koordinasi antar OPD. |
| | Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Tanjungbalai | Dengar Pendapat | 2. Sebagai Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota di DPRD. |

| Jadwal Evaluasi | Pelaksana | Metode Evaluasi | Output Evaluasi |
|---|---|---|---|
| | Bapperida dan Seluruh OPD | 1. Laporan 5 tahunan oleh seluruh OPD.<br><br>2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD, yang dikaitkan dengan RPJPD Kota Tanjungbalai.<br><br>3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik Berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD. | 3. Tindak lanjut untuk penyusunan RPJMD dan Renstra berikutnya. |

Proses pelaksanaan evaluasi kinerja RPJMD Kota Tanjungbalai, baik tahunan maupun di akhir RPJMD, dilakukan secara terpadu dan berkolaborasi dengan pihak akademisi yang ditunjuk serta diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungbalai. Surat Keputusan tersebut memuat tentang pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

### 3. Manajemen Resiko

Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan serta menjaga sinkronisasi antar periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko.

Analisis Profil Risiko dilakukan dengan proses identifikasi dan *assesment* risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari

internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Adapun identifikasi risiko terhadap misi yang telah ditetapkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 antara lain:

a. **Pencapaian Misi 1** di Kota Tanjungbalai berpotensi menghadapi sejumlah risiko strategis yang dapat menghambat peningkatan kualitas pemerintahan dan terwujudnya kota yang tertata dan nyaman. Rendahnya kapasitas aparatur dalam hal tata kelola dan pelayanan publik, ditambah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, dapat menyebabkan pelayanan yang lambat, kurang responsif, dan tidak transparan. Koordinasi antarsatuan kerja yang belum solid serta lemahnya sistem pengendalian internal turut meningkatkan risiko inefisiensi dan penurunan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Di sisi lain, kondisi kota yang masih menghadapi persoalan tata ruang, penumpukan sampah, drainase yang buruk, dan minimnya ruang terbuka hijau memperbesar kerentanan terhadap banjir dan bencana lingkungan lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan lingkungan, serta keterbatasan anggaran untuk penataan kawasan, juga menjadi tantangan tersendiri. Jika risiko-risiko ini tidak ditangani secara terpadu, maka misi untuk membangun tata kelola yang elok dan kota yang humanis di Tanjungbalai akan sulit terwujud secara menyeluruh.
b. **Pencapaian Misi 2** di Kota Tanjungbalai berisiko terhambat oleh sejumlah tantangan yang mempengaruhi pengembangan SDM, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas layanan dasar, serta masih tingginya angka putus sekolah dan gizi buruk dapat menghambat upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul. Di sektor infrastruktur, tantangan muncul dari keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya perencanaan teknis yang adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, yang menyebabkan banyak infrastruktur belum memenuhi standar ketahanan dan keberlanjutan. Sementara itu, perekonomian lokal yang masih didominasi oleh sektor informal serta minimnya inovasi, nilai tambah, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di bidang jasa dan perdagangan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika tidak dikelola secara sistematis, risiko-risiko ini dapat menggagalkan tujuan pembangunan SDM yang unggul, infrastruktur yang tangguh, dan ekonomi yang tumbuh inklusif di Tanjungbalai.

c. **Pencapaian Misi 3** di Kota Tanjungbalai berisiko terhambat oleh melemahnya praktik nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di tengah arus modernisasi dan individualisme yang kian kuat. Kurangnya ruang edukasi dan ekspresi kebudayaan serta minimnya forum dialog antarumat beragama dapat menurunkan semangat toleransi dan kohesi sosial. Di sisi lain, belum optimalnya peran lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan moral dan karakter, khususnya generasi muda, berpotensi melemahkan kualitas kehidupan sosial yang religius dan berakhlak. Lemahnya fasilitasi pemerintah terhadap pelestarian budaya lokal dan kegiatan keagamaan yang inklusif juga menjadi faktor penghambat. Jika hal-hal ini tidak diantisipasi, maka upaya membangun masyarakat yang religius, toleran, dan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal di Tanjungbalai akan sulit tercapai secara menyeluruh.
d. **Pencapaian Misi 4** dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berisiko terhambat oleh berbagai faktor yang berkaitan langsung dengan upaya pemberantasan kemiskinan, pemenuhan layanan dasar, serta perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Risiko utama muncul dari belum meratanya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang layak. Ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi juga dapat menyebabkan kelompok miskin tidak sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan. Selain itu, rendahnya pendataan dan inklusi terhadap penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelayanan publik memperbesar risiko diskriminasi serta keterbatasan akses mereka terhadap hak dasar. Kurangnya integrasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan, serta lemahnya koordinasi dalam pelayanan inklusif, dapat memperlambat pencapaian target pengurangan kemiskinan secara signifikan. Jika risiko-risiko ini tidak diantisipasi dan ditangani secara serius, maka misi untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan menyeluruh akan sulit tercapai.

## 5.3. Sistem Insentif

Pencapaian sasaran pembangunan di Kota Tanjungbalai membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor non-pemerintah. Untuk

itu, keterlibatan berbagai aktor seperti lembaga riset, dunia usaha, organisasi filantropi, serta masyarakat sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam setiap tahap pembangunan. Agar partisipasi ini lebih luas dan efektif, perlu dirancang sistem insentif yang adil dan tepat guna.

Sistem insentif ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan peran serta pelaku pembangunan dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Bagi unsur pemerintah, insentif akan diberikan melalui pengintegrasian dalam sistem manajemen kinerja serta pengelolaan anggaran yang mencakup evaluasi terhadap kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, pencapaian indikator ekonomi makro pusat-daerah, indikator kinerja utama, dan keberhasilan pelaksanaan program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non-pemerintah, insentif dapat berupa dukungan dalam bentuk regulasi, fasilitas, serta kemudahan administratif yang akan mempermudah partisipasi mereka. Dengan cara ini, seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dapat bekerja secara sinergis dan memperkuat upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## 5.4. Mekanisme Perubahan

Menghadapi berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah, dokumen perencanaan pembangunan di Kota Tanjungbalai harus disusun dengan pendekatan yang adaptif dan fleksibel, agar mampu merespons dinamika yang terjadi. Dalam kondisi darurat (force majeure), seperti perubahan situasi geopolitik, geoekonomi, bencana alam, atau penyimpangan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, sasaran jangka menengah yang ada dalam RPJMD dapat disesuaikan. Penyesuaian ini akan dilakukan melalui pembaruan dalam dokumen RKPD, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan mekanisme ini, perencanaan pembangunan tetap dapat menjaga relevansi dan responsivitas terhadap perubahan, sekaligus memastikan kesinambungan kebijakan daerah.

## 5.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang efektif, kebijakan dan program pembangunan dapat dipahami oleh masyarakat luas, serta mendorong partisipasi aktif publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Pelaksanaan komunikasi publik harus berlandaskan pada prinsip keterbukaan informasi, akses yang luas, penyampaian informasi yang jelas, cepat, tepat sasaran, dan objektif. Dengan pendekatan ini, komunikasi publik menjadi alat untuk memperkuat partisipasi masyarakat yang berarti dalam seluruh siklus pembangunan.

Dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029, komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip "tidak ada yang tertinggal" dan "partisipasi yang bermakna." Komunikasi ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat. Komunikasi dengan OPD dilakukan melalui Forum OPD sebagai wadah untuk memperoleh masukan mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, komunikasi dengan masyarakat—termasuk sektor swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, serta kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia—dilaksanakan melalui berbagai pendekatan dan media yang mudah diakses, untuk memastikan mereka dapat memahami tujuan pembangunan dan berpartisipasi dalam memberikan masukan, kritik konstruktif, serta mendukung kebijakan pembangunan daerah.

## 5.6. Pembiayaan Pembangunan non Pemerintahan

Untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor non-pemerintah di Kota Tanjungbalai, langkah-langkah strategis difokuskan pada optimalisasi sektor keuangan. Ini termasuk pendalaman pasar keuangan melalui diversifikasi produk dan instrumen pembiayaan, penguatan regulasi yang mencakup pembiayaan jangka panjang, serta pengembangan pasar keuangan yang inklusif dan kompetitif. Peran sektor keuangan dalam mendukung sektor-sektor prioritas seperti UMKM juga diperkuat, dengan menyediakan pembiayaan dan pendampingan usaha. Selain itu, inklusi keuangan akan didorong melalui edukasi masyarakat, peningkatan

infrastruktur keuangan, serta pemanfaatan inovasi digitalisasi untuk memperluas akses keuangan, terutama di wilayah dan kelompok yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal. Pemerintah daerah juga akan mengambil peran lebih aktif dalam mendukung integrasi ekonomi dan keuangan syariah, memastikan perlindungan konsumen, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

## 5.7. Kesimpulan

Setiap rumusan dalam dokumen ini, mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan hingga program prioritas, telah dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, potensi daerah, serta tantangan pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan. RPJMD ini juga hadir sebagai bentuk sinergi antara aspirasi masyarakat, capaian pembangunan nasional dan provinsi, serta dinamika global yang memengaruhi arah pembangunan lokal. Keberhasilan implementasi RPJMD tentu sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, maupun media massa. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga semangat gotong royong dan menjadikan dokumen ini sebagai kompas pembangunan.

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 disusun sebagai landasan awal yang kokoh untuk mewujudkan Visi *Tanjungbalai Masyhur 2045*, yakni Kota yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Dokumen ini menjadi panduan strategis dalam merancang pembangunan lima tahun ke depan yang tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi transformasi menuju kota yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Dalam periode ini, penguatan sektor sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan menjadi fokus utama, seiring dengan upaya menciptakan lingkungan dan ekosistem yang mendukung kemajuan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Di tahun 2029, Kota Tanjungbalai diharapkan mampu meletakkan fondasi pembangunan sehingga menjadi simpul strategis perdagangan dan jasa, baik di level regional, nasional, maupun internasional. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kesinambungan pembangunan yang dijalankan dalam kerangka keadilan, profesionalitas, serta berorientasi pada

keberlanjutan. RPJMD ini menjadi titik tolak untuk memastikan setiap langkah pembangunan dilakukan secara terukur, terpadu, dan selaras dengan visi jangka panjang, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar Tanjungbalai benar-benar mampu menapaki jalan menuju masa depan yang lebih elok, maju, agamais, dan sejahtera.

# L A M P I R A N

## PERATURAN DAERAH
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
## (RPJMD)

## KOTA TANJUNGBALAI
## TAHUN 2025-2029

## Tabel 1: Dukungan Kota Tanjungbalai Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota** | 2025 | Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur 33 Kabupaten/Kota | Dinas Pendidikan | Diskominfo (Publikasi Kegiatan) | - Akan menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjut ke jenjang SLTA/SMK<br>- Tetap memberikan edukasi kepada siswa SMP/SLTP agar mau dan berminat melanjutkan pendidikan kepada jenjang SLTA/SMK |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Implementasi Program Bersekolah Gratis<br>• Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur | | | |
| | 2030 | Implementasi Program Bersekolah Gratis | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur | | | |
| **2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program *Universal Health Coverage* (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).** | 2025 | Melakukan Launching UHC Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/Kota Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025 33 Kabupaten/Kota | Dinas Kesehatan | 1. Dinas Sosial melakukan Pembinaan<br>2. Dinsos kab/kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya)<br>3. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) | - Sudah mengalokasikan anggaran untuk dana *Universal Health Coverage (UHC)* setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target sesuai RPJMD Tahun 2025-2029<br>- Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya<br>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan penyediaan data kependudukan Kota Tanjungbalai |
| | 2026 | Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 Kabupaten/Kota | | | |
| | 2027 | Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Kabupaten/Kota | | 4. Diskominfo (Publikasi Kegiatan) | |
| | 2028 | Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 Kabupaten/Kota | | | |
| | 2029 | - Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara<br>- Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus 33 Kabupaten/Kota | | | |
| | 2030 | - Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara<br>- Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus 33 Kabupaten/Kota | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | | |
| **3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)** | 2025 | Tidak ada | Dinas TPH | - Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha)<br>- Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih)<br>- PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR kab/kota terkait akses jalan)<br>- BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) | - Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Dinas Koperasi dan UKM melakukan fasilitasi dan pameran produk unggulan daerah<br>- Dinas Perdagangan dan Perindustrian tetap melakukan operasi pasar dan pangan murah<br>- Dinas Pertanian melakukan pendampingan kepada kelompok tani (Calon Petani) |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | - | | | |
| | 2030 | - | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | - Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah)<br>- Diskominfo (Publikasi Kegiatan) | |
| **4. Digitalisasi Pelayanan Publik "Cepat, Responsif, Handal, danSolutif" (CERDAS)** | 2025 | Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi<br>1. Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung<br>2. Penyusunan roadmap dan desain awal sistem Layanan digital.<br>Lokasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. | Dinas Kominfo | DPMPTSP<br>Dinas Pendidikan<br>Dinas Kesehatan<br>Bapenda<br>Disperindag<br>ESDM<br>BPSDM<br>Biro Adpem<br>BUMD: PDAM, Bank Sumut | - Telah memiliki/ menggunakan kebijakan/regulasi dalam hal pelayanan publik secara digitalisasi<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kabupaten/kota<br>- Telah menentukan lokasi publik yang memiliki akses internet gratis |
| | | Identifikasi Penetapan Lokasi<br>1. Pelaksanaan Survei lapangan | | | - Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan<br>2. Integrasi Sistem (Layanan)<br>3. Pemetaan Lokasi Strategis<br>4. Koordinasi kepada Stake Holder dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif.<br>Lokasi Kegiatan: 33 Kabupaten/Kota | | | - Rutin melakukan pemeliharaan dan pengawasan |
| | 2026 | Pembangunan integrasi portal aplikasi<br>1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi .<br>2. Integrasi Sistem (Layanan).<br>3. Pelatihan penggunaan Aplikasi.<br>4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.<br>Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. | | | - Telah memiliki/ menggunakan kebijakan/regulasi dalam hal pelayanan publik secara digitalisasi<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kabupaten/ kota<br>- Telah menentukan lokasi publik yang memiliki akses internet gratis |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet<br>1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet..<br>2. Pemasangan Titik akses Wifi.<br>3. Sosialisasi Penggunaan.<br>4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring.<br>Lokasi: 8 Kota (Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, P. Siantar, Padangsidimpuan, Sibolga, Gunungsitoli) | | | - Akan menyusun Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Rutin melakukan pemeliharaan dan pengawasan |
| | 2027 | Pengembangan dan penambahan<br>1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.<br>2. Integrasi Sistem (Layanan).<br>3. Pelatihan penggunaan Aplikasi.<br>4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.<br>5. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur<br>Lokasi: Pemerintah Provinsi | | | - Telah menggunakan kebijakan/ regulasi dalam hal pelayanan publik secara digitalisasi<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kabupaten/kota<br>- Telah menentukan lokasi publik yang memiliki akses |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Sumatera Utara. | | | internet gratis<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Rutin melakukan pemeliharaan dan pengawasan |
| | | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Perluasan area layanan dan akses jaringan internet<br>1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.<br>2. Pelatihan penggunaan Aplikasi.<br>3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.<br>4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur<br>Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. | | | - Telah memiliki/ menggunakan kebijakan/regulasi dalam hal pelayanan publik secara digitalisasi<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kabupaten/kota<br>- Telah menentukan lokasi publik yang memiliki akses internet gratis |
| | | 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.<br>2. Pemasangan Titik akses Wifi. | | | - Melakukan pelayanan publik berbasis elektronik<br>- Menyediakan anggaran untuk |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | 3. Sosialisasi Penggunaan.<br>4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: 8 kota | | | peningkatan kapasitas SDM<br>- Rutin melakukan pemeliharaan dan pengawasan |
| | 2029 | Perluasan area layanan dan akses jaringan internet<br>1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.<br>2. Pelatihan penggunaan Aplikasi.<br>3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.<br>4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. | | | - Telah memiliki/ menggunakan kebijakan/ regulasi dalam hal pelayanan publik secara digitalisasi<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kabupaten/kota |
| | | Tidak ada | | | - Telah menentukan lokasi publik yang memiliki akses internet gratis<br>- Melakukan pelayanan publik berbasis elektronik<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Rutin melakukan pemeliharaan dan |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | | pengawasan |
| | 2030 | Evaluasi dan Monitoring<br>**1.** Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.<br>**2.** Pelatihan penggunaan Aplikasi.<br>**3.** Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.<br>**4.** Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur<br>Lokasi kegiatan: Kabupaten/Kota | | | - Telah memiliki/ menggunakan kebijakan/ regulasi dalam hal pelayanan publik secara digitalisasi<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kabupaten/kota<br>- Telah menentukan lokasi publik yang memiliki akses internet gratis |
| | | **1.** Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.<br>**2.** Pemasangan Titik akses Wifi.<br>**3.** Sosialisasi Penggunaan.<br>**4.** Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring.<br>Lokasi Perluasan Area Layanan: Kabupaten/Kota | | | - Melakukan pelayanan publik berbasis elektronik<br>- Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM<br>- Rutin melakukan pemeliharaan dan pengawasan |
| **5. a. Pembangunan Infrastruktur** | 2025 | Tidak ada | Dinas PUPR | OPD Dinas LHK terkait penyiapan | - Akan melakukan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan |
| | 2026 | Tidak ada | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **Terintegrasi (INSTANSI)** | | | | dokumen lingkungan/AMDAL<br>Dinas Kominfo untuk publikasi Media<br>Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan<br>Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi | jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas Kota Tanjungbalai |
| | 2027 | 1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)<br>2. Penyusunan Leger jalan<br>3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten (Karo, Simalungun, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Dairi), Kota (Pematang Siantar, Medan, Binjai, Padangsidimpuan) Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten (Labuhanbatu, Asahan, Padang Lawas, Tapanuli Selatan) Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten (Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhanbatu, Dairi, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan) Kawasan Afirmasi: Kabupaten (Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan) Kawasan Konservasi/ Rawan | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Bencana: Kabupaten Langkat<br>4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten (Batu Bara, Deli Serdang) Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten (Serdang Bedagai, Asahan), Kota Tanjung Balai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten (Serdang Bedagai, Pakpak Barat) Serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m | | | |
| | 2028 | 1. Penyediaan penyusunan desain<br>2. Perencanaan (DED)<br>2.Penyusunan Leger jalan<br>3. Pelaksanaan penanganan Jalan<br>Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten (Karo, Batu Bara, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Toba), Kota (Medan, Gunungsitoli, | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten (Karo, Labuhanbatu, Asahan, Humbang Hasundutan, Padang Lawas), Kota Tanjung Balai. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kabupaten (Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhanbatu, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Toba, Tapanuli Utara, Langkat) Kawasan Afirmasi: Kabupaten (Nias Utara, Nias Barat) Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana : Kabupaten Langkat<br>4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten (Samosir, Tapanuli Tengah, Dairi) Kawasan Komoditas | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Unggulan: Kabupaten (Labuhanbatu, Asahan, Tapanuli Selatan) Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kabupaten Pakpak Bharat serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **5. b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan** | 2025 | Tidak ada | Dinas PUPR | OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemataan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, | - Melakukan pengelolaan jaringan irigasi tersier<br>- Pembangunan sumur bor dan pompanisasi untuk sumber air cadangan<br>- Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi<br>- Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media | |
| 5 **c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah** | 2025 | Tidak ada | Dinas PKP | Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang, Jalan, dan Keciptakaryaan (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap | - Menetapkan SK Kumuh yang dikeluarkan Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha<br>- Telah memiliki SK Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>- Akan melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN<br>- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan pendataan, verifikasi, pelaksanaan, penyaluran bantuan, |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | - Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya<br>- Survei Lokasi di setiap kab/kota<br>- Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll)<br>- Penyediaan data dan/atau | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah<br>- Pembangunan Fisik setiap Tahun<br>- Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN<br>- Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kabupaten (Nias, Karo, Langkat, Nias Utara, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara), Kota (Tanjung Balai, Pematang Siantar, Medan) | | pelaksanaan dan evaluasi Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media | pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan<br>- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan<br>- Dinas Sosial Kota membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal melalui DTSEN<br>- Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan membantu identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan<br>- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyediaan data ASN yang belum memilik |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | - Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya<br>- Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota<br>- Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll)<br>- Penyediaan data dan/atau | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah<br>- Pembangunan Fisik setiap Tahun<br>- Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN<br>- Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kabupaten (Asahan, Nias, Nias Selatan, Serdang Bedagai), Kota (Tanjung Balai, Gunungsitoli, Kota Tebing Tinggi) | | | rumah |
| **6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).** | 2025 | - Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemprovsu dengan Poldasu<br>- Penetapan SK Tim Prestice Provinsi<br>- Penyusunan panduan teknis pelaksanaan<br>- Pembentukan kelembagaan Prestice dan Edukasi dan Sosialisasi Prestice di 8 Kota. Medan, Tebing Tinggi | Biro Hukum | Dinas PMD Capil (memberikan data/ pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi), | - Melakukan Edukasi dan Sosialisasi Hukum secara umum kepada Masyarakat<br>- Pendampingan dari bagian hukum kota melalui Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu dari kasus tindak pidana seperti narkoba, pemerkosaan, penganiayaan, perceraian dan kasus perdata lainnya |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2026 | - Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di 25 Kabupaten/Kota. Kabupaten (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbahas, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, medan, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba)<br>- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba<br>- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | ringan.<br>- Pelatihan mediator tingkat Kabupaten /Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) | | | |
| | 2027 | - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan<br>- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba<br>- Pelatihan mediator tingkat Kabupaten /Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) | | | |
| | 2028 | - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan<br>- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba<br>- Pelatihan mediator tingkat Kabupaten /Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) | | | |
| | 2029 | - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan<br>- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba<br>- Pelatihan mediator tingkat Kabupaten /Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) | | | |
| | 2030 | - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba<br>- Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/ Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) | | | |

## Tabel 2: Dukungan Kota Tanjungbalai Terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **PP 1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL** | | | | | |
| **1. Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara** | 2025 | Tidak ada | Dinas Pendidikan | • Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik),<br>• Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan) | Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet jika ada kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **2. Pembangunan 4 SMA/ SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026,** | 2025 | Tidak ada | Dinas Pendidikan | • PUPR (Pendampingan, | - Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan jika |
| | 2026 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK - 2028, Karo/SLB - 2029)** | | | | Monitoring dan Evaluasi)<br>• Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) | ada pembangunan Sekolah oleh Provinsi Sumatera Utara<br>- Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah jika ada pembangunan Sekolah oleh Provinsi Sumatera Utara<br>- Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang berprestasi dan direkomendasikan masuk ke dalam sekolah unggulan |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah** | 2025 | Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029<br>• Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial) | Dinas Pendidikan | • PUPR (Appraisal/ Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi)<br>• Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) | Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak jika ada kegiatan oleh Provinsi Sumatera Utara |
| | 2026 | Pelaksanaan Fisik Tahap I - 150 Ruang Kelas (2026) di 21 Kabupaten/Kota<br>• Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidimpuan, | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat | | | |
| | 2027 | Pelaksanaan Fisik Tahap II – 150 Ruang Kelas (2027) di 22 Kabupaten/Kota<br>• Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat | | | |
| | 2028 | Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kabupaten/Kota | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | • Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Labura, Labusel, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbahas, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas | | | |
| | 2029 | Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029) | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru** | 2025 | Tidak ada | Dinas Pendidikan | PUPR (pendampingan, monitoring dan evaluasi) Dinas Kominfo (publikasi kegiatan) | Penyediaan atau hibah Lahan dari kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan jika ada kegiatan oleh Provinsi Sumatera Utara |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | | |
| | 2028 | Pembangunan RKB sebanyak 30 RKB di 13 Kabupaten/Kota<br>• Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Asahan, Tanjung Balai, Samosir, Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu, Labusel, Sibolga<br><br>Pembangunan 2 Sekolah Baru | | | Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah jika ada kegiatan oleh Provinsi Sumatera Utara |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata** | 2025 | Tidak ada | DISNAKER | 1. Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral:<br>2. Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. | - Akan mendukung sarana dan prasaran yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan kota<br>- Telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kerja dan pengiriman magang melalui subkegiatan perluasan |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut:<br>• Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK.<br>• Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal.<br>• Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat | kesempatan kerja<br>- Melaksanakan Informasi Ketenagakerjaan melalui pelaksanaan Job Fair |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | pelatihan.<br><br>3. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut:<br>• Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan lulusan SMK lebih siap kerja.<br>• Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK.<br>• Mengintegrasikan *teaching factory* di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk menciptakan ekosistem pelatihan *dual system.* | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | • Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK.<br>• Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM:<br>• Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM<br>• Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh<br>• Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha<br>• Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK<br>• Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui *E-commerce* dan platform digital UMKM.<br><br>4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:<br>• Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, event pariwisata, serta | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | platform pemasaran digital.<br>• Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.<br>• Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.<br>• Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif.<br><br>5. Dinas Sosial:Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial.<br>• Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja.<br>• Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial.<br>• Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri.<br><br>6. Badan Kepegawaiaan Daerah:<br>• BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan.<br>• Melakukan pemetaan dan | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan.<br>• BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam re*ncana* pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan.<br>• Berperan dalam | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis output dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja.<br><br>7. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan | |
| **PP 2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI** | | | | | |
| **6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang** | 2025 | 1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi | Dispora | 1. Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan | - Mengikuti kegiatan Liga Olahraga yang dilaksanakan oleh Provinsi |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030** | | tahun 2025<br>2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 Provinsi Sumatera Utara | | Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar)<br>2. Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) | Sumatera Utara<br>- Melaksanakan event/turnamen Olahraga tingkat kota |
| | 2026 | Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara | | | |
| | 2027 | Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 Provinsi Sumatera Utara | | | |
| | 2028 | Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 Provinsi Sumatera Utara | | | |
| | 2029 | Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 Provinsi Sumatera Utara | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2030 | Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030<br>Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030<br>Penguatan Legacy & Keberlanjutan Tahun 2030<br>Provinsi Sumatera Utara | | | |
| **7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030** | 2025 | Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang | Dispora | • Dinas Pendidikan/ Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa)<br>• Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) | - Pemerintah Kota Tanjungbalai berpartisipasi dengan mengirim Atlit NPC untuk mengikuti event olahraga yang diadakan Provinsi Sumatera Utara<br>- Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata membina dan memberikan dukungan dana melalui Hibah |
| | 2026 | 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026<br>2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang | | | |
| | 2027 | 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027<br>2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi PelaksanaanTahun 2027-2028<br><br>Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang | | | |
| | 2028 | 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028<br>2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi PelaksanaanTahun 2028-2029<br><br>Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang | | | |
| | 2029 | 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029<br>2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi PelaksanaanTahun 2029-2030<br><br>Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang | | | |
| | 2030 | 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030<br>2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030<br><br>Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **PP 3, KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU** | | | | | |
| **8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi *(Sumut e-Health Integration system)*** | 2025 | Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses *Platform e-Health Integration System* Tahun 2025<br>Pembangunan Aplikasi Tahun 2025<br>*Launching* Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2025<br><br>33 Kabupaten/Kota | Dinas Kesehatan | Dinas Kominfo (Penyediaan Web,Server dan Publikasi Kegiatan) | - Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menyediakan data kepesertaan JKN Kota<br>- Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kota<br>- Pemanfaatan Profil Pelayanan JKN *(Sumut e-Health Integration system)* |
| | 2026 | Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026<br>Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029<br><br>33 Kabupaten/Kota | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | | |
| | 2027 | Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029<br><br>33 Kabupaten/Kota | | | |
| | 2028 | Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029<br><br>33 Kabupaten/Kota | | | |
| | 2029 | Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | 33 Kabupaten/Kota | | | |
| | 2030 | - | | | |
| **9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)** | 2025 | Tidak ada | Dinas Kesehatan | • Badan Kepegawaian bekerjasama dengan USU dan UGM (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja)<br>• Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) | - Berperan dalam mengikuti Program Beasiswa Mandiri dari Kemenkes RI<br>- Memberikan data dokter yang akan mengikuti assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan<br>- Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis<br>- Mengidentifikasi profesi spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah<br>- Menyiapkan Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD<br>- Surat Penugasan dan Dukungan Legal Formal |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | - Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM<br>- Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030<br>- RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tj. Balai, RSUD Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, RSUD | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi, RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat, RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo, RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labura, RSUD H. Abdul M. Simatupang Kabupaten Asahan, Lanjutan 2026 : 8 orang, Lanjutan 2025 : 21 Orang | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | - Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM<br>- Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030<br><br>• Kab/Kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029 | | | |
| **10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)** | 2025 | Tidak ada | Dinas Kesehatan | PUPR (Manajamen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) | - Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas jika ada kegiatan dari Provinsi Sumatera Utara |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **PP 4. PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN** | | | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | | |
| **11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).** | 2025 | Tidak ada | Dinas Sosial | • Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas)<br>• Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) | - Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Koperasi dan UKM menyediakan anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM<br>- Mengikutsertakan peserta jika ada event/expo terkait UMKM di Provinsi Sumatera Utara dan atau di luar daerah |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)** | 2025 | Tidak ada | DISPERINDAG ESDM | • Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok<br>• Dinas Perhubungan Transportasi logistik<br>• Dinas Sosial : Data P3KE *by name by address* (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) | - Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Sosial menyediakan data DTSEN kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin<br>- Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyediakan |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2030 | Tidak ada | | • Dinas Koperasi & UMKM : Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok<br>• Biro Perekonomian : pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi<br>• Dinas Kominfo : Publikasi Pelaksanaan<br>• Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan<br>• Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan | data jumlah penyedia Bahan Kebutuhan Pokok<br>- Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyediaan dan Bagian Perekonomian Sekdako melakukan Program Pasar Murah di lokasi tertentu dan melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi |
| **13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)** | 2025 | 1. Pendataan dan verifikasi<br>2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH | DISNAKER | • Dinas Sosial Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan.<br>• Pendataan dan Validasi | - Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam menyiapkan dukungan pelaksanaan target *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ)<br>- Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Sawit)<br>3. Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsu dengan Kabupaten dan Kota)<br><br>Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2) | | Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS.<br>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil<br>• Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas<br>• Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan.<br>• Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara | kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan<br>- Pengalokasian DBH untuk perlindungan pekerja rentan |
| | 2026 | Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota<br><br>33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2 | | | |
| | 2027 | Pembayaran kepesertaan | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota<br><br>33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2 | | administratif.<br>• Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS.<br>• Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.<br><br>BPJS Ketenagakerjaan<br>• BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan | |
| | 2028 | Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota<br><br>33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2 | | | |
| | 2029 | Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota<br><br>33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2 | | Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja.<br>• Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal.<br>• Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun.<br>• Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun.<br>• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK.<br><br>Kominfo: Publikasi Kegiatan | |
| | 2030 | 1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota<br>2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ<br><br>33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara | | | |
| **14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan** | 2025 | Ada | PUPR | PUPR (Dokumen appraisal, | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **masyarakat Panti Sosial Provinsi** | 2026 | Ada | | pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) | - Mengikutsertakan peserta pelatihan di luar panti ke Provinsi Sumatera Utara<br>- Memberikan bantuan peralatan untuk peserta di luar panti |
| | 2027 | Ada | | | |
| | 2028 | Ada | | | |
| | 2029 | Ada | | | |
| | 2030 | Ada | | | |
| **PP 5. PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH** | | | | | |
| **15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan Pariwisata** | 2025 | KEK Pertanian | DISBUDPAREKRAF dan DINAS KETAPANG TPH | • Bappelitbang : Menyelaraskan rencana pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/ RIPPARDA Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | - Membuat Dokumen Rencana Induk Pariwisata Kota Tanjungbalai<br>- Penyusunan Perwa RTRW dan menyusun Dokumen RDTR<br>- Peningkatan infrastruktur kewenangan kota (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) untuk mendukung Kawasan Pertanian dan Pariwisata Kota<br>- Kemudahan Perizinan |
| | | Tidak ada | | | |
| | 2026 | KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba | | | |
| | | Tidak ada | | | |
| | 2027 | KEK Pertanian | | | |
| | | Tidak ada | | | |
| | 2028 | KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba | | | |
| | | Tidak ada | | | |
| | 2029 | KEK Pertanian | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Tidak ada | | • Dinas Lingkungan Hidup : Kajian AMDAL dan Pengelolaan lingkungan<br>• Dinas Ketenagakerjaan : Peningkatan Capacity Building Pariwisata dan Pertanian<br>• Dinas Pendidikan : Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian<br>• DInas PUPR : Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW<br>• Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan<br>• Biro Hukum : Penetapan Regulasi Perda/Pergub<br>• DPMPTSP : fasilitasi perizinan | Usaha Kewenangan kota untuk mendukung Kawasan Pertanian dan Pariwisata Kota<br>- Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian untuk mendukung Kawasan Pertanian dan Pariwisata Kota<br>- Penyediaan Lahan<br>- Peningkatan Infrastruktur kewenangan kota untuk mendukung Kawasan Pertanian dan Pariwisata Kota |
| | 2030 | KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba | | | |
| | | tidak ada | | | |
| **16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di** | 2025 | Tidak ada | DISPERINDAG ESDM | • Dinas TPH : Peningkatan Produksi Cabe | • Menyediakan Data Industri Kecil dan Menengah sektor pertanian, perkebunan dan |
| | 2026 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **Kawasan Industri Sumatera Utara** | | | | melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, *capacity building* bagi petani<br>• Dinas Perkebunan dan Peternakan : Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggul, Aren, *capacity building* bagi petani<br>• Dinas PUPR : Penguatan Inftratruktur Jalan dan Jembatan<br>• Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan | peternakan<br>• Peningkatan *capacity building* kepada Industri Kecil dan Menengah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan<br>• Penguatan kemitraan<br>• Pendampingan sertiikasi Halal |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)** | 2025 | Tidak ada | | • Bappelitbang : Penyusunan konsep dan perencanaan | Berusaha mengaktikan peran PDAM Tirta Kualo dan BUMD Aneka Kualo |
| | 2026 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2027 | Tidak ada | | kesehatan BUMD, GCG.<br>• Biro Hukum : percepatan fasilitasi regulasi<br>• Biro PemOtda : Fasilitasi Kerja sama<br>• Diskominfo : Publikasi Kegiatan<br>• Inspektorat : Audit BUMD | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi** | 2025 | • Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan<br>• Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD<br>• Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi<br>• Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah | BKAD | • Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi<br>• Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan<br>• Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi<br>• OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan | Pemerintah Kota melakukan penataan kepemilikan dan status asset BMD |
| | 2026 | • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | termanfaatkan)<br>• Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi<br>• Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah<br>• Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang | | pengamanan aset serta pemeliharaan BMD | |
| | 2027 | • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)<br>• Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi<br>• Pengembangan skema peman faatan Barang Milik Daerah Pengembangan sistem informasi atau promosi | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2028 | • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)<br>• Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi<br>• Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerjasama dengan platform lain | | | |
| | 2029 | • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)<br>• Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi<br>• Penguatan kemitraan dalam perluasan | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain (kerja sama dengan 1 Platform)<br>• Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan | | | |
| | 2030 | • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)<br>• Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi<br>• Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **PP 6. PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU** | | | | | |
| **19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)** | 2025 | Tidak ada | DISBUNAK | 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan *coconut milk*, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol<br>2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan | Dinas Pertanian:<br>1. Menyediakan Data Kelompok tani (Calon Petani) di lokasi intervensi<br>2. Melakukan pendampingan kepada kelompok tani (Calon Petani) di lokasi intervensi |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren;<br>3. Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan<br>4. Diskominfo: untuk publikasi media | |
| **20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya** | 2025 | Kajian kampung nelayan dan budidaya | DISKANLA | Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>- Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan.<br><br>Dinas Koperasi dan UKM<br>- Penguatan kelembagaan usaha nelayan/ pembudidaya.<br><br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>- Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). | Dinas Perikanan:<br>- Menyediakan Data kelompok nelayan dan pembudidaya<br>- Melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan dan pembudidaya<br>- Pengembangan kawasan centra perikanan dan bahari kota |
| | 2026 | 1. Pembuatan master plan<br>2. Pembangunan sarana prasarana produksi<br>a. Perikanan tangkap: sampan, jala dan dermaga<br>b. Perikanan budidaya: revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, automatic feeder<br>- Perikanan tangkap: kawasan | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Tapanuli Tengah-Sibolga, kawasan Asahan-Tanjung Balai, Nias Utara<br>- Perikanan budidaya: Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.<br>- | | Dinas Kominfo:<br>- Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat | |
| | 2027 | 1. Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk coolbox dan gudang ikan<br>2. Kemitraan usaha dengan:<br><br>Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>- Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan.<br>-<br>Dinas Koperasi dan UKM<br>- Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya.<br><br>Perikanan tangkap :<br>- Kawasan Tapanuli Tengah- Sibolga, | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | - kawasan Asahan-Tanjung Balai,<br>- Nias Utara<br><br>Perikanan budidaya :<br>- Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai. | | | |
| | 2028 | 1. Sertifikasi mutu<br>2. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil perikanan<br>3. Pembukaan akses pasar ekspor<br><br>Kawasan perikanan tangkap:<br>- Tapanuli Tengah- Sibolga (Ikan Asin), kawasan Asahan-Tanjung Balai (Ikan Teri), Nias Utara (Udang Beku),<br>Kawasan perikanan budidaya:<br>- Simalungun (Ikan Dori), Deli Serdang (Ikan Mas), Langkat (Udang), Serdang Bedagai (Ikan Gurami). | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)** | 2025 | Ada | DISKANLA | BAPPELITBANG<br>- Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah.<br><br>Dinas Lingkungan Hidup Provsu<br>- Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut.<br><br>Dinas Perhubungan Provsu<br>- Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli.<br><br>Satpol PP Provsu<br>- Penegakan perda terkait konservasi laut.<br><br>Dinas Pariwisata Provsu<br>- Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan.<br><br>Dinas Kominfo Provsu | Dinas Perikanan:<br>- Menyediakan Data kelompok nelayan dan pembudidaya<br>- Melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan dan pembudidaya |
| | 2026 | Ada | | | |
| | 2027 | Ada | | | |
| | 2028 | Ada | | | |
| | 2029 | Ada | | | |
| | 2030 | Ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | - Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat.<br><br>Dinas Koperasi & UKM Provsu<br>- Penguatan kelembagaan nelayan pengawas.<br><br>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu<br>- Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut.<br><br>Inspektorat :<br>- Pengawasan dan pendampingan jalannya program | |
| **22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat** | 2025 | Tidak ada | DLHK | Dinas Kominfo<br>- Media massa<br>- Publikasi kegiatan<br><br>Kementerian Kehutanan<br>- Penyediaan Regulasi<br>- Koordinasi program-program<br>- | - |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)** | 2025 | Tidak ada | DISPERINDAG ESDM | TPH :<br>- Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS .<br><br>Bappelitbang :<br>- Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan<br><br>Inspektorat :<br>- Pengawasan Pelaksanaa<br><br>Dinas Kominfo :<br>- Dukungan Publikasi Kegiatan | - |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **PP 7. KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN** | | | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL** | | | | | |
| **24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah** | 2025 | Tidak ada | Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan.<br>2. Dinas Perindustrian, | • Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar.<br>• Memfasilitasi pembangunan /peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan.<br>• Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini<br>3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan.<br>4. Diskominfo (Publikasi) membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini<br>5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan.<br>6. Diskominfo (Publikasi) | |
| **25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan** | 2025 | Tidak ada | DISBUNAK | 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar | - |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2028 | Tidak ada | | hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi<br>2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak<br>3. Dinas PMD Dukcapil: Untukpembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan<br>4. Diskominfo: Untuk publikasi media | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian** | 2025 | Tidak ada | Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. | PT. Dirga Surya : memasarkan produksi bibit unggul padi | Akan mengunakan bibit unggul jika mendapat bantuan dari provinsi Sumatera Utara |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di Kabupaten/Kota sentra Provinsi Sumatera Utara dan di Kepulauan Sumatera | | | |
| **27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani** | 2025 | Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi | Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta | 1. Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat | Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program.<br>- 33 Kabupaten/Kota | lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya. | memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan.<br>2. Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi.<br>3. Dinas Kominfo memainkan peran | |
| | 2026 | Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit.<br>- 33 Kabupaten/Kota | | | |
| | 2027 | Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran.<br>- 33 Kabupaten/Kota | | | |
| | 2028 | Mengintegrasikan | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | pemasaran digital dan *e-commerce*, mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya<br>- 33 Kabupaten/Kota | | dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian.<br>4. Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data | |
| | 2029 | Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir.<br>- 33 Kabupaten/Kota | | | |
| | 2030 | Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | tani.<br>- 33 Kabupaten/Kota | | kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani.<br>5. Diskominfo (Publikasi) | |
| **PP 8. PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)** | | | | | |
| **28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi** | 2025 | Tidak ada | DISBUDPAREKRAF | 1. KOMINFO : Publikasi | - Membuat Dokumen |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **Pariwisata Prioritas Danau Toba** | 2026 | Tidak ada | | Media<br>2. DISBUDPAREKRAF : Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi;<br>3. PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) : Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata<br>4. PERAN | Rencana Induk Pariwisata Kota Tanjungbalai<br>- Peningkatan infrastruktur kewenangan kota (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) untuk mendukung Kawasan Pariwisata Kota<br>- Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik)<br>- Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) : Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif<br><br>Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprovsu yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | Danau Toba sesuai dengan Rencan Aksi yang disusun | |
| **29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya** | 2025 | Tidak ada | DISBUDPAREKRAF | 1. DISBUDPAREKRAF :Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan *Visibilities di* Geosite; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan Cultural Heritage di Kawasan Geopark; Melaksanakan *Event Geofest*.<br>2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan *Geosite*;<br>3. Dinas Pendidikan: Melaksanaan kegiatan *Geopark to School* dan edukasi terkait Geopark kepada pelajar; | - Membuat Dokumen Rencana Induk Pariwisata Kota Tanjungbalai<br>- Peningkatan infrastruktur kewenangan kota (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) untuk mendukung Kawasan Pariwisata Kota<br>- Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik)<br>- Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | 4. Dinas PUPR : Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar geosite; 5.Bappeltbang: Melaksanakan penelitian terkait *Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage* di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark yang baru;<br>5. BPBD : Mitigasi Bencana & Sosialisasi;<br>6. Dinas LHK : Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba<br>7. Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan | |
| **30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang** | 2025 | Tidak ada | DISBUDPAREKRAF | 1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. | - Membuat Dokumen Rencana Induk Pariwisata Kota Tanjungbalai<br>- Peningkatan infrastruktur kewenangan kota (jalan, air, |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)** | | | | 2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan.<br>3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata<br>4. Dinas Kominfo : Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan | sarana persampahan, sanitasi) untuk mendukung Kawasan Pariwisata Kota<br>- Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik)<br>- Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara** | 2025 | Tidak ada | DISBUDPAREKRAF | 1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan.<br>2. Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan.<br>3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata<br>4. Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas | 1. Menyusun SK Tim Ahli Cagar Budaya<br>2. Akan menetapkan SK cagar budaya<br>3. Akan Membentuk Tim Pengelola Cagar Budaya<br>4. Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik)<br>5. Akan Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan<br>5. Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya | tentang Kawasan Situs Cagar Budaya<br>6. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/ Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*<br>7. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata<br>8. Pendataan dan Pendampingan UMKM<br>9. Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif |
| **32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global** | 2025 | Tidak ada | DISBUDPAREKRAF | 1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan<br>2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans<br>3. Dinas Koperasi | 1. Membantu Pelaksanaan Promosi melalui web site pemerintah kota<br>2. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM<br>3. Membantu Memastikan kelancaran aksesibiltas terutama saat pelaksanaan *Event* internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan) |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan event internasional<br>4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan<br>5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan *Event* dan ketertiban penyelenggaraan acara<br>6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan *event* (sport, *e-sport*, dsb) | |
| **PP 9.<br>EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI** | | | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara** | 2025 | Tidak ada | DISBUDPAREKRAF | 1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif<br>2. Biro Perekonomian : Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif.<br>3. Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif.<br>4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM<br>5. Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif;<br>Publikasi Kegiatan | Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif** | 2025 | Evaluasi Platform e-commerce yang sudah ada (SIMITRA) | DISKOP UMKM | 1. KOMINFO : Publikasi Media<br>2. DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; | - Pendataan UMKM binaan kab/kota<br>- Kurasi Produk UMKM<br>- Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri |
| | 2026 | Desain dan pengembangan platform e-commerce; *platform* | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | logistik & *payment gateway*. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce*;<br>PLUT | | Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan<br>3. DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM;<br>4. Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan | |
| | 2027 | *Onboarding* UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform* e-commerce;<br>PLUT | | | |
| | 2028 | Pengembangan *E-commerce* menjadi Market Place; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform* e-commerce;<br>PLUT | | | |
| | 2029 | Galeri Virtual 3D; | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform* e-commerce;<br>PLUT | | | |
| | 2030 | Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di *event* internasional (*virtual expo, marketplace* ASEAN), Manajemen Operasional *platform e-commerce* dan Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce*;<br>PLUT | | | |
| **PP 10. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN** | | | | | |
| **35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs** | 2025 | 1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030<br>2. Sosialisasi SK Tim | Bappelitbang | Seluruh Perangkat Daerah | 1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs kab/kota se-Sumut Tahun 2025-2030<br>2. Mendukung pelaksanaan |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | forum dan *milestone* TPB SDGs 2025-2030<br>3. Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029<br>4. Penyusunan skema *Declaration and Registration System*<br>5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs<br>6. Replikasi, instalasi dan *Capacity Building* Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi)<br>7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030<br>8. *Launching* dan Pelaksanaan BRS *pilot project* sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM<br>9. *Workshop* | | | skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dengan melakukan identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha<br>3. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota<br>4. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota<br>10. Modifikasi Aplikasi *E-Monev* SDGs<br>11. *Workshop* E-Monev dengan Bappeda/ Bapperida/ Bappelitbang Kabupaten/Kota<br>12. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2025 | | | |
| | 2026 | 1. Inovasi *Business Registration System Policy TPB/SDGs*<br>2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum)<br>3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025<br>4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs<br>5. *Launching* Aplikasi e-Monev<br>6. Pelaksanaan skema *Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs*<br>7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030<br>8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)<br>9. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota<br>10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 | | | |
| | 2027 | 1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)<br>2. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Tahun 2026<br>3. Forum *Business Registration System* (BRS)<br>4. *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)<br>5. *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026<br>6. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota<br>7. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027<br>8. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) | | | |
| | 2028 | 1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027<br>2. Finalisasi aplikasi e- | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Monev SDGs<br>3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)<br>4. *North Sumatra SDGs Action Award 2028*<br>5. *Launching* aplikasi e-Monev SDGs<br>6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs<br>7. *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027<br>8. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota<br>9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028 | | | |
| | 2029 | 1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028<br>2. Pelaksanaan Skema BRS | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | 3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA *Launching* integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA<br>4. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs<br>5. *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028<br>6. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)<br>7. *North Sumatra SDGs Action Award 2029*<br>8. Pelaksanaan Skema BRS<br>9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029 | | | |
| | 2030 | 1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | 2. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029<br>3. *North Sumatra SDGs Action Award 2030*<br>4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030<br>5. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review (*VLR) Kabupaten/Kota<br>6. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs | | | |
| **36. Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis** | 2025 | 1. Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian)<br>2. Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah | Inspektorat | • Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)<br>• Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis | Inspektorat kota melakukan Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan APH lainnya terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kota |
| | 2026 | 1. Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara<br>2. Pendampingan Pelaksanaan Proyek | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Strategis Daerah Sumatera Utara<br>3. Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara | | | |
| | 2027 | 1. Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara<br>2. Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah<br>3. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah | | | |
| | 2028 | 1. Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara<br>2. Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah<br>3. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah | | | |
| | 2029 | 1. Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara<br>2. Pelaksanaan Kolaborasi | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Pendampingan Proyek Strategis Daerah<br>3. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah | | | |
| | 2030 | 1. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah | | | |
| **PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT** | | | | | |
| **37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan** | 2025 | 1. Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA Reborn)<br>2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD<br>3. *Launching* SADAINA Reborn di Konreg PDRB | Dinas Kominfo | Seluruh OPD menginput data statistik sektoral | Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | ISEI (BPS dan Diskominfo)<br>4. *Updating* SK Tim Pelaksana SADAINA Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA | | | |
| | 2026 | 1. Pemanfaatan SADAINA Reborn<br>2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD<br>3. Forum Satu Data tingkat Daerah<br>4. Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu<br>5. Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial<br>6. Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs | | | |
| | 2027 | 1. Pemanfaatan SADAINA Reborn<br>2. Proses input dan | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | sinkronisasi data statistik sektoral OPD<br>3. Forum Satu Data tingkat Daerah<br>4. Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial<br>5. Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs<br>6. Proses bisnis integrasi SADAINA Reborn dengan kab/kota | | | |
| | 2028 | 1. Pemanfaatan SADAINA Reborn<br>2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD<br>3. Forum Satu data tingkat Daerah<br>4. Pengembangan fitur SADAINA (API)<br>5. Peningkatan kapasitas user SADAINA Reborn<br>6. Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn | | | |
| | 2029 | 1. Pemanfaatan SADAINA Reborn | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | 2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD<br>3. Forum Satu data tingkat Daerah<br>4. Menyediakan API (*Application Programming Interface*)<br>5. Peningkatan kapasitas user SADAINA Reborn<br>6. Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn | | | |
| | 2030 | 1. Menyediakan API (*Application Programming Interface*)<br>2. Pemanfaatan SADAINA Reborn<br>3. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD<br>4. Forum Satu data tingkat Daerah Monitoring dan Evaluasi | | | |
| **PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI** | | | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL** | | | | | |
| **38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi** | 2025 | Tidak ada | Dinas PUPR | • Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan,<br>• Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan,<br>• Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi,<br>• Inspektorat melaksanakan pengawasan | - |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| **39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan** | 2025 | Tidak ada | Dinas PUPR | • Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL,<br>• Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, | 1. Pemerintah Kota akan Menyediakan lahan serta mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi) kepada penerima bantuan yang tepat |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2028 | Tidak ada | | • Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi,<br>• Inspektorat melaksanakan pengawasan | sasaran<br>2. Dinas Perumahan dan Kkawasan Permukiman Kota sebagai Pelaksana utama di lapangan yang akan melakukan pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan.<br>3. Dinas PUTR Kota memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di Lapangan dibidang ke PU an<br>4. Dinas Sosial Kota: Membantu memperbarui dan memverifikasi data kemiskinan lokal.<br>5. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan pada kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan. |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING** | | | | | |
| **40. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta *Commuter*** | 2025 | Tidak ada | Dinas Perhubungan | • Dinas Kominfo untuk publikasi Media<br>• Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi)<br>• Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL,<br>• Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang,<br>• Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan | Dinas Perhubungan Kota melakukan kegiatan operasional harian dan koordinator lapangan. |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil** | 2025 | Tidak ada | Dinas Perhubungan | • Dinas Kominfo untuk publikasi Media<br>• Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi)<br>• Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL,<br>• Biro terhadap pelaksanaan dan evaluasi,<br>• Inspektorat melaksanakan pengawasan | - |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA** | | | | | |
| **42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir** | 2025 | Tidak ada | Dinas PUPR | • Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL | 1. Pemerintah kota melalui BPBD menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan |
| | 2026 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2027 | Tidak ada | | • BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana,<br>• Diskominfo untuk publikasi kegiatan | teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif<br>2. Pemerintah kota melalui Dinas PUPR membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan<br>3. Pemerintah kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan<br>4. Menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **43. Pembangunan TPST Regional** | 2025 | Tidak ada | Dinas PUPR : pelaksana | PUPR: | 1. Menyusun Master Plan |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | 2026 | Tidak ada | | • Penyiapan dokumen Lingkungan,<br>• Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya,<br><br>Dinas LHK :<br>• Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup<br><br>Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi,<br><br>Dinas Kominfo untuk publikasi<br>Media | Dokumen Persampahan<br>2. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah<br>3. Penyediaan dan penentuan lokasi<br>4. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kota<br>5. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan<br>6. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan<br>7. Membuat/Mengaktifkan Bank Sampah<br>8. Dukungan SDM |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **44. Pembangunan PLTSa** | 2025 | Tidak ada | DISPERINDAG ESDM | • PUPR : Pembangunan TPST<br>• LHK: Pengelolaan Sampah<br>• Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan | 1. Menyusun Master Plan Dokumen Persampahan<br>2. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah<br>3. Penyediaan dan |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | | penentuan lokasi<br>4. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kota<br>5. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan<br>6. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan<br>7. Membuat/Mengaktifkan Bank Sampah<br>8. Dukungan SDM |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **45. Pengembangan SPAL Regional** | 2025 | Tidak ada | Dinas PUPR | • Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL,<br>• PDAM dalam peningkatan layanan,<br>• Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi,<br>• Dinas Kominfo untuk publikasi media | 1. Penyusunan Perwa RTRW dan menyusun Dokumen RDTR<br>2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br>3. Dinas Kesehatan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat<br>4. Dukungan penyediaan lahan jika ada kegiatan<br>5. Menyediakan alokasi anggaran pendamping jika ada kegiatan |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | | 6. Pembentukan Kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT ika ada kegiatan |
| **46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Kehati** | 2025 | Rapat koordinasi, pembentukan tim appraisal dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati | DLHK | • Biro Pem Otda : SK Penlok<br>• BPN : Sertifikat Lahan<br>• Diskominfo : Publikasi Media | Dukungan terhadap pengadaan lahan jika ada kegiatan |
| | 2026 | Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan | | | |
| | 2027 | Penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi lainnya | | | |
| | 2028 | Pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor P.5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Design Dasar (*Design* Vegetasi dan *Design* Infrastruktur Taman Kehati) | | | |
| | 2029 | Tahap lanjutan kegiatan | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | penanaman dan pemeliharaan vegetasi serta membuat Rencana Kesepakatan Bersama/ kerja sama Pembangunan Taman Kehati sebagai dukungan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Kehati | | | |
| | 2030 | 1. Pembukaan dan peresmian Taman Kehati serta tahap lanjutan kegiatan penanaman<br>2. Pemeliharaan vegetasi serta kegiatan pengembangan<br>3. Pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati | | | |
| **PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA** | | | | | |
| **47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi** | 2025 | Tidak ada | 1. Dinas Kominfo | • Dinas Kominfo | - |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan *Master Plan* Desa Produktif dan Mandiri.** | 2026 | Tidak ada | (Publikasi Kegiatan)<br>2. Dinas Perkebunan (Pemberian | (Publikasi Kegiatan)<br>• Dinas Perkebunan (Pemberian Bantuan/ pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini) | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES** | 2025 | Tidak ada | | • Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)<br>• Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/ Masyarakat Desa). | - |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |
| **PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA** | | | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN** | | | | | |
| **49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota** | 2025 | 1. Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025<br>2. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br>3. *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br><br>33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | Biro KESRA | • Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)<br>• Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah) | - |
| | 2026 | 1. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br>2. *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br><br>33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | | | |
| | 2027 | 1. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br>2. *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br><br>33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | | | |
| | 2028 | 1. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br>2. *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br><br>33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | | | |
| | 2029 | 1. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br>2. *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br><br>33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | | | |
| | 2030 | 1. Penerimaan Proposal | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br>2. *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030<br><br>33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | | | |
| **50. Festival Seni dan Budaya Daerah** | 2025 | Tidak ada | DISBUDPAREKRAF | • Dinas Perhubungan : Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat *event* internasional dilaksanakan<br>• Dinas Kesehatan : Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans<br>• Dinas Koperasi &UMKM : Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk | 1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi;<br>2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah;<br>3. Pendataan/Inventarisai potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah;<br>4. Memastikan kontinyuitas pelaksaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah<br>5. Promosi pelaksaan Festival Seni-Budaya; |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | | | mendukung pelaksaan *event* internasional<br>• Dinas Kominfo : Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra *event*-*event*-pasca *event* internasional; publikasi kegiatan<br>• Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan *Event* dan ketertiban penyelenggaraan acara | |
| **51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat** | 2025 | Tidak ada | | Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) | Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat di kota |
| | 2026 | 1. Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2026<br>2. Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2026<br>3. Monitoring dan Evaluasi | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Tahun 2026<br><br>- Kota Medan, Kab. Batu Bara, Toba, TanjungBalai, Serdang Bedagai | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | 1. Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2029<br>2. Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2029<br>3. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2029<br><br>- Kabupaten Langkat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Medan, Simalungun, P.Siantar, Serdang Bedagai, | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | Tanjung Balai, Karo | | | |
| | 2030 | 1. Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2030<br>2. Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2030<br>3. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2030<br>- Kota Medan, Deli Serdang, TanjungBalai, Binjai, Karo, Langkat, Mandailing Natal, Kab. Batu Bara, Serdang Bedagai, P.Sidempuan | | | |
| **PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB** | | | | | |
| | 2025 | 1. Pembentukan SK | Satpol PP | | 1. Badan Kesbangpol Kota |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| **52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).** | | Gubernur tentang Tim Patroli Gabungan Tahun 2025<br>2. Pelaksanaan Rapat Teknis terkait Pelaksanaan Patroli gabungan dengan Stakeholder terkait Tahun 2025<br>3. Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motordan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2025<br>• Medan, Binjai, Deli Serdang, TanjungBalai Asahan dan Langkat | | • Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba)<br>• Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) | melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan.<br>2. Badan Kesbangpol menyediakan data dan peta daerah rawan narkoba di Kota |
| | 2026 | 4. Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2026<br>5. Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2026 | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | • Medan, Binjai, Deli Serdang, TanjungBalai Asahan, dan Langkat | | | |
| | 2027 | 1. Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2027<br>2. Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2027<br>• Medan, Binjai, Deli Serdang, TanjungBalai, Asahan, dan Langkat | | | |
| | 2028 | 1. Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2028<br>2. Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2028<br>• Medan, Binjai, Deli Serdang, TanjungBalai, Asahan, | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | dan Langkat | | | |
| | 2029 | 1. Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2029<br>2. Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2029<br>• Medan, Binjai, Deli Serdang, TanjungBalai, Asahan, dan Langkat | | | |
| | 2030 | 1. Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2030<br>2. Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2030<br>• Medan, Binjai, Deli Serdang, TanjungBalai, Asahan, | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | |
| | | dan Langkat | | | |
| **53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan** | 2025 | Tidak ada | | • Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)<br>• Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba)<br>• Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gerbong narkoba) | Penguatan pencegahan narkoba di pemerintah kota |
| | 2026 | Tidak ada | | | |
| | 2027 | Tidak ada | | | |
| | 2028 | Tidak ada | | | |
| | 2029 | Tidak ada | | | |
| | 2030 | Tidak ada | | | |